
SOSIOHUMANIORA

Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora
Journal of Social Sciences and Humanities
Volume 20, No. 1, Maret 2018

Editor	: Asep Sumaryana
Editor Bagian	: Suwandi Sumartias Sulaeman Rahman Nidar Agus Nero Sofyan Munadjat Rd. Ahmad Buchari Yoga Bestari Anissa Lestari Kadiyono Nia Kurniati Asep Agus Handaka Suryana Ella Lesmanawaty Wargadinata Linda Sunarti
Manajer Jurnal	: Usep Sahrudin U. Santosa Kusumah
Sekretariat	: Trisatya Yono Yugiono Movy Rosida Lala Adilla Nur

Alamat Penerbit / Redaksi:

Direktorat Sumberdaya Akademik dan Perpustakaan Universitas Padjadjaran
Graha Kandaga (Perpustakaan) Jatinangor Lt. 1
Jl. Raya Bandung - Sumedang KM. 21 Jatinangor
Telepon/Fax (022) 842 88806 ext. 3806 dan E-mail: sosiohumaniora@yahoo.co.id
website: <http://sosiohumaniora.unpad.ac.id/user>

(Terbit 3 Kali dalam Satu Tahun: Maret, Juli dan Nopember)

Terindeks di:



DAFTAR ISI

SOSIOHUMANIORA
Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora
Journal of Social Sciences and Humanities

Volume 20, No. 1, Maret 2018

Pengaruh Transfer Modal Manusia Antargenerasi terhadap Mobilitas Pendapatan Antargenerasi di Indonesia (Ari Purbowati)	1 - 14
<i>DOI : 10.24198/sosiohumaniora.v20i1.10667</i>	
Pengaruh Pengawasan terhadap Kinerja Pegawai dalam Meningkatkan Pelayanan Kesehatan di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah (Ahmad Averus dan Andi Pitono)	15 - 21
<i>DOI : 10.24198/sosiohumaniora.v20i1.11677</i>	
Model Pendidikan Multikultural pada Pesantren Tradisional di Kota Tasikmalaya dalam Mencegah Ancaman Radikalisme (Akhmad Satori dan Wiwi Widiastuti)	22 - 28
<i>DOI : 10.24198/sosiohumaniora.v20i1.10304</i>	
Strategi Implementasi Kebijakan Hutan Tanaman Rakyat di KPH Gedong Wani (Irwan Sukri Banuwa, Rahmat Safe'i, Indra Gumay Febryano dan Dian Novayanti)	29 - 38
<i>DOI : 10.24198/sosiohumaniora.v20i1.13507</i>	
Potret Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga Pembudidayaan di Ciganjur Jakarta Selatan (Achmad Rizal, Rosidah dan Ginandya Fathira)	39 - 44
<i>DOI : 10.24198/sosiohumaniora.v20i1.14401</i>	
Analisis Usaha Pembiakan Sapi Potong Pola Kemitraan Antara Korporasi dengan Peternak Rakyat (Rochadi Tawaf)	45 - 56
<i>DOI : 10.24198/sosiohumaniora.v20i1.16141</i>	
Transformasi Desain <i>Tarompa Datuak</i> dalam Konteks Perubahan Sosiokultural (Amrizal dan Sumadi)	57 - 64
<i>DOI : 10.24198/sosiohumaniora.v20i1.13801</i>	
Analisis Keberlanjutan Perkebunan Karet di Pulau Sarak Kabupaten Kampar Riau (Shorea Khaswarina dan Eliza)	65 - 69
<i>DOI : 10.24198/sosiohumaniora.v20i1.13187</i>	
Membangun Model Komunikasi Program Tanggungjawab Sosial Perusahaan untuk Keberdayaan Masyarakat Sekitar (Studi Kasus Desa Lulut, Kabupaten Bogor) (David Rizar Nugroho, Aida Vitayala S. Hubeis, Amiruddin Saleh, dan Wahyu Budi Priatna)	70 - 77
<i>DOI : 10.24198/sosiohumaniora.v20i1.8683</i>	
Demokrasi dalam Sejarah Militer Indonesia Kajian Historis tentang Pemilihan Panglima Tentara Pertama Pada 1945 (Widyo Nugrahanto dan Rina Adyawardhina)	78 - 85
<i>DOI : 10.24198/sosiohumaniora.v20i1.14368</i>	
Partisipasi Masyarakat pada Program Desa Mandiri Pangan di Kabupaten Bandung (Encang Saepudin, Ninis Agustini Damayani, dan Agung Budiono)	86 - 94
<i>DOI : 10.24198/sosiohumaniora.v20i1.9895</i>	
Analisis Kinerja Ekonomi dan Keuangan Daerah di Provinsi Lampung (Teguh Endaryanto, Muhammad Firdaus, Hermanto Siregar dan Dedi Budiman Hakim)	95 - 102
<i>DOI : 10.24198/sosiohumaniora.v20i1.9501</i>	

PENGANTAR REDAKSI

Dalam Volume 20, No 1 Maret 2018 SOSIOHUMANIORA kembali menyajikan 12 artikel yang telah diseleksi. Untuk tulisan pertama ditampilkan karya Ari Purbowati yang mengupas tentang transfer modal manusia antargenerasi yang dianggapnya berpengaruh terhadap mobilitas pendapatan di Indonesia. Bisa jadi hal demikian dapat ditelusuri dengan tulisan berikutnya yang melihat pengawasan terhadap pelayanan kesehatan yang ditulis Ahmad Averus. Mungkin saja secara langsung tidak berkaitan, namun tatkala dihubungkan dari sisi perbedaan usia dan pihak yang dilayaninya, maka hal demikian dapat disikapi secara baik.

Kinerja juga menjadi sorotan dari Teguh Endaryanto, dkk yang menganalisis kinerja ekonomi di Lampung. Bisa saja kondisi Lampung berbeda dengan tempat lainnya dalam urusan kinerja, namun yang penting patut diihat adanya hal yang spesifik atas hal tersebut. Bahkan mungkin hal demikian terjadi dalam implementasi kebijakan Hutan tanaman Rakyat yang dituliskan Irwan, dkk. Sejumlah tulisan diatas bertali temali satu dengan lainnya untuk dapat dilihat benang merah agar dapat memberikan kegunaan bagi pengembangan aktivitas secara spesifik.

Tulisan berikutnya adalah Potret kesejahteraan yang ditulis Ahmad Rizal, dkk. Tulisan ini dapat memberikan pengetahuan tentang pembudi daya ikan di Ciganjur. Tulisan yang berdekatan ditulis oleh Rochadi Tawaf tentang Usaha Pembiakan Sapi Potong. Demikian halnya dengan keberlanjutan perkebunan karet di sarak yang ditulis Shorea, dkk. Ketiga tulisan ini patut dibaca untuk memberikan pemahaman kepada pembaca atas sejumlah usaha yang dilakukan kalangan petani dan peternak. Dengan demikian, setidaknya dapat mengubah sikap para pembaca dan dapat diteruskan kepada pengambil kebijakan.

Pemberdayaan masyarakat menjadi tulisan berikutnya yang dihadirkan pada volume ini. Tulisan David Rizar, dkk mengupas tentang model komunikasi yang disurvei di desa Lulut. Pemberdayaan bisa saja berkaitan dengan partisipasi masyarakat seperti tulisan Encang Saepudin, dkk dengan setting Kabupaten Bandung. Dengan demikian, mungkin perlu didalami oleh penulis lainnya bahwa demokrasi pun menuntut partisipasi dan komunikasi. Oleh karena itu tulisan Widy, dkk yang mengupas demokrasi dalam sejarah militer akan melengkapi tulisan dengan tema yang berdekatan.

Tulisan lainnya adalah model pendidikan multikultur yang ditulis Akhmad Satori, dkk yang mengambil lokasi di Kabupaten Tasikmalaya. Mungkin perlu dipahami bagaimana model yang dikembangkan disana mengingat kabupaten ini menjadi basisnya pesantren. Tulisan terakhir yang tampil adalah tranformasi *Tarompa Datuak* yang ditulis Amrizal dkk. Tulisan ini penting juga untuk diketahui khususnya mengenai tarompa agar dapat dijadikan bahan untuk mengkaji aspek yang mirip di tempat lainnya.

Tulisan diatas tentunya dapat memberikan inspirasi bagi pembaca untuk mengembangkan ke aspek lainnya sehingga riset semakin dapat berkembang. Semoga apa yang disajikan memberikan kegunaan yang besar untuk mendorong kemajuan dalam berbagai hal di tempat kita bersama.

Selamat membaca.

Hormat kami,

Dewan Redaktur

PENGARUH TRANSFER MODAL MANUSIA ANTARGENERASI TERHADAP MOBILITAS PENDAPATAN ANTARGENERASI DI INDONESIA

Ari Purbowati

Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia

E-mail: purbowati.ari@gmail.com

ABSTRAK. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur mobilitas pendapatan antargenerasi dan melihat pengaruh transfer modal manusia antargenerasi terhadap mobilitas pendapatan antargenerasi di Indonesia. Data yang digunakan adalah pasangan bapak dan anak yang bersumber dari IFLS periode 2000 sampai 2014. Dengan menggunakan metode 2SLS diketahui bahwa modal manusia secara langsung diturunkan dari orang tua kepada anaknya. Elastisitas pendapatan antargenerasi (IGE) meningkat dari 0.118 menjadi 0.151 ketika transfer langsung modal manusia diperhitungkan. Dengan kata lain transfer langsung modal manusia memperkuat IGE Hal ini memberikan indikasi bahwa ketika pengembangan modal manusia anak diserahkan sepenuhnya kepada keputusan rumah tangga, maka kesenjangan pendapatan yang terjadi pada generasi orang tua akan cenderung diwariskan atau dipertahankan kepada generasi anak.

Kata kunci: mobilitas pendapatan antargenerasi, elastisitas pendapatan antargenerasi, IGE, modal manusia, pendidikan, transfer langsung, Klasifikasi JEL: I24, I25, J24

EFFECT OF INTERGENERATIONAL TRANSFER OF HUMAN CAPITAL ON INTERGENERATIONAL INCOME MOBILITY IN INDONESIA

ABSTRACT. *The purpose of this study are to estimate the intergenerational income mobility and the effect of intergenerational transfer of human capital on intergenerational income mobility in Indonesia. The intergenerational income elasticity is estimated by using father-child pairs from Indonesia Family Life Survey (IFLS) 2000 until IFLS 2014. This study apply 2SLS method and the estimation results suggests that human capital is directly transmitted from parent to child. IGE increased from 0.118 to 0.151 when the direct transfer of human capital are taken into account. In other words, the direct transfer of human capital strengthening IGE. This is an indication that when the human capital development of children left entirely to household decisions, then the income gap that occurs in the older generation tends to be inherited or maintained for generations of children.*

Key words: *intergenerational income mobility, intergenerational income elasticity, IGE, human capital, direct transfer, education JEL Codes : I24, I25, J24*

PENDAHULUAN

Mobilitas pendapatan antargenerasi, yang biasanya diukur dengan IGE (*Intergenerational Income Elasticity*), merupakan salah satu kunci untuk mengetahui kesenjangan ekonomi. Mobilitas pendapatan antargenerasi yang tinggi menunjukkan bahwa pendapatan anak tidak terlalu terkait dengan pendapatan orang tua (Mayer & Lopoo, 2008). Hal tersebut dapat terjadi dalam masyarakat ketika peluang anak untuk mendapatkan pendapatan tidak sepenuhnya ditentukan oleh orang tua tetapi juga oleh faktor lain yang ada di masyarakat, misalnya kesempatan belajar atau kesempatan untuk berusaha (Black & Devereux, 2010). Sebaliknya, jika mobilitas pendapatan antargenerasi rendah menunjukkan bahwa pendapatan yang diperoleh anak dimasa yang akan datang sangat terkait dengan pendapatan orang tua.

Studi empiris mengenai mobilitas pendapatan antar generasi masih sangat terbatas di negara berkembang. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya sumber data yang memadai untuk melakukan estimasi mobilitas pendapatan antargenerasi (Qin, Wang, &

Zhuang, 2016). Hal serupa juga disampaikan oleh Hertz & Jayasundera (2007) dalam penelitiannya mengenai mobilitas pendidikan antargenerasi di Indonesia yaitu pada dasarnya sangat sulit untuk mengestimasi mobilitas pendapatan antargenerasi dengan menggunakan data yang tersedia di negara berkembang karena mayoritas negara berkembang tidak memiliki data panel yang cukup panjang untuk mengestimasi pendapatan permanen.

Disisi lain, mobilitas pendapatan antargenerasi merupakan isu yang telah lama menjadi perhatian masyarakat, khususnya pemangku kebijakan dan kalangan akademik. Bagi pemangku kebijakan, isu ini penting untuk melihat sejauh mana keterkaitan antara pendapatan orang tua dengan pendapatan anak (Solon, 1992) dan apa saja saluran yang mempengaruhi keterkaitan tersebut, misalnya Qin, Wang, & Zhuang (2016) mengamati saluran modal manusia yaitu melalui pendidikan dan kesehatan serta melihat pengaruhnya terhadap mobilitas pendapatan di China, Bevis & Barrett (2015) mengamati saluran modal manusia (pendidikan dan kesehatan) dan modal fisik (lahan pertanian) dalam mengukur mobilitas pendapatan antargenerasi di rural Filipina, Björklund, Roine, & Waldenström (2012)

mengamati saluran pendidikan, IQ, dan kemampuan non-kognitif dalam mengukur mobilitas pendapatan antargenerasi di Swedia. Adanya keterkaitan yang kuat antara pendapatan orang tua dengan pendapatan anak memberi indikasi bahwa kesenjangan yang terjadi pada generasi orang tua cenderung dipertahankan atau diwariskan pada generasi selanjutnya (Björklund & Jäntti, 2009). Sebagai contoh, orang tua yang kaya akan berinvestasi lebih banyak dalam modal manusia anak-anaknya daripada orang tua yang miskin, sehingga di masa yang akan datang pendapatan anak dari orang tua yang kaya relatif lebih tinggi dibandingkan pendapatan anak dari orang tua yang miskin (Bevis & Barrett, 2015). Tain (2013) dalam tulisannya juga menyebutkan bahwa di Wilayah Tangkap Lebih Jawa Timur, rumah tangga nelayan banyak yang miskin karena tingkat pendidikan yang rendah. Pendidikan rendah ini bertahan dari generasi ke generasi sehingga tidak membuat kondisi ekonomi membaik dari generasi ke generasi. Selain itu, mobilitas pendapatan antargenerasi memberi gambaran mengenai sejauh mana masyarakat mampu memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang, contohnya anak-anak dari keluarga berpendapatan rendah mempunyai kesempatan untuk sukses sebagaimana anak-anak dari keluarga kaya atau seseorang memperoleh pekerjaan berdasarkan keahliannya bukan berdasarkan latar belakang keluarga (Mayer & Lopoo, 2008; Black & Devereux, 2010).

Sementara itu, bagi kalangan akademik, isu yang penting dalam mobilitas pendapatan antargenerasi adalah mendapatkan ukuran mobilitas pendapatan antargenerasi yang baik. Pengukuran mobilitas pendapatan antar generasi memiliki beberapa masalah empiris. Pertama, ukuran mobilitas pendapatan antargenerasi akan tepat jika pengukuran pendapatan permanen dilakukan dengan baik (Black & Devereux, 2010). Kedua, ukuran mobilitas pendapatan antargenerasi akan mengandung bias jika tidak memperhitungkan “*direct transfer*” atau transfer langsung modal manusia antargenerasi (Qin, Wang, & Zhuang, 2016).

Terkait dengan isu transfer modal manusia antar generasi, mobilitas pendapatan antargenerasi tergantung seberapa baik generasi muda dalam mengembangkan modal manusianya. Ada indikasi bahwa ketika transfer langsung modal manusia dari orang tua kepada anak tidak diperhitungkan maka ukuran mobilitas pendapatan antargenerasi akan mengandung bias, yaitu IGE yang dihasilkan akan cenderung bias ke bawah. Bukti empiris di China mengatakan bahwa transfer langsung modal manusia memperkuat besaran IGE. Melalui penelitiannya, Qin, Wang dan Zhuang (2016) menunjukkan bahwa IGE di China meningkat dari 0.429 menjadi 0.481 ketika transfer langsung modal manusia (melalui pendidikan dan kesehatan) dari orang tua ke anak dipertimbangkan. Ukuran mobilitas pendapatan di China menjadi terlalu tinggi ketika transfer langsung modal manusia antargenerasi tidak dipertimbangkan

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini akan mengisi kekurangan informasi mengenai mobilitas pendapatan antargenerasi di Indonesia. Dapat dikatakan bahwa penelitian ini merupakan penelitian awal mengenai mobilitas pendapatan antargenerasi di Indonesia. Sejauh ini penelitian mengenai mobilitas pendapatan antargenerasi belum pernah dilakukan di Indonesia karena masalah keterbatasan data sehingga informasi mengenai mobilitas pendapatan antar generasi di Indonesia belum ada informasinya. Hertz & Jayasundera (2007) dalam penelitiannya mengenai mobilitas pendidikan antargenerasi di Indonesia berpendapat bahwa pada dasarnya sangat sulit untuk mengestimasi persistensi pendapatan antargenerasi dengan menggunakan data yang tersedia di negara berkembang. Hal ini dikarenakan mayoritas negara berkembang tidak memiliki data panel yang cukup panjang untuk mengestimasi pendapatan permanen.

Secara khusus, penelitian ini akan menyajikan pengukuran pendapatan permanen orang tua dengan menggunakan data IFLS tahun 2000, 2007, dan 2014. Pengukuran pendapatan permanen orang tua akan menggunakan rata-rata pendapatan orang tua dari tahun 2000, 2007, dan 2014. Rata-rata pendapatan dari tiga sampai lima titik pengamatan merupakan ukuran yang akurat untuk pendapatan permanen (Solon, 1992; Zimmerman, 1992). Melalui penelitian empirisnya, Solon (1992) menganalisis mengenai mobilitas pendapatan antargenerasi di US dengan menggunakan data dari tahun 1967-1971 dan menemukan bahwa estimasi IGE di US dengan menggunakan rata-rata pendapatan orang tua dari 3 titik pengamatan menghasilkan estimasi yang mirip ketika menggunakan rata-rata pendapatan orang tua dari empat atau lima titik pengamatan, yaitu sekitar 0.4, di mana angka tersebut lebih besar dari penelitian sebelumnya yaitu sekitar 0.2.

Selain itu, penelitian ini juga akan melihat pengaruh dari transfer modal manusia antargenerasi terhadap mobilitas pendapatan antargenerasi di Indonesia. Untuk melihat hubungan ini, penelitian ini akan memodifikasi model teoritis dan model empiris dari literatur sebelumnya (Qin, Wang, & Zhuang, 2016). Pada model teoritis, penelitian ini menggunakan kerangka OLG untuk melihat pengaruh transfer modal manusia terhadap IGE. Pada analisis empiris, penelitian ini akan menggunakan data pasangan bapak dan anak dari IFLS3 (tahun 2000), IFLS4 (tahun 2007) dan IFLS5 (tahun 2014) yang bekerja dengan penghasilan untuk melihat transfer modal manusia antargenerasi dan pengaruhnya terhadap IGE dengan menggunakan metode estimasi 2SLS. Saluran atau transmisi modal manusia pada penelitian ini masih terbatas pada saluran pendidikan, sementara dalam literatur yang ada terdapat saluran transmisi modal manusia yang lain seperti kesehatan (Bevis & Barrett, 2015; Qin, Wang, & Zhuang, 2016), IQ, dan kemampuan non-kognitif (Björklund, Roine, & Waldenström, 2012)

Mobilitas pendapatan antargenerasi umumnya diukur dengan menghitung korelasi pendapatan antar generasi, atau yang lebih dikenal dengan sebutan IGE. IGE diestimasi melalui regresi linier dari logaritma pendapatan permanen anak terhadap logaritma pendapatan permanen orang tua (Solon, 1992; Black & Devereux, 2010; Blanden et al., 2014; Piraino, 2015; Yuan, 2015; Qin, Wang & Zhuang, 2016). Koefisien dari logaritma pendapatan permanen orang tua inilah yang disebut sebagai IGE. IGE menunjukkan derajat persistensi pendapatan antargenerasi (Blanden et al., 2014; Piraino, 2015).

Metode dalam mengestimasi IGE mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Perkembangan metode ini semakin menarik karena mulai muncul banyak perdebatan tentang pengukuran pendapatan permanen orang tua. Pengukuran pendapatan permanen orang tua yang tidak tepat dapat menyebabkan bias pada IGE (Solon, 1992; Behrman & Taubman, 1990; Solon, 2002; Black & Devereux, 2010; Bevis & Barrett, 2015). Pertama, bias yang disebabkan oleh kesalahan pengukuran pada pendapatan permanen orang tua (Solon, 1992; Solon, 2002; Yuan, 2015; Bevis & Barrett, 2015). Hal tersebut terjadi ketika pendapatan pada waktu tertentu (*single year income*) digunakan sebagai pendekatan untuk mengukur pendapatan permanen orang tua. Pendapatan pada tahun tertentu bukan pendekatan yang tepat untuk mengukur pendapatan permanen orang tua karena masih mengandung unsur pendapatan permanen dan fluktuasi sementara (Solon, 1992; Solon, 2002; Mazumder, 2005). Bias yang terjadi karena kesalahan pengukuran dapat dikoreksi dengan menggunakan rata-rata pendapatan orang tua di beberapa tahun pengamatan. Penggunaan rata-rata pendapatan umumnya dapat meningkatkan IGE di US dan UK (Solon, 1992; Blanden J., 2013) yaitu sekitar 0.4 dan di Kanada dan negara bagian di Eropa (Corak & Heisz, 1999; Osterbacka, 2001; Solon, 2002) yaitu sekitar 0.1-0.2. Kedua, bias yang disebabkan oleh efek umur dan *life cycle*. Bias yang terjadi karena efek *life cycle* dapat diatasi dengan memasukkan kuadrat umur anak sebagai variabel kontrol dalam model (Solon, 1992; Black & Devereux, 2010; Bevis & Barrett, 2015).

Meskipun pendapatan permanen orang tua yang telah diproksi dengan menggunakan rata-rata pendapatan dapat mengatasi bias, tetapi hasilnya masih mengandung variasi yang bersifat sementara. Bevis & Barret (2015) mengatakan bahwa variasi yang bersifat sementara pada pendapatan permanen disebabkan adanya efek dari pendapatan sementara (*transitory income*) dan guncangan harga (*price shock*), sehingga estimasi IGE yang dihasilkan masih terlalu rendah (*underestimate*) pada kebanyakan penelitian yang ada. Menurut mereka bias yang disebabkan oleh guncangan sementara dapat dikurangi dengan menggunakan panel data yang panjang. Hal ini dikarenakan guncangan sementara mempunyai kecenderungan untuk bertahan atau terjadi

sepanjang waktu. Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Mazumder (2005) ketika menggunakan data dari *US social security*; estimasi IGE meningkat menjadi 0.61 ketika menggunakan rata-rata pendapatan selama 16 tahun dari sebelumnya yaitu 0.45 ketika menggunakan rata-rata pendapatan selama 7 tahun.

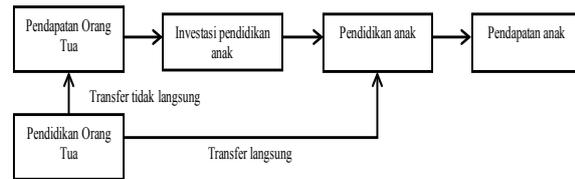
Sementara itu, terdapat perdebatan pula dalam pengukuran pendapatan permanen anak juga. Beberapa penelitian menggunakan pendapatan anak pada tahun tertentu sebagai pendekatan dalam mengukur pendapatan permanen anak. Pendapatan permanen anak yang diukur dengan pendapatan pada tahun tertentu tidak akan menyebabkan bias pada estimasi karena merupakan variabel dependen (Zimmerman, 1992; Gong, Leigh, & Meng, 2012; Yuan, 2015; Qin, Wang, & Zhuang, 2016). Kesalahan pengukuran pada pendapatan permanen anak akan menjadi satu dengan eror pada persamaan regresi (Zimmerman, 1992). Pendapatan tahun tertentu sebenarnya kurang tepat dalam menggambarkan pendapatan permanen anak ketika pendapatan tersebut diambil pada usia muda (misal di bawah 30 tahun). Haider & Solon (2006) dan Böhlmark & Lindquist (2006) berpendapat bahwa pendapatan pendapatan tahun tertentu masih merupakan ukuran yang baik untuk pendapatan permanen jika pendapatan tersebut diukur pada umur antara 30 sampai 40 tahun. Umur 30-40 tahun merupakan usia prima dimana pada saat itu seseorang mempunyai pendapatan yang stabil sehingga lebih dapat menggambarkan pendapatan permanen anak. Akan tetapi karena observasi yang digunakan akan lebih sedikit ketika menggunakan umur anak antara 30-40 tahun, maka beberapa penelitian tetap menggunakan semua observasi tetapi dengan menambahkan kuadrat umur anak pada persamaan regresi untuk mengatasi dampak *life cycle*.

Terkait dengan isu mengenai transfer modal manusia antargenerasi, modal manusia antargenerasi mempunyai peranan penting dalam mobilitas pendapatan antar generasi. Penelitian-penelitian mengenai mobilitas pendapatan antar generasi (Solon, 2002; Mayer & Loppo, 2007; Nakamura & Murayama, 2011; Blanden et al, 2014) hanya terfokus pada transfer modal manusia antar generasi melalui saluran investasi modal manusia yang dibuat oleh orang tua untuk anak dan belum mempertimbangkan transfer langsung modal manusia dari orang tua kepada anak. Idenya adalah orang tua akan menggunakan modal manusianya untuk memperoleh pendapatan. Pendapatan tersebut akan dialokasikan salah satunya untuk investasi terhadap modal manusia anak-anaknya. Modal manusia anak akan mempengaruhi pendapatan anak di masa yang akan datang. Orang tua yang berpendidikan tinggi akan mempunyai penghasilan yang tinggi dan sumber daya atau tenaga yang lebih untuk berinvestasi pada pendidikan anak-anaknya sehingga di masa yang akan datang anak-anak mempunyai pendidikan yang tinggi sehingga memiliki penghasilan yang tinggi juga. Qin, Wang, & Zhuang

(2016) menyebut mekanisme ini sebagai transfer tidak langsung modal manusia dari orang tua kepada anak. Dalam penelitiannya Qin, Wang, & Zhuang (2016) menjelaskan bahwa "... ketika pendapatan seseorang ditentukan oleh akumulasi modal manusianya, modal manusia orang tua akan mempengaruhi kemampuan finansialnya untuk berinvestasi pada modal manusia anaknya dan akan mempengaruhi pendapatan anak di masa yang akan datang". Dengan kata lain modal manusia orang tua ditularkan secara tidak langsung kepada modal manusia anak melalui saluran investasi modal manusia.

Akan tetapi, modal manusia tidak hanya ditularkan secara tidak langsung dari orang tua kepada anak tetapi juga ditularkan secara langsung. Qin, Wang, & Zhuang (2016) menyebut mekanisme ini sebagai transfer langsung atau "*direct transfer*" modal manusia antargenerasi, sebagaimana ditulis "... modal manusia orang tua dapat secara langsung ditularkan kepada anak-anaknya melalui saluran genetik atau non-genetik yang juga akan mempengaruhi pendapatan anak di masa yang akan datang". Dapat dikatakan bahwa orang tua akan secara langsung menularkan modal manusianya kepada anak melalui saluran genetik (misalnya IQ atau kemampuan kognitif) dan saluran non-genetik seperti kebiasaan (misalnya anak-anak belajar dari orang tua melalui aktivitas sehari-hari) dan cara didik (Bevis & Barrett, 2015; Qin, Wang, & Zhuang, 2016). Pada gambar 1 dijelaskan dengan singkat mengenai transfer modal manusia dari orang tua kepada anak baik secara tidak langsung maupun secara langsung. Dalam teorinya mengenai mobilitas antargenerasi, Becker et al. (2015) menggambarkan bahwa pendidikan membantu orang tua untuk memilih input yang lebih efektif dalam meraih capaian anak. Orang tua yang berpendidikan mempunyai pengetahuan yang lebih baik dalam sistem pendidikan yang dapat membantu proses pendidikan anak-anaknya dan lebih produktif dalam mengajar anak-anak mereka. Bevis & Barrett (2015) menyatakan bahwa pendidikan orang tua dapat mempengaruhi preferensi orang tua dan keputusan untuk berinvestasi ke modal manusia anak-anaknya. Sebagai contoh, orang tua yang berpendidikan rendah tidak akan percaya bahwa pendidikan merupakan faktor yang penting dalam menentukan pendapatan anak di masa yang akan datang sehingga mereka cenderung menyekolahkan anaknya pada level pendidikan yang tidak terlalu tinggi dan lebih menginginkan anak-anaknya untuk memperoleh pekerjaan lebih awal. Selain itu, Herrington (2015) mengatakan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi kemampuan belajar individu adalah pendidikan orang tua, di mana kemampuan tersebut menggambarkan efisiensi individu dalam memproduksi modal manusianya yang nantinya akan menentukan pendapatannya di pasar kerja. Dalam penelitiannya, Hertz et al. (2007) juga menemukan bahwa korelasi pendidikan antara orang tua dan anak di Indonesia masih cenderung

tinggi yaitu sekitar 0.55. Hal ini menandakan bahwa pendidikan orang tua masih sangat berperan dalam menentukan pendidikan anak.



Gambar 1. Mekanisme transfer langsung dan tidak langsung modal manusia antar generasi dan hubungannya dengan mobilitas pendapatan antargenerasi

Pengaruh transfer langsung maupun transfer tidak langsung modal manusia antargenerasi terhadap mobilitas pendapatan antargenerasi dapat dijelaskan melalui model OLG (*overlapping-generations*). Qin, Wang, & Zhuang (2016) menjelaskan secara konseptual pengaruh transfer modal manusia antargenerasi terhadap mobilitas pendapatan menggunakan model OLG untuk menunjukkan bahwa ketika transfer langsung modal manusia antargenerasi tidak diperhitungkan dalam pengukuran mobilitas pendapatan antargenerasi, maka IGE yang dihasilkan akan cenderung bias ke bawah. Mereka menggunakan pendekatan yang dibangun oleh Becker & Tomes (1979) yang mengasumsikan bahwa orang tua bersifat altruistik dan memaksimalkan kepuasan atas konsumsi mereka dan ekspektasi pendapatan anak dimasa yang akan datang dengan kendala pendapatan orang tua sekarang.

Dalam model OLG, diasumsikan individu melalui tiga tahap kehidupan, yaitu anak-anak, individu muda yang bekerja, dan individu tua (pensiun). Pada tahap pertama, individu mengakumulasi modal manusia pada saat anak-anak, sehingga dibayangkan anak-anak tidak melakukan keputusan, tetapi orang tua yang nantinya menentukan berapa modal manusia anaknya. Pada tahap kedua, individu muda menggunakan akumulasi modal manusia semasa kecil untuk mendapatkan pekerjaan dan memperoleh pendapatan, sehingga pendapatan seseorang (y_t^p) ditentukan oleh akumulasi modal manusianya (h_t^p), yaitu:

$$y_t^p = (h_t^p)^\gamma \dots\dots\dots (1)$$

γ merupakan kontribusi relatif dari modal manusia terhadap pendapatan. Nilai γ adalah antara 0 dan 1 ($0 < \gamma < 1$). Pengembalian marginal dari modal manusia terhadap pendapatan atau dapat juga diinterpretasikan sebagai produktivitas diasumsikan sebagai *diminishing marginal return* (Qin, Wang, & Zhuang, 2016). Akan tetapi, karena dalam penelitian ini modal manusia akan diukur melalui pendidikan, tidak menutup kemungkinan bahwa pengembalian marginal dari modal manusia terhadap pendapatan diasumsikan sebagai *increasing marginal return* dengan nilai γ lebih dari 1. Salah satu alasannya adalah pendidikan merupakan hal yang *nondefeasible*, sehingga kenaikan satu tahun pendidikan

di tingkat yang lebih tinggi akan lebih meningkatkan pendapatan. Seperti dikutip oleh Senoaji (2011), menurut teori *Human Capital*, salah satu hal yang menentukan kualitas sumber daya manusia adalah tingkat pendidikan. Pendidikan dipandang dapat meningkatkan produktivitas (pendapatan). Nilai γ tidak mungkin di bawah 0, karena akan mengakibatkan nilai elastisitas pendapatan orang tua terhadap pendapatan anak atau nilai IGE menjadi negatif.

Pada saat yang bersamaan, individu muda yang bekerja harus membuat keputusan berapa banyak pendapatan (y_t^p) yang digunakan untuk konsumsi (k_t^p), ditabung untuk hari tua (s_t^p) dan diinvestasikan kepada anak-anak mereka (e_t^p).
 $y_t^p = k_t^p + s_t^p + e_t^p \dots\dots\dots (2)$

Jika individu muda lebih banyak menggunakan pendapatannya untuk konsumsi, maka pendapatan yang ditabung dan diinvestasikan akan lebih sedikit, sehingga generasi yang akan datang tidak lebih sejahtera. Sebaliknya, jika individu muda semakin banyak menggunakan pendapatannya untuk investasi, maka generasi yang akan datang akan lebih sejahtera meskipun konsumsi orang tua di masa yang akan datang lebih sedikit.

Pada tahap ketiga, individu tua akan pensiun dan menghabiskan tabungannya $(1 + R_t)s_t^p$ untuk konsumsi k_{t+1}^p .
 $k_{t+1}^p = (1 + R_t)s_t^p \dots\dots\dots(3)$
 R_t adalah tingkat bunga (*interest rate*) pada periode t .

Pada generasi anak, pendapatan anak pada periode $t+1$ juga ditentukan oleh akumulasi modal manusia pada saat $t+1$, sehingga :

$y_{t+1}^c = (h_{t+1}^c)^\gamma \dots\dots\dots (4)$
 Akumulasi modal manusia dari individu tergantung pada kemampuan bawaan (A_t^c) dan investasi modal manusia dari orang tuanya (e_t^p) sehingga :
 $h_{t+1}^c = A_t^c (e_t^p)^{1-\sigma} \dots\dots\dots (5)$

$(1 - \sigma)$ merupakan kontribusi relatif dari investasi modal manusia terhadap stok modal manusia. Pengembalian marginal dari investasi modal manusia diasumsikan sebagai *diminishing marginal return*. Menurut Becker et.al (2015) "Terdapat *diminishing return* dari y (investasi orang tua terhadap anak) sehingga menjadi sangat sulit untuk menambah pengetahuan kepada anak dengan kapasitas mental tertentu" (Becker et.al, 2015, p.4-5). Dapat dikatakan bahwa, modal manusia mempunyai batas optimal. Ketika modal manusia mencapai batas yang optimal, maka penambahan investasi modal manusia tidak akan menyebabkan kenaikan modal manusia.

Diasumsikan bahwa kemampuan bawaan dari individu ditentukan secara random, maka :

$\ln A_t^c = \ln \bar{A} + \varepsilon_t \dots\dots\dots (6)$

$\ln \bar{A}$ menunjukkan nilai rata-rata dari $\ln A_t^c$ dan ε_t adalah *random shock* yang mengikuti distribusi normal. Ketika orang tua tidak mengetahui kemampuan bawaan anak, maka orang tua akan

membentuk ekspektasi terhadap kemampuan bawaan anak berdasarkan kemampuan bawaan orang tua.

Berdasarkan tiga tahap kehidupan, yaitu anak-anak, individu muda yang bekerja, dan individu tua (pensiun), individu hanya membuat keputusan pada tahap kedua kehidupannya, sehingga kepuasan yang diharapkan dari individu muda yang bekerja tergantung pada konsumsi saat t , ekspektasi konsumsi saat $t+1$ dan ekspektasi pendapatan anak saat $t+1$.

$EU_t^p = u(k_t^p) + \beta E_t u(k_{t+1}^p) + \beta \alpha E_t u(y_{t+1}^c) \dots\dots (7)$

Fungsi kepuasan dituliskan dalam bentuk logaritma (Solon, 2004; Qin, Wang, dan Zhuang, 2016) dan masalah optimisasi menjadi :

$Max_{k_t^p, s_t^p, e_t^p} EU_t^p = \ln(k_t^p) + \beta E_t \ln(k_{t+1}^p) + \beta \alpha E_t \ln(y_{t+1}^c) \dots (8)$

s. t. $k_t^p + s_t^p + e_t^p = y_t^p$

$k_{t+1}^p = (1 + R_t)s_t^p$

Berdasarkan persamaan (5), (4), (3), dan (8) diperoleh persamaan Lagrange yaitu:

$Q = \ln(k_t^p) + \beta \ln(1 + R_t) + \beta \ln(s_t^p) + \alpha \beta \gamma \ln A_t^c + \alpha \beta \gamma (1 - \sigma) \ln e_t^p + \lambda_1 [y_t^p - k_t^p - s_t^p - e_t^p] + \lambda_2 [(1 + R_t)s_t^p - k_{t+1}^p] \dots\dots\dots (9)$

Turunan pertama (*first order conditions*) dari persamaan (9) terhadap konsumsi pada saat t (k_t^p), terhadap tabungan pada saat t (s_t^p), dan terhadap investasi modal manusia pada saat t (e_t^p), yaitu :

$\frac{1}{k_t^p} = \frac{\alpha \beta \gamma (1 - \sigma)}{e_t^p} \dots\dots\dots (10)$

$\frac{1}{k_t^p} = \frac{\beta (1 + R_t)}{k_{t+1}^p} \dots\dots\dots (11)$

Berdasarkan persamaan (3), (2), (10), dan (11), diperoleh investasi modal manusia dari orang tua ke anak. e_t^p yang optimal, yaitu :

$e_t^p = y_t^p \frac{\alpha \beta \gamma (1 - \sigma)}{1 + \beta + \alpha \beta \gamma (1 - \sigma)} \dots\dots\dots (12)$

Fungsi transmisi pendapatan antargenerasi diperoleh dengan menyubstitusi persamaan (5), (6), dan (12) ke persamaan (4) dan dituliskan dalam bentuk logaritma yaitu:

$\ln y_{t+1}^c = \gamma \ln \bar{A} + \gamma (1 - \sigma) \ln \frac{\alpha \beta \gamma (1 - \sigma)}{1 + \beta + \alpha \beta \gamma (1 - \sigma)} + \gamma (1 - \sigma) \ln y_t^p + \gamma \varepsilon_t \dots\dots (13)$

Berdasarkan persamaan (13), elastisitas pendapatan antargenerasi (IGE) adalah sebesar $\gamma(1 - \sigma)$. Hal ini menunjukkan bahwa IGE ditentukan oleh pengembalian marginal dari modal manusia terhadap pendapatan dan pengembalian marginal investasi modal manusia.

Oleh karena salah satu tujuan penelitian adalah melihat pengaruh transfer langsung modal manusia orang tua kepada anak dan pengaruhnya terhadap mobilitas pendapatan, maka untuk menangkap mekanisme transfer langsung modal manusia dari orang tua kepada anak, penelitian ini memodifikasi model transmisi langsung dari Qin, Wang, & Zhuang (2016). Modal manusia tidak hanya berasal dari investasi modal manusia dari orang tua ke anak tetapi juga diturunkan dari modal manusia orang tua ke anak, sehingga fungsi akumulasi modal manusia dapat dimodifikasi dengan penambahan h_t^p ke persamaan (5) menjadi :

$$h_{t+1}^c = A_t^c (h_t^p)^\sigma (e_t^p)^{1-\sigma}, \quad 0 < \sigma < 10 < \sigma < 1 \quad (14)$$

$(h_t^p)^\sigma$ menggambarkan transfer langsung modal manusia dari orang tua kepada anaknya dan bersama-sama dengan e_t^p menentukan h_{t+1}^c melalui fungsi Cobb-Douglas.

Solusi optimal untuk e_t^p tidak berubah ketika persamaan (5) diganti dengan persamaan (14) pada masalah optimisasi, tetapi fungsi transmisi pendapatan antargenerasi akan berubah. Fungsi transmisi pendapatan antargenerasi diperoleh dengan menyubstitusi persamaan (1), (6), (12), dan (14) ke persamaan (4) dan dituliskan dalam bentuk logaritma, yaitu :

$$\ln y_{t+1}^c = \gamma \ln \bar{A} + \gamma(1-\sigma) \ln \frac{a\beta\gamma(1-\sigma)}{1+\beta+a\beta\gamma(1-\sigma)} + \gamma\sigma \ln h_t^p + \gamma(1-\sigma) \ln y_t^p + \gamma\varepsilon_t \dots \quad (15)$$

Ketika $\ln h_t^p = \frac{1}{\gamma} \ln y_t^p$, yang merupakan *inverse function* dari $y_t^p = (h_t^p)^\gamma$, disubstitusikan ke persamaan (15), maka fungsi transmisi pendapatan antargenerasi menjadi :

$$\ln y_{t+1}^c = \gamma \ln \bar{A} + \gamma(1-\sigma) \ln \frac{a\beta\gamma(1-\sigma)}{1+\beta+a\beta\gamma(1-\sigma)} + [\sigma + \gamma(1-\sigma)] \ln y_t^p + \gamma\varepsilon_t \dots \quad (16)$$

Persamaan (16) menghasilkan IGE sebesar $\sigma + \gamma(1-\sigma)$. IGE tidak hanya dipengaruhi oleh pengembalian marginal dari modal manusia terhadap pendapatan dan pengembalian marginal investasi modal manusia, tetapi juga pengembalian marginal dari modal manusia orang tua terhadap modal manusia anak. Jika dibandingkan dengan IGE pada persamaan (13), maka IGE pada persamaan (16) lebih besar daripada IGE pada persamaan (13). Berdasarkan hal tersebut dapat ditarik dugaan bahwa transfer langsung modal manusia dari orang tua kepada anak mempengaruhi besaran IGE. IGE yang memperhitungkan transfer langsung modal manusia dari orang tua kepada anak akan lebih besar daripada IGE yang tanpa memperhitungkan transfer modal manusia dari orang tua kepada anak.

Sumber data yang akan digunakan pada penelitian ini adalah IFLS3, IFLS4, dan IFLS5 dengan unit analisis pasangan orang tua dan anak yang bekerja dan mendapat penghasilan. Informasi mengenai pendapatan orang tua akan diambil dari IFLS3, IFLS4, dan IFLS5, informasi mengenai pendidikan orang tua akan diambil dari IFLS, sedangkan informasi mengenai pendapatan anak dan karakteristik anak akan diambil dari IFLS5. Dalam penelitian ini dibatasi bahwa orang tua adalah bapak kandung dari anak (Björklund, Roine, & Waldenström, 2012). Jika satu bapak kandung memiliki lebih dari satu anak yang bekerja dengan penghasilan pada tahun 2014, maka semua observasi anak dipakai dalam penelitian ini untuk mendapatkan ukuran sampel yang lebih besar (Mazumder, 2005; Björklund, Roine, & Waldenström, 2012; Yuan, 2015).

Jumlah pasangan bapak-anak yang teridentifikasi adalah 4,777 pasang bapak-anak yang terdiri dari 837 pasang bapak-anak di mana bapak hanya mempunyai

informasi pendapatan di satu titik waktu saja, 1,149 pasang bapak-anak di mana bapak mempunyai informasi pendapatan di 2 titik, dan 2,791 pasang bapak-anak di mana bapak mempunyai informasi pendapatan di 3 titik waktu. Dalam penelitian ini akan menggunakan pasangan bapak-anak di mana bapak memiliki pendapatan di 3 titik yang untuk selanjutnya disebut sampel 1 dan pasangan bapak-anak di mana bapak memiliki pendapatan minimal 2 titik waktu (gabungan 2 titik waktu dan 3 titik waktu) yang untuk selanjutnya disebut sampel 2. Jumlah observasi sampel 1 adalah 2,791 pasang dan jumlah observasi sampel 2 adalah 3,940 pasang.

METODE

Tujuan penelitian ini adalah mendapatkan ukuran mobilitas pendapatan antargenerasi yang baik melalui IGE. Dalam mengestimasi IGE, penelitian ini akan memperhatikan mekanisme transfer langsung modal manusia dari orang tua kepada anak. Ada dugaan bahwa transfer langsung modal manusia antargenerasi dapat mempengaruhi besaran IGE. Oleh karena itu, dalam penelitian ini menggunakan dua model persamaan yaitu model persamaan tunggal dan model persamaan simultan.

Model persamaan tunggal merupakan model persamaan yang biasa digunakan untuk mengestimasi IGE. Model ini akan diestimasi menggunakan metode OLS (*Ordinary Least Squares*). Spesifikasi modelnya

$$\ln y_{2014}^c = \eta_0 + \eta_1 \ln y^p + \eta_2 educ_{2014}^c + \eta_3 sex^c + \eta_4 age_{2014}^c + \eta_5 age2_{2014}^c + \eta_6 w_{2014}^c + \eta_7 marstat_{2014}^c + \eta_8 work_{2014}^c + \eta_9 industry_{2014}^c + \eta_{10} service_{2014}^c + u \quad \dots \quad (17)$$

Model persamaan simultan digunakan untuk menangkap pengaruh transfer modal manusia antargenerasi terhadap mobilitas pendapatan antargenerasi sesuai dengan kerangka konseptual yang telah disajikan. Model ini akan diestimasi menggunakan metode 2SLS (*Two-Stage Least Square*). Spesifikasi modelnya adalah:

$$\ln y_{2014}^c = \theta_0 + \theta_1 \ln y^p + \theta_2 educ_{2014}^c + \theta_3 sex^c + \theta_4 age_{2014}^c + \theta_5 age2_{2014}^c + \theta_6 w_{2014}^c + \theta_7 marstat_{2014}^c + \theta_8 work_{2014}^c + \theta_9 industry_{2014}^c + \theta_{10} service_{2014}^c + \varepsilon \quad \dots \quad (18)$$

$$educ_{2014}^c = \alpha_0 + \alpha_1 educ_{2000}^p + \alpha_2 \ln y^p + \alpha_3 sex^c + \alpha_4 age_{2014}^c + \alpha_5 w_{2014}^c + v \quad \dots \quad (19)$$

dimana :

- y_{2014}^c = pendapatan permanen anak yang diukur dengan pendapatan tahun 2014
- y^p = pendapatan permanen orang tua yang diukur dengan rata-rata pendapatan dari tahun 2000, 2007, dan 2914
- $educ_{2000}^p$ = lama pendidikan bapak pada tahun 2000
- $educ_{2014}^c$ = lama pendidikan anak pada tahun 2014
- sex^c = jenis kelamin anak
- age_{2014}^c = umur anak pada tahun 2014
- $age2_{2014}^c$ = kuadrat umur anak pada tahun 2014

ur_{2014}^c	= karakteristik tempat tinggal anak (variabel <i>dummy</i> bernilai 0 untuk Perdesaan dan 1 untuk perkotaan)
$marstat_{2014}^c$	= status perkawinan anak (variabel <i>dummy</i> bernilai 0 untuk kawin dan 1 untuk tidak kawin atau pernah kawin)
$work_{2014}^c$	= lama bekerja (tahun)
$industry_{2014}^c$	= sektor industri (variabel <i>dummy</i> bernilai 0 untuk sektor lain dan 1 untuk sektor industri)
$service_{2014}^c$	= sektor jasa (variabel <i>dummy</i> bernilai 0 untuk sektor lain dan 1 untuk sektor jasa)

Pendapatan bapak dan anak pada penelitian ini diambil dari pendapatan yang diperoleh dari bekerja (*labor income*) baik dari pekerjaan utama maupun pekerjaan tambahan. Pendapatan ini akan diukur dengan menggunakan pendapatan tahunan. Pendapatan tahunan diperoleh dari informasi pendapatan selama 12 bulan yang lalu. Jika informasi tidak tersedia, maka pendapatan tahunan dihitung dengan menggunakan pendapatan selama sebulan yang lalu dikali 12. Pendapatan tahunan bapak dari tahun 2000, 2007, dan 2014 akan dikonversikan ke dalam tahun dasar 1996 untuk menghilangkan pengaruh kenaikan harga. Begitu pula dengan pendapatan tahunan anak 2014 akan dikonversi ke tahun 1996. Informasi mengenai pendapatan diperoleh dari buku 3A sesi TK. Pendapatan permanen bapak akan dihitung dengan menggunakan rata-rata pendapatan tahunan, sedangkan pendapatan permanen anak akan dihitung dengan menggunakan pendapatan tahun 2014.

Lama pendidikan bapak dan anak digunakan sebagai ukuran dari modal manusia. Lama pendidikan dihitung dari tingkat pendidikan tertinggi dan kelas yang pernah diduduki. Informasi mengenai tingkat pendidikan dan kelas yang pernah diduduki diperoleh dari buku kontrol AR (ar16 dan ar17) dan buku 3A sesi DL (dl04, dl06, dan dl07). Lama pendidikan bapak diukur pada tahun 2000, sedangkan lama pendidikan anak diukur pada tahun 2014.

Umur dan kuadrat umur anak digunakan sebagai variabel kontrol untuk mengatasi efek *life cycle* (Solon, 1992; Mazumder, 2005; Bevis & Barrett, 2015). Umur anak diobservasi pada tahun 2014. Dampak kuadrat umur anak terhadap pendapatannya diharapkan mempunyai pola atau bentuk U terbalik yang menggambarkan *diminishing marginal return* dari umur. Informasi mengenai umur diperoleh dari buku kontrol AR (ar09).

Jenis kelamin anak digunakan sebagai variabel kontrol dalam model persamaan pendapatan anak untuk menangkap perbedaan pendapatan yang diperoleh oleh laki-laki maupun perempuan. Sementara pada persamaan pendidikan anak, jenis kelamin digunakan untuk menangkap ekspektasi yang berbeda dari orang tua terhadap hasil pendidikan anak laki-laki maupun perempuan. Jenis kelamin anak akan disajikan dalam bentuk variabel *dummy*, di mana 0 adalah perempuan

dan 1 adalah laki-laki. Informasi mengenai jenis kelamin terdapat pada buku kontrol AR (ar07).

Status perkawinan ditandai dengan ada tidaknya ikatan perkawinan. Status perkawinan dalam penelitian ini merupakan variabel *dummy* yang bernilai 0 jika berstatus kawin dan bernilai 1 jika tidak kawin atau pernah kawin. Status perkawinan dapat memberikan pengaruh yang berbeda kepada pendapatan. Individu yang berstatus kawin mempunyai kecenderungan mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi terkait dengan tunjangan yang diterima. Informasi mengenai status perkawinan diperoleh dari buku kontrol sesi AR (ar13).

Lapangan pekerjaan adalah bidang pekerjaan dari pekerjaan atau tempat bekerja di mana seseorang bekerja. Lapangan pekerjaan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi tiga kelompok. Pertama adalah lapangan pekerjaan sektor pertanian, yang terdiri dari pertanian, kehutanan, perikanan, dan perburuan. Kedua adalah lapangan pekerjaan sektor industri, yang terdiri dari pertambangan dan penggalian; manufaktur; listrik, gas, air bersih; bangunan; dan industri. Ketiga adalah lapangan pekerjaan sektor jasa yang terdiri dari perdagangan besar, eceran, rumah makan, dan hotel; angkutan; pergudangan dan komunikasi; keuangan; asuransi; usaha persewaan bangunan, real estate, dan jasa perusahaan; serta kemasyarakatan. Kategori yang dijadikan kelompok referensi adalah individu yang bekerja di sektor pertanian. Terdapat dua variabel *dummy* yaitu industri, yang bernilai 1 jika lapangan pekerjaan utamanya adalah di sektor industri dan 0 lainnya, serta variabel jasa yang bernilai 1 jika lapangan pekerjaan utamanya adalah jasa dan 0 jika lainnya. Informasi mengenai lapangan pekerjaan diperoleh dari buku 3A modul TK.

Karakteristik wilayah tempat tinggal anak digunakan sebagai variabel kontrol dalam persamaan pendapatan anak dan persamaan pendidikan anak. Karakteristik tempat tinggal akan disajikan dalam bentuk variabel *dummy*, di mana 0 adalah rural (perdesaan) dan 1 adalah urban (perkotaan). Akses untuk mendapatkan fasilitas sekolah lebih baik di perkotaan dan hal ini dapat mendorong pendidikan anak menjadi lebih baik. Selain itu, karakteristik wilayah juga mempengaruhi pendapatan yang diperoleh. Informasi mengenai karakteristik wilayah diperoleh dari buku kontrol sesi SC (SC05).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara statistik, pendapatan permanen orang tua, pendapatan permanen anak, pendidikan orang tua dan beberapa variabel lain dalam pengukuran mobilitas pendapatan antargenerasi dapat dilihat pada tabel 1. dan tabel 2. Tabel 1. menyajikan statistik deskriptif dari observasi sampel 1. Sampel 1 adalah pasangan bapak dan anak di mana bapak mempunyai informasi pendapatan lengkap di 3 titik waktu. Tabel 2 menyajikan statistik deskriptif dari observasi sampel 2. Sampel 2 adalah

Tabel 1. Statistik Deskriptif Pasangan Bapak dan Anak dari Sampel 1

Variabel	Total	Anak Laki-laki	Anak Perempuan	Perdesaan	Perkotaan
	Mean	Mean	Mean	Mean	Mean
Variabel anak					
Pendapatan tahunan (Ribu Rupiah)	5,944	6,626	4,802	4,742	6,633
Lama pendidikan (tahun)	10.77	10.51	11.20	9.81	11.31
Umur anak (tahun)	26.38	26.60	26.01	26.66	26.22
Status perkawinan (0. kawin, 1.tidak/pernah kawin)	0.47	0.50	0.42	0.38	0.52
Lama bekerja (bulan)	46.26	49.75	40.41	52.82	42.50
Sektor industri (1. industri, 0.lainnya)	0.31	0.30	0.31	0.33	0.29
Sektor jasa (1. Jasa, 0. Lainnya)	0.49	0.47	0.51	0.38	0.55
Variabel bapak					
Pendapatan tahunan (Ribu Rupiah)	10,700	10,000	11,800	8,831	11,800
Lama pendidikan (tahun)	6.39	6.28	6.57	5.11	7.12
Observasi	2,791	1,747	1,044	1,017	1,774

Sumber : IFLS3, IFLS4, dan IFLS5, diolah Sampel 1 adalah pasangan bapak dan anak di mana bapak mempunyai informasi pendapatan lengkap di 3 titik waktu

Sampel 2 juga mempunyai pola yang sama dengan sampel 1 dalam hal pendapatan anak dan pendapatan bapak. Pendapatan tahunan anak lebih rendah daripada rata-rata pendapatan bapak. Rata-rata umur anak pada sampel 2 adalah 27 tahun. Rata-rata lama pendidikan bapak dan anak tidak jauh berbeda dengan sampel 1.

pasangan bapak dan anak di mana bapak mempunyai informasi pendapatan minimal 2 titik waktu.

Jumlah pasangan bapak dan anak pada sampel 1 adalah 2,791 pasang dengan 1,747 pasang bapak - anak laki-laki dan 1,044 pasang bapak - anak perempuan, sedangkan jumlah pasangan bapak dan anak pada sampel 2 adalah 3,940 pasang dengan 2,470 pasang bapak - anak laki-laki dan 1,470 pasang bapak - anak perempuan.

Pendapatan tahunan anak pada sampel 1 lebih rendah daripada rata-rata pendapatan tahunan bapak. Hal ini dikarenakan pengukuran pendapatan anak dilakukan pada saat umur anak belum optimal sebagaimana dilihat bahwa rata-rata umur anak pada tahun 2014 adalah 26 tahun. Pendapatan anak kemungkinan masih akan mengalami kenaikan. Berdasarkan total sampel 1, anak yang berstatus tidak/pernah kawin adalah sebesar 47%. Rata-rata lama bekerja anak adalah sebesar 46 bulan.

Rata-rata lama pendidikan bapak adalah sekitar 6.4 tahun, sedangkan rata-rata lama pendidikan anak sekitar 10.77 tahun. Hal ini menandakan bahwa mayoritas bapak hanya menamatkan pendidikannya sampai tamat sekolah dasar. Adanya peningkatan lama pendidikan menandakan bahwa modal manusia meningkat pada generasi anak. Peningkatan modal manusia ini akan berakibat peningkatan pendapatan anak pada masa yang akan datang.

Rata-rata lama pendidikan anak laki-laki lebih rendah daripada anak perempuan pada kedua sampel. Demikian juga untuk rata-rata lama pendidikan di daerah perkotaan lebih tinggi daripada rata-rata lama pendidikan di daerah perdesaan pada kedua sampel data.

Tabel 3. dan tabel 4. menunjukkan hasil regresi dengan metode OLS. Masing-masing tabel menggunakan sampel pasangan yang berbeda dalam mengestimasi IGE. Tabel 3. menggunakan sampel 1, sedangkan tabel 4. menggunakan sampel 2. Model (1) merupakan model persamaan tunggal yang diestimasi menggunakan OLS, sedangkan model (2) dan (3) merupakan model persamaan simultan yang diestimasi dengan menggunakan 2SLS. Model (2) merujuk pada model empiris pada persamaan (17) yaitu model persamaan regresi konvensional yang digunakan untuk memperoleh IGE yaitu dengan menyertakan variabel kontrol karakteristik anak dan karakteristik pekerjaan anak. Model (2) dan model (3) merupakan model persamaan simultan yang digunakan untuk menangkap pengaruh transfer langsung modal manusia dari bapak ke anak yang mengacu pada (19) dan mengukur IGE persamaan (18).

Berdasarkan tabel 3. estimasi IGE pada model (1) dengan mengontrol karakteristik anak dan karakteristik pekerjaan anak menghasilkan angka sebesar 0.118, artinya jika rata-rata pendapatan tahunan bapak meningkat sebesar 1 persen maka rata-rata pendapatan anak akan meningkat sebesar 0.118 persen. Pada model (1) terlihat bahwa lama pendidikan anak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan anak dengan koefisien sebesar 0.086, yang artinya ketika lama pendidikan meningkat sebesar 1 tahun, maka pendapatan akan meningkat sebesar 8.6 persen ketika hal lainnya dikontrol. Dampak umur anak terhadap pendapatannya mempunyai bentuk U terbalik. Hal ini menggambarkan *diminishing marginal return* dari umur.

Tabel 2. Statistik Deskriptif Pasangan Bapak dan Anak dari Sampel 2

Variabel	Total	Anak Laki-laki	Anak Perempuan	Perdesaan	Perkotaan
	Mean	Mean	Mean	Mean	Mean
Variabel anak					
Pendapatan tahunan (Ribu Rupiah)	6,295	6,924	5,238	5,006	7,010
Lama pendidikan (tahun)	10.76	10.42	11.32	9.78	11.30
Umur anak (tahun)	27.13	27.29	26.86	27.32	27.02
Status perkawinan (0. kawin, 1.tidak/pernah kawin)	0.45	0.47	0.41	0.37	0.49
Lama bekerja (bulan)	49.35	51.81	45.23	55.78	45.79
Sektor industri (1. industri, 0.lainnya)	0.30	0.30	0.30	0.31	0.30
Sektor jasa (1. Jasa, 0. Lainnya)	0.49	0.47	0.51	0.39	0.54
Variabel bapak					
Pendapatan tahunan (Ribu Rupiah)	16,900	9,309	29,600	26,300	11,600
Lama pendidikan (tahun)	6.41	6.21	6.76	5.17	7.10
Observasi	3,940	2,470	1,470	1,405	2,535

Sumber : IFLS3, IFLS4, dan IFLS5, diolah Sampel 2 adalah pasangan bapak dan anak di mana bapak mempunyai informasi pendapatan minimal 2 titik waktu.

Tabel 3. Hasil Estimasi IGE dengan Menggunakan Sampel Pasangan 1

Variabel	OLS		Persamaan Simultan			
	Log natural pendapatan tahunan anak		Log natural pendapatan tahunan anak		Lama Pendidikan anak	
	(1)	(2)	(2)	(3)	(3)	
Log natural rata-rata pendapatan tahunan bapak	0.118 (0.026)	***	0.151 (0.034)	***	0.561 (0.063)	***
Lama pendidikan anak	0.086 (0.008)	***	0.055 (0.022)	**		
Lama pendidikan bapak					0.322 (0.016)	***
Jenis Kelamin anak	-0.449 (0.053)	***	-0.430 (0.054)	***	0.553 (0.119)	***
Umur anak	0.343 (0.030)	***	0.369 (0.035)	***	0.019 (0.009)	**
Kuadrat umur anak	-0.005 (0.001)	***	-0.006 (0.001)	***		
Urban/rural	0.204 (0.055)	***	0.233 (0.058)	***	0.669 (0.123)	***
Status perkawinan	0.113 (0.064)	*	0.150 (0.069)	**		
Lama bekerja	0.006 (0.001)	***	0.006 (0.001)	***		
Sektor_industri	0.452 (0.072)	***	0.450 (0.072)	***		
Sektor_jasa	0.443 (0.067)	***	0.452 (0.068)	***		
Konstanta	6.281 (0.590)	***	5.689 (0.709)	***	-1.170 (1.005)	
observasi	2,791		2,791		2,791	
<i>R-square</i>	0.223		0.221		0.264	

Keterangan : 1) ***p<0.01, **p<0.05, *p<0.1. 2) Angka dalam kurung menunjukkan *standar error*. 3) Sampel 1 adalah pasangan bapak dan anak di mana bapak mempunyai informasi pendapatan yang lengkap di 3 titik waktu

Sementara itu, dengan menggunakan 2SLS, model (3) menunjukkan bahwa pendidikan orang tua berpengaruh signifikan terhadap pendidikan anak dengan koefisien sebesar 0.322, artinya kenaikan 1 tahun lama sekolah bapak akan meningkatkan lama pendidikan anak sebesar 0.322 tahun ketika hal lainnya dikontrol. Adanya korelasi yang positif antara pendidikan orang tua dengan pendidikan anak mengindikasikan bahwa orang tua yang berpendidikan tinggi akan mempunyai perhatian lebih kepada pendidikan anak. Angka ini lebih rendah dari penelitian Hertz et al (2007) yang menemukan bahwa korelasi capaian pendidikan antara orang tua dan anak di Indonesia masih cenderung tinggi yaitu sebesar 0.55. Sebagai tambahan, pendapatan bapak juga mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap lama pendidikan anak. Kenaikan 10 persen pendapatan bapak akan meningkatkan lama sekolah anak sebesar 0.056 tahun ketika hal lain di kontrol. Hal ini menggambarkan mekanisme transmisi modal manusia melalui saluran investasi model manusia dari orang tua ke anak. Orang tua yang berpendidikan tinggi mempunyai kemampuan finansial yang lebih untuk berinvestasi kepada modal manusia anaknya. Selain itu, umur anak dan karakteristik tempat tinggal juga mempengaruhi lama pendidikan anak.

Model (2) menunjukkan hasil estimasi 2SLS yang merujuk pada persamaan (17). Model (2) menghasilkan angka IGE sebesar 0.151, artinya kenaikan 1 persen rata-rata pendapatan bapak akan meningkatkan pendapatan anak sebesar 0.151 persen ketika hal lain dikontrol. Jika dibandingkan dengan IGE pada model (1), IGE yang dihasilkan pada model (2) lebih tinggi.

Hasil empiris di atas mendukung dugaan bahwa transfer modal manusia mempunyai pengaruh terhadap besaran IGE. IGE yang mengandung transfer langsung modal manusia yang diperoleh pada model (2) yaitu sebesar 0.151 lebih besar daripada IGE yang tidak memasukkan transfer langsung modal manusia pada model (1) yaitu sebesar 0.118. Hal ini diperkuat secara statistik bahwa kedua IGE memang berbeda. Hasil uji t dua arah menunjukkan nilai p -value yaitu 0.0000 lebih kecil daripada $\alpha = 1\%$ yang artinya menolak hipotesis nol bahwa kedua rata-rata tidak berbeda secara statistik. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa IGE model (2) yaitu 0.151 lebih besar daripada estimasi IGE model (1) yaitu 0.118.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa transfer langsung modal manusia antargenerasi, yang digambarkan oleh lama pendidikan bapak, meningkatkan korelasi atau kaitan antara pendapatan permanen bapak dengan pendapatan permanen anak. Transfer modal manusia memperkuat besaran IGE. Hasil empiris ini sejalan dengan penelitian Qin, Wang, & Zhuang (2016) di China mengenai pengaruh transfer modal manusia antargenerasi terhadap mobilitas pendapatan antargenerasi yang menunjukkan bahwa transfer langsung modal manusia (melalui pendidikan dan kesehatan) meningkatkan estimasi IGE dari 0.429 menjadi 0.481.

Dengan menggunakan sampel yang berbeda yaitu dengan menyertakan sebagian observasi bapak yang tidak mempunyai informasi pendapatan yang lengkap, tabel 4. menyajikan hasil estimasi IGE dengan langkah dan spesifikasi model yang sama dengan tabel 3. Dapat dilihat bahwa IGE yang dihasilkan dengan menggunakan sampel 2 lebih kecil jika dibandingkan dengan IGE yang dihasilkan dengan menggunakan sampel 1, baik untuk model (1) maupun model (2). Dapat dikatakan bahwa penggunaan sampel observasi yang berbeda menyebabkan perbedaan besaran IGE. IGE yang dihasilkan dengan menggunakan observasi pasangan bapak dan anak dan menyertakan bapak yang mempunyai informasi pendapatan yang tidak lengkap akan menghasilkan IGE yang lebih kecil. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan pendapatan di dua titik pengamatan belum bisa mengatasi kesalahan pengukuran. Kesalahan pengukuran karena penggunaan rata-rata di 2 titik pengamatan akan cenderung membuat IGE bias ke bawah. Hal ini sesuai dengan literatur sebelumnya (Mazumder, 2005; Solon, 1992). Solon (1992) menemukan bahwa estimasi IGE di US yang menggunakan rata-rata pendapatan di dua titik pengamatan menghasilkan IGE yang lebih kecil yaitu sekitar 0.3 daripada estimasi IGE yang menggunakan rata-rata pendapatan minimal 3 titik pengamatan yaitu sekitar 0.4.

Pada tabel 4. estimasi IGE pada model (1), yang tidak mempertimbangkan transfer langsung modal manusia dan sudah mengontrol karakteristik anak menghasilkan angka sebesar 0.087, artinya jika rata-rata pendapatan bapak meningkat sebesar 1 persen maka rata-rata pendapatan anak akan meningkat sebesar 0.087 persen. Sementara itu, dengan metode 2SLS, model (2) menghasilkan IGE sebesar 0.089, artinya jika rata-rata pendapatan bapak meningkat sebesar 1 persen maka rata-rata pendapatan anak akan meningkat sebesar 0.089 persen.

Hasil estimasi IGE pada tabel 4. mempunyai arah dugaan yang sama dengan hasil estimasi IGE pada tabel 3. meskipun berbeda besaran. IGE yang diperoleh tanpa mempertimbangkan transfer langsung modal manusia mempunyai angka lebih kecil yaitu 0.087 daripada IGE yang sudah mempertimbangkan transfer langsung modal manusia yaitu sebesar 0.089. Hal ini diperkuat secara statistik bahwa kedua IGE memang berbeda. Hasil uji t dua arah menunjukkan nilai p -value yaitu 0.0139 lebih kecil daripada $\alpha = 5\%$ yang artinya menolak hipotesis nol bahwa kedua rata-rata tidak berbeda secara statistik. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa IGE model (2) yaitu 0.089 lebih besar daripada estimasi IGE model (1) yaitu 0.087. Dapat dikatakan bahwa pengaruh transfer langsung modal manusia akan memperkuat besaran IGE.

Bukti empiris di Indonesia menunjukkan bahwa transfer langsung modal manusia memperkuat besaran IGE. IGE yang semakin besar dapat dijadikan indikasi

Tabel 4. Hasil Estimasi IGE dengan Menggunakan Sampel Pasangan 2

Variabel	OLS		Persamaan Simultan			
	Log natural pendapatan tahunan anak		Log natural pendapatan tahunan anak		Lama Pendidikan anak	
	(1)	(2)	(2)	(3)	(3)	
Log natural rata-rata pendapatan tahunan bapak	0.087 (0.019)	***	0.089 (0.024)	***	0.483 (0.047)	***
Lama pendidikan anak	0.094 (0.006)	***	0.092 (0.016)	***		
Lama pendidikan bapak					0.356 (0.013)	***
Jenis Kelamin anak	-0.488 (0.044)	***	-0.487 (0.045)	***	0.644 (0.102)	***
Umur anak	0.294 (0.023)	***	0.295 (0.025)	***	0.020 (0.008)	***
Kuadrat umur anak	-0.004 (0.000)	***	-0.004 (0.000)	***		
Urban/rural	0.238 (0.045)	***	0.240 (0.048)	***	0.701 (0.105)	***
Status perkawinan	0.037 (0.053)		0.038 (0.054)			
Lama bekerja	0.006 (0.000)	***	0.006 (0.000)	***		
Sektor_industri	0.414 (0.060)	***	0.414 (0.060)	***		
Sektor_jasa	0.383 (0.056)	***	0.383 (0.056)	***		
Konstanta	7.423 (0.440)	***	7.403 (0.490)	***	-0.146 (0.763)	
observasi	3,940		3,940		3,940	
R-square	0.231		0.233		0.290	

Keterangan : 1) ***p<0.01, **p<0.05, *p<0.1. 2) Angka dalam kurung menunjukkan *standar error*. 3) Sampel 2 adalah pasangan bapak dan anak di mana bapak mempunyai informasi pendapatan minimal 2 titik waktu

bahwa kesenjangan yang terjadi pada generasi orang tua cenderung diwariskan atau dipertahankan ke generasi anak. Persistensi kesenjangan pendapatan antargenerasi dapat terjadi karena persistensi dari tingkat pendidikan antargenerasi. Hal tersebut mengimplikasikan bahwa ketika pengembangan modal manusia anak diserahkan sepenuhnya kepada keputusan rumah tangga, maka kesenjangan pendapatan akan terus dipertahankan dari generasi orang tua kepada generasi anak. Hal ini dikarenakan orang tua yang mempunyai modal manusia (pendidikan) yang tinggi dan memberikan investasi yang cukup tinggi untuk modal manusia anak-anaknya akan menghasilkan anak dengan modal manusia yang tinggi pula, sebaliknya orang tua yang mempunyai modal manusia tidak terlalu tinggi dan memberikan investasi yang kurang pada modal manusia anak-anaknya akan mempunyai anak dengan modal manusia yang tidak terlalu tinggi pula.

Sementara itu, penggunaan data untuk mengukur mobilitas pendapatan antargenerasi di Indonesia dapat memberi gambaran mengenai IGE di Indonesia yang relatif rendah. Hal ini dikarenakan data IFLS mengambil lebih banyak sampel responden di daerah maju, seperti di Pulau Jawa, yang mempunyai akses pendidikan yang

lebih baik daripada daerah lain di Indonesia. Adanya akses pendidikan yang lebih baik kepada pendidikan dapat membantu generasi anak untuk mengembangkan modal manusianya terlepas dari latar belakang keluarganya meskipun ada kemungkinan bahwa transfer langsung modal manusia bekerja secara genetik. Dalam penelitiannya mengenai mobilitas pendapatan antargenerasi di US dan Kanada, Corak & Heisz (1999) mengungkapkan bahwa Kanada mempunyai mobilitas pendidikan antargenerasi yang lebih tinggi daripada US karena Kanada mempunyai kebijakan publik yang lebih progresif daripada US yang membuat akses ke pendidikan lebih bagus. Ada kemungkinan bahwa IGE di Indonesia akan lebih tinggi jika data yang digunakan lebih representatif untuk Indonesia.

Sebagai informasi tambahan, akan lebih menarik untuk membedakan IGE antara anak laki-laki dan anak perempuan seperti yang sudah dilakukan oleh penelitian sebelumnya (Bevis & Barrett, 2015; Qin, Wang, & Zhuang, 2016). Bevis & Barrett (2015) membandingkan IGE untuk anak laki-laki dan untuk perempuan di Rural Philipina dengan dugaan bahwa orang tua mempunyai ekspektasi dan preferensi yang berbeda tergantung pada jenis kelamin anak. Orang tua mungkin melihat tingkat

Tabel 5. Perbedaan IGE Antara Anak Laki-laki dan Anak Perempuan dengan Menggunakan Sampel 1

Variabel	Persamaan Simultan			
	Log natural pendapatan tahunan anak		Lama Pendidikan anak	
	(2)		(3)	
Log natural rata-rata pendapatan tahunan bapak	0.137 (0.039)	***	0.439 (0.079)	***
Lama pendidikan anak	0.048 (0.022)	**		
Lama pendidikan bapak			0.323 (0.016)	***
Jenis Kelamin anak	-1.250 (0.773)		-3.575 (1.760)	**
Log natural rata-rata pendapatan tahunan bapak*Jenis Kelamin anak	0.053 (0.049)		0.265 (0.113)	**
Umur anak	0.375 (0.035)	***	0.019 (0.009)	*
Kuadrat umur anak	-0.006 (0.001)	***		
Urban/rural	0.243 (0.058)	***	0.676 (0.123)	
Status perkawinan	0.155 (0.069)	**		
Lama bekerja	0.006 (0.001)	***		
Sektor_industri	0.450 (0.072)	***		
Sektor_jasa	0.455 (0.068)	***		
Konstanta	5.896 (0.768)	***	0.737 (1.248)	
observasi	2,791		2,791	
<i>R-square</i>	0.219		0.264	

Keterangan : 1) *** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$. 2) Angka dalam kurung menunjukkan *standar error*. 3) Sampel 1 adalah pasangan bapak dan anak di mana bapak mempunyai informasi pendapatan yang lengkap di 3 titik waktu

pengembalian dari pendidikan berbeda antar jenis kelamin anak. Hasilnya adalah IGE anak perempuan lebih tinggi daripada anak laki-laki dan pendapatan orang tua mempengaruhi pendapatan anak perempuan secara kuat, sedangkan untuk anak laki-laki terdapat transmisi lain dari orang tua ke anak yaitu melalui modal fisik (lahan pertanian). Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan untuk membatasi lahan pertanian orang tua hanya efektif untuk menurunkan IGE anak laki-laki sedangkan tidak berpengaruh dalam menurunkan IGE untuk anak perempuan. Sementara itu, Qin, Wang, & Zhuang (2016) membedakan IGE anak laki-laki dan IGE anak perempuan di China dan menemukan bahwa IGE anak perempuan (sebesar 0.464) lebih tinggi daripada IGE anak laki-laki (sebesar 0.415). Hal ini mengindikasikan bahwa perempuan masih termasuk dalam kelompok yang tidak diuntungkan dalam perkembangan ekonomi karena mereka tidak bisa memutus persistensi pendapatan antargenerasi. dengan kata lain, pendapatan anak perempuan di masa yang akan datang masih sangat dipengaruhi oleh pendapatan orang tua jika dibandingkan dengan anak laki-laki.

Untuk mengetahui perbedaan antara IGE laki-laki dengan perempuan, maka ditambahkan variabel interaksi dari rata-rata pendapatan bapak dan jenis kelamin anak pada persamaan simultan. Hasil estimasi disajikan oleh tabel 4.5 dengan menggunakan sampel 1.

Berdasarkan tabel 5. terlihat bahwa variabel interaksi antara pendapatan permanen orang tua dengan jenis kelamin anak persamaan model (2) tidak signifikan secara statistik. Dapat dikatakan bahwa IGE tidak berbeda untuk anak laki-laki dan anak perempuan.

SIMPULAN

Penelitian ini memberikan gambaran mengenai transfer langsung modal manusia antargenerasi dan pengaruhnya terhadap mobilitas pendapatan antar generasi di Indonesia. Transfer langsung modal manusia dari orang tua ke anak berperan dalam memperkuat IGE. Modal manusia orang tua ditularkan secara langsung terhadap modal manusia anak. Dalam hal ini pendidikan orang tua masih memiliki korelasi yang cukup kuat terhadap pendidikan anak. Dapat dikatakan bahwa persistensi dari tingkat pendidikan inilah yang nantinya menyebabkan persistensi dari pendapatan antargenerasi. Hal ini dapat menjadi indikasi bahwa jika pengembangan modal manusia anak diserahkan sepenuhnya oleh keputusan dalam rumah tangga, maka kesenjangan yang terjadi pada generasi orang tua cenderung dipertahankan atau diwariskan kepada generasi anak.

Sementara itu, penggunaan data untuk mengukur mobilitas pendapatan antargenerasi di Indonesia dapat memberi gambaran mengenai IGE di Indonesia yang

relatif rendah. Hal ini dikarenakan data IFLS mengambil lebih banyak sampel responden di daerah maju, seperti di Pulau Jawa, yang mempunyai akses pendidikan yang lebih baik daripada daerah lain di Indonesia. Hal ini dapat dijadikan indikasi bahwa adanya akses pendidikan yang lebih baik kepada pendidikan dapat membantu generasi anak untuk mengembangkan modal manusianya terlepas dari latar belakang keluarganya meskipun ada kemungkinan bahwa transfer langsung modal manusia bekerja secara genetik.

DAFTAR PUSTAKA

- Becker, G.S. (1993). Human capital: A theoretical and empirical analysis with special reference to education. University of Chicago Press.
- Becker, G.S. & Tomes, N. (1979). An equilibrium theory of the distribution of income and intergenerational mobility. *Journal of Political Economy* 87 (6), 1153-1189.
- Becker, G.S., Kominers, S. D., Murphy, K.M., & Spenkuch, J.L. (2015). A Theory of Intergenerational Mobility. mimeographed, University of Chicago.
- Behrman, J., & Taubman, P. (1990). The intergenerational correlation between children's adult earnings and their parent's income: Results from the michigan panel survey of income dynamics. *Review of Income and Wealth*, 36 (2), 115-127.
- Barrett, C.B. & Bevis, L.E. (2015). Decomposing Intergenerational Income Elasticity: The Gender-differentiated Contribution of Capital Transmission in Rural Philippines. *World Development* Vol. 74, 233-252.
- Barrett, C.B. & Naschold, F. (2011). Do short-term observed income changes overstate structural economic mobility? *Oxford Bulletin of Economics and Statistics*, 73(5), 705–717.
- Björklund, A. & Jäntti, M. (1997). Intergenerational income mobility in Sweden compared to the United. *American Economic Review*, 1009-1018.
- Björklund, A. & Jäntti, M. (2009). Intergenerational income mobility and the role of family background. in *The Oxford Handbook of Economic Inequality*.
- Björklund, A., Roine, J. & Waldenström, D. (2012). Intergenerational top income mobility in Sweden: Capitalist dynasties in the land of equal opportunity? *Journal of Public Economics*, 96, 474-484.
- Black, S.E, & Devereux, P.J. (2010). Recent Developments in Intergenerational Mobility. NBER working paper.
- Blanden, J. (2013). Cross-country rankings in intergenerational mobility: A comparison of approaches from economics and sociology. *Journal of Economic Surveys*, 27(1), 38-73.
- Blanden, J., Haveman, R., Smeeding, T. & Wilson, K. (2014). Intergenerational Mobility in The United States and Great Britain : A Comparative Study of Parent-Child Pathways. *Review of Income and Wealth* 60(3), 425-449.
- Corak, M. (2013). Income inequality, equality of opportunity, and intergenerational mobility. *The Journal of Economic Perspectives*, 27(3), 79-102.
- Corak, M, & Heisz, A. (1999). The intergenerational earnings and income mobility of Canadian men: Evidence from longitudinal income tax data. *Journal of Human Resources*, 34(3), 504-533.
- Gong, H., Leigh, A, & Meng, X. (2012). Intergenerational Income Mobility in Urban China. *Review of Income and Wealth*, 58(3), 481-503.
- Haider, S, & Solon, G. (2006). Life-cycle variation in the association between current and lifetime earnings. *American Economic Review* 96(4), 1308-1320.
- Herrington, C.M. (2015). Public education financing, earnings inequality, and intergenerational mobility. *Review of Economic Dynamics*, 18(4), 822–842.
- Hertz, T. & Jayasundera, T. (2007). School Construction and Intergenerational in Indonesia. Department of Economics, American University Working Paper Series No. 2007-18.
- Hertz, T., Jayasundera, T., Piraino, P., Selcuk, S., Smith, N, & Verashchagina, A. (2007). The Inheritance of Educational Inequality: International Comparisons and Fifty-Year Trends. *The B.E. Journal of Economic Analysis & Policy*, Vol 7(2), Article 10.
- Lindquist, M. & Bohlmark, A. (2006). Life-cycle variations in the association between current and lifetime income: Replication and extension for Sweden. *Journal of Labor Economics* 24(4), 879-896.
- Mazumder, B. (2005). Fortunate sons: New estimates of intergenerational mobility in the United States using social security earnings data. *Review of Economics and Statistics*, 87(2), 235-255.
- Osterbacka, E. (2001). Family background and economic status in Finland. *The Scandinavian Journal of Economics*, 103(3), 467–484.

- Piraino, P. (2015). Intergenerational Earnings Mobility and Equality of Opportunity in South Africa. *World Development* Vol. 67, 396–405.
- Qin, X., Wang, T, & Zhuang, C.C. (2016). Intergenerational transfer of human capital and its impact on income mobility : Evidence from China. *China Economic Review* 38, 306-321.
- Senoaji, G. (2011). Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar Hutan Lindung Bukit Daun di Bengkulu. *Sosiohumaniora*, Vol. 13, No. 1, 1-17.
- Solon, G. (1992). Intergenerational Income Mobility in the United States. *The American Economic Review*, Vol. 82, No. 3, 393-408.
- Solon, G. (2002). Cross-country differences in intergenerational earnings mobility. *The Journal of Economic Perspectives*, 16(3), 59-66.
- Tain, A., (2013). Faktor Dominan Penyebab Kemiskinan Rumah Tangga Nelayan Motor Tempel di Wilayah Tangkap Lebih Jawa Timur. *Sosiohumaniora*, Vol. 15, No. 1, 35-44.
- Wang, M. & Li, Z., Liu, L., (2014). Intergenerational income mobility and public education spending: Evidence from China. *Children and Youth Services Review*, 40, 89–97.
- Yuan, W. (2015). The Sins of the Fathers: Intergenerational Income Mobility in China. *The Review of Income and Wealth*.
- Zimmerman, D. (1992). Regression toward Mediocrity in Economic Stature. *The American Economic Review*, 82(3), 409-429.

PENGARUH PENGAWASAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN KESEHATAN DI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH

Ahmad Averus dan Andi Pitono

Prodi Kebijakan Pemerintahan Daerah Fakultas Politik Pemerintahan

Institut Pendidikan Dalam Negeri Kampus Jakarta dan Jatinarong

E-mail :ahmad_averus@yahoo.co.id

ABSTRAK. Rumah sakit sebagai salah satu elemen penting dalam pelayanan publik di bidang kesehatan. Adanya dorongan kemandirian dan persaingan mengakibatkan pelayanan kesehatan ini semakin terasa mahal bagi masyarakat, tidak terkecuali pelayanan rawat inap yang belum memenuhi harapan. Kondisi ini bila terus terjadi dapat berakibat pada pembangunan kualitas sumber daya manusia yang semakin melorot disebabkan oleh keberadaan rumah sakit yang seyogyanya menjadi solusi bagi pelayanan kesehatan khususnya rawat inap tapi justru menjadi bagian dari permasalahan pelayanan kesehatan itu sendiri. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan terhadap kinerja dalam meningkatkan pelaksanaan pelayanan kesehatan rawat inap di rumah sakit umum. Adapun teori yang digunakan adalah teori pengawasan yang dikemukakan oleh Siagian, sedangkan teori kinerja dikutip dari Prawirosentono, dan teori pelayanan yang disampaikan oleh Sabarguna. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif, serta analisis korelasi *productmoment*, determinasi dan koefisien korelasi untuk mengetahui pengaruh pengawasan terhadap kinerja perawat dalam meningkatkan pelayanan kesehatan rawat inap di rumah sakit. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan pimpinan rumah sakit berpengaruh terhadap kinerja perawat, namun kinerja perawat kurang berpengaruh terhadap kualitas pelayanan kesehatan rawat inap, ini dikarenakan para perawat masih mengerjakan tugas lain diluar tugas utama mereka. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berkaitan dengan administrasi di rumah sakit khususnya mengenai pelaksanaan pengawasan dan pengaruhnya terhadap kinerja perawat dalam memberikan pelayanan kesehatan rawat inap yang terbaik kepada para pasien.

Kata kunci: Pengawasan, Kinerja, Pelayanan

THE EFFECTS OF SUPERVISION ON THE EMPLOYEES PERFORMANCE IN IMPROVING HEALTH SERVICE IN PALU CENTRAL SULAWESI PROVINCE

ABSTRACT. Hospital is one of key elements on health public service. With higher competition and independency among the sectors, yet health public service is expensive even for the basic service, such as overnight care. If this situation continues, it could reduce the quality of human resources and detain the human development despite the expectation that hospital presence, especially overnight can be the solution for public health problems. To gain more knowledge on this, we employ several grand theories: the supervision theory from Siagian; the working performance theory from Prawirosentono; and the public service theory from Sabarguna. Besides that, quantitative method with correlation analysis of product moment is also being used to look at more deeply on the effects of supervision on nurses' performance in improving the service of overnight care at the hospital. The results of research indicate that supervision of hospital leaders affect the performance of nurses, but the performance of nurses has little effect on the quality of inpatient health services, this is because the nurses are still doing other tasks outside their main tasks. it is expected that the findings of this research, regarding to the supervising implementation and its impacts, can help the hospital staffs to deliver the best service to the patients and improve their service quality as well as their administration.

Key words: Monitoring, Performance, Services.

PENDAHULUAN

Fungsi pelayanan kesehatan di rumah sakit umum pada hakekatnya lebih dari sekedar menyembuhkan penyakit pasien yang berobat di sana, rumah sakit umum juga memiliki fungsi yang tidak kalah pentingnya yakni menjaga dan menciptakan paradigma sehat bagi masyarakat. Selain pembentuk paradigma sehat bagi masyarakat, peran tersebut pada dewasa ini makin menonjol mengingat timbulnya perubahan-perubahan struktur demografis, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perubahan struktur sosial masyarakat dan pelayanan yang lebih bermutu, ramah dan sanggup memenuhi kebutuhan mereka yang menuntut perubahan pola pelayanan kesehatan. Disamping menjalankan fungsi sosialnya, rumah sakit umum tidak terlepas dari

persaingan dalam memberikan pelayanan kesehatan. Menurut Ndraha (2008 : 50) bahwa pemerintah tidak boleh menolak untuk menyelesaikan suatu urusan dan tidak boleh menolak mendengarkan tuntutan setiap warga masyarakat dengan alasan apapun, apalagi masalah kesehatan yang merupakan hak, kebutuhan dasar dan tuntutan setiap orang. Sedangkan Menurut Napitupulu (2007:164), bahwa Pelayanan merupakan serangkaian kegiatan suatu proses pemenuhan kebutuhan orang lain secara lebih memuaskan berupa produk jasa dengan sejumlah ciri seperti tidak terwujud ,cepat hilang, lebih dapat dirasakan daripada memiliki, dan pelanggan lebih dapat berpartisipasi aktif dalam proses mengkonsumsi jasa tersebut”.

Dikaitkan dengan semakin meningkatnya pertumbuhan penduduk maka pentingnya pelayanan

kesehatan menjadi suatu keharusan bagi setiap rumah sakit umum untuk mengantisipasi hal tersebut. Mengingat kesehatan masyarakat sangat penting untuk menuju masyarakat sejahtera, sebab masyarakat yang sehat akan mampu menopang pemerintah dalam pelaksanaan tugas-tugasnya. Salah satu pelayanan kesehatan di rumah sakit umum adalah rawat inap, pada rawat inap tersebut pegawai rumah sakit umum yang memegang peranan penting dalam melayani pasien rawat inap adalah perawat, sebab perawat berhubungan lebih intens dengan pasien rawat inap. Oleh sebab itu perawat yang menangani pasien rawat inap harus menyadari dengan sebaik-baiknya bahwa pelayanan kesehatan rawat inap merupakan suatu proses mempercepat penyembuhan dan pemulihan pasien sehingga harus dilayani secara fisik dan psikis.

Namun hingga saat ini pelayanan kesehatan terhadap pasien rawat inap masih terdapat hasil yang belum dapat memenuhi harapan pasien, dari informasi yang diperoleh bahwa masih rendahnya kualitas pelayanan dapat ditandai dari masih sering terjadi keterlambatan dalam penanganan pasien dan terkadang dalam menangani pasien yang membutuhkan pertolongan dengan tindakan yang sifatnya harus dilakukan dengan segera, akan tetapi pada kondisi demikian perawat rumah sakit umum masih lebih mengutamakan meminta jaminan biaya pelayanan kesehatan dan penanganan proses administrasi pada keluarga pasien atau kerabat pasien, hal lainnya bila berkaitan dengan proses administrasi bagi pasien yang akan rawat inap mengalami prosedur yang harus dilewati cenderung berbelit-belit serta sulit, sehingga cepat atau tidaknya proses administrasi untuk pelayanan kesehatan rawat inap dapat ditentukan oleh *paviliun* yang akan ditempati. Selain itu cepat atau tidaknya proses administrasi bagi pasien rawat inap juga ditentukan oleh kedekatan hubungan antara pasien atau keluarga pasien dengan pegawai rumah sakit umum. Disamping itu, masih kurangnya perawat rumah sakit umum memberikan informasi yang dibutuhkan pasien maupun keluarga pasien, dan dalam memberikan informasi masih sering dibarengi dengan rendahnya keramahan dari perawat rumah sakit umum terhadap pasien maupun keluarga pasien.

Berkenaan dengan hal tersebut, sehingga diketahui bahwa salah satu penyebab dari rendahnya pelayanan kesehatan rawat inap yang ada di rumah sakit umum merupakan dampak dari rendahnya kinerja pegawai yang menangani pelayanan kesehatan, baik pelayanan kesehatan yang dilakukan secara langsung oleh perawat maupun secara tidak langsung oleh pegawai administrasi. Dimana pelayanan kesehatan yang dilakukan secara langsung, merupakan pelayanan secara medik pada pasien yang dilakukan oleh pihak rumah sakit umum, sedangkan pelayanan kesehatan secara tidak langsung, yakni pelayanan non medik oleh pihak rumah sakit umum dengan melakukan pelayanan administrasi,

ataupun pelayanan yang dihasilkan memiliki keterkaitan tidak langsung bagi proses penyembuhan pasien.

Masih rendahnya pelayanan kesehatan rawat inap bagi pasien, disebabkan masih rendahnya kinerja perawat rumah sakit umum dalam melaksanakan tugas, sehingga adanya suatu dugaan bahwa hal ini diakibatkan dari masih rendahnya pelaksanaan salah satu dari fungsi administrasi, yakni pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan rumah sakit umum. Berdasarkan hasil observasi di lapangan, terlihat lemahnya pengawasan ditandai dari lemahnya teguran ataupun sanksi yang diberikan terhadap perawat yang lalai dalam melakukan pekerjaan, hal tersebut dapat disebabkan adanya pengaruh familiar yang berlebihan di lingkungan kerja, serta masih berlakunya faktor senioritas yang dalam hal ini apabila pelanggaran dilakukan oleh perawat yang memiliki tingkat senioritas yang tinggi maka belum adanya tindakan yang tegas, serta masih kurangnya pimpinan rumah sakit umum melakukan pengawasan secara langsung terhadap pegawai rumah sakit umum dalam melaksanakan pekerjaan. Sehingga dari lemahnya pengawasan tersebut dapat mempengaruhi pada laporan atas hasil pekerjaan yang hanya menyampaikan tentang hal-hal yang baik-baik saja.

Untuk itu, dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan rawat inap yang dilakukan oleh perawat rumah sakit umum, memiliki hubungan dengan bagaimana pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh perawat rumah sakit umum, sehingga dengan pelaksanaan pekerjaan yang baik, diharapkan akan berdampak pada hasil pelayanan rawat inap kesehatan yang baik pula. Sebagai salah satu fungsi administrasi maka faktor pengawasan menjadi salah satu hal penting dalam menjalankan kegiatan administrasi di rumah sakit umum, sebab dengan adanya pengawasan maka kebijakan pimpinan maupun rencana yang telah disepakati dan ditetapkan diharapkan akan dapat tercapai dengan sebaik-baiknya. Dalam konteks ini pengawasan menjadi suatu hal yang turut menentukan keberhasilan pimpinan rumah sakit umum dalam menjaga pekerjaan yang dilaksanakan setiap perawat agar sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan. Dalam hal ini, pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan rumah sakit umum bukan semata-mata untuk mencari kesalahan perawat, namun pengawasan dari pimpinan rumah sakit umum untuk memastikan bahwa kinerja perawat rumah sakit umum telah sesuai dengan ketentuan yang ada, yang selanjutnya diharapkan akan dapat mempengaruhi kualitas pelayanan kesehatan rawat inap terhadap setiap pasien yang berobat di rumah sakit umum. Berbagai permasalahan tersebut menjadi dasar dalam menentukan tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan terhadap kinerja pegawai dalam meningkatkan pelaksanaan pelayanan kesehatan rawat inap di rumah sakit umum. Lebih lanjut penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berkaitan dengan penyelenggaraan administrasi

di rumah sakit khususnya mengenai pelaksanaan pengawasan dan pengaruhnya terhadap kinerja pegawai dalam memberikan pelayanan kesehatan rawat inap yang terbaik kepada para pasien, disamping itu diharapkan pula pada masa yang akan datang pelayanan kesehatan rawat inap dapat dilakukan tindakan fisik maupun psikis dengan penanganan yang terbaik, hal ini disebabkan rumah sakit umum merupakan pusat pelayanan kesehatan pada masyarakat, serta rumah sakit dapat semakin berperan aktif dalam menciptakan masyarakat sehat rohani sekaligus jasmani.

Tinjauan Konseptual

Variabel pengawasan diukur oleh Siagian (1989: 139) yang mengemukakan bahwa Proses pengawasan pada dasarnya dilaksanakan oleh administrasi dan manajemen dengan mempergunakan dua macam teknik, yakni Pengawasan langsung (*direct control*) ialah apabila pimpinan organisasi mengadakan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan. Pengawasan langsung ini dapat berbentuk sebagai berikut (a) inspeksi langsung, (b) *on-the-spot observation*, (c) *on-the-spot report*. Yang sekaligus berarti pengambilan keputusan *on-the-spot* pula jika diperlukan. Akan tetapi karena banyaknya dan kompleksnya tugas-tugas seorang pimpinan – terutama dalam organisasi yang besar – seorang pimpinan tidak mungkin dapat selalu menjalankan pengawasan langsung itu. Karena itu sering pula ia harus melakukan pengawasan yang bersifat tidak langsung, dan Pengawasan tidak langsung (*indirect control*) ialah pengawasan jarak jauh. Pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan. Laporan itu dapat berbentuk sebagai berikut (a) tertulis, (b) lisan. Kelemahan dari pada pengawasan tidak langsung itu ialah bahwa sering para bawahan hanya melaporkan hal-hal yang positif saja. Dengan perkataan lain, para bawahan itu mempunyai kecenderungan hanya melaporkan hal-hal yang diduga akan menyenangkan pimpinan.

Adapun variabel kinerja diukur oleh Prawirosentono (1999:27) mengungkapkan bahwa, “Faktor-faktor yang dijadikan ukuran kinerja adalah (1) Efektivitas (2) Otoritas dan Tanggungjawab (3) Disiplin (4) Inisiatif”. Sedangkan variabel pelayanan diukur oleh Sabarguna (2004:38) yang memberikan kriteria tentang mutu pelayanan yang baik, yakni terdiri atas : “(1) tersedia dan terjangkau (2) tepat kebutuhan (3) tepat sumber daya (4) tepat standar profesi / etika profesi (5) wajar dan aman (6) mutu memuaskan bagi pasien yang dilayani”. Adapun yang menghubungkan variabel pengawasan dan kinerja berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Harahap (2000:36) merumuskan pengawasan dengan mengemukakan bahwa, “pengawasan dapat dirumuskan sebagai ERMC yaitu *Expectation* (tujuan atau standar), *Recording* (Pencatatan kinerja), *Monitoring* (perbandingan antara *Expectation* dan catatan), dan *Correction* (tindakan

koreksi terhadap penyimpangan yang ada)”. Demikian pula yang menghubungkan variabel kinerja dan pelayanan berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Dwiyanto (1995:6) mengungkapkan bahwa, “Kinerja organisasi publik dapat dikaji dari lima ukuran, yaitu (1) Produktivitas (2) Kualitas layanan (3) responsivitas (4) tanggungjawab (5) akuntabilitas”.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian menggunakan metode kuantitatif yaitu penelitian yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab akibat, dengan menganalisa faktor-faktor penyebab terjadinya atau pun munculnya suatu fenomena tertentu. Dengan demikian, dari hasil penelitian ini diharapkan akan dapat memperoleh gambaran yang jelas, sistematis dan faktual mengenai aktivitas pengelolaan dan proses pelayanan kesehatan rawat inap yang dilakukan oleh Perawat Rumah Sakit Umum Undata, Perawat Rumah Sakit Umum Anutapura dan Perawat Rumah Sakit Umum Woodward terhadap pasien, sekaligus diharapkan pula akan dapat memperoleh gambaran yang jelas tentang bagaimana proses pengawasan yang dilaksanakan oleh masing-masing pimpinan rumah sakit umum dalam peningkatan pelayanan kesehatan rawat inap di rumah sakit tersebut.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, sebab data yang digunakan merupakan hasil dari skala pengukuran dari hasil jawaban responden pada kuesioner. Namun adanya data wawancara, observasi, dan dokumentasi juga digunakan sebagai data pendukung dari data kuantitatif yang diperoleh di lokasi penelitian. Adapun unit analisisnya bukan pegawai rumah sakit umum secara menyeluruh, namun hanya pegawai rumah sakit umum yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan rawat inap, sebab mereka yang mengetahui dan memahami tentang pengawasan dan pelayanan kesehatan rawat inap, sebaliknya bila bagi pegawai rumah sakit umum yang tidak mengetahui dan mengerti tentang pengawasan dan pelayanan kesehatan rawat inap akan mengalami bias datanya. Berdasarkan hal tersebut maka populasi yang menjadi sasaran dalam penelitian ini yang sekaligus menjadi sumber data adalah Pegawai yang berada di Rumah Sakit Umum Undata, Rumah Sakit Umum Anutapura, dan Rumah Sakit Umum Woodward sebanyak 45 orang, serta juga pasien rawat inap di tiga rumah sakit umum tersebut berfungsi sebagai *counter information* sebanyak 65 orang yang diambil dari berbagai kelas pasien yang dirawat inap.

Pemilihan ketiga rumah sakit umum tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa ketigarah sakit umum tersebut memiliki sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang lebih memadai di Kota Palu, sedangkan pemilihan pasien rawat inap didasarkan atas pertimbangan bahwa pasien rawat inap memiliki waktu yang lebih lama

berada di rumah sakit umum, sehingga lebih merasakan pelayanan kesehatan rawat inap yang dilakukan oleh pihak rumah sakit umum. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yakni dengan menggunakan analisis jalur (*path analysis*), untuk mengetahui besaran pengaruh dari variabel bebas ke variabel antara, kemudian dari variabel antara ke variabel terikat. Kelebihan dengan menggunakan analisis jalur akan dapat menentukan besarnya pengaruh langsung secara relatif dari variabel bebas pada variabel terikat maupun pada variabel antara dan pengaruh lain yang turut mempengaruhi variabel antara dan variabel terikat.

Pengujian validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menghitung distribusi jawaban responden yang selanjutnya diurutkan mulai dari nilai yang terkecil sampai dengan nilai terbesar, kemudian dikelompokkan ke dalam tiga bagian dari bagian yang terkecil, bagian menengah dan bagian yang terbesar. Selanjutnya dihitung jumlah nilai jawaban setiap pertanyaan. Setelah ditemukan bahwa pertanyaan-pertanyaan yang digunakan penelitian valid, maka selanjutnya diuji reliabilitasnya. Uji reliabilitas dimaksudkan untuk mengukur ketepatan, ketelitian serta keakuratan instrumen yang digunakan dalam mengukur variabel penelitian, artinya hasil pengukuran tetap konsisten, meskipun diuji cobakan pada penelitian yang sama dan dengan menggunakan alat ukur yang sama.

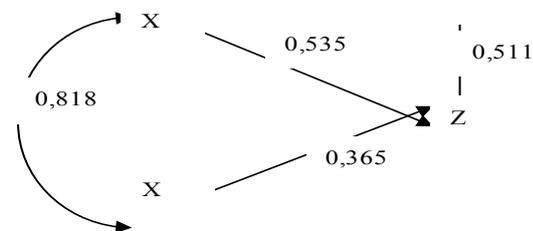
Uji reliabilitas ini dilakukan secara internal yakni secara internal reliabilitas instrumen dapat diuji dengan menganalisis konsistensi butir-butir yang ada pada instrumen dengan teknik tertentu. Pengujian reliabilitas dengan *internal contigency*, dilakukan dengan cara mencobakan instrumen sekali saja, kemudian yang diperoleh dianalisis. Hasil analisis dapat digunakan untuk memprediksi reliabilitas instrumen. Pengujian reliabilitas instrumen dapat dilakukan dengan teknik belah dua dari Spearman Brown (Sugiyono, 2003:278). Penarikan kesimpulan mengenai keeratn hubungan antara variabel X dan variabel Z serta variabel Y, semata-mata dilakukan dengan koefisien korelasi (r) kurang memberikan keterangan. Untuk itu, perlu dijelaskan dengan analisis determinan. Dalam analisis korelasi terdapat suatu angka yang disebut dengan koefisien determinasi, yang besarnya adalah kuadrat dari koefisien korelasi (r^2). Koefisien ini disebut koefisien penentu, karena varian yang terjadi pada variabel dependen dapat dijelaskan melalui varian yang terjadi pada variabel independen, (Sugiyono, 2003:216).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengawasan

Dari hasil penelitian dilakukan pengujian secara kausalitas pada variabel pengawasan (X) yang terdiri dari sub variabel pengawasan langsung (X) dan pengawasan tidak langsung (X) terhadap variabel kinerja pegawai (Z).

Adapun dari hasil analisis varians regresi diperoleh nilai F tabel adalah $F_{[0,05; 2; 43]} = 3.215$. Oleh karena nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$, sehingga dapat diartikan bahwa secara bersama-sama sub variabel pengawasan (X) dapat mempengaruhi variabel kinerja pegawai (Z). Sub variabel pengawasan dalam penelitian ini adalah pengawasan langsung (X) dan pengawasan tidak langsung (X). Dari hasil analisis dan perhitungan bahwa hasil pengujian bersifat signifikan, karena dari hasil pengujian koefisien jalur diperoleh keterangan objektif, bahwa koefisien jalur dari pengawasan ke kinerja pegawai, secara statistik adalah $t_{hitung} = 4.050$ dan $2.759 > t_{tabel} = 2.018$ bermakna artinya nilai t hasil hitung $> t$ tabel, jadi dapat disimpulkan kedua jalur signifikan. Dari struktur jalur juga dapat diketahui pengaruh variabel pengawasan, baik pengawasan yang dilakukan secara langsung sebesar 0,535 dan pengawasan yang dilakukan secara tidak langsung sebesar 0,365. Secara struktur pengaruh pengawasan baik secara langsung dan tidak langsung terhadap kinerja pegawai dapat digambarkan pada struktur jalur seperti berikut ini:



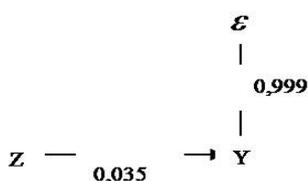
Sumber: Hasil olah data lapangan

Gambar 1. Struktur jalur pengaruh pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung terhadap kinerja pegawai

Sehingga dari hasil tersebut dapat diartikan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan di Rumah Sakit Umum Undata, Rumah Sakit Umum Anutapura, dan Rumah Sakit Umum Woodward berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai pada ketiga rumah sakit umum tersebut, akan tetapi memiliki tingkat hubungan yang masih rendah dan sedang, karena besarnya pengaruh langsung dari pengawasan langsung terhadap kinerja pegawai sebesar $0,535 \times 0,535 \times 100\% = 28,62\%$ sedangkan pengaruh langsung dari pelaksanaan pengawasan tidak langsung sebesar $0,365 \times 0,365 \times 100\% = 13,32\%$, pengaruh tidak langsung dari pelaksanaan pengawasan langsung sebesar $0,535 \times 0,818 \times 0,365 \times 100\% = 15,97\%$ sedangkan dari pelaksanaan pengawasan tidak langsung sebesar $0,365 \times 0,818 \times 0,535 \times 100\% = 15,97\%$, disisi lain besarnya pengaruh faktor lain terhadap kinerja pegawai memiliki tingkat hubungan yang sedang yakni sebesar $0,511 \times 0,511 \times 100\% = 26,11\%$.

Selanjutnya dilakukan pengujian pada variabel kinerja pegawai (Z) yakni seberapa besar variabel kinerja pegawai (Z) berpengaruh terhadap variabel pelayanan kesehatan rawat inap (Y). Setelah diperoleh hasil analisis varians regresi, yang menunjukkan bahwa F tabel adalah

$F_{[0,05; 1; 43]} = 4.065$. Oleh karena nilai $F_{hitung} < F_{tabel}$. Sehingga dapat diartikan bahwa variabel kinerja pegawai (Z) tidak dapat mempengaruhi variabel pelayanan kesehatan rawat inap (Y). Dari hasil analisis dan perhitungan tersebut menunjukkan bahwa hasil pengujian bersifat tidak signifikan, karena dari hasil pengujian koefisien jalur diperoleh keterangan objektif, bahwa koefisien jalur dari kinerja pegawai ke pelayanan kesehatan rawat inap, secara statistik adalah $t_{hitung} = 0.234 < t_{tabel} = 2.018$, bermakna artinya nilai t hasil hitung $< t$ tabel, jadi dapat disimpulkan jalur variabel kinerja pegawai terhadap variabel pelayanan kesehatan rawat inap tidak signifikan. Dari gambar juga dapat diketahui bahwa pengaruh variabel kinerja pegawai terhadap variabel pelayanan kesehatan rawat inap hanya sebesar 0,035. Secara struktur pengaruh kinerja pegawai terhadap pelayanan kesehatan rawat inap dapat digambarkan pada struktur jalur seperti berikut ini.

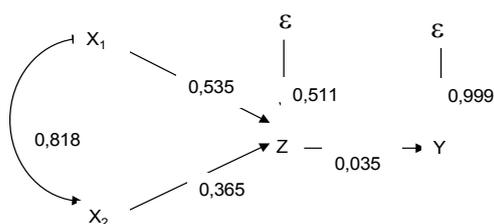


Sumber: Hasil olah data lapangan

Gambar 2. Struktur jalur pengaruh kinerja pegawai terhadap pelayanan kesehatan rawat inap

Dari struktur jalur tersebut dapat diartikan bahwa kinerja pegawai yang berada di Rumah Sakit Umum Undata, Rumah Sakit Umum Anutapura dan Rumah Sakit Umum Woodward tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pelayanan kesehatan rawat inap. Walaupun kinerja pegawai sudah baik, namun pengaruhnya terhadap pelayanan kesehatan rawat inap tidak bersifat signifikan. Karena besarnya pengaruh kinerja pegawai terhadap pelayanan kesehatan rawat inap adalah $(0,035 \times 0,035 \times 100\%) = 0,12\%$, sedangkan pengaruh faktor lain yang mempengaruhi terhadap pelayanan kesehatan rawat inap memiliki tingkat hubungan yang sangat kuat, yakni sebesar $(0,999 \times 0,999 \times 100\%) = 99,80\%$, dari hal tersebut menandakan bahwa faktor lain lebih mempengaruhi pelayanan kesehatan rawat inap dibandingkan dengan kinerja pegawai.

Berdasarkan kedua sub struktur jalur yang telah diungkapkan di atas, maka secara lengkap struktur jalur sesuai dengan penelitian yang dilakukan dapat disajikan pada gambar berikut ini:



Sumber: Hasil olah data lapangan

Gambar 3. Struktur Jalur Lengkap Hasil Penelitian

Sebagai salah satu cara dalam meningkatkan kinerja pegawai termasuk perawat di rumah sakit adalah dengan melaksanakan pengawasan dengan baik dan terarah, artinya pengawasan dilaksanakan dengan dua cara yakni pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Adapun pengawasan langsung dilakukan oleh pimpinan rumah sakit umum agar pimpinan rumah sakit umum secara langsung meninjau para perawat dalam melaksanakan pekerjaannya. Sedangkan pengawasan secara tidak langsung dilakukan untuk melengkapi pelaksanaan pengawasan yang dilakukan secara langsung. Pelaksanaan pengawasan tidak langsung adalah tinjauan hasil pekerjaan administrasi seperti laporan tertulis dan lisan, yang mana hasil dari pengawasan tidak langsung dimaksudkan untuk memperkuat pengawasan langsung. Akan tetapi kelemahan dari pengawasan tidak langsung ini adalah kecenderungan yang dilaporkan hanyalah hal-hal yang dapat menyenangkan pimpinan rumah sakit umum saja.

Korelasi antara pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung memiliki keterkaitan yang erat dalam pelaksanaan proses pengawasan, artinya dua proses pelaksanaan pengawasan tersebut tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya atau dengan kata lain bahwa pimpinan rumah sakit umum tidak dapat melaksanakan secara dominan salah satu dari proses pelaksanaan pengawasan. Karena kedua proses pelaksanaan pengawasan tersebut saling melengkapi antara satu dengan lainnya, sehingga apabila lebih mengedepankan salah satu dari keduanya maka pelaksanaan pengawasan dapat dikatakan cacat atau diperkirakan pengawasan tidak dapat berfungsi dengan baik.

Kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh pimpinan rumah sakit umum seyogianya akan memberikan dampak positif di lingkungan pekerjaan dan organisasi seperti terciptanya hubungan emosional yang baik antara pimpinan rumah sakit umum dan para perawat, sehingga dengan adanya kedekatan hubungan tersebut akan dapat meringankan beban pekerjaan dan pelaksanaan pekerjaan lebih efektif, disamping itu juga pimpinan rumah sakit umum akan dapat mengetahui permasalahan ataupun kendala yang dihadapi oleh para perawat dalam pelaksanaan tugas, sekaligus juga akan mengetahui sejauhmana pekerjaan yang dilakukan oleh para perawat, serta prestasi kerja yang telah dihasilkan oleh para perawat.

Oleh karena itu, efektivitas pengawasan sangat ditentukan oleh kualitas pimpinan rumah sakit umum. Kedudukan pimpinan rumah sakit umum merupakan seorang pimpinan organisasi yang kompetibel dan memiliki pandangan jauh ke depan, dengan memperhatikan perkembangan zaman yang terus berubah dengan mempengaruhi perubahan pola kerja organisasi yang dipimpinnya, serta dapat berkedudukan sebagai pengayom dan pembina bawahan yang baik, dan mampu

berpikir secara menyeluruh maupun konseptual sehingga mampu berpikir bagi sistem karir sekaligus penghargaan prestasi kerja perawat yang berada di rumah sakit umum.

2. Kinerja Pegawai dan Pelayanan Kesehatan

Kenyataan bila masih terdapat kinerja perawat yang belum melaksanakan pelayanan kesehatan rawat inap yang baik, sehingga pelayanan kesehatan rawat inap dirasakan masih kurang memuaskan pasien memang perlu untuk dicermati, bahwa pada kenyataannya para perawat yang bertugas di rumah sakit umum bukan saja mengerjakan secara spesifik pelayanan kesehatan rawat inap pada pasien, namun para perawat juga mengerjakan berbagai pekerjaan diluar tugas utama mereka, seperti melakukan kebersihan ruangan (*cleaning service*) yang seharusnya menjadi tugas bagi petugas kebersihan rumah sakit umum, dan juga melaksanakan kegiatan administrasi, untuk kegiatan administrasi memang sudah semestinya menjadi tugas perawat, akan tetapi dengan kurangnya tenaga perawat yang bertugas terkadang tugas administrasi agak terbengkalai. Disinilah kerumitan pelaksanaan tugas perawat dimana harus menyelesaikan tugas-tugas administrasi maupun laporan serta pada waktu yang hampir bersamaan harus segera melakukan tindakan pelayanan kesehatan pada pasien.

Disamping itu, status kepegawaian bagi para perawat yang bertugas di bagian rawat inap terasa kurang mendukung untuk tercapainya pelayanan kesehatan rawat inap yang baik, misanya saja dengan status perawat yang masih sebagai tenaga honorer, bahkan ada perawat yang status kepegawaiannya sebagai tenaga sukarela, ataupun dengan status sebagai perawat kontrak yang mendapatkan gaji masih kurang layak untuk pekerjaan yang penuh dengan resiko dan tanggung jawab yang besar. Oleh sebab itu status kepegawaian perawat yang masih belum jelas juga sedikit banyak turut mempengaruhi kinerjanya.

Perawat yang bertugas dengan status kepegawaiannya belum sebagai pegawai tetap, tentunya hal tersebut secara spikis menjadi pemicu minimnya kinerja mereka, kurangnya kinerja perawat juga didukung oleh masih kurangnya kesejahteraan perawat, serta masih lambannya informasi yang diperoleh mengenai dunia kesehatan khususnya mengenai keperawatan yang sangat penting dalam pengembangan kemampuan melaksanakan tugas. Jumlah tenaga perawat yang masih kurang juga menjadi faktor penyebab masih rendahnya kinerja perawat yang ada di rumah sakit umum, sehingga jumlah para perawat tidak sebanding dengan pekerjaan yang dilakukan, dimana frekuensi pekerjaan yang dilakukan lebih banyak dari jumlah perawat yang ada.

Permasalahan tersebut akan dapat teratasi jika setiap perawat dengan kondisi yang masih serba kekurangan tetap memiliki komitmen yang kuat untuk memelihara eksistensinya sebagai pekerja yang profesional dengan dorongan kemanusiaan, serta penghayatan terhadap nilai-nilai profesi perawat itu sendiri dan penghargaan terhadap

hak pasien sebagai manusia hamba Tuhan yang harus dihargai, yang dibarengi dengan kepedulian, ketulusan, dan keikhlasan dalam memberikan pelayanan kesehatan rawat inap yang terbaik.

SIMPULAN

Pengawasan yang dilaksanakan pimpinan rumah sakit umum merupakan suatu hal yang penting, selain pelaksanaan perencanaan, menggerakkan dan organisasi. Pelaksanaan pengawasan merupakan upaya untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan, sebab antara perencanaan dan pengawasan merupakan dua hal yang penting bagi organisasi. Disamping itu, pengawasan merupakan upaya menselaraskan seluruh sumber daya yang ada dalam organisasi rumah sakit umum.

Disisi lain pengawasan berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai, hal ini menandakan bahwa pengawasan merupakan salah satu cara bagi pimpinan rumah sakit umum dalam meningkatkan kinerja perawat, sebab saat pelaksanaan pengawasan terdapat kontak langsung antara pimpinan rumah sakit umum dan para pegawai, sehingga pimpinan rumah sakit umum dapat mengetahui secara langsung pekerjaan para pegawai serta pencapaiannya. Disamping itu pengawasan diperlukan menurut kebutuhan keadaan dan kebaikan kerja, sehingga pelaksanaan pengawasan dari pimpinan rumah sakit umum menjadi penting karena memiliki efek psikologis yang besar bagi para pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya.

Pelaksanaan pengawasan dapat dilakukan secara langsung dan dapat pula dilakukan secara tidak langsung. Kedua pelaksanaan pengawasan tersebut adalah dua komponen yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan lainnya, dengan kata lain bahwa pelaksanaan pengawasan tidak dapat dilakukan secara dominan satu hal saja, sebab ke dua komponen pengawasan tersebut saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya, yakni hasil pengawasan tidak langsung dapat dilengkapi dengan pengawasan langsung, demikian pula sebaliknya. Pengawasan yang baik adalah pengawasan yang dapat melaksanakan dua komponen sekaligus yakni pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung, sehingga bila salah satu komponen pengawasan tidak dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya maka pengawasan tidak berfungsi dengan optimal.

Adapun kinerja pegawai kurang berpengaruh terhadap pelayanan kesehatan rawat inap. Hal ini disebabkan kurangnya tenaga pegawai atau perawat yang berada di rumah sakit umum,serta frekuensi pekerjaan para perawat lebih banyak dari jumlah perawat itu sendiri. Disamping itu, berbagai faktor lain juga turut mempengaruhi kurang maksimalnya kinerja perawat, seperti status kepegawaian perawat, kesejahteraan dan gaji yang masih perlu untuk diperbaharui kembali, sehingga kondisi tersebut akan berdampak pada pelaksanaan pelayanan kesehatan rawat inap.

DAFTAR PUSTAKA

- Dwiyanto, A. (1995). *Penilaian Kinerja Organisasi Pelayanan Publik*, Yogyakarta: Fisipol UGM.
- _____, (2002). *Reformasi Birokrasi Publik Di Indonesia, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Harahap, S.S. (2000). *Sistem Pengawasan Manajemen*, Jakarta: Pustaka Quantum.
- Napitupulu, P. (2007). *Pelayanan Publik dan Customer Statisfaction*. Bandung: PT. Alumni.
- Ndraha, T. (2008). *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta : Bineka Cipta.
- Prawirosentono, S. (1999). *Kebijakan Kinerja Karyawan*, Yogyakarta: BPFE.
- Sabarguna, H. dan Boy S. (2004). *Manajemen Operasional Rumah Sakit*, Yogyakarta: Konsorsium Rumah Sakit Islam Jateng – DIY.
- Siagian, S.P. (1989). *Filsafat Administrasi*, Jakarta: Haji Masagung.
- Sugiyono. (2001). *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung: Alfabeta.
- _____, (2003). *Statistika Untuk Penelitian*, Bandung: Alfabeta

MODEL PENDIDIKAN MULTIKULTURAL PADA PESANTREN TRADISIONAL DI KOTA TASIKMALAYA DALAM MENCEGAH ANCAMAN RADIKALISME

Akhmad Satori dan Wiwi Widiastuti
Jurusan Ilmu Politik, Universitas Siliwangi
E-mail: akhmadstori@unsil.ac.id,

ABSTRAK. Penelitian ini menjelaskan mengenai model pendidikan multikultural pada Pesantren tradisional Nahdatul Ulama di Kota Tasikmalaya. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi tawaran model pendidikan multikultural agar dapat diaplikasikan di komunitas masyarakat lainnya terutama dalam mencegah ancaman radikalisme. Dengan menggunakan metode kualitatif, didapatkan hasil penelitian sebagai berikut; *Pertama*, Pola internalisasi tradisi di pondok pesantren sangat di pengaruhi oleh nilai-nilai *Ahlussunah wal jamaah* (ASWAJA), penerapan prinsip *tawasut, tasammuh, taadul* ditanamkan pada pendidikan baik di pesantren maupun di madrasah formal di tingkat pertama dan di lanjutkan pada tahap selanjutnya, *Kedua*, Pola transformasi dimensi multikultural di Pendidikan Pesantren mempunyai ciri khas memberikan pengetahuan mengenai ilmu alat/metode, sebagai kunci untuk membaca dan memahami ilmu agama yang lebih mendalam, hal ini dikarenakan pemahaman mengenai ajaran agama di landasi oleh pemahaman metodologis terhadap ilmu. Pada tingkat lebih lanjut pengajaran mengenai *ushul fiqh* maupun Al-Qur'an dan Hadits harus terintegrasi. *Ketiga*, respon dan penerimaan terhadap ajaran baru di pesantren selalu dilakukan melalui berbagai aktifitas dialogis, seperti *bathsul masaail*, menjadikan penerimaan pesantren terhadap nilai multikultural lebih terbuka.

Kata Kunci: Internalisasi, Pendidikan Multikulturalisme, Pesantren Tradisional, Radikalisme

MULTICULTURAL EDUCATION MODEL IN TRADITIONAL PESANTREN IN TASIKMALAYA TO PREVENT THE THREAT OF RADICALISM

ABSTRACT. This research explains the multicultural education model at the traditional Pesantren Nahdatul Ulama in Tasikmalaya City. This research expected to gives to offer a multicultural education model so it can be applied in other communities especially in preventing the threat of radicalism.. By using qualitative methods, the following research results are obtained; *First*, the pattern of internalization of traditions in pesantren is strongly influenced by the values of *Ahlussunah wal jamaah* (ASWAJA), the application of the principle of *tawasut, tasammuh, taadul* is implanted in education both in pesantren and in formal madrasah in the first level and in the next, The pattern of multicultural dimension transformation in Pesantren Education has the characteristic of providing knowledge of the science of methods, as the key to read and comprehension the deeper knowledge of religion, this is because the comprehension of religious teachings is base on the methodological understanding of science. At a further level the teaching about *ushul fiqh* as well as the *Qur'an* and *Hadith* must be integrated. *Third*, the response and acceptance of new teachings in pesantren is always done through various dialogical activities, such as *bathsul masaail*, makes acceptance of pesantren to the value of multicultural more open.

Key words: Internalization, Multiculturalism Education, Traditional Pesantren, Radicalism

PENDAHULUAN

Praktek kekerasan yang mengatasnamakan Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan yang disebabkan gerakan yang bersifat radikal sampai terorisme sangat marak terjadi khususnya awal munculnya reformasi sampai dengan saat ini. Praktek kekerasan ini memperlihatkan adanya tanda-tanda perpecahan bangsa yang nyata terlihat. Kasus konflik yang terjadi beberapa tahun terakhir di papua, poso, ambon, sampai aksis teror bom seperti yang terjadi di Bali, Kuningan Jakarta telah memprihatinkan.

Di tingkat global, munculnya gerakan *Islamic State of Irak and Syam* (ISIS), di yakini bersumber dari pemahaman yang radikal mengenai ajaran agama Islam yang memberikan ancaman terhadap proses keberagaman, bukan hanya dapat meningkatkan intensitas konflik antar agama, namun juga berdampak pada ketegangan dalam intra agama sekalipun. Ancaman

kelompok radikal ISIS semakin terasa menguat di Indonesia, dapat membahayakan proses kerukunan berbangsa dan bernegara dan pada gilirannya akan mengancam keutuhan Negara Republik Indonesia.

Embrio radikalitas yang bergerak melalui gerakan massa, telah masuk dan hadir dalam masyarakat kita, semuanya ini jelas menunjukkan betapa pemahaman agama sebagian masyarakat kita masih diwarnai oleh watak intoleran dan eksklusif, yang bisa saja disampaikan dalam ruang publik, semisal sekolah, pesantren atau di perguruan tinggi. Untuk itu, pendidikan agama berbasis multikultural hadir sebagai inovasi dan reformasi yang integral dan komprehensif dalam muatan pendidikan agama; memberi konstruk pengetahuan baru tentang agama-agama yang bebas prasangka, rasisme, bias, dan stereotip. Pendidikan agama berbasis multikultural memberi pengakuan akan pluralitas, saran belajar untuk perjumpaan lintas batas, dan mentransformasi indoktrinasi menuju dialog. (Zakiyuddin, 2005 : 75)

Fakta sejarah telah membuktikan bahwa pondok pesantren merupakan institusi pendidikan yang sangat fungsional. Pesantren mampu memberi jawaban terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat, khususnya tingkat bawah. Pesantren juga mampu mempertahankan eksistensinya meskipun perubahan zaman berjalan dengan pesat. Dunia pesantren sangat kental dengan nilai, pemikiran dan kehidupan yang sederhana, kejujuran, toleran (*tasamuh*), moderat, (*tawasuth*), seimbang dengan faham inklusifitas (*infithahiyah*) dan pluralitas (*ta'addudiyah*). Nilai-nilai tersebut menempatkan pesantren menjadi *ummatan wasathan* (ummat yang moderat). Nilai dan pemikiran yang ditanamkan dalam pendidikan pesantren akan sangat membantu dalam proses deradikalisasi agama dalam rangka penanggulangan terorisme.

Berangkat dari latar belakang penelitian di atas, peneliti menganggap pentingnya untuk mengetahui dan mengkaji model Pendidikan multikultural yang dipraktikkan di kalangan Pondok pesantren khususnya yang berbasis tradisional di Tasikmalaya, Jawa Barat. Oleh karena itu, peneliti mendefinisikan pengkajian model pendidikan multikultural pesantren dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut: Bagaimanakah pola internalisasi pemahaman nilai dan tradisi pesantren? dan bagaimana pola transformasi dimensi pendidikan multikultural di pesantren tradisional dalam mencegah faham radikal?

Urgensi Kajian Pendidikan Multikulturalisme di Pesantren

Tasikmalaya yang dikenal sebagai kota santri dibuat tidak nyaman dengan opini tentang Islam yang diidentikkan dengan terorisme. Terlebih mayoritas penduduk di Tasikmalaya ini adalah Islam dan di Tasikmalaya ini juga terdapat lebih dari 700 pondok pesantren yang berdiri sebagai lembaga pendidikan. Stigma pesantren sebagai institusi yang memproduksi kekerasan dan radikalisme menguat ketika ada beberapa santri yang diindikasikan terlibat dalam jaringan terorisme. Fenomena kekerasan, radikalisme hingga terorisme inilah yang pada akhirnya memunculkan ide untuk berupaya menanamkan kembali nilai-nilai persatuan dan saling kerjasama walaupun kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku, adat dan agama yang berbeda-beda. Upaya ini dimaksudkan agar keberadaan konflik-konflik yang berbau SARA dapat diminimalisir.

Berkaca dari fenomena diatas, kegiatan pendidikan di Indonesia dituntut untuk memiliki kepekaan menghadapi arus globalisasi dan gelombang demokratisasi yang menuntut adanya pengakuan perbedaan dan Hak Asasi Manusia. Upaya itu ditawarkan melalui pendidikan multikulturalisme. Pendidikan multikulturalisme diharapkan menjadi sarana dalam meminimalisir dan memperbaiki citra kota santri yang bebas dari *image* terorisme. Dalam konteks inilah peneliti menganggap penelitian ini menemukan urgensinya.

Menurut Mohammad Jamaluddin (2007) Pondok pesantren yang masih mempertahankan nilai-nilai tradisional, menyimpan potensi kesadaran multikultural. Wacana lokal dan rasionalitas lokal selama ini sudah diyakini menjadi *custom* atau tradisi pesantren. Demikian pula, konsep kemajuan bagi pesantren ini juga bertitik tolak dari tradisi, sehingga tidak mengalami keterputusan sejarah (Jamaluddin, 2007).

Selanjutnya penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan satu sumbangan pemikiran, mengenai model pendidikan yang tepat dalam menangkal paham-paham radikal yang bersumber baik pada dangkalnya pemahaman keagamaan dan keberagaman, kekerasan atas nama agama, maupun tindakan yang lebih ekstrim yaitu terorisme yang belakangan ini menjadi momok bagi bangsa Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penggunaan metode ini untuk memperoleh data berupa deskripsi ucapan, tulisan, dan perilaku, serta penekanan pada aspek subjektif yang dapat diamati dari orang-orang (subjek) itu sendiri. (Moleong, 2005:5) teknik pengambilan data dengan menggunakan *purposive sampling* dan untuk analisis data digunakan teknik analisis data interaktif. (Sugiyono, 2006:277-284)

Dengan lokasi penelitian di tiga pesantren tradisional Nahdatul Ulama di Kota Tasikmalaya yaitu Ponpes *Riyadhatul Ulum Wa Da'wah*, Ponpes *Munawwar Al Jarnauziyah* dan Ponpes *Bustanul Ulum*, peneliti ini memfokuskan pada model pendidikan multikulturalisme yang terbentuk di 3 (tiga) pesantren NU di Tasikmalaya dengan sub fokus penelitiannya adalah: (1) pola internalisasi nilai-nilai multikultural di pesantren tradisional, (2) pola transformasi dimensi pendidikan multicultural di pesantren.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Acuan Studi Pendidikan Multikulturalisme

Studi multikulturalisme merupakan salah satu kajian ilmu politik. Studi ini sangat urgen pasca berakhirnya era kolonialisme dan imperialisme. Menyaksikan fenomena pada abad ke-20, studi tentang sistem politik, institusi pemerintahan, pemilihan umum, partai politik, dan parlemen masih mendominasi kalangan ilmuwan politik. Sementara kajian budaya politik, politik identitas, politik multikulturalisme, gender dan pendidikan multikulturalisme mulai banyak diminati, sebelumnya kajian ini cenderung menjadi kajian ilmuwan sosiologi, antropologi dan kajian ilmu Sejarah. (Satori, 2014) Dalam aspek kajian pendidikan multikultural, beberapa ilmuwan seperti, Paulo Freire, James Bank, Hilliard Cooper, Stavenrager, maupun H.R Tilaar mencoba mempelopori kajian kajian multikulturalisme dalam konteks pendidikan.

Kajian penelitian mengenai pendidikan multikulturalisme yang akan dilakukan ini, sebenarnya sudah cukup banyak dengan perspektif dan latar belakang keilmuan yang beragam. Paulo Freire merupakan salah satu penulis penting dan berpengaruh mengenai teori dan praktik pendidikan kritis abad ke-20. Fokusnya pada peran pendidikan dalam perjuangan kaum tertindas dicirikan dalam meramu dan mengawinkan konsep-konsep pendidikan yang sangat praktis untuk dikerjakan dalam rangka menuntaskan kebodohan di Brasil. Dalam kajiannya Freire menyatakan pendidikan bukan merupakan “menara gading” yang berusaha menjauhi realitas sosial dan budaya. Pendidikan menurutnya harus mampu menciptakan tatanan masyarakat yang terdidik dan berpendidikan, bukan sebuah masyarakat yang hanya mengagungkan prestis sosial sebagai akibat kekayaan dan kemakmuran yang dialaminya. (Ardiansyah, 2008: 4) Dari pendapat Freire tersebut dapat di fahami bahwa pendidikan multikultural bisa di maknai sebagai pendidikan untuk/tentang keragaman kebudayaan dalam merespon perubahan demografis dan kultural lingkungan masyarakat tertentu atau bahkan dunia secara keseluruhan.

Definisi diatas senada dengan kajian Cooper Hilliard, menurut Hilliard, pendidikan multikultural (*multicultural education*) merupakan respon terhadap perkembangan keragaman populasi sekolah, sebagaimana tuntutan persamaan hak bagi setiap kelompok. Dalam dimensi lain, pendidikan multikultural merupakan pengembang kurikulum dan aktivitas pendidikan untuk memasuki berbagai pandangan, sejarah, prestasi, dan perhatian terhadap terhadap orang-orang non Eropa (Hilliard, 1991-1992) dalam el Mahdy (2012).

Satu penelitian lain yang penting dalam kajian ini adalah penelitian dari H.A.R. Tilaar (2004) Tilaar menjelaskan pendidikan multikultural merupakan proses pengembangan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran, pelatihan, proses, perbuatan, dan cara-cara mendidik yang menghargai pluralitas dan heterogenitas secara humanistik. Pendidikan adalah sebuah konsep, ide atau falsafah sebagai suatu rangkaian kepercayaan (*set of believe*) dan penjelasan yang mengakui dan menilai pentingnya keragaman budaya dan etnis di dalam membentuk gaya hidup, pengalaman sosial, identitas pribadi, kesempatan-kesempatan pendidikan dari individu, kelompok maupun negara. Tilaar mengemukakan gagasan mengenai pendidikan multikultural adalah sebagai tawaran konsep bagi dunia pendidikan Indonesia ke depan, khususnya pendidikan yang bercirikan Islam yang ada di Indonesia dalam hal ini adalah madrasah (Tilaar, 2004).

Secara etimologis, istilah pendidikan multicultural terdiri dari dua kata, yaitu pendidikan dan multicultural. Kata “Pendidikan” menurut Ainurrofiq (2003:100) dalam Aly (2011:104-105) diartikan sebagai proses pengem-

bangun sikap dan tatalaku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran, pelatihan, proses, pembuatan, dan cara cara mendidik. Sedangkan istilah “multikultural” secara umum di artikan sebagai keragaman budaya sebagai bentuk dari keragaman latar belakang seseorang. Dengan demikian secara etimologis pendidikan multikultural didefinisikan sebagai pendidikan yang memperhatikan keragaman budaya para peserta didik. (Aly, 2011:105).

Adapun secara terminologis, definisi pendidikan multikultural sangat beragam rumusnya, namun secara umum di kelompokkan menjadi dua kategori; 1) definisi yang dibangun berdasarkan prinsip demokrasi dan kesetaraan, dan keadilan; serta 2) definisi yang dibangun berdasarkan sikap social, yaitu: penghargaan, pengakuan dan penerimaan.

Pendidikan multikultural inilah yang akan mengantarkan dan membangun manusia Indonesia mempunyai jiwa nasionalisme dan akhirnya dapat mempertahankan keutuhan bangsa dari ancaman disintegrasi. Apabila diwujudkan oleh pendidikan bercorak keagamaan, maka pendidikan multikultural diyakini dapat mengantarkan peserta didik berpaham moderat dan inklusif. Menciptakan masyarakat semacam ini merupakan hal penting bagi bangsa Indonesia yang diketahui penduduknya multi-etnis, multi-agama, dan plural. (Marzuki, dkk., 2011:2).

Beberapa literatur awal sebagai penelitian pendahuluan dan acuan dalam penelitian ini seperti, Penelitian yang dilakukan oleh Abdullah Aly (2012) dengan judul “*Model Kurikulum Pendidikan Islam Multikultural Di Pondok Pesantren Modern Islam Assalam Surakarta.*”. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa untuk mempromosikan nilai-nilai multikultural, disarankan kepada pimpinan, bidang kurikulum, kepala sekolah/madrasah, dan para guru di lingkungan pesantren pada umumnya dan PPMI Assalaam Surakarta melalui pengembangan model kurikulum pesantren yang menghindari nilai-nilai yang kontraproduktif terhadap nilai-nilai multikultural seperti nilai diskriminasi dan ketidakadilan, kemudian tidak menerapkan kebijakan yang diskriminatif dan tidak adil.

Selain penelitian terdahulu di atas, salah satu acuan utama penting dalam penelitian ini adalah kajian dan penelitiannya James Banks (1994) tentang konsep pendidikan multikulturalisme, Bank menjelaskan bahwa pendidikan multikultural memiliki lima dimensi yang saling berkaitan diantaranya adalah sebagai berikut;

1. *Content integrations in instructional* adalah mengintegrasikan berbagai budaya dan kelompok untuk mengilustrasikan konsep mendasar, generalisasi dan teori dalam mata pelajaran/disiplin ilmu
2. *The Knowledge Construction Process in instructional*, adalah membawa siswa untuk memahami implikasi budaya ke dalam sebuah mata pelajaran (disiplin)

3. *An Equity Paedagogy in instructional*, adalah menyesuaikan metode pengajaran dengan cara belajar siswa dalam rangka memfasilitasi prestasi akademik siswa yang beragam, baik dari segi ras, budaya, maupun sosial
4. *Training participation in instructional*, adalah melatih kelompok untuk berpartisipasi dalam kegiatan olah raga, berinteraksi dengan seluruh staf dan siswa yang berbeda etnis dan ras dalam rangka upaya menciptakan budaya akademik.
5. *Prejudice Reduction in instructional*, adalah mengidentifikasi karakteristik ras siswa dan menentukan metode pengajaran mereka.

Kerangka teoritis yang di kemukakan James Bank di atas, yang akan menjadi *tool of analysis* penelitian ini, seperti yang akan dijelaskan dalam tabel berikut ini:

Tabel 1. Dimensi Pendidikan Multikultural

Dimensi	Instruksi
<i>Content integrations</i>	Integrasi budaya
<i>The Knowledge Construction Process</i>	Konstruksi budaya dalam pengetahuan
<i>An Equity Paedagogy</i>	Metode pengajaran
<i>Training participation</i>	Interaksi dalam pengajaran
<i>Prejudice Reduction</i>	Identifikasi karakter

Sumber. James Bank (2004)

Pola Internasiasi Nilai Multikultural pada Pesantren Tradisional di Tasikmalaya

Pesantren merupakan institusi pendidikan asli produk Indonesia, yang mempunyai karakter dan ciri pendidikan yang khas yang dapat dibedakan dari sistem dan metodologi dengan institusi pendidikan yang lainnya. Pesantren dianggap sebagai model pendidikan yang menjalankan sistem tradisional, lembaga pendidikan tradisional, mempunyai sistem pengajaran tersendiri, mempunyai metode pendidikan dan kurikulum yang berbasis pada pengajaran Pesantren tradisional, meskipun sebagian besar pesantren saat ini sudah bertransformasi dengan model pendidikan modern, tetapi stereotipe tradisional masih melekat pada institusi pesantren.

James Banks (2004), menjelaskan pendidikan Multikultural yang berorientasi pada materi dapat dilakukan dengan mengintegrasikan nilai budaya multikultural kedalam kurikulum atau perencanaan pembelajaran. Untuk itu menurut Banks ada dua tahap yang harus dilakukan, antara lain: tahap penambahan (*additive level*) dan tahap perubahan (*transformative level*). Dalam tahap penambahan (*additive level*), pengembangan perencanaan pendidikan atau kurikulum dilakukan dengan cara menambahkan nilai, konsep dan multikulturalisme kedalam kurikulum yang sudah ada.

Penambahan (*additive level*) nilai diatas bisa dilakukan dengan memberikan pemahaman yang mendasar terhadap santri atau pelajar nilai-nilai budaya

multikulturalisme pada pendidikan pesantren, meskipun pada prinsipnya nilai nilai tersebut sudah merupakan tradisi yang biasa dilakukan di kalangan pesantren. Proses ini mencakup proses internalisasi nilai dan tradisi pesantren bagi santri.

Internalisasi merupakan suatu proses penanaman nilai tentang budaya. Dalam penanaman dan penumbuhkembangan nilai tersebut dilakukan melalui berbagai didaktik-metodik pendidikan dan pengajaran, seperti pendidikan, pengajaran indoktrinasi, *brain-washing*, dan lain sebagainya. Internalisasi yaitu proses penyerapan nilai-nilai dan norma-norma oleh santri; proses belajar untuk beradaptasi terhadap keadaan, kondisi, dan lingkungan. Sedangkan kepribadian yaitu bahwa seseorang mempunyai beberapa ciri watak yang diperlihatkannya secara lahir, konsisten, dan konsekuen dalam tingkah lakunya sehingga tampak bahwa individu tersebut memiliki identitas khusus yang berbeda dari individu-individu lainnya. Gejala ini tumbuh berangsur-angsur dalam keseharian santri diakibatkan oleh proses sosialisasi dan internalisasi. Selain itu, kepribadian seseorang juga dipengaruhi banyak hal.

Manfaat internalisasi adalah untuk pengembangan, perbaikan dan penyaringan dalam hal budaya. Dalam manfaat pengembangan memiliki manfaat sebagai pengembangan potensi seseorang untuk menjadi pribadi dan memiliki perilaku yang baik agar seseorang yang telah memiliki sikap dan perilaku yang mencerminkan budaya dan karakter khas pesantren.

Pesantren sebagai institusi pendidikan Islam akan lebih efektif melakukan penanaman nilai-nilai tradisi khas apabila santri melakukan enkulturasi penuh selama 24 jam, artinya santri melakukan aktifitas dan berada di pesantren sepanjang hari. Secara ideal jika santri pulang pada siang harinya sebagaimana sekolah pada umumnya, maka yang di dapatkan di rumah dan lingkungannya tidak boleh bertentangan dengan sekolah atau pesantrennya. Begitu pula dengan pesantren, dengan cara demikian pendidikan di pesantren akan berjalan efektif meskipun santri tidak menetap di pesantren. Namun demikian hal ini akan bergantung kepada tingkat kepatuhan santri terhadap nilai yang di terapkan. Proses ini memerlukan waktu yang cukup sehingga nilai-nilai tradisi pesantren dapat di terima santri secara utuh.

Pola internalisasi tradisi di pondok pesantren sangat di pengaruhi oleh nilai nilai *Ahlussunah wal jamaah* (ASWAJA), penerapan prinsip prinsip *tawasut, tasammuh, taadul* ditanamkan pada pendidikan baik di pesantren maupun di madrasah formal sejak tingkat pertama, melalui Kegiatan rutin pesantren dan dilanjutkan pada tingkat tingkat selanjutnya. Selain itu pembekalan nilai nilai moral melalui penanaman fondasi akhlakul karimah diintegrasikan kedalam sistem pendidikan pesantren tradisional.

Selanjutnya dalam tahap Transformatif level menurut Banks, santri melihat konsep-konsep dari sejumlah perspektif budaya, etnik dan agama secara kritis. Dalam level ini memerlukan pemasukan perspektif-perspektif, kerangka-kerangka referensi dan gagasan-gagasan yang akan memperluas pemahaman pembelajar tentang sebuah ideakan dijelaskan dalam pola transformasi dimensi pendidikan multikultural.

Untuk mencapai tujuan transformatif pendidikan multikultural dikembangkan dalam lima dimensi, (Banks, 1997:69) Kelima dimensi akan dijelaskan dalam pola transformasi dimensi Multikultural.

Pola Transformasi Dimensi Pendidikan Multikultural di Pesantren

Seperti diuraikan sebelumnya, dalam frame teori Pendidikan Multikultural James Banks (2004) terdapat lima dimensi pendidikan multikultural yang dapat dilihat dalam transformasi pendidikan pesantren; *pertama* tahap *conten integration* atau integrasi budaya, pada tahap ini merupakan cara dengan mengambil contoh dari berbagai budaya dan kelompok untuk mengilustrasikan konsep-konsep kunci, prinsip, generalisasi dan teori di dalam kajian.

Pada tahap ini, santri diajarkan pada sikap pengembangan budaya pesantren yang merupakan integrasi dari pengembangan sikap saling menghargai, pengendalian diri, tolong menolong, kebersamaan dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dan melalui kerja sama yang saling menguntungkan, prasangka sosial yang berkembang dalam suatu kelompok keagamaan terhadap kelompok keagamaan lainnya dapat diminimalisasi. (Hernawan, 2017:84).

Kedua, The Knowledge Construction Process atau Konstruksi budaya dalam pengetahuan. Proses belajar dan mengajar di lingkungan pondok pesantren bukanlah sekadar menguasai ilmu-ilmu keagamaan, melainkan juga proses pembentukan pandangan hidup, budaya dan perilaku para santri itu nantinya setelah kembali dari pondok pesantren ke dalam kehidupan masyarakat. Sebaliknya, para kiai adalah mereka yang telah memiliki kesempurnaan pandangan. Dalam pengertian tasawuf, masjid pesantren yang terletak di tengah-tengah antara keduanya merupakan tempat “pertempuran moral” berlangsung di antara para santri, yang akan diubah perilakunya oleh kiai. (Wahid, 2007 : 131).

Telah dijelaskan bahwa proses internalisasi nilai pesantren di lakukan melalui pengamalan tradisi pesantren dalam kehidupan sehari hari, oleh karena itu para santri menikmati pembelajaran di dalam lembaga pesantren secara lues, tanpa batasan-batasan artifisial dan formal seperti usia dan latar belakang sosial lainnya. Proses seperti ini diharapkan dapat membantu santri memahami, menemukan, dan menentukan pola pikir santri yang terbuka dan egaliter.

Tahap *ketiga*, tahap *an equality of pedagogy* atau tahap metode pembelajaran. Pesantren tradisional memiliki sistem pembelajaran yang khas, sistem pembelajaran ini mempunyai karakteristik, terutama tidak menganut ketentuan-ketentuan formalistik dan prosedural yang ketat. Hal ini karena organisasi sistem pembelajaran itu sendiri tidak terbentuk sebagaimana mestinya.

Dalam pembelajaran di pondok pesantren konvensional tidak dijumpai komponen-komponen pembelajaran formal, seperti daftar santri (peserta) pengajian, daftar pelajaran, desain pembelajaran, media pembelajaran, dan tidak ada pula evaluasi hasil belajar. Mata ajaran yang diajarkan hanyalah ilmu-ilmu keagamaan terutama dari kitab-kitab abad pertengahan yang dikenal dengan kitab-kitab klasik/kuning (*al-kutub al-qadimah*). Metode pendekatan yang berkisar pada *sorogan*, *bandongan*, *setoran*, *muthalaah* dan *musyawarah*, *mudzakah* dan lain sebagainya.

Sorogan misalnya, berasal dari kata *sorog* (bahasa Jawa), yang berarti menyodorkan atau menyerahkan. Dalam kenyataannya, sorogan diterapkan dengan cara setiap santri menyodorkan kitab kajiannya di hadapan kyai atau asisten kyai, untuk selanjutnya sang kiai atau asistennya mengajar santri yang bersangkutan berdasarkan kitab yang disodorkannya itu.

Sistem dan metodologi pembelajaran konvensional yang dianut pesantren pada umumnya berkisar pada varian-varian metode baik itu individual maupun kolektif. Kedua metode tersebut baik pembelajaran individu maupun kolektif tidak berpengaruh terhadap konten atau materi ajar apa yang di sampaikan.

Pola Pendidikan Pesantren NU mempunyai ciri khas memberikan pengetahuan mengenai ilmu *alat / metode*, sebagai kunci untuk membaca dan memahami ilmu yang lebih mendalam, hal ini dikarenakan pemahaman mengenai ajaran agama di landasi oleh pemahaman metodologis terhadap ilmu. Pada tingkat lebih lanjut pengajaran mengenai ushul baik fiqh maupun Al-Quran dan Hadits harus terintegrasi.

Keempat, tahap interaksi dalam pengajaran, tahap ini sering disebut *culturally sensitive teaching strategies*, dalam tahap ini kiai memberikan cara mengajar agar membantu capaian pembelajaran santri dalam memahami pembelajaran di pesantren. Salah satunya melalui kegiatan Makesta (Masa Kesetiaan Anggota) yang merupakan Kegiatan yang dilaksanakan pesantren *bustanul ulum* dalam menerapkan nilai-nilai kepesantrenan yang di landasi oleh prinsip aswaja. Model Kegiatan ini di tekankan pada aspek kognitif aspek afektif dan psikomotorik yaitu gabungan antara pengajaran berbasis kurikulum, model pengalaman hidup dan pendidikan keterampilan bagi santri.

Kelima, Prejudice Reduction in instructional, adalah mengidentifikasi karakteristik ras siswa dengan memberdayakan budaya sekolah dan struktur sosial untuk memandang sekolah sebagai sistem sosial yang

kompleks, yang mencakup reformasi semua aspek pendidikan. Sebagai lembaga pendidikan yang inklusif, keberadaan pesantren juga tidak bisa dilepaskan dari pengaruh ajaran-ajaran baru yang berasal dari luar. Pesantren bukan merupakan institusi pendidikan yang *jumud* dan tidak berkembang, pesantren juga adaptif terhadap perubahan-perubahan yang terjadi seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan.

Doktrin aswaja yang menggunakan merupakan metode pesantren dalam menghadapi dan merespon perubahan tersebut. Penerimaan ajaran ajaran baru dengan tetap mempertahankan ajaran ajaran lama yang masih relevan, hanya saja ajaran ajaran baru tersebut tidak serta merta diterima, terdapat metodologi yang biasa di gunakan di kalangan pesantren NU. Dengan demikian pesantren akan bersifat terbuka terhadap perbedaan baik berupa inovasi maupun dalam hal keragaman ajaran dan pemikiran.

Donna M. Gollnick, dalam Aly (2011) menjelaskan bahwa sikap menerima, mengakui dan menghargai perbedaan dan keragaman ini diperlukan dalam kehidupan sosial di masyarakat majemuk. Dalam pandangannya Gollnick mengatakan bahwa penerimaan, pengakuan dan penghargaan terhadap keragaman laksana mosaik dalam suatu masyarakat. Dalam mosaik tersebut tercakup semua kebudayaan masyarakat yang lebih kecil yang membentuk terwujudnya masyarakat yang lebih besar.

Islam datang dalam lingkungan yang multikultural. Nabi Muhammad Saw banyak bersentuhan dengan kultur Mekkah yang saat itu kental dengan agama dinamisme yang dipeluk oleh kaum Yahudi, sehingga Islam mengajak umat atas dasar kesadaran bukan atas paksaan dalam menganut Islam. Pengakuan yang tinggi atas perbedaan dalam Islam menjadikan penyebaran Islam didasarkan atas kebebasan bukan pada paksaan. Islam menjadi agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan di saat kultur mekkah yang penuh dominasi kekuasaan pada masa jahiliyah. Islam menjadi besar dengan ditopang kebebasan untuk memeluk Islam (Azyumardi 2002:15).

Islam sangat menghargai keragaman, dalam pandangan Islam keragaman merupakan sebuah keniscayaan (*sunmatullah*) yang harus kita imani dan percayai adanya. Keragaman adalah kehendak Allah SWT melalui penciptaannya, melalui keberagaman makhluk ciptaannya baik di langit maupun di bumi, keragaman manusia dari segi warna dan bahasa, keragaman bangsa, keragaman syariat, sistem kehidupan dan keragaman pemikiran manusia, itu semua merupakan bukti bahwa keragaman merupakan suatu keniscayaan, oleh karenanya umat Islam harus mengakui, menerima dan menghargai keragaman tersebut. Mengingkari keragaman sama saja dengan mengingkari terhadap ciptaan Allah SWT, artinya sama saja dengan tidak beriman kepada Allah SWT.

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa ajaran Islam sangat menjunjung tinggi keragaman dan pluralitas.

Islam sangat menghargai perbedaan, karenanya Islam menjadi agama yang terbuka dan di terima hampir oleh seluruh wilayah dimana Islam sebar. Penerimaan Islam ini juga di rasakan oleh masyarakat Jawa pra Islam. Masyarakat Jawa pada saat itu yang kental dengan kebudayaan Hindu dan Budha secara perlahan menerma Islam sebagai agama baru, karena Islam sangat akomodatif dengan kebudayaan lokal, sebagaimana ajaran yang di sebar oleh wali songo yang mengadopsi budaya lokal dalam metode penyebaran agama Islam. Tidaklah mengherankan ketika sekarang, masih banyak ajaran Islam baik yang sifatnya ubudiah (ibadah), maupun muamalah (kemasyarakatan) yang masih diwarnai corak jawa.

Gambaran ajaran Islam diatas, menjelaskan bagaimana Islam bisa bertemu dengan tradisi. Secara teoritis pertemuan Islam dengan tradisi dapat terwujud dalam beberapa bentuk; *pertama*, akulturasi, dimaknai sebagai proses pembudayaan lewat pencampuran dua kebudayaan atau lebih yang saling bertemu satu sama lain. Terjadinya akulturasi atau penyatuan antara dua kebudayaan ini dihasilkan oleh kontak yang berkelanjutan seperti melalui kolonialisasi, perang, infiltrasi militer, migrasi, misi penyebaran agama (dakwah), perdagangan, pariwisata, media masa dan sebagainya. Akulturasi juga terjadi sebagai akibat pengaruh kebudayaan yang kuat dan bergensi terhadap kebudayaan yang lemah dan terbelakang, dan antara kebudayaan yang relatif setara. (Nurizzati, 2013)

Penerimaan terhadap ajaran ajaran baru di pesantren NU selalu di lakukan dengan berbagai aktifitas dialogis, seperti *bathsul masaail*, menjadikan penerimaan pondok pesantren NU terhadap multikultural lebih terbuka. Dapat disimpulkan bahwa model pendidikan di Pondok Pesantren NU telah memasukan nilai nilai multikulturalisme yang dapat mencegah ancaman radikalisme.

SIMPULAN

Dari Pembahasan penelitian sementara menunjukan bahwa *pertama*, Pola internalisasi tradisi di pondok pesantren sangat di pengaruhi oleh nilai nilai *Ahlussunah wal jamaah* (ASWAJA), penerapan prinsip prinsip *tawasut, tasammuh, taadul* ditanamkan pada pendidikan baik di pesantren maupun di madrasah formal di tingkat pertama, *Kedua*, Pola transformasi dimensi multicultural pada Pendidikan Pesantren Nu mempunyai ciri khas memberikan pengetahuan mengenai ilmu *alat / metode*, sebagai kunci untuk membaca dan memahami ilmu ilmu yang lebih mendalam, hal ini dikarenakan pemahaman mengenai ajaran agama di landasi oleh pemahaman metodologis terhadap ilmu. Pada tingkat lebih lanjut pengajaran mengenai ushul baik fiqh maupun Al-Quran dan Hadits harus terintegrasi. Ketiga, penerimaan terhadap ajaran ajaran baru di pesantren NU selalu di

lakukan dengan berbagai aktifitas dialogis, seperti *bathsul masaail*, menjadikan penerimaan pondok pesantren NU terhadap multiKultural lebih terbuka. Dapat disimpulkan bahwa model pendidikan di Pondok Pesantren NU telah memasukan nilai nilai multikulturalisme yang dapat mencegah ancaman radikalisme.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. (2012) Model Kurikulum Pendidikan Islam Multikultural Di Pondok Pesantren Modern Islam Assalam Surakarta, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.
- Ainurrofiq, D. (2003), “Emoh” Sekolah Menolak “Komersialisasi Pendidikan” dan “Kanibalisme Intelektual”, Menuju Pendidikan Multikultural, Yogyakarta: INSPEAL Press.
- Ardiansyah, M.A., “Konsep Pendidikan Multikultural”, <http://alumnigontor.blogspot.com/2008/04/konsep-pendidikan-multikultural.html>. Diakses 11 Februari 2015
- Azyumardi, A. (2002). Paradigma Baru Pendidikan Nasional: Rekonstruksi Dan Demokratisasi, Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Banks, J.A. (2004). *An introduction to Multicultural Education*, Boston-London: Allyn and Bacon Press.
- _____, (2007). *Educating Citizens In Multicultural Society*. Second edition. New York: Teachers College Columbia University.
- El Mahdy, Muhaimin. (2015). “Multikulturalisme dan Pendidikan Multikultural” dalam <http://artikel.us/muhaemin6-04.html>, diakses 27 Mei 2015.
- Freire, P. (1984) Pendidikan Sebagai Praktek Pembebasan, terj. Alois A. Nugroho, Jakarta: Penerbit Gramedia.
- Hernawan, W. (2017). Prasangka Sosial Dalam Pluralitas Keberagamaan Di Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan Jawa Barat, *Sosiohumaniora*, 19 (1), 77 - 85
- Jamaluddin, M. (2007). Pesantren dan Pendidikan Multikulturalisme, <http://buntetpesantren.org/index.php>. diakses 15 Oktober 2016
- Moleong, L.J. (2005). Metodologi Kualitatif Edisi Revisi, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Marzuki, M.M., dan Miftahuddin. (2010). Tipologi Perubahan Dan Model Pendidikan Multikultural Pesantren Salaf. Laporan Penelitian Strategis Nasional Tahun Anggaran 2010, Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta.
- Nurizzati, Y. (2013). Penerapan Pendidikan Multikultural di Pondok Pesantren, makalah. dipresentasikan di Majelis Ta’lim Al-Imaroh Pesantren Buntet, diakses 30 Mei 2015
- Satori, A. dan Subhan, A. (2014). “Kepemimpinan Masyarakat Majemuk (Studi Model Kewenangan, Pembagian Peran, dan relasi Kuasa Pemimpin Tradisional di Dusun Susuru, Panawangan, Ciamis”, *Proceeding, Seminar Nasional Dies Natalis FISIP Unsoed tahun 2014*, 100-111
- Sugiyono. (2006). Metode Penelitian Kuantitatif. Bandung: Alfabeta.
- Tilaar, H.A.R. (2004). Perubahan Sosial dan Pendidikan: Pengantar Pedagogik Transformatif untuk Indonesia, Jakarta: Grasindo.
- Wahid, A. (2007). Gusdur, Menjawab Kegelisahan Rakyat, Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Zakiyuddin, B. (2005). Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural, Jakarta: Erlangga.

STRATEGI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN HUTAN TANAMAN RAKYAT DI KPH GEDONG WANI

Irwan Sukri Banuwa, Rahmat Safe'i, Indra Gumay Febryano dan Dian Novayanti

Jurusan Kehutanan dan Magister Kehutanan Universitas Lampung

Email: diannova_nova@ymail.com

ABSTRAK. Hutan Tanaman Rakyat (HTR) merupakan program dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengurangi laju kerusakan hutan dan mengentaskan kemiskinan masyarakat. Program ini membutuhkan partisipasi dari masyarakat untuk mengelola hutan produksi dan mengembalikan fungsinya. Tujuan penelitian ini adalah :1) mengetahui tingkat partisipasi masyarakat terhadap hutan tanaman rakyat, 2) Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat, dan 3) Membangun strategi implemtasi kebijakan HTR. Data dianalisis dengan analisis deskriptif, regresi berganda, SWOT, dan QSPM. Data dalam penelitian ini berasal dari hasil wawancara terhadap 95 responden yang berasal dari 5 desa penerima IUPHHK HTR di KPH Gedong Wani. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat terhadap HTR di KPH Gedong Wani termasuk kategori sedang. Faktor-faktor yang berpengaruh nyata terhadap tingkat partisipasi adalah manfaat, sosialisasi, tenaga pendamping, dan dukungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diperlukan strategi implementasi kebijakan hutan tanaman rakyat, yaitu dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas penyuluh.

Kata kunci: strategi, Hutan Tanaman Rakyat (HTR),Kerusakan Hutan

POLICY IMPLEMENTATION STRATEGY OF COMMUNITY PLANTATION FOREST IN KPH GEDONG WANI

ABSTRACT. *Community Plantation Forest (HTR) is a program of the Ministry of Environment and Forestry to reduce the rate of forest destruction and alleviate the poverty of the community. This program requires the participation of communities to manage production forests and restore their functions. The objectives of this research are: 1) to know the level of people's participation in community forest plantations, 2) to know the factors that influence the level of community participation, and 3) to develop the strategy of implemtation of HTR policy. Data were analyzed by descriptive analysis, multiple regression, SWOT, and QSPM. The data in this study comes from interviews of 95 respondents from 5 villages receiving IUPHHK HTR in KPH Gedong Wani. The results showed that the level of community participation on HTR in KPH Gedong Wani included in medium category. Factors that significantly affect the level of participation are benefits, socialization, co-workers, and support. The result of the research shows that it is necessary to implement the policy strategy of community forest plantation by improving the quality and quantity of extension agent.*

Key word: strategy, Community Plantation Forest (HTR, Forest Destruction

PENDAHULUAN

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Gedong Wani merupakan salah satu otoritas pengelolaan hutan di Provinsi Lampung yang seluruh kawasannya telah diokupasi oleh masyarakat perambah. Di dalam kawasan seluas 30.324 hektar kini tidak dapat lagi dijumpai areal yang berhutan melainkan berupa 70,6% pertanian lahan kering; 13,71% kebun campuran; 8,62% pemukiman; 6,72% lahan terbuka dan 0,28% berupa industri skala besar pengolahan hasil pertanian seperti kepala sawit, tapioka dan lain-lainnya. Bahkan di kawasan hutan produksi ini tercatat ada 39 desa definitif dalam 11 kecamatan definitif lengkap dengan fasilitas umum termasuk jaringan jalan beraspal *hotmix*, kantor desa, kantor camat, sekolah dasar sampai perguruan tinggi, puskesmas, pasar, tempat ibadah, polsek, koramil dan sebagainya (Dishut Provinsi Lampung, 2013). Permasalahan ini berakar dari pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat. Pertambahan penduduk menuntut tercukupinya kebutuhan pangan, kebutuhan kayu bakar, kebutuhan kayu pertukangan, dan tempat pemukiman. (Senoaji, 2011).

Dinas Kehutanan Provinsi Lampung (Dishut Prov) Lampung sudah lama tidak mampu mengusir perambah yang sudah tinggal selama bertahun-tahun di kawasan KPH Gedong Wani tersebut. Untuk mengusir perambah merupakan pekerjaan berat dan sangat mahal yang dapat dikatakan hampir tidak mungkin apalagi jika dipersyaratkan tanpa ada gejolak sosial. Namun di sisi lain otoritas Dishut Provinsi Lampung mempunyai tugas untuk melestarikan hutan.

Kartodiharjo (2007) berpendapat bahwa kerusakan hutan tidak mungkin dapat dihentikan tanpa dibangunnya kondisi yang memungkinkan tumbuhnya kepedulian masyarakat terhadap hutan. Dengan kata lain keterlibatan masyarakat sekitar hutan dalam pengelolaan hutan merupakan suatu keharusan. Simon (2000) menjelaskan bahwa pada waktu lampau, pengelolaan hutan menekankan pada pendekatan teknik dan ekonomi. Namun sekarang rimbawan dituntut untuk menfokuskan masalah sosial sebagai bagian dari proses pengelolaan hutan yang lestari. Memecahkan masalah sosial memerlukan sebuah pemahaman terhadap nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat dan partisipasi

dari kelompok masyarakat kunci dalam membuat keputusan tentang pengelolaan hutan. Sekarang ini kunci keberhasilan pengelolaan sumberdaya hutan ditentukan oleh keberhasilannya dalam memecahkan masalah sosial ekonomi masyarakat. Gagal dalam pemecahan masalah ekonomi masyarakat, akan gagal pula dalam upaya pengelolaan hutan (Simon, 2001).

Untuk mengurangi laju kerusakan hutan sekaligus meningkatkan keterlibatan masyarakat sekitar hutan dalam pengelolaan hutan, maka pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencanangkan program Perhutanan Sosial. Tujuan pengembangan perhutanan sosial adalah meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengelola hutan sehingga dapat meningkatkan taraf kehidupan masyarakat sekitar (Sumanto, 2009). Dasar hukum pelaksanaan program Perhutanan Sosial adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial. Di dalam peraturan tersebut terdapat skema-skema pengelolaan hutan berbasis masyarakat seperti Hutan Desa, Hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan rakyat, hutan adat, dan kemitraan kehutanan.

Kebijakan pembangunan HTR terkait dengan kebijakan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan, menciptakan lapangan kerja baru, dan memperbaiki kualitas pertumbuhan melalui investasi yang proporsional antar pelaku ekonomi. (Noordwijk et al. 2007). Selain itu kebijakan ini dimaksudkan untuk memberikan akses hukum, akses lembaga keuangan dan akses pasar yang lebih luas kepada masyarakat dalam pemanfaatan hutan produksi dalam kerangka mensejahterakan masyarakat dan mewujudkan pengelolaan hutan lestari (Emila dan Suwito 2007). Kepastian jaminan akses tersebut merupakan syarat untuk keberhasilan program-program pengelolaan hutan yang melibatkan masyarakat (Nawir et al 2007).

Saat ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah memberikan Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR) kepada 5 Desa yaitu Desa Budi Lestari, Desa Sinar Ogan, Desa Jati Baru, Desa Srikaton, dan Desa Jati Indah yang terletak di Register 40 KPH Gedong Wani Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Permohonan untuk IUPHHK-HTR ini telah dilakukan oleh masyarakat sejak tahun 2014 dan baru diberikan ijin oleh Kementerian pada Bulan Maret tahun 2017. Sekalipun demikian, dalam implementasinya skema HTR menjadi persoalan lain yang tidak sederhana dalam kawasan hutan tersebut. Umumnya para petani tidak puas bila hanya diakui sebagai pemegang hak guna atas semua lahan yang telah mereka kuasai sekarang. Mereka umumnya menginginkan agar menjadi hak milik melalui suatu proses pelepasan kawasan hutan. Hal ini menyebabkan masyarakat tidak mau terlibat atau berpartisipasi dalam kegiatan HTR. Hal ini

akan mempengaruhi kesuksesan program HTR. Padahal keterlibatan masyarakat turut mempengaruhi kesuksesan sebuah program. Kumba (2003) mengatakan kesuksesan sebuah program dapat terlaksana melalui peran partisipasi masyarakat secara langsung yang bermukim di mana program tersebut akan dilaksanakan. Jika masyarakat masih ragu untuk berpartisipasi dalam mensukseskan program HTR, maka akan menyebabkan lambannya pembangunan HTR.

Stringer (2013) memberikan pendapatnya bahwa berpartisipasi adalah keikutsertaan suatu kelompok masyarakat dalam program-program pemerintah. Menurut Papilla (2012), Masyarakat akan tergerak untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan apabila 1) dilakukan melalui organisasi yang sudah dikenal atau yang sudah ada di tengah masyarakat yang bersangkutan, 2) partisipasi memberikan manfaat langsung kepada masyarakat yang bersangkutan, (3) manfaat yang diperoleh tersebut dapat memenuhi kepentingan masyarakat setempat, dan (4) dalam proses partisipasi terdapat jaminan kontrol oleh masyarakat.

Implementasi program HTR ini kerap kurang berhasil dikarenakan: partisipasi rendah, program tidak tepat sasaran karena informasi tidak akurat, teknologi tidak sesuai kebutuhan, informasi dan inovasi. Oleh karena itu dibutuhkan strategi yang tepat untuk mengimplementasikan kebijakan hutan tanaman rakyat agar tidak berujung kepada kegagalan. Sebagai langkah awal menuju suatu proses kerjasama antar pelaku, perlu dilakukan studi tentang tingkat partisipasi petani penggarap terhadap program yang telah dilakukan sampai saat ini (Desmiwati, 2016). Berdasarkan beberapa uraian tersebut di atas maka dilakukanlah penelitian dengan fokus untuk mengkaji partisipasi masyarakat terhadap pembangunan HTR di Wilayah KPH XIV Gedong Wani yang nantinya dapat digunakan untuk merencanakan langkah-langkah kebijakan yang diperlukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Maret sampai Juli 2017 di Desa Budi Lestari, Desa Sinar Ogan, Desa Jati Baru, Desa Srikaton, dan Desa Jati Indah yang merupakan areal HTR di Register 40 KPH XIV Gedong Wani, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja (*purposive*) dengan pertimbangan bahwa lokasi tersebut telah memiliki ijin pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman rakyat (IUPHHK-HTR) sejak tahun 2017 sehingga program HTR dapat dilaksanakan.

Metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan kuisisioner. Teknik pengumpulan data meliputi pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh nyata

terhadap tingkat partisipasi maka digunakan analisis regresi berganda. Strategi implementasi kebijakan HTR menggunakan analisis SWOT. Responden terpilih sejumlah 95 orang dipilih secara acak dari 1866 populasi dengan menggunakan rumus slovin. Pengolahan dan analisis data meliputi 1) analisis deskriptif mengenai tingkat partisipasi masyarakat terhadap implementasi HTR, 2) Analisis regresi berganda untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat, 3) Analisis strategi implementasi kebijakan HTR melalui tiga tahap, yaitu : pengumpulan data, analisis SWOT, dan pengambilan keputusan dengan menggunakan analisis QSPM (Rangkuti, 2008)

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tingkat partisipasi masyarakat dalam implementasi HTR

Partisipasi masyarakat pada kegiatan pembangunan hutan tanaman rakyat merupakan faktor yang menunjang keberhasilan pelaksanaan pembangunan hutan tanaman rakyat yang dijalankan selama ini. Secara keseluruhan, partisipasi masyarakat pada pembangunan hutan tanaman rakyat ini tergolong sedang. Hal ini menggambarkan bahwa dalam kegiatan pembangunan hutan tanaman rakyat yang dilaksanakan selama ini masyarakat belum terlibat secara penuh pada semua tahapan kegiatan. Menurut Winarto (2003) masyarakat tergerak untuk berpartisipasi jika partisipasi itu memberikan manfaat langsung kepada masyarakat yang bersangkutan atau manfaat yang diperoleh melalui partisipasi itu dapat memenuhi kepentingan masyarakat. Masyarakat pada umumnya mempunyai keinginan untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan hutan tanaman rakyat, karena masyarakat menilai bahwa pembangunan hutan tanaman rakyat akan memberikan manfaat bagi mereka sendiri dan bagi penduduk desa umumnya, baik manfaat yang secara langsung maupun manfaat yang secara tidak langsung dirasakan.

Dalam pembangunan hutan tanaman rakyat ini tidak semua kegiatan membuka kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi. Kesempatan untuk berpartisipasi diberikan hanya kepada sebagian masyarakat. Misalnya pada kegiatan penyusunan rencana dan program, kesempatan berpartisipasi hanya diberikan kepada tokoh masyarakat seperti ketua gapoktan, kepala desa, dan pendamping yang merupakan anggota kelompok tani hutan. Hal ini sesuai Winarto (2003) yang menyatakan bahwa kesempatan, kemampuan dan kemauan mutlak harus ada dalam keseimbangan. Apabila salah satu faktor tersebut tidak tercakup maka partisipasi tidak akan sempurna. Partisipasi masyarakat pada kegiatan pembangunan hutan tanaman rakyat terjalin pada semua tahapan kegiatan, partisipasi dalam kegiatan perencanaan, partisipasi dalam aktivitas kelompok tani hutan rakyat, partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan hutan rakyat

dan partisipasi dalam pengamanan. Keempat komponen partisipasi tersebut di atas mempunyai keterkaitan hubungan satu sama lain. Artinya keterlibatan dalam perencanaan akan berkaitan dengan aktivitas kelompok tani, selanjutnya berkaitan dengan pelaksanaan yang pada akhirnya berkaitan dengan kegiatan pengamanan.

Partisipasi masyarakat yang diukur dalam penelitian ini adalah partisipasi masyarakat dalam perencanaan; partisipasi masyarakat dalam aktivitas kelompok tani hutan; partisipasi masyarakat dalam pembibitan, penanaman, pemeliharaan; dan partisipasi dalam pengamanan, pemecahan masalah, dan pemasaran. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan tergolong rendah (50,3%). Tahap awal yang merupakan bagian perencanaan antara lain pengukuran areal lokasi HTR, penentuan jenis tanaman, dan penyusunan rencana dan program hutan tanaman rakyat. Masyarakat tidak dilibatkan dalam penentuan jenis tanaman, akan tetapi aturan yang telah ada dalam P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang perhutanan sosial, sesuai dengan tanaman yang masyarakat tanam selama ini. Untuk penyusunan rencana dan program hutan tanaman rakyat, mereka sampai saat ini belum menyusun rencana kerja tahunan dan rencana kerja umum yang merupakan kewajiban dari pemegang ijin HTR. Perencanaan merupakan dasar kegiatan yang mengarahkan dan menuntun orang untuk melakukan kegiatan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan guna mencapai tujuan yang diinginkan.

Untuk partisipasi responden dalam aktivitas kelompok tani hutan tergolong sedang (76,8%). dalam pembentukan kelompok tani sistemnya berbeda-beda untuk masing-masing kelompok. Ada yang pembentukan kelompok taninya melibatkan seluruh petani, ada yang dengan perwakilan dan ada pula yang hanya melibatkan tokoh-tokoh masyarakat. Dalam wawancara, terdapat responden yang tidak mengetahui nama kelompok tani mereka dikarenakan dalam pembuatan kelompok tani hanya melibatkan perwakilan saja.

Walaupun mereka setuju dengan peran KTH, namun mereka merasa belum saling mengenal antar satu anggota dengan anggota yang lain. Hal ini wajar dikarenakan mengingat kelembagaan KTH yang mereka bentuk baru. Selain itu, mereka juga beranggapan bahwa keaktifan setiap anggota kelompok dalam kelompoknya sangat rendah. KTH selama ini baru berperan dalam proses pengajuan ijin dan dapat dibilang bahwa yang berperan hanya anggota tertentu saja dan ketua nya, sedangkan dalam kegiatan lainnya peran KTH belum terlihat. Di Desa Sinar Ogan, Budi Lestari, Srikaton, Jati Indah, dan Jati Baru, frekuensi pertemuan antar anggota kelompok maupun antar kelompok sangat tinggi pada saat proses pengajuan baru berjalan. Namun begitu ijin telah keluar, frekuensi pertemuan tersebut menurun dengan drastis bahkan hampir tidak pernah dilakukan lagi. Meskipun demikian dari petani hutan rakyat yang menjadi responden, apabila ada undangan pertemuan

kelompoktani dipastikan akan datang memenuhi undangan tersebut.

Partisipasi dalam hal pembibitan, penanaman, pemeliharaan tergolong tinggi (68,4%) dibandingkan dengan partisipasi lainnya. Hal tersebut dikarenakan kegiatan tersebut telah dilaksanakan oleh masyarakat jauh sebelum IUPHHK-HTR keluar. Mereka telah melakukan pembibitan, penanaman, serta pemeliharaan di lahan mereka. Sedangkan partisipasi dalam pengamanan, pemecahan masalah, dan pemasaran hasil menunjukkan nilai yang terendah dibandingkan dengan nilai partisipasi kegiatan lainnya (61,1). Sampai saat ini belum terdapat aktivitas pemasaran hasil dikarenakan masyarakat belum melakukan pemanenan.

B. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam implementasi HTR

Untuk melihat pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel tak bebas (partisipasi masyarakat pada kegiatan pembangunan hutan tanaman rakyat) dilakukan dengan menggunakan analisis regresi berganda. Variabel yang dianalisis mencakup faktor-faktor partisipasi yang dianggap bisa mempengaruhi partisipasi masyarakat pada pembangunan hutan tanaman rakyat. Variabel tersebut adalah manfaat (X1), jenis tanaman (X2), persyaratan perijinan (X3), proses perijinan (X4), pewarisan (X5), hak dan kewajiban (X6), kelembagaan (X7), Sosialisasi (X8), tenaga pendamping (X9), dan dukungan (X10).

Tabel 1. Analisis regresi linier berganda faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat terhadap pembangunan HTR

Variabel Bebas	Koefisien Regresi	Pvalue
Manfaat (X ₁)	0,850	0,015
Jenis Tanaman (X ₂)	-0,214	0,874
Persyaratan perijinan (X ₃)	0,196	0,627
Proses perijinan (X ₄)	0,080	0,806
Pewarisan (X ₅)	0,305	0,499
Hak dan kewajiban (X ₆)	0,613	0,313
Kelembagaan (X ₇)	0,415	0,064
Sosialisasi (X ₈)	0,579	0,011
Tenaga Pendamping (X ₉)	0,715	0,000
Dukungan (X ₁₀)	0,648	0,009
Konstanta	0,045	0,997
F hitung	9,727	0,000
R	0,733	
R Square	0,537	

Sumber : Hasil Penelitian (2017)

Berdasarkan uji analisa pada tabel 1 diatas diperoleh nilai koefisien determinasi (R²) yang diperoleh sebesar 0,537. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi yang diperoleh menjelaskan keragaman

data yang diteliti sebanyak 53 %. Sedangkan sisanya 47 % diterangkan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam model ini. Dari uji analisa, diperoleh nilai Fhitung sebesar 9,723 dengan nilai probabilitas (sig) = 0,000. Sedangkan nilai Ftabel sebesar 1,94. Oleh karena Fhitung (9,727) > Ftabel (1,94) dan nilai probabilitas (sig) lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05, maka faktor-faktor persepsi secara bersama-sama berpengaruh terhadap partisipasi.

Seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel tak bebas (partisipasi) dilakukan analisis lanjutan dengan tahapan memasukkan semua variabel bebas, kemudian dilakukan analisis dan variabel yang tidak layak masuk dalam regresi dikeluarkan satu persatu. Berdasarkan hasil uji statistik pada tabel 2, tidak semua variabel bebas menunjukkan peran yang nyata sebagai penduga variabel tak bebas. Hasilnya adalah variabel jenis tanaman (X2), persyaratan perijinan (X3), proses perijinan (X4), Pewarisan (X5), hak dan kewajiban (X6), dan kelembagaan (X7) dinyatakan sebagai variabel bebas yang tidak berpengaruh nyata terhadap partisipasi responden. Sedangkan untuk variabel manfaat (X1), sosialisasi (X8), tenaga pendamping (X9), dan dukungan (X10) dinyatakan sebagai variabel bebas yang berpengaruh nyata terhadap partisipasi responden terhadap pembangunan HTR. Oleh karena itu didapatkan persamaan sebagai berikut :

$$Y = 0,045 + 0,85X_1 + 0,579X_8 + 0,715X_9 + 0,648X_{10}$$

Y = partisipasi masyarakat
 X1 = manfaat
 X8 = sosialisasi
 X9 = tenaga pendamping
 X10 = dukungan

Besarnya pengaruh faktor-faktor partisipasi sebagai variabel bebas terhadap partisipasi masyarakat terhadap pembangunan hutan tanaman rakyat sebagai variabel tak bebas dijelaskan sebagai berikut :

(1) Pengaruh Manfaat terhadap Tingkat Partisipasi
 Berdasarkan hasil uji statistik, manfaat yang diterima oleh masyarakat berpengaruh secara nyata terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan hutan tanaman rakyat. Masyarakat merasa tenteram dengan adanya IUPHHK-HTR dikarenakan kenyamanan dan keamanan dalam mengelola lahan. Perkembangan kegiatan HTR di lokasi penelitian merupakan tahap awal karena masyarakat baru mendapatkan ijin usaha pengelolaan hutan-hutan tanaman rakyat pada tanggal 1 Maret 2017 yang lalu sehingga manfaat yang dimaksud dalam penelitian ini lebih ditujukan pada harapan masyarakat dengan mengikuti program pembangunan hutan tanaman rakyat. Namun demikian manfaat yang saat ini sudah dirasakan oleh masyarakat adalah mengenai kepastian status lahan yang mereka miliki. Dengan adanya kepastian status lahan, maka status masyarakat yang

tadinya bisa dibilang sebagai perambah, kini berubah menjadi pengelola hutan. Selain itu, dengan adanya program pembangunan Hutan Tanaman Rakyat ini masyarakat berharap bantuan seperti pemberian bibit, pemberian pupuk, pemberian pelatihan untuk meningkatkan hasil panen dapat mereka peroleh. Dengan alasan tersebut manfaat yang diterima oleh masyarakat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan hutan tanaman rakyat.

(2) Pengaruh Jenis Tanaman terhadap Tingkat Partisipasi

Berdasarkan hasil uji statistik, jenis tanaman tidak berpengaruh secara nyata terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan hutan tanaman rakyat. Kenyataannya, masyarakat tetap dapat menikmati hasil ketika jenis tanaman diatur oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Selain itu, tanaman yang telah ditetapkan dalam P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang perhutanan sosial, tidak bertentangan dengan keinginan masyarakat. Dengan kata lain jenis tanaman yang telah diatur sesuai dengan harapan masyarakat.

Jenis tanaman pokok yang dapat dikembangkan untuk pembangunan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu HTR terdiri dari: a. tanaman sejenis; atau b. tanaman berbagai jenis. Jenis tanaman pokok sejenis sebagaimana dimaksud adalah tanaman hutan berkayu yang hanya terdiri satu jenis (species) dan varietasnya. Jenis tanaman pokok berbagai jenis sebagaimana dimaksud adalah tanaman hutan berkayu yang dikombinasikan dengan tanaman budidaya tahunan yang berkayu antara lain karet, tanaman berbuah, bergetah dan pohon penghasil pangan dan energi. Tanaman budidaya tahunan paling luas 40% (empat puluh persen) dari areal kerja dan tidak didominasi oleh satu jenis tanaman. Di lokasi penelitian seperti di Desa Budi Lestari, lahan di dominasi tanaman karet, akasia, sawit, dan sengon yang diselang seling dengan acasia. Di Desa Sinar Ogan lahan ditanami karet, acasia, sawit, palawija. Di Desa Jati Baru lahan ditanami karet, acasia, sawit, dan palawija. Desa Srikaton seluruh areal sudah dimanfaatkan dengan ditanami karet 80% sisanya ditanami sengon, acasia, singkong, jagung, dan padi. Sedangkan Desa Jati Indah lahannya ditanami karet, jati, dan acasia.

Namun, bila dilihat dari jenis tanaman yang masyarakat usahakan di lahan hutan tanaman rakyat, dalam jangka waktu 5 tahun belum dapat memenuhi kebutuhan industri kayu karena produksi yang dihasilkan sebagian besar adalah getah karet, dan untuk acasia serta sengon sebagian besar masih berumur sekitar 2 sampai 3 tahun.

(3) Pengaruh persyaratan perijinan terhadap Tingkat Partisipasi

Berdasarkan hasil uji statistik, persyaratan perijinan tidak berpengaruh secara nyata terhadap tingkat

partisipasi masyarakat dalam pembangunan hutan tanaman rakyat. Dikarenakan berdasarkan hasil wawancara persyaratan perijinan menurut responden tergolong mudah dikarenakan mereka hanya diminta untuk mengumpulkan kartu identitas diri seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP). Namun pada beberapa desa seperti Desa Srikaton dan Jati Indah, masyarakat berpendapat bahwa masyarakat yang merupakan pendatang agak dipersulit persyaratannya, hal tersebut dikarenakan terjadinya migrasi pendatang sehingga sebagian penduduk tidak mempunyai surat keterangan ijin tinggal. Hal ini mengacaukan administrasi desa. Dengan demikian perlu dilakukan penguatan kelembagaan pemerintahan desa dan pengawasan dari institusi di atasnya.

(4) Pengaruh Proses perijinan terhadap Tingkat Partisipasi

Dari hasil wawancara, meskipun proses perijinannya yang tidak berbelit-belit dan tidak membutuhkannya biaya yang besar, namun waktu yang dibutuhkan agar perijinan keluar tergolong lama. Proses dari waktu pengajuan sampai diterbitkannya SK IUPHHK-HTR membutuhkan waktu kurang lebih 3 tahun. Berdasarkan hasil uji statistik, proses perijinan tidak berpengaruh secara nyata terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan hutan tanaman rakyat. Proses yang lama tidak mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dikarenakan ada atau tidaknya ijin IUPHHK-HTR tersebut, masyarakat tetap dapat memanfaatkan lahan.

Walaupun persyaratan bagi masyarakat yang ingin mengajukan ijin pemanfaatan HTR (IUPHHK-HTR) mudah dipenuhi, waktu yang dibutuhkan agar ijin IUPHHK-HTR keluar tergolong lama. Usulan pencadangan HTR telah dilakukan mulai tahun 2014, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Surat Bupati Lampung Selatan nomor 522/2469/III.13/02/2014 tanggal 14 Juni 2014 menyampaikan usulan pencadangan HTR yang dimohon Gapoktan Maju (Desa Budi Lestari), Gemah Ripah (Desa Sinar Ogan), dan Karya Mudah (Desa Jati Baru).
- 2) Surat Bupati Lampung Selatan nomor 522/3911/III.13/02/2014 tanggal 5 November 2014, menyampaikan usulan pencadangan areal HTR yang dimohon Gapoktan Jaya Abadi (Desa Srikaton) dan Subur (Desa Jati Indah).

Kelima Desa tersebut, baru akhirnya mendapatkan ijin IUPHHK-HTR pada bulan Maret 2017 dan diserahkan melalui Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung. Namun SK IUPHHK-HTR yang diberikan masih bersifat sementara karena belum merupakan SK asli hanya SK salinan. Rencananya

SK IUPHHK-HTR asli akan diberikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia pada bulan April 2017. Namun sampai saat ini, SK asli tersebut belum juga diserahkan sehingga masyarakat hanya memegang SK salinan saja.

(5) Pengaruh Pewarisan terhadap Tingkat Partisipasi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.83.MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang perhutanan sosial, IUPHHK-HTR berlaku untuk jangka 35 tahun dan tidak dapat diwariskan. Dengan adanya ketentuan bahwa ijin IUPHHK HTR tidak dapat diwariskan, maka ketika pemegang ijin telah meninggal dunia, ijin harus dikembalikan kepada negara. Seseorang hanya dapat mengelola lahan tersebut sampai orang tersebut meninggal dunia walaupun ijin tersebut setelah 35 tahun dapat diperpanjang lagi. SK IUPHHK-HTR yang dipegang oleh masing-masing ketua gapoktan, aturannya sama dengan peraturan yang termuat dalam P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang perhutanan sosial, dimana IUPHHK-HTR tidak dapat diwariskan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa seluruh responden kurang setuju bahwa lahan HTR tidak dapat diwariskan dikarenakan selama ini mereka telah menggarap lahan tersebut turun menurun dalam jangka waktu yang lama. Sampai wawancara dilakukan, responden tidak mengetahui bahwa aturan dalam P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 dan juga SK IUPHHK-HTR adalah tidak dapat diwariskan. Hal ini dikarenakan SK dipegang oleh ketua gapoktan dan belum ada pertemuan kelompok lanjutan setelah ijin tersebut keluar dan SK diberikan kepada ketua gapoktan. Selain itu sosialisasi dilakukan dengan hanya mengundang ketua gapoktan saja, sehingga informasi belum sampai kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil uji statistik, pewarisan tidak berpengaruh secara nyata terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan hutan tanaman rakyat. Hal ini mendukung pernyataan di atas, bahwa masyarakat belum mengetahui aturan yang sesungguhnya mengenai pewarisan. Hal tersebut juga disebabkan oleh kurangnya intensitas penyuluhan dan keterbatasan informasi yang didapatkan oleh masyarakat.

(6) Pengaruh Hak dan Kewajiban terhadap Tingkat Partisipasi

Hak dan kewajiban dari kelompok tani hutan telah tertuang dalam SK yang diberikan kepada masing-masing gapoktan pada bulan Maret 2017. Hak dan kewajiban yang tertuang dalam SK IUPHHK-HTR

sama dengan dalam P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang perhutanan sosial. Kewajiban dari pemegang ijin IUPHHK-HTR antara lain menjaga arealnya dari perusakan dan pencemaran, memberi tanda batas areal kerjanya, menyusun RKU (Rencana Kerja Usaha), dan RKT (Rencana Kerja Tahunan), melakukan penanaman dan pemeliharaan hutan di areal kerjanya, melakukan tata usaha hasil hutan, membayar provisi sumber daya hutan, mempertahankan fungsi hutan, dan melaksanakan perlindungan hutan.

Berdasarkan hasil uji statistik, hak dan kewajiban tidak berpengaruh secara nyata terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan hutan tanaman rakyat. Hal ini dikarenakan pemahaman masyarakat akan manfaat dari hutan tanaman rakyat tinggi. Hal tersebut dapat dijelaskan bahwa masyarakat menyadari manfaat positif kepada kedua belah pihak, baik negara maupun masyarakat. Sehingga urgensi akan hak dan kewajiban dirasakan tidak berpengaruh nyata terhadap tingkat partisipasi.

(7) Pengaruh Kelembagaan terhadap Tingkat Partisipasi

Kelompok tani dibuat dengan tujuan untuk memudahkan pengurusan administrasi dalam pengajuan ijin HTR, memudahkan transfer informasi mengenai HTR, dan memudahkan administrasi pengajuan pinjam dana bergulir untuk pembangunan HTR nantinya. Yang terjadi di lapangan adalah bahwa kelembagaan HTR di daerah penelitian merupakan kelembagaan baru yang sengaja dibuat demi kepentingan pelaksanaan HTR.

Walaupun mereka setuju dengan peran KTH, namun mereka merasa belum saling mengenal antar satu anggota dengan anggota yang lain. Hal ini wajar dikarenakan mengingat kelembagaan KTH yang mereka bentuk baru. Selain itu, mereka juga beranggapan bahwa keaktifan setiap anggota kelompok dalam kelompoknya sangat rendah. KTH selama ini baru berperan dalam proses pengajuan ijin dan dapat dibilang bahwa yang berperan hanya anggota tertentu saja dan ketua nya, sedangkan dalam kegiatan lainnya peran KTH belum terlihat. Di Desa Sinar Ogan, Budi Lestari, Srikaton, Jati Indah, dan Jati Baru, frekuensi pertemuan antar anggota kelompok maupun antar kelompok sangat tinggi pada saat proses pengajuan baru berjalan. Namun begitu ijin telah keluar, frekuensi pertemuan tersebut menurun dengan drastis bahkan hampir tidak pernah dilakukan lagi.

Berdasarkan hasil uji statistik, kelembagaan tidak berpengaruh secara nyata terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan hutan tanaman rakyat. Dikarenakan pada lokasi penelitian,

responden tidak merasakan pengaruh langsung terhadap manfaat lembaga tersebut. Karena pada kenyataannya, mayoritas responden menggarap lahannya secara individu bukan secara kelompok.

(8) Pengaruh Sosialisasi terhadap Tingkat Partisipasi

Masyarakat beranggapan bahwa frekuensi kegiatan sosialisasi tentang HTR yang selama ini dilakukan sudah cukup walaupun mereka mengatakan bahwa penyuluhan yang dilakukan secara langsung hanya untuk perwakilan saja, sedangkan informasi sosialisasi selanjutnya diberikan dalam pertemuan kelompok tani. Namun, mereka beranggapan bahwa materi penyuluhan yang diberikan selama ini belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan menunjang program HTR. Selama ini sosialisasi yang diberikan hanya sebatas pengertian HTR, hak dan kewajiban masyarakat sebagai pemegang ijin, sedangkan yang diinginkan masyarakat adalah lebih ke usaha dan akses pasar nantinya.

Berdasarkan hasil uji statistik, sosialisasi berpengaruh secara nyata terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan hutan tanaman rakyat. Partisipasi masyarakat terhadap program HTR rendah dikarenakan kurangnya intensitas penyuluhan, hal tersebut dikarenakan sosialisasi yang diberikan terhadap mereka kurang. Hal ini juga disebabkan karena materi sosialisasi yang belum sesuai dengan keinginan masyarakat dan metode sosialisasi yang dilakukan. Masyarakat ingin diadakan studi banding ke tempat kelompok tani lain yang sudah berhasil mengembangkan usaha dan memiliki akses pasar sehingga mereka dapat mencontohnya.

(9) Pengaruh Tenaga Pendamping terhadap Tingkat Partisipasi

Pendampingan merupakan hak yang diperoleh setiap pemegang ijin HTR. Hal ini sesuai dengan P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang perhutanan sosial. Pendampingan juga dibutuhkan untuk menunjang kegiatan HTR. Pendampingan HTR dilakukan oleh penyuluh kehutanan dan pihak dari KPHP Gedong Wani sendiri.

Menurut Rosalia dan Ratnasari (2016), kegiatan pendampingan masyarakat/ fasilitasi bertujuan meningkatkan kemampuan masyarakat setempat dalam mengelola organisasi kelompok, membimbing masyarakat mengajukan permohonan izin sesuai ketentuan yang berlaku, meningkatkan kemampuan masyarakat setempat dalam menyusun rencana kerja pemanfaatan hutan, meningkatkan kemampuan masyarakat setempat dalam melaksanakan budidaya hutan melalui pengembangan teknologi tepat guna dan peningkatan nilai tambah hasil hutan, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia masyarakat setempat melalui pengembangan pengetahuan, kemampuan

dan keterampilan, memberikan informasi pasar dan modal dalam meningkatkan daya saing dan akses masyarakat setempat terhadap pasar dan modal, dan meningkatkan kemampuan masyarakat setempat dalam mengembangkan usaha pemanfaatan hutan dan hasil hutan.

Berdasarkan hasil uji statistik, tenaga pendamping berpengaruh secara nyata terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan hutan tanaman rakyat. Pada lokasi penelitian dikarenakan kurangnya tenaga pendamping dan rendahnya intensitas sosialisasi menyebabkan partisipasi masyarakat terhadap program pembangunan HTR rendah. Saat ini, pendampingan yang berjalan baru bersifat teknis. Untuk pendampingan yang bersifat non teknis seperti penguatan kelembagaan masih sangat kurang. Padahal penguatan kelembagaan merupakan faktor penting dalam menyiapkan masyarakat untuk mengelola HTR (Hakim, 2009). Hal ini perlu diperhatikan, karena pendampingan penguatan kelembagaan dapat membangun masyarakat yang mandiri dalam mengelola hutan.

(10) Pengaruh Dukungan terhadap Tingkat Partisipasi

Responden berpendapat bahwa dukungan yang diberikan baik dari pemerintah desa maupun Dinas Kehutanan dan KPHP Gedong Wani tidak dirasakan oleh semua responden dan hanya dirasakan manfaatnya oleh elite kelompok tani. Dukungan dalam penguatan kelembagaan dirasakan rendah dikarenakan dengan dibentuknya kelompok tani manfaat tidak dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Hal tersebut dikarenakan 1) dalam proses pengolahan lahan dilakukan secara individu bukan kelompok, 2) tidak ada koordinasi antara kelompok tani, dan 3) mayoritas kelompok tani dikuasai oleh satu anggota keluarga. Sehingga hanya segelintir orang yang merasakan manfaat dari dukungan penguatan kelembagaan tersebut.

Dukungan dalam penguatan kapasitas masyarakat juga dirasakan kurang karena kurangnya kegiatan pelatihan, studi banding dan sosialisasi sehingga tidak ada manfaat yang masyarakat rasakan. Bentuk dukungan yang diberikan sejauh ini hanyalah fasilitas pengurus izin, pendampingan dan pembuatan aturan main kelompok, namun intensitasnya masih rendah.

Berdasarkan hasil uji statistik, dukungan berpengaruh secara nyata terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan hutan tanaman rakyat. Dikarenakan kurangnya dukungan yang diberikan, baik dari pihak pemerintah maupun non pemerintahan seperti sosialisasi dan pendampingan maka tingkat partisipasi dalam pembangunan hutan tanaman rakyat rendah.

Sintesis unsur-unsur SWOT dengan skor tertinggi menghasilkan alternatif strategi. Analisis SWOT strategi implementasi kebijakan KPH Gedong Wani berdasarkan evaluasi faktor internal dan eksternal disajikan pada Tabel 2. Berdasarkan QSPM, diperoleh 2 strategi SO : Mengembangkan usaha dengan bekerja sama dengan multipihak dan pembentukan dan pengefektifan fungsi koperasi, 2 strategi WO: penguatan kelembagaan KTH dan peningkatan kualitas dan kuantitas penyuluh, 2 strategi ST, yaitu pemanfaatan potensi lahan yang tersedia dan menerapkan pola SFM (*Sustainable Forest Management*), sedangkan terdapat 3 strategi WT yaitu menjamin kepastian usaha dengan melibatkan berbagai pihak, dukungan pendanaan dari multipihak, dan peningkatan SDM petani melalui sekolah lapang dan lapang.

Strategi SO bertujuan agar pemegang IUPHHK-HTR dapat mandiri dalam mengelola lahan yang telah diberikan ijin. Dengan adanya pembentukan koperasi, ditujukan untuk menyejahterakan anggotanya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional. Dengan adanya masyarakat mandiri, diharapkan mereka juga mampu untuk bekerja sama dengan multipihak sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Koperasi ini juga merupakan wadah pertukaran informasi dan saling mengenal anggota satu sama lain, dimana permasalahan mengenai kelompok tani hutan di ke lima desa pemegang IUPHHK-HTR adalah sudah terbentuknya kelompok tani tetapi frekuensi pertemuan mereka berkurang dan juga informasi mengenai HTR tidak sampai pada masyarakat hanya segelintir kelompok elit saja seperti ketua nya saja.

Strategi WO bertujuan untuk mengatasi kurangnya tenaga pendamping. Tenaga pendamping berperan sebagai fasilitator dan motivator bagi masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan dan informasi mengenai HTR, termasuk mengakses informasi serta membangun kerjasama dengan pihak-pihak terkait. Saat ini kondisi di lapangan keberadaan penyuluh sebagai tenaga pendamping masih sangat minim. Peningkatan kualitas penyuluhan dapat dilakukan dengan peningkatan kualitas materi penyuluhan dan teknis pelaksanaan penyuluhan dengan metode penyuluhan yang sesuai dengan kondisi dan harapan masyarakat. Sedangkan peningkatan kuantitas penyuluhan dilakukan dengan lebih meningkatkan intensitas atau frekuensi penyuluhan sebagai proses belajar bersama untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat. Untuk itu peran dari Dinas Kehutanan dan KPH Gedong Wani dalam program pembangunan hutan rakyat khususnya dalam hal kualitas dan kuantitas penyuluhan agar lebih ditingkatkan.

Strategi ST bertujuan untuk mengembalikan fungsi hutan dan mencegah agar pemukiman liar tidak semakin bertambah. Selain itu juga mencegah adanya pemindah kuasaan atas lahan. Oleh karena itu, strategi yang dapat dilakukan adalah dengan memanfaatkan potensi lahan yang tersedia dengan menerapkan pola SFM (*Sustainable*

Forest Management). Pengelolaan hutan lestari (SFM) adalah pengelolaan hutan sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Pengelolaan hutan lestari menggunakan tujuan sosial, ekonomi dan lingkungan yang sangat luas.

Strategi WT bertujuan untuk memberikan kepastian pada masyarakat mengenai pasar dikarenakan kekhawatiran masyarakat selama ini adalah mengenai pasar. Masyarakat mengeluhkan belum adanya multipihak yang bekerja sama dengan masyarakat terkait dengan memasarkan hasil panen. Mutaqin (2008) mengemukakan bahwa penyediaan pasar yang dapat diakses oleh masyarakat sekitar hutan merupakan fokus utama dalam implementasi kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar hutan. Oleh karena itu, isu mengenai kelangkaan kayu dan pemasaran dapat dijadikan rangsangan bagi masyarakat untuk menanam tanaman berkayu.

Selanjutnya adalah tahap keputusan yang merupakan tahap untuk menentukan strategi terbaik yang dapat dijalankan oleh KPH XIV Gedong Wani selaku fasilitator program HTR dari alternatif-alternatif yang diperoleh dari hasil analisis SWOT. Dari beberapa strategi yaitu dimana yang harus dilakukan oleh KPH XIV Gedong Wani adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas penyuluh. Peningkatan kualitas penyuluhan dapat dilakukan dengan peningkatan kualitas materi penyuluhan dan teknis pelaksanaan penyuluhan dengan metode penyuluhan yang sesuai dengan kondisi dan harapan masyarakat. Sedangkan peningkatan kuantitas penyuluhan dilakukan dengan lebih meningkatkan intensitas atau frekuensi penyuluhan sebagai proses belajar bersama untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat. Untuk itu peran dari Dinas Kehutanan dan KPH Gedong Wani dalam program pembangunan hutan rakyat khususnya dalam hal kualitas dan kuantitas penyuluhan agar lebih ditingkatkan.

SIMPULAN

Partisipasi masyarakat terhadap pembangunan HTR secara keseluruhan tergolong sedang dikarenakan beberapa faktor, dimana partisipasi masyarakat yang sedang dapat menghambat atau bahkan dapat mendukung kesuksesan dari implementasi pembangunan HTR. Untuk itu diperlukan strategi implementasi kebijakan hutan tanaman rakyat, yaitu dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas penyuluh.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penelitian ini dapat dilaksanakan atas sponsor tunggal yaitu DIPA BLU Unila Tahun 2017 melalui Skema Hibah Penelitian Pascasarjana Universitas Lampung tahun 2017. Karena itu kepada sponsor patut kami ucapkan terima kasih.

DAFTAR PUSTAKA

- Desmiwati, N.F.N. (2016). "Studi Tentang Persepsi Dan Tingkat Partisipasi Petani Penggarap Di Hutan Penelitian Parungpanjang." *Jurnal Perbenihan Tanaman Hutan* 4.2 (2016): 109-124.
- Dishut Provinsi Lampung. (2013). *Tata Hutan dan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang 2014-2023 UPTD KPHP Gedong Wani*, Bandar Lampung: Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.
- Emila, S. (2007). *Hutan Tanaman Rakyat (HTR): Agenda Baru untuk*
- Pengentasan Kemiskinan? Warta Tenure Nomor 4 - Februari 2007*
- Hakim, I. (2009). *Kajian Kelembagaan dan Kebijakan hutan Tanaman Rakyat. Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan* 6 (1) : 27-41
- Kumba, F.F. (2003). *Farmer participation in agricultural research and extension service in Namibia. Journal IntAgric Extension Edu.* 10 (3): 47-55.
- Nawir, A.A., Kassa, H., Sandewall, M., Dore, D., Campbell, B., Ohlsson, B, and Bekele, M. (2007). *Stimulating Smallholder Tree Planting – Lessons from Africa and Asia. Unasylya* 228 Vol. 58, 2007
- Rangkuti, F. (2008). *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis (Reorientasi Konsep Perencanaan Strategis untuk Menghadapi Abad 21)*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Rosalia, F. & Ratnasari, Y. (2016). *Analisis Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Di Sekitar Kawasan Hutan Lindung Register 30 Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung Tahun 2010. Sosiohumaniora*, 18(1)
- Senoaji, G. (2011). *Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar Hutan Lindung Bukit Daun di Bengkulu. Sosiohumaniora*, 13 (1), 1.
- Simon, H. (2000). *Hutan Jati dan Kemakmuran. Problematika dan Strategi Pemecahan*. Yogyakarta: BIGRAF Publishing.
- Simon, H. (2001). *Pengelolaan Hutan Bersama Rakyat (Cooperative Forest Management) Teori dan Aplikasi pada hutan Jati di Jawa*. Yogyakarta: Biograf Publishing.
- Sumanto, S.E. (2009). "Kebijakan pengembangan perhutanan sosial dalam perspektif resolusi konflik." *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan* 6 (1)
- Stringer, L.C. and Paavola, J. (2013). *Participation in environmental conservation and protected area management in Romania: a review of three case studies. Environmental Conservation*, 40(2), 138-146
- Winarto H. (2003). *Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Agroforestry [tesis]*. Bogor: Program Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor

POTRET TINGKAT KESEJAHTERAAN RUMAH TANGGA PEMBUDIDAYA IKAN DI CIGANJUR JAKARTA SELATAN

Achmad Rizal¹, Rosidah¹ dan Ginandya Fathira²

¹Dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Padjadjaran

²Mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Padjadjaran

E-mail: achmad.rizal@unpad.ac.id

ABSTRAK. Penelitian mengenai analisis tingkat kesejahteraan rumah tangga pembudidaya ikan di Lahan Pusat Budidaya Perikanan Ciganjur Jakarta Selatan, telah dilaksanakan pada bulan Februari sampai Maret 2017. Penelitian bertujuan untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan dan menganalisis tingkat kesejahteraan pembudidaya ikan berdasarkan standar kesejahteraan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Susenas 2011. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode studi kasus dimana data dikumpulkan dengan teknik wawancara langsung terhadap 29 pembudidaya ikan menggunakan kuisioner. Parameter penelitian meliputi karakteristik pembudidaya dan aspek lingkungan yang terangkum dalam 11 indikator kesejahteraan dari BPS dalam Susenas 2011. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rumah tangga pembudidaya ikan di lahan Pusat Budidaya Perikanan seluruhnya dikategorikan tidak miskin. Berdasarkan 11 indikator tersebut skor rata-rata yang diperoleh adalah 34, yang menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan seluruh pembudidaya di lahan Pusat Budidaya Perikanan Ciganjur Jakarta Selatan tergolong kesejahteraan tinggi.

Kata kunci: Susenas 2011, Kesejahteraan, Pembudidaya ikan.

POTRAIT OF HOUSEHOLD WELFARE LEVEL OF FISH FARMERS IN CIGANJUR OF SOUTH JAKARTA

ABSTRACT. This study analyzes household welfare level of fish farmers in Aquaculture Center Land in Ciganjur, South Jakarta, held in February until March 2017. This research aims to determine the level of household welfare of fish farmer in Aquaculture Center Land based on the standard from Central Statistics Agency (CSA) of National Survey of Social Economy (NSSE) 2011. The methods used in this research is a case study and the data is collected by direct interview and distributing questionnaires to 29 fish farmers. Parameter research covered characteristics of fish farmers and environmental aspects are summarized in 11 indicators from CSA of NESS 2011. The result showed that fish farmers in Aquaculture Center Land are not entirely poor. Based on 11 indicators from NSSE 2011, the score welfare in average is 34, show that the economic welfare level of fish farmers in Aquaculture Center Land in Ciganjur of South Jakarta is high.

Key words: National Survey of Social Economy (NSSE) 2011, Economic Welfare level, Fish Farmer

PENDAHULUAN

Sektor perikanan di DKI Jakarta berpotensi besar menjadi sektor unggulan dan penggerak utama pembangunan perekonomian daerah. Hal ini disebabkan karena sektor perikanan memiliki keunggulan berupa ketersediaan sumber daya alam dan tersedianya potensi ekonomi yang mampu menghasilkan produk dan jasa dengan daya saing tinggi. Namun, potensi pengembangan perikanan hingga saat ini belum semua digarap secara serius oleh pemerintah DKI Jakarta. Perekonomian Provinsi DKI Jakarta secara umum sudah didominasi oleh sektor tersier yaitu sebesar 71,28%. Sektor sekunder dan sektor primer masing-masing berkontribusi sebesar 28,17% dan 0,55%. Lapangan usaha perikanan hanya berkontribusi rata-rata sebesar 0,04% dan cenderung stagnan (BPS, 2016).

Berdasarkan pernyataan dari Badan Pusat Statistik (2015) bahwa lapangan usaha budidaya perikanan di DKI Jakarta terus menurun baik dari produksi maupun jumlah rumah tangga pembudidayanya, hal ini dikarenakan banyaknya pembudidaya yang beralih profesi akibat

semakin sempitnya lahan karena pengalihan fungsi lahan. Salah satu kasus pengalihan fungsi lahan perikanan di DKI Jakarta adalah pengusuran di Kuningan pada tahun 1977. Pengalihan fungsi lahan tersebut berdampak bagi pembudidaya yang kehilangan mata pencahariannya. Melihat kondisi tersebut, pemerintah DKI Jakarta mengambil kebijakan langsung untuk mengalihkan lokasi budidaya ke daerah Ciganjur Jakarta Selatan seluas 10 hektar, dimana pembudidaya menggunakan 2,6 ha dan 7,4 ha sisanya dikelola pemerintah dengan membangun Pusat Budidaya Perikanan (Pusdakan). Kebijakan pemerintah DKI ini dilakukan setelah melihat kenyataan di lapangan (upaya bottom up), pemerintah telah mengembangkan kebijakan pembangunan yang tidak lagi melulu bersifat top-down namun juga mendorong corak yang bottom-up (Handoko dkk, 2017).

Keluarga dengan mata pencaharian utama sebagai pembudidaya memang tidak dengan mudah mendapatkan penghasilan yang tetap untuk biaya hidup sehari-hari. Sektor perikanan pun dianggap sebagai salah satu sektor yang rawan terhadap kemiskinan karena sebagian besar pembudidaya ikan merupakan pembudidaya yang hanya

mempunyai lahan kecil ataupun hanya mengerjakan lahan milik orang lain (Rizal, 2013). Kesejahteraan pada hakekatnya adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya (Undang-Undang No.11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial). Oleh karena itu, perlu dikaji lebih jauh mengenai tingkat kesejahteraan sehingga dapat dianalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan rumah tangga pembudidaya ikan di Lahan Pusat Budidaya Perikanan Ciganjur Jakarta Selatan.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan studi kasus. Data dan informasi dikumpulkan dari responden melalui penyebaran kuisioner. Metode penentuan responden menggunakan metode sensus, dimana responden yang diambil dari seluruh populasi. Pengumpulan data diteliti satu persatu dengan pencatatan dan perhitungan yang lengkap dari seluruh populasi. Jumlah responden adalah sebanyak 29 responden. Kriteria responden adalah pembudidaya yang menempati lahan usaha Pusdakan Ciganjur. Analisis usaha diperlukan untuk mengetahui perkembangan dan kelayakan dari suatu usaha. Berdasarkan Effendi dan Wawan (2006), analisis usaha tersebut dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

a) Analisis Laba

Analisis laba bertujuan untuk mengetahui besarnya keuntungan dari usaha yang dikelola. Perhitungan analisis keuntungan dapat dirumuskan sebagai berikut:

Keuntungan = Penerimaan – (Total biaya tetap + Total biaya Variabel)

b) Revenue Cost Ratio (R/C)

Analisis R/C merupakan alat analisis untuk melihat keuntungan relatif suatu usaha dalam satu tahun terhadap biaya yang dipakai dalam kegiatan tersebut. Suatu usaha dikatakan layak apabila R/C lebih besar dari 1 ($R/C > 1$). Hal ini menggambarkan semakin tinggi nilai R/C maka tingkat keuntungan suatu usaha akan semakin tinggi.

$$R/C = \frac{\text{TotalPenerimaan}}{\text{TotalBiayaTetap} + \text{TotalBiayaVariabel}}$$

c) Payback Period

Analisis Payback Period bertujuan untuk mengetahui waktu tingkat pengembalian investasi yang telah ditanam pada suatu jenis usaha. Secara umum, rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$PP = \frac{\text{TotalInvestasix1tahun}}{\text{Keuntungan}}$$

d) Break Event Point (BEP)

Analisis BEP merupakan alat analisis untuk mengetahui batas nilai produksi atau volume produksi suatu usaha mencapai titik impas). Usaha dinyatakan layak apabila BEP produksi lebih besar dari jumlah unit yang sedang di produksi saat ini. Sementara BEP harga harus lebih rendah daripada harga yang berlaku saat ini.

$$\begin{aligned} \text{BEP Produksi} &= \frac{\text{TotalBiaya}}{\text{HargaPenjualan}} \\ \text{BEP Harga} &= \frac{\text{TotalBiaya}}{\text{TotalProduksi}} \end{aligned}$$

Mengukur tingkat kesejahteraan keluarga menurut BPS dalam Susenas 2011 berdasarkan 11 indikator antara lain:

1) Pendapatan Rumah Tangga

Pendapatan rumah tangga berasal dari tiga sumber, yaitu suami, istri dan sumber lainnya. Mardiana dalam Irawan (2014) menyatakan pendapatan rumah tangga dapat dihitung dengan:

$$\text{TPRN} = \text{PN} + \text{PAN} + \text{PIN}$$

Keterangan:

TRPN = Pendapatan rumah tangga

PN = Pendapatan suami

PAN = Pendapatan istri

PIN = Pendapatan sumber lain

2) Pengeluaran Rumah Tangga

Pengeluaran rumah tangga adalah biaya yang dikeluarkan untuk kebutuhan hidup dalam jangka waktu satu tahun. Pengukurannya dilakukan dengan menghitung kebutuhan harian, mingguan dan bulanan. Menurut Alfiyah (2002) total pengeluaran rumah tangga dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$C_t = C_1 + C_2$$

Keterangan:

C_t = Total pengeluaran rumah tangga

C₁ = Pengeluaran untuk pangan

C₂ = Pengeluaran untuk non pangan

Pengukuran tingkat kesejahteraan berdasarkan kriteria BPS dalam Susenas 2011 yang dimodifikasi yaitu dengan memasukan kriteria kemiskinan Sajogyo pada indikator pendapatan rumah tangga dan kriteria kemiskinan Tata Guna Tanah pada indikator pengeluaran rumah tangga (Tabel 1).

Penentuan tingkat kesejahteraan berdasarkan skor akhir dikelompokkan kedalam tiga bagian, antara lain:

1. Skor antara 27 – 35 (tingkat kesejahteraan tinggi).
2. Skor antara 19 – 26 (tingkat kesejahteraan sedang).
3. Skor antara 11 – 18 (tingkat kesejahteraan rendah).

Tabel 1. Indikator Kesejahteraan Menurut BPS dalam Susenas 2011

No	Indikator Kesejahteraan	Kriteria	Skor	Bobot
1.	Pendapatan rumah tangga (Konsep kemiskinan menurut Direktorat Tata Guna Tanah)	Tidak miskin	4	25%
		Hampir miskin	3	
		Miskin	2	
		Miskin sekali	1	
2.	Konsumsi dan pengeluaran rumah tangga (Konsep kemiskinan menurut Sagojyo)	Tidak miskin	4	16%
		Hampir miskin	3	
		Miskin	2	
		Miskin sekali	1	
3.	Keadaan tempat tinggal 1) Atap: genting (5)/asbes (4)/ seng (3)/ sirap (2)/ daun (1) 2) Bilik: tembok (5)/ setengah tembok (4)/ kayu (3)/ bambu kayu (2)/ bambu (1) 3) Status milik: sendiri (3)/ sewa (2)/ numpang (1) 4) Lantai: porselin (5)/ ubin (4)/ plester (3)/ kayu (2)/ tanah (1) 5) Luas: luas>100m ² (3)/ sedang50-100m ² (2)/ sempit <50m ² (1)	Permanen (skor 15-21)	3	13%
		Semi permanen (skor 10-14)	2	
		Non permanen (skor 5-9)	1	
4.	Fasilitas tempat tinggal 1) Pekarangan: luas > 100m ² (3)/ cukup 50-100m ² (2)/ sempit <50m ² (1) 2) Hiburan: Video (4)/ TV (3)/ Tape recorder (2)/ radio (1) 3) Pendingin: AC (4)/ lemari es (3)/ kipas angin (2)/ alami (1) 4) Sumber penerangan listrik: listrik (3)/ petromak (2)/ lampu tempel 1 5) Bahan bakar: gas (3)/ minyak tanah (2)/ batu arang (1) 6) Sumber air: PAM (6)/ Sumur bor (5)/ Sumur (4)/ mata air (3)/ air hujan (2)/ Sungai (1) 7) MCK: KM sendiri (4)/ KM umum (3)/ sungai (2)/ kebun (1)	Lengkap (skor 21-27)	3	4%
		Cukup (skor 14-20)	2	
		Kurang (skor 7-13)	1	
5.	Kesehatan anggota keluarga Banyaknya anggota keluarga yang sakit dalam satu bulan	Baik (<25% sakit)	3	10%
		Cukup (25-50% sakit)	2	
		Kurang (>50% sakit)	1	
6.	Kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan dari tenaga medis 1) Jarak RS terdekat: 0 km (3)/ 0,01-3 km (2)/ > 3km (1) 2) Jarak ke poliklinik: 0 km (3)/ 0,01-2 km (2)/ > 2km (1) 3) Biaya berobat: terjangkau (3)/ cukup terjangkau (2)/ sulit terjangkau (1) 4) Penanganan berobat: baik (3)/ cukup (2)/ jelek (1) 5) Alat kontrasepsi: mudah didapat (3)/ cukup mudah (2)/ sulit (1) 6) Konsultasi KB: mudah (3)/ cukup (2)/ sulit (1) 7) Harga obat: terjangkau(3)/ cukup (2)/ sulit terjangkau (1)	Mudah (skor 17-23)	3	4%
		Cukup (skor 12-16)	2	
		Sulit (skor 7-11)	1	
7.	Kemudahan memasukan anak ke jenjang pendidikan: 1) Biaya sekolah: terjangkau (3)/ cukup terjangkau (2)/ sulit terjangkau (1) 2) Jarak sekolah: 0 km (3)/ 0,01-3 km (2)/ > 3km (1) 3) Prosedur penerimaan: mudah (3)/ cukup (2)/ sulit (1)	Mudah (skor 8-9)	3	12%
		Cukup (skor 6-7)	2	
		Sulit (skor 3-5)	1	
8.	Kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi: 1) Ongkos dan biaya: terjangkau (3)/ cukup terjangkau (2)/ sulit terjangkau (1) 2) Fasilitas kendaraan: tersedia (3)/ cukup tersedia (2)/ sulit tersedia (1) 3) Kepemilikan: sendiri (3)/ sewa (2)/ ongkos (1)	Mudah	3	4%
		Cukup	2	
		Sulit	1	
9.	Kehidupan beragama	Toleransi tinggi	3	4%
		Toleransi sedang	2	
		Toleransi kurang	1	
10.	Rasa aman dari gangguan kejahatan	Aman	3	4%
		Cukup aman	2	
		Tidak aman	1	
11.	Kemudahan dalam melakukan olahraga Frekuensi responden dalam melakukan olahraga dalam satu minggu	Mudah	3	4%
		Cukup mudah	2	
		Sulit	1	

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor kelayakan usaha dianalisis untuk mengetahui suatu usaha budidaya masih layak untuk dilanjutkan atau tidak. Faktor kelayakan usaha yang dianalisis dalam penelitian ini adalah keuntungan suatu usaha, *R/C Ratio*, *Payback Period*, *BEP* (Break Event Point) Harga dan Produksi yang disajikan nilai rata-ratanya pada Tabel 2.

Berdasarkan Tabel 2 di atas menunjukkan bahwa keuntungan tertinggi yaitu responden ke-10 sebesar Rp.91.580.000 per tahunnya. Keuntungan terendah yaitu responden ke-20 sebesar Rp.9.500.000 per tahunnya. Hasil keuntungan tersebut dipengaruhi oleh produktivitas usaha budidaya yang dilakukan oleh masing-masing pembudidaya, semakin banyak produksi budidaya maka akan semakin tinggi pula keuntungan yang diterima. Nilai *R/C Ratio* yang didapatkan pembudidaya rata-rata adalah 4,72. Nilai tersebut menjelaskan bahwa usaha budidaya ikan dapat memberikan pendapatan bagi pembudidaya dan dianggap layak.

Nilai *payback period* tertinggi adalah 1,45 dimana waktu pengembalian biaya investasi yaitu kurang lebih satu tahun lima bulan, sedangkan nilai *payback period* terendah yaitu 0,10 dimana waktu pengembalian biaya investasi didapatkan dalam waktu satu bulan lebih. Nilai *BEP* harga pada satuan unit sudah lebih rendah dari jumlah harga yang dijual saat ini oleh pembudidaya. Sedangkan *BEP* produksi sudah lebih besar dari unit yang sedang di produksi saat ini. Perhitungan *BEP* untuk usaha budidaya di lahan Pusdakan Ciganjur Jakarta Selatan dianggap sulit dilakukan karena pembudidaya memiliki banyak komoditas sehingga untuk menghitung *BEP* dilakukan dengan merata-ratakan harga serta unit produksinya.

Keadaan rumah tangga pembudidaya dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti karakteristik pembudidaya ikan seperti umur pembudidaya, tingkat pendidikan pembudidaya, jumlah tanggungan keluarga pembudidaya, pengalaman lamanya usaha budidaya dan luas lahan pembudidaya. Berdasarkan hasil penelitian tingkat kesejahteraan rumah tangga pembudidaya di lahan Pusat Budidaya Perikanan Ciganjur Jakarta Selatan berdasarkan metode Susenas 2011 adalah sebagai berikut:

1) Indikator Pendapatan Rumah Tangga

Kemiskinan diklasifikasikan kedalam empat kriteria (Direktorat Tata Guna Tanah):

1. Miskin sekali, apabila tingkat pendapatan seseorang per kapita per tahun lebih rendah dari 75% dari total pengeluaran 9 bahan pokok (< Rp.1.682.775)

2. Miskin, apabila tingkat pendapatan seseorang per kapita per tahun berkisar antara 75-125% dari total pengeluaran 9 bahan pokok (Rp.1.682.775-Rp.2.804.625)
3. Hampir miskin, apabila tingkat pendapatan seseorang per kapita per tahun berkisar antara 126-200% dari total pengeluaran 9 bahan pokok (Rp.2.827.062 – Rp.4.464.963).
4. Tidak miskin, apabila tingkat pendapatan seseorang per kapita per tahun lebih besar 200% dari total pengeluaran 9 bahan pokok (>Rp. 4.487.400).

Hasil perhitungan pendapatan perkapita pertahun rumah tangga pembudidaya termasuk katagori tidak miskin karena rata-rata pendapatan per kapita per tahun 29 pembudidaya adalah sebesar Rp. 13.544.383. Berdasarkan kriteria kemiskinan dari Direktorat Tata Guna Tanah maka pembudidaya di lahan Pusat Budidaya Perikanan Ciganjur Jakarta Selatan seluruhnya 100% tidak miskin

Hanya saja, jika kriteria yang dipakai menggunakan kriteria Upah Minimum Regional (UMR) DKI Jakarta, maka rata-rata pendapatan pembudidaya adalah sebesar Rp.3.715.730 per bulannya dimana nilai tersebut dibandingkan dengan standar UMR DKI Jakarta yaitu sebesar Rp. 3.100.000,- maka 48% atau sebanyak 14 rumah tangga pembudidaya pendapatannya dibawah UMR dan 52% atau sebanyak 15 rumah tangga pembudidaya pendapatannya diatas UMR (Tabel 3).

Tabel 3. Perbandingan Pendapatan dengan UMR DKI Jakarta

Kriteria	Nilai (Rp.)	Jumlah	Persentase (%)
> UMR	Rp. 1.656.500 - Rp. 3.017.431	14	48
< UMR	Rp. 3.420.833 - Rp. 12.750.375	15	52

2) Indikator Pengeluaran Rumah Tangga

Menurut konsep garis kemiskinan menurut Sajogyo tingkat kesejahteraan rumah tangga dapat diukur dengan menyetarakan pengeluaran per kapita per tahun dengan konsumsi beras setempat. Harga beras yang digunakan adalah rata-rata per Kg Rp.10.600,- dimana konsep tersebut membagi menjadi empat kriteria yaitu:

- a. Tidak Miskin, apabila pendapatan per kapita per tahun seseorang lebih besar dari harga beras 480 kg (\geq Rp.5.088.000)
- b. Miskin, apabila pendapatan per kapita per tahun seseorang kurang dari harga beras 480 kg (\leq Rp. 5.088.000)

Tabel 2. Hasil Keuntungan, R/C Ratio, PP, BEP Harga dan Produksi

	Keuntungan (Rp)	R/C Ratio	Payback Period (Tahun)	BEP Harga (Rp)	BEP Produksi (Unit)
Rata-rata	42.694.392	4,72	0,54	1.560	8.824
Tertinggi	91.580.000	8,55	1,45	22.325	41.935
Terendah	9.500.000	1,74	0,10	5	106

- c. Miskin Sekali, apabila pendapatan per kapita per tahun seseorang lebih besar dari harga beras 380 kg (\geq Rp. 4.028.000)
- d. Paling Miskin, apabila pendapatan per kapita per tahun seseorang lebih besar dari harga beras 240 kg (\geq Rp. 2.544.00).

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pembudidaya di Lahan Pusat Budidaya Perikanan Ciganjur Jakarta Selatan seluruhnya tergolong 100% tidak miskin.

Kemudian total pendapatan pembudidaya dibandingkan dengan standar nilai KHL DKI Jakarta Desember 2015 yaitu Rp.2.980.000 atau sebesar Rp.35.760.000 per tahunnya, nilai tersebut akan dibandingkan dengan jumlah pengeluaran Kriteria Hidup Layak (KHL) DKI Jakarta menunjukkan bahwa 100% pembudidaya di lahan Puskas Ciganjur Jakarta Selatan belum termasuk dalam kriteria hidup layak karena total pengeluarannya masih diantara Rp5.100.000-30.120.000 per tahunnya.

Hal tersebut dikarenakan rumah tangga seluruh pembudidaya yang penghasilannya hanya dari satu sumber saja yaitu dari suami (pembudidaya) dan tanggungan keluarga dimana anak yang masih kecil dan istri yang tidak bekerja, sehingga ketika menghitung pengeluaran/pendapatan per kapita pun jumlahnya kecil dan tergolong dibawah standar KHL.

3) Indikator Keadaan Tempat Tinggal

Keadaan tempat tinggal pembudidaya merupakan salah satu indikator untuk menunjukkan status sosial rumah tangga dalam masyarakat. Semakin baik kondisi dan fasilitas tempat tinggal, maka akan semakin baik keadaan sosial rumah tangga (Rizal, 2013). Tempat tinggal pembudidaya tergolong dalam kategori permanen (90%) dan semi permanen (10%).

4) Indikator Fasilitas Tempat Tinggal

Fasilitas tempat tinggal juga dapat dijadikan sebagai salah satu indikator keadaan sosial ekonomi rumah tangga selain dari keadaan tempat tinggal. Fasilitas tempat tinggal adalah luas pekarangan, fasilitas hiburan, fasilitas pendingin, sumber penerangan, bahan bakar yang digunakan, sumber air, dan MCK. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 100% fasilitas tempat tinggal sudah tersedia lengkap.

5) Indikator Kesehatan Anggota Keluarga

Kriteria kesehatan rumah tangga yaitu banyaknya anggota keluarga yang sering mengalami sakit dalam satu bulan. Pembudidaya pada umumnya mempunyai 93% kesehatan anggota keluarga yang baik yaitu 93%.

6) Indikator Kemudahan Mendapatkan Pelayanan

Kesehatan rentan katiannya dengan kesejahteraan sosial individu. Beberapa kriteria yang termasuk dalam kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan yaitu Jarak RS terdekat, jarak ke poliklinik/posyandu/

puskesmas, biaya berobat, penanganan berobat, alat kontrasepsi, konsultasi KB dan harga obat-obatan. Berdasarkan hasil penelitian dari indikator kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan menunjukkan bahwa 26 rumah tangga pembudidaya (90%) menyatakan mudah dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik.

7) Indikator Kemudahan Memasukan Anak ke Jenjang Pendidikan

Keberhasilan pembangunan suatu daerah ditentukan dari sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, SDM yang berkualitas dapat dilihat dari tingkat pendidikannya. Berdasarkan hasil penelitian, rumah tangga pembudidaya ikan di lahan Puskas Ciganjur Jakarta Selatan menyatakan 83% mudah dalam memasukan anak ke jenjang pendidikan.

8) Indikator Kemudahan Mendapatkan Fasilitas Transportasi

Kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi di Lahan Puskas Ciganjur sangat mempengaruhi pembudidaya untuk dapat memasarkan komoditasnya. Berdasarkan hasil wawancara, seluruh pembudidaya (100%) sudah memiliki kendaraan pribadi.

9) Indikator Kehidupan Beragama

Berdasarkan hasil penelitian, rumah tangga pembudidaya ikan adalah 28 keluarga beragama islam dan satu keluarga beragama kristen. Hasil wawancara menyatakan bahwa 93% toleransi beragama di lahan Pusat Budidaya Perikanan Ciganjur cukup baik dan tinggi.

10) Indikator Rasa Aman dari Gangguan Kejahatan

Indikator rasa aman dari kejahatan dapat dilihat dari sering tidaknya lingkungan tempat tinggal responden mengalami tindak kejahatan selama satu bulan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 97% keluarga pembudidaya menyatakan bahwa lingkungan tempat tinggal pembudidaya aman dari gangguan kejahatan.

11) Indikator Kemudahan dalam Melakukan Olahraga

Kemudahan melakukan olahraga dilihat dari sering atau tidaknya responden melakukan olahraga dalam satu minggu. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan 69% rumah tangga pembudidaya mudah dalam melakukan olahraga.

Rekapitulasi Indikator Kesejahteraan

Berdasarkan hasil rekapitulasi dari indikator-indikator tingkat kesejahteraan BPS dalam Susenas 2011, maka dapat disimpulkan bahwa rumah tangga pembudidaya ikan di Lahan Puskas Ciganjur Jakarta Selatan 100% termasuk dalam golongan kesejahteraan tinggi. Hasil ini didapatkan berdasarkan jumlah perhitungan berdasarkan indikator BPS Tingkat

kesejahteraan dapat terlihat dan diukur dengan 11 indikator yang telah ditentukan dan dianggap sudah dapat mencakup dari gambaran kesejahteraan sesungguhnya. Skor tertinggi adalah 35 dan skor terendah yaitu 32. Apabila dengan perhitungan bobot maka skor tertinggi adalah 3,4 dan skor terendah sebesar 3,12. Skor tersebut memiliki rentang yang masih termasuk dalam kategori tingkat kesejahteraan tinggi. Faktor yang paling mempengaruhi adalah faktor pendapatan dan faktor pengeluaran dan jumlah tanggungan suatu keluarga. Hasil rekapitulasi tingkat kesejahteraan pembudidaya di Lahan Pusat Budidaya Perikanan tersaji dalam Tabel 4 berikut.

Tabel 4. Rekapitulasi Tingkat Kesejahteraan Pembudidaya

Kriteria	Skor	Skor Bobot	Jumlah	Persentase (%)
Kesejahteraan Tinggi	27-35	2,6-3,4	29	100%
Kesejahteraan Sedang	19-26	1,7-2,5	0	0%
Kesejahteraan Rendah	11-18	0,8-1,6	0	0%

SIMPULAN

Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan menggunakan Susenas 2011 adalah pendapatan rumah tangga, tanggungan keluarga, pengalaman usaha dan luas lahan. Faktor yang paling berpengaruh adalah tanggungan keluarga karena semakin banyaknya tanggungan dalam satu rumah tangga maka akan besar pula biaya yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Berdasarkan kriteria 11 indikator kesejahteraan dari BPS dalam Susenas 2011 menunjukkan bahwa 100% rumah tangga pembudidaya ikan di Lahan Pusdakan Ciganjur Jakarta Selatan termasuk dalam golongan kesejahteraan tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik. (2011). Survey Sosial Ekonomi Nasional 2011. Jakarta.

Badan Pusat Statistik. (2016). Profil Kelautan dan Perikanan Provinsi DKI Jakarta Untuk Mendukung Industrialisasi KP. Pusat Data Statistik dan Informasi Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jakarta.

Direktorat Produksi. (2010). Penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) Pada Unit Usaha Budidaya. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya.

Effendi, I dan Wawan, O. (2006). Manajemen Agribisnis Perikanan. Penebar Swadaya. Jakarta.

Handoko, W, Marwah, S dan Widyastuti, TR. (2017). Menjaga Sustainability Pengembangan Masyarakat Pesisir Kebumen: Antara Corak *Top-Down*, Partisipatif dan Inisiasi Kelembagaan Lokal. *Sosiohumaniora*, Vol. 19. No. 3, 244 – 252.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No.PER-17/MEN/VIII/2005 tentang komponen dan Pelaksanaan tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak.

Rizal, A. (2013). Kinerja Sektor Perikanan Provinsi Banten. *Jurnal Akuatika* Vol. 4, No.1/Maret 2013. FPIK-UNPAD. Jatinangor.

Sajogyo. (1977). Garis Miskin dan Kebutuhan Minimum Pangan. Lembaga Penelitian Sosiologi Perdesaan (LPSP). IPB Bogor.

Tim Balai Benih Ikan Ciganjur. (2014). Profil PUSDAKAN. Pusat Budidaya Perikanan. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

Undang-Undang Republik Indonesia No.13 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 30 dan Pasal 185 Tentang Ketenagakerjaan.

ANALISIS USAHA PEMBIAKAN SAPI POTONG POLA KEMITRAAN ANTARA KORPORASI DENGAN PETERNAK RAKYAT

Rochadi Tawaf

Fakultas Peternakan Universitas Padjadajaran

E-mail: rochadi@unpad.ac.id

ABSTRAK. Kebijakan Permentan nomor 2/2017 tentang rasio importasi sapi bakalan dan indukan, mengharuskan perusahaan penggemukan melakukan usaha pembiakan serta bermitra dengan peternakan rakyat. Sejauhmana kebijakan ini dapat direalisasikan perlu kajian usaha pembiakan dan penggemukan merupakan dua usaha yang sangat berbeda. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah usaha pembiakan sapi potong dengan pola kemitraan antara korporasi dengan peternakn rakyat dapat dilaksanakan sesuai dengan kebijakan pemerintah. Penelitian ini dilaksanakan dengan metode survey pada tiga korporasi penggemukan sapi potong yang bermitra dengan peternak rakyat di provinsi Kalimantan Tengah, Banten dan Provinsi Lampung. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif dan finansial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Usaha pembiakan sapi potong secara intensif tingkat keuntungannya negative. (2) Agar usaha pembiakan dapat berjalan dengan baik pada pola usaha intensif, maka diperlukan kontribusi perusahaan feedlot terhadap biaya pakan sebesar Rp 400,00/kg. Selain itu, diperlukan fasilitas bunga bank 5% per tahun dengan tenggang waktu pembayaran hutang 18 bulan. (3) Dari tiga pola kemitraan yang dianalisis, direkomendasikan pola kemitraan tahap pertama dan ketiga dengan skala usaha 100 ekor per kelompok.

Kata kunci: pembiakan, penggemukan, kemitraan, perusahaan, peternak rakyat

CATTLE BREEDING FARM ANALYSIS OF PARTNERSHIP BETWEEN CORPORATION WITH SMALLHOLDER

ABSTRACT. *The minister of agriculture decree number 2/2017 on the ratio of imported feeder and female cattle fattening enterprises to conducted breeding farm as well as partnering with the smallholder farms. whether this policy could be realized, it is require a critical study because the business of breeding and fattening are two kind different farm activities. The purpose of this study is to determine whether the cattle breeding partnersip could be implemented in accordance with government policy. This research was conducted by survey method on three corporation of beef cattle fattening which partnered with smallholder farmers in Central Kalimantan Province, Banten Province and Lampung Province. The data were analyzed by descriptively and financially. The results showed that: (1) Breeding beef cattle intensively results in a negative provitability (2) In order for the breeding farm to running well on the pattern of intensive, it is necessary contribution of feedlot company to feed cost of IDR 400.00/kg. In addition, the government should be able to contribute with a 5% bank interest facility per year with a grace period of 18 months debt payment. (3) Of the three modeled breeding partnerships analyzed, the first and third stage partnership model can be recommended to be realized with the scale of business per group of 100 heads.*

Key words: *breeding, fattening, partnership, corporation and smallholder farm*

PENDAHULUAN

Pada tanggal 20 Oktober 2016 telah diundangkan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 49/Permentan/Pk.440/10/2016 tentang Pemasukan Ternak Ruminansia Besar ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, menggantikan Permentan nomor. 16/Permentan/Pk.440/5/2016) dengan maksud untuk memenuhi ketersediaan daging sapi, mempercepat peningkatan populasi, dan mengoptimalkan pelayanan pemberian rekomendasi pemasukan ternak ruminansia besar. Dalam hal ini yang menjadi fokus perhatian adalah ketentuan harus adanya rasio jumlah indukan dan bakalan impor yang dimasukkan minimal (1:5) untuk pelaku usaha penggemukan, dan (1:10) untuk koperasi peternak dan kelompok peternak.

Dalam rangka penyempurnaan kebijakan rasio impor antara sapi indukan dengan sapi bakalan, pemerintah

telah mengeluarkan kebijakan, yaitu Permentan No. 02/Permentan/Pk.440/2/2017 tentang perubahan atas Permentan No. 49/2016. Ditambahkan bahwa audit pertama kali akan dilakukan pada bulan Desember 2018, dan audit selanjutnya dilakukan setiap dua tahun sekali. Perubahan lainnya adalah tentang spesifikasi bakalan dari maksimal rata-rata 350 kg (untuk sapi) dan 400 kg (untuk kerbau), menjadi maksimal rata-rata 450 kg untuk sapi dan kerbau, dengan kewajiban digemukkan paling cepat empat bulan setelah selesai karantina.

Seperti diketahui bahwa usaha penggemukan sapi sangat berbeda dengan usaha pembiakan. Usaha pembiakan sapi secara komersial umumnya dilakukan oleh peternak yang memiliki modal besar serta menerapkan teknologi modern (Mubyarto dalam Anggraini 2003). Menurut Nasoetion dalam Winarso dkk. (2005) bahwa dalam upaya pengembangan sapi potong, pemerintah menempuh dua kebijakan, yaitu

ekstensifikasi dan intensifikasi. Pengembangan secara ekstensifikasi menitik beratkan pada peningkatan populasi yang didukung oleh pengadaan dan peningkatan mutu bibit, penanggulangan penyakit, penyuluhan dan pembinaan usaha, bantuan perkreditan, pengadaan dan peningkatan mutu pakan, dan pemasaran.

Usaha peternakan memerlukan modal besar, terutama untuk pengadaan pakan dan bibit. Biaya yang besar ini sulit dipenuhi oleh peternak rakyat yang pada umumnya memiliki keterbatasan modal (Hadi dan Ilham 2000). Usaha penggemukan dilakukan dalam jangka waktu empat bulan/periode, sedangkan usaha pembiakan dilakukan dalam waktu yang cukup panjang (5-7 tahun/periode). Hal ini, sesuai dengan penjelasan UU No. 18/2009 jo. 41/2014 tentang PKH bahwa sapi betina produktif adalah sapi yang telah melahirkan kurang dari 5 kali atau umur dibawah 8 tahun. Pola produksi ini berpengaruh pada *cash flow* usaha, dimana usaha penggemukan lebih cepat perputarannya dibanding dengan usaha pembiakan yang membutuhkan jangka waktu relatif panjang untuk memperoleh keuntungan. Integrasi ternak dapat dilakukan melalui pola kemitraan antara pihak perusahaan dan petani-ternak atau pemerintah daerah (Suharto 2004).

Berdasarkan hasil simulasi terhadap dinamika Populasi yang disesuaikan dengan kebijakan Permentan No. 02/2017 Jo. 49/2016, bahwa usaha penggemukan dengan kapasitas kandang 10.000 ekor, dalam kondisi normal akan mampu melakukan importasi sapi bakalan sebanyak 30.000 ekor dan sapi indukan sebanyak 6.000 ekor dalam setahun. Apabila kapasitas kandang yang dimiliki tidak bertambah, maka pada tahun 2018 importasi sapi bakalan penggemukan harus dikurangi akibat jumlah sapi indukan yang dipelihara akan terakumulasi menjadi 11.100 ekor. Hal ini berkaitan dengan pemberlakuan permentan No. 02/2017 jo. No. 49/ 2016 terhitung sejak importasi feedlot pada awal tahun 2017, sehingga pemenuhan realisasi impor sapi indukan pada tahun 2018 akan dilakukan dua kali lipat, karena terhutang kewajiban pada tahun 2017 yang belum dilakukan (Agus dkk, 2017).



Gambar 1. Perspektif Dinamika Populasi Sapi Potong berdasarkan Permentan No. 02/2017 (Agus dkk, 2017)

Hasil perhitungan tersebut, menunjukkan bahwa pada tahun 2019 bulan ke 2 populasi indukan impor yang dipelihara sudah melebihi jumlah populasi sapi penggemukan. Hal ini, menyebabkan fasilitas kandang

yang ada, tidak dapat menampung sapi penggemukan dalam arti feedlot tidak dapat melakukan kegiatan usaha penggemukannya. Dalam hal ini jumlah sapi indukan impor dan keturunannya memerlukan luasan kandang sekitar tiga kali lipat dari usaha penggemukan. Sementara itu, para pengusaha memiliki keterbatasan dalam kepemilikan kandang/lahan, dengan kata lain kandang dan lahannya tidak bertambah.

Kondisi faktual yang terjadi, sampai saat ini hanya beberapa pengusaha penggemukan sapi yang melakukan impor sapi indukan sesuai dengan Permentan No 2/2017. Hal ini disebabkan, perusahaan penggemukan tersebut telah lama menjalankan pola kemitraan dengan peternak rakyat. Pola kemitraan yang telah dilakukan ada tiga jenis yaitu, kemitraan yang hasil produksinya (1) pedet, (2) sapi bakalan dan (3) sapi siap potong. Kemitraan seperti ini perlu terus disebarluaskan mengingat bahwa ketergantungan Indonesia terhadap daging sapi impor akan meningkat, dan kebutuhan konsumsi dalam negeri akan terus dipasok oleh daging impor (Handayani dkk, 2016).

Berdasarkan fenomena yang terjadi, diperoleh informasi sebagai berikut: (1) bahwa kewajiban impor sapi indukan berbasis pada jumlah impor sapi bakalan. Hal ini menyebabkan jumlah sapi indukan yang dipelihara akan lebih banyak dari pada jumlah sapi bakalan yang dipelihara. (2) bahwa tidak tersedianya lahan dan kandang yang cukup dimiliki perusahaan feedlot untuk pengembangan sapi indukan.

Berdasar atas kondisi tersebut, perlu dilakukan kemitraan usaha antara perusahaan penggemukan dengan peternak rakyat sebagai plasma. Penelitian ini ditujukan untuk memperoleh gambaran mengenai analisis kondisi usaha kemitraan antara peternak rakyat dengan perusahaan.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah survey pada tiga perusahaan feedlot pada tanggal 1 September 2017 sampai dengan 30 Nopember 2017. Data primer diperoleh dari perusahaan feedlot sedangkan data sekunder berasal dari:

- Badan Pusat Statistik, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas peternakan Provinsi mengenai: populasi ternak, data peternak, data produksi daging, data impor sapi dan daging.
- Studi Kepustakaan yang berkaitan dengan kajian ini.
- Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri ataupun Peraturan lain yang setara atau di bawahnya yang terkait dengan penelitian.

Korporasi adalah perusahaan feedlot yang ditetapkan sebagai responden untuk mencari data primer yang terkait kajian ini. Metode yang digunakan untuk

penentuan sampel adalah *purposif sampling* berdasarkan kepada perusahaan feedlot yang melakukan kemitraan dengan peternak rakyat, yaitu : PT A di Banten, PT B di Lampung dan PT. C di Kalimantan Tengah.

Pengambilan data primer dilakukan dengan teknik wawancara. Pertanyaan yang diajukan oleh peneliti dalam bentuk pertanyaan tertutup dan terbuka yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu. Data yang terkumpul dilakukan simulasi secara deskriptif dan analisis finansial usaha ternak pada usaha kelompok peternak sapi potong.

Simulasi pola kemitraan antara perusahaan feedlot dengan peternak rakyat, dilakukan sesuai dengan hasil kajian Fapet UGM (2017), lihat Gambar. 1.



Gambar 1. Tiga Tahapan kemitraan Usaha Pembiakan sapi Potong (sumber : Agus dkk, 2017.)

Berdasarkan pada Gambar 1, rincian kegiatan ke tiga pola kemitraan sebagai berikut :

- 1. Pola Kemitraan Pemeliharaan Tahap-1:** kemitraan dilakukan antara perusahaan feedlot dengan peternak rakyat sebagai peternak mitra. Dimana sapi dara bunting diperoleh dari perusahaan feedlot, yang dipelihara oleh peternak rakyat dengan pembinaan teknologi dan pasar oleh perusahaan feedlot. Pada analisis tahapan ini, peternak rakyat menjual hasil produksinya berupa sapi pedet lepas sapih dan indukannya.
- 2. Pola Kemitraan Pemeliharaan Tahap-2:** yaitu peternak rakyat sebagai peternak mitra, memelihara sejak sapi dara bunting yang diperoleh dari perusahaan feedlot sampai dengan anakan yang dihasilkan dipelihara sebagai sapi bakalan. Hasil produksi dari pemeliharaan pada tahap ini adalah sapi bakalan dan induk. Perilakuannya mulai dari pemeliharaan indukan bunting sampai melahirkan anak (pedet), kemudian pemeliharaan Induk dan anak menyusui, penyapihan pedet untuk kemudian melakukan pembesaran (rearing) sampai menjadi sapi bakalan (jantan) dan atau dara/calon induk (betina) pada umur 18 bulan.
- 3. Pola kemitraan Pemeliharaan Tahap-3:** yaitu peternak rakyat sebagai peternak mitra, memelihara sapi sejak sapi dara bunting yang diperoleh dari perusahaan feedlot sampai dengan melakukan penggemukkan pada skala peternakan rakyat. Hasil

produksi dari tahapan ini adalah berupa sapi siap potong.

Peternak rakyat sebagai kelompok peternak mitra, berskala usaha dibawah 100 ekor per kelompok kluster, hal ini sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kelompok ini, berskala usaha antara 5-10 ekor per peternak, sehingga per kelompok kluster ada maksimal 20 orang anggota peternak. Kelompok usaha peternak mitra ini, melakukan pembagian tugas kerjanya dalam mengelola usaha hariannya secara bergiliran. Pola kemitraan ini menurut Nono, O.H. (2011) bahwa keberadaannya memberikan peluang bagi peternak rakyat dan keluarganya untuk melakukan optimalisasi sumber daya lahan dan tenaga kerja keluarganya sehingga akan meningkatkan potensi pendapatannya.

Analisis usahat ernak yang dilakukan menggunakan data asumsi berdasarkan Poetri dkk (2014) bahwa data asumsi sebagai dasar analisis diperoleh melalui suatu kajian, informasi studi pustaka, maupun data lapangan. Asumsi yang digunakan pada penelitian ini adalah eksisting data yang berlaku pada saat penelitian, meliputi harga, biaya dan jumlah sarana produksi, koefisien teknis produksi ternak serta harga dan jumlah hasil produksi. Penggunaan asumsi bunga bank 5% adalah bunga yang berlaku bagi SKIM kredit pengembangan usaha kecil dan menengah yang ditetapkan oleh BI. Sedangkan skala usaha peternakan rakyat sesuai dengan kebijakan pemerintah , maksimal 100 ekor dan pola kemitraan yang dimaksud sesuai dengan Peraturan menteri pertanian No. 3/2017 tentang kemitraan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pola Pemeliharaan Sapi Potong

Jenis Usaha ternak sapi potong terdiri atas; kegiatan usaha pembibitan, pembiakan, pembesaran, dan penggemukkan. Pada dasarnya kegiatan usaha ini merupakan tahapan perlakuan pemeliharaan yang meliputi: (1) Pemeliharaan sapi indukan siap kawin sampai dengan bunting, (2) Pemeliharaan sapi indukan bunting sampai dengan melahirkan, (3) Pemeliharaan sapi indukan dan pedet menyusui sampai dengan penyapihan, (4) Pembesaran anak sapi lepas sapih sampai dengan bakalan/calon induk, (5) Penggemukkan sapi bakalan (jantan) sampai dengan siap potong. Dari lima tahapan tersebut, tahap penggemukkan sapi bakalan merupakan bisnis yang paling banyak dilakukan oleh peternak pelaku usaha karena lebih menguntungkan. Hal ini sesuai dengan pendapat Hadi dan Ilham (2002); dan Umiyasih dkk. (2004) melaporkan bahwa usaha pembibitan sapi potong secara finansial memberikan keuntungan yang jauh lebih kecil dibandingkan usaha penggemukkan. Hasil penelitian di beberapa provinsi juga memberikan kesimpulan serupa. Benefit Cost Ratio (BCR) untuk usaha penggemukkan sapi berkisar

antara 1,63–1,72, sedangkan untuk usaha pembibitan sebesar 1,62 (Direktorat Jenderal Peternakan 1995). Sekalipun, dihadapkan pada resiko dan ketergantungan terhadap sistem penyediaan sapi bakalannya. Dalam hal ini sangat sedikit peternak pelaku usaha komersial yang tertarik dengan tahapan pemeliharaan pembibitan, indukan bunting dan menyusui, serta pembesaran dengan pertimbangan kurang menguntungkan dan memerlukan waktu panjang. Namun demikian, pengembangan sapi potong pada tahapan tersebut banyak dilakukan oleh usaha peternakan rakyat dengan skala kecil dan pola pemeliharaan secara tradisional, hasil yang dicapai dalam menghasilkan daging kurang optimal. Hal ini dilakukan oleh peternakan rakyat, mengingat ternak berfungsi pula sebagai status sosial bagi kehidupan masyarakat di perdesaan. Namun demikian, usaha pembiakan sapi potong yang selama ini dilakukan peternakan rakyat, kiranya harus terus dikembangkan untuk menyangga pemenuhan akan daging sapi. Usaha pembiakan oleh peternakan rakyat perlu dukungan pemerintah melalui upaya pertama melakukan pengembangan di pulau Jawa dan kemudian ke luar Jawa (Hadi dan Ilham, 2002). Secara umum, basis pembibitan sapi potong dilakukan oleh Village Breeding Centre (VBC) yang bercirikan: tidak terstruktur, skala usaha kecil, manajemen sederhana, pemanfaatan teknologi seadanya. Peran pemerintah dimaksudkan untuk mendorong usaha pembibitan rakyat dan sebaiknya usaha pembibitan VBC diarahkan pada pembibitan (Samariyanto, 2004 dalam Sodik dan Budiono, 2012).

Analisis Usaha Pembiakan Korporasi

Pada analisis usaha pembiakan sapi potong, sebagai penyediaan sapi betina dara bunting (*pregnant heifer*) dapat dilakukan oleh Korporasi, dalam hal ini adalah perusahaan Feedloter. Perusahaan melakukan importasi sapi indukan sesuai dengan Permentan No 2/2017. Anak-anak yang diperoleh dari kelahiran sapi indukan ex impor tersebut dilakukan proses pembuntingan dengan asumsi seperti tampak pada Tabel 1.

Pada Tabel 1, tampak bahwa harga beli sapi indukan lokal yaitu Rp. 48.250,00/kg berat hidup. Sementara itu penjualan dara bunting seharga Rp. 45.000,00/kg mengikuti harga yang berlaku. Terdapat tiga titik kritis pada usaha budidaya pembiakan yang dilakukan oleh perusahaan feedlot yang berpotensi menimbulkan kerugian yaitu proses (1) pemeliharaan indukan bunting impor sampai dengan lepas menyusui, (2) pembesaran (rearing) dan (3) indukan lokal bunting sampai dengan 6 bulan. Sehingga pada proses pemeliharaan di tiga tahap tersebut perlu adanya rekayasa atau skema yang dapat menekan biaya produksi yang tinggi agar usaha ini tetap dapat berjalan. Salah satu upaya yang dilakukan melalui dilakukannya simulasi terhadap penekanan harga pakan untuk indukan bunting yaitu dengan memberikan pakan komplit (campuran konsentrat dengan hijauan), mengingat pakan merupakan komponen paling berpengaruh terhadap biaya produksi. Pakan memiliki kebutuhan yang paling tinggi yakni 60 –70% dari total biaya produksi. Tingginya biaya tersebut maka

Tabel 1. Asumsi Pemeliharaan Indukan Impor sampai. Menghasilkan Indukan Lokal Bunting 6 Bulan oleh Perusahaan Feedlot

Asumsi	Proses Produksi			
	Induk. Bunting Impor s.d. Menyusui Anak	Anak Betina - Lepas Sapih	Anak Betina Lepas Sapih - Dara	Induk - Bunting 6 Bulan
HPP Beli Sapi (Rp/Ekor)	16.887.500,00	4.310.547,41	5.764.346,95	14.897.292,00
HPP Beli Sapi (Rp/Kg)	48.250,00	-	38.428,98	42.697,88
Bobot Beli (Kg)	350,00	-	150,00	348,90
Bobot Jual (Kg)	530,00	150,00	348,90	474,90
Rataan HPT (Kg/e/h)	-	13,13	27,34	-
Rataan Konsentrat (Kg/E/H)	-	0,82	5,15	-
Rataan Pakan Komplit (Kg/E/H)	35,25	-	-	35,14
Harga HPT(Rp/Kg)	-	250,00	250,00	-
Harga Konsentrat (Rp/Kg)	-	2.800,00	2.800,00	-
Harga Pakan Komplit (Rp/Kg)	600,00	-	-	600,00
Harga Jual Sapi (Rp/Kg)	45.000,00	46.666,67	42.850,00	45.000,00
Biaya Sewa Kandang (Rp/E/Hr)	684,93	684,93	684,93	684,93
Biaya T.K/ Overhead (Rp/E)	1.666,67	833,33	833,33	1.666,67
Lama Pelihara (Hari)	-	150,00	390,00	-
Lama (Hari) Bunting	300,00	-	-	210,00
Lama (Hari) Menyusui	150,00	-	-	-
Biaya Obat (Rp/ Ekor)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
ADG (Kg)	1,20	-	0,51	0,60
Calving Rate	0,63	-	-	-
Kematian (%)	-	5%	-	-
Bunga Bank (%)	5%	5%	5%	5%

Keterangan : asumsi-asumsi ini sesuai kondisi lapangan dan harga yang berlaku pada saat studi

mengharuskan peternak untuk menjadikan pakan sebagai hal yang harus diperhatikan dalam usaha peternakan. Bahan pakan harus mempunyai harga yang layak dan diusahakan jangan bersaing dengan kebutuhan manusia yang sangat utama. Bahan pakan harus dapat diganti oleh bahan pakan lain yang kandungan zat-zat makanannya hampir sama. Bahan pakan tidak mengandung racun dan tidak dipalsukan atau tidak menampakan perbedaan warna, bau, atau rasa dari keadaan normalnya.

Hasil simulasi yang dilakukan, ditemukan bahwa kemampuan usaha ini dapat berjalan jika harga pakan untuk pemeliharaan indukan bunting pada harga maksimal Rp.600/kg, sehingga diperlukan adanya subsidi dari perusahaan feedlot sebesar Rp. 400/kg untuk pakan pada proses pemeliharaan indukan bunting. Selain pakan, lahan juga tidak diperhitungkan dalam analisis ini. Sedangkan, harga-harga lainnya mengikuti kondisi yang berlaku saat penelitian ini. Sejalan dengan pendapat Budihardjo dkk (2011) bahwa pakan memberikan kontribusi biaya terbesar dalam usahaternak sapi potong.

Berdasarkan asumsi pada Tabel 1, maka dilakukan analisis usahaternak seperti tampak pada Tabel 2. Berdasarkan Tabel 2, apabila analisisnya dilakukan secara parsial, tampak bahwa perusahaan feedlot, pada pemeliharaan induk impor bunting sampai melahirkan anak lepas sapih posisinya merugi 15%. Di sisi lain, pada pemeliharaan anak betina lepas sapih mendapatkan keuntungan sebesar 21,44%. Sedangkan pemeliharaan dara memperoleh keuntungan sebesar 0,36% dan penjualan dara bunting lokal sebesar 4,12%.

Namun, karena pemeliharaan ini terus berlanjut, maka sesungguhnya biaya perolehan sapi dari setiap proses produksi mengacu pada HPP (biaya perolehan ditambah biaya pemeliharaan) bukan harga jual (setelah ditambah keuntungan). Kerugian pada tahapan pemeliharaan sapi impor bunting menjadi harga perolehan anak sapi yang dilahirkan seharga Rp. 4.310.547,41 pada pemeliharaan anak betina lepas sapih

dan menjadi tanggungan pada proses pemeliharaan anak sampai dengan lepas sapih. Demikian juga halnya pada pemeliharaan anak lepas sapih sampai sapi dara. Kesimpulannya pada system pemeliharaan ini perusahaan feedlot akan mendapatkan keuntungan usaha sebesar 4,12%, tatkala menjual sapi indukan lokal bunting.

Analisis Usahaternak Pola kemitraan Tahap ke-1

Dalam pola kemitraan tahap ke-1 asumsi yang digunakan berdasarkan hasil survey seperti pada Tabel 3. tampak bahwa agar usaha pada tahapan ini dapat berjalan dan menguntungkan bagi peternak, maka harga beli indukan bunting 6 bulan dipastikan tidak lebih dari Rp.45.000,-/kg. Hal ini berdasarkan hasil analisis terhadap situasi dan kondisi lapangan pada saat penelitian berlangsung. Harga ini, merupakan hasil simulasi yang paling rasional. Pada tahapan ini, setiap nilai kerugian per ekor pada proses pemeliharaan sapi indukan bunting sampai dengan menyusui anaknya yang dipelihara, menjadi nilai acuan harga anak yang baru lahir, sehingga harga anak yang baru lahir per ekor yaitu sebesar Rp. 4.870.173,01 merupakan nilai kerugian dari penjualan induk setelah proses menyusui. Harga pedet tersebut, merupakan harga ideal yang berlaku dilapangan. Sedangkan bobot jual pedet lepas sapih terdapat perbedaan antara sapi pedet betina Rp. 46.666,67/ kg berat hidup, lebih murah daripada harga pedet jantan dengan harga Rp. 53.333,33/Kg berat hidup. Selanjutnya, berdasarkan asumsi-asumsi tersebut pada tabel 3, dilakukan analisis usaha ternak yang tampak pada Tabel 4.

Pada Tabel 4, tampak bahwa terdapat dua kegiatan budidaya pada tahapan ini yaitu pemeliharaan sapi indukan bunting 6 bulan sampai dengan indukan setelah menyusui (lepas sapih) dan pemeliharaan pedet (anak lahir sampai anak lepas sapih). Dari dua aktivitas tersebut pemeliharaan indukan bunting, ternyata merupakan aktivitas usaha

Tabel 2. Analisis Usaha Ternak Pemeliharaan Indukan Impor sampai Menghasilkan Indukan Lokal Bunting 6 Bulan oleh Perusahaan Feedlot

Asumsi	Proses Produksi					
	Induk. Bunting Impor s.d. Menyusui Anak		Anak Betina-Lepas Sapih	Anak Betina Lepas Sapih - Dara	Induk - Bunting 6 Bulan	
	Per Ekor	2000 ekor	Per Ekor	Per Ekor	Per Ekor	1000 ekor
HPP (Rp/ Kg)	53.133	-	36.507,53	42.697,88	42.797,68	-
HPP + Ongkos (Rp/Kg)	-	-	-	-	43.234,61	-
HPP Setelah Kematian 5%	-	-	38.428,98	42.697,88	-	-
L/R (Rp/ Kg)	-8.133	-8.621.094.819	8.237,69	152,12	1.765,39	838.383.111,93
L/R(Rp/ Ekor/ Prod)	- 4.310.547	- 8.621.094.819	1.235.653,05	53.073,00	838.383,11	838.383.111,93
L/R (Rp/ Ekor/ Bulan)	- 538.818	- 1.077.636.852	154.456,63	2.527,29	104.797,89	104.797.888,99
Persentase (%)	-15%	-	21,44%	0,36%	4,12%	-

yang merugikan (-14%). Kerugian ini, ditutupi oleh keuntungan dari penjualan anak lepas sapih, yaitu anak betina dan jantan (Rp. 4.870.173/ekor pedet). Sesungguhnya, HPP indukan setelah lepas sapih sebesar Rp.52.493,00 per kg berat hidup, sedangkan

harga jual nya adalah Rp.45.000,-per kg sehingga nilai kerugian daripada induk setelah menyusui menjadi nilai perolehan anak pada proses budidaya pemeliharaan anak sampai dengan lepas sapih.

Tabel 3. Asumsi Analisis Usahaternak Model Pemeliharaan Tahap-1

Asumsi	Proses Produksi		
	Induk Bunting 6 Bulan - Lepas Menyusui	Anak Betina - Lepas Sapih	Anak Jantan - Lepas Sapih
HPP Beli Sapi (Rp/Ekor)	21.150.000,00	4.870.173,01	4.870.173,01
HPP Beli Sapi (Rp/Kg)	45.000,00	-	-
Bobot Beli (Kg)	470,00	-	-
Bobot Jual (Kg)	650,00	150,00	150,00
Rata-Rata Hpt (Kg/e/h)	-	13,13	13,13
Rata-Rata Konsentrat (Kg/E/H)	-	0,82	0,82
Rata-Rata Pakan Komplit (Kg/E/H)	47,34	-	-
Harga Hpt(Rp/Kg)	-	250,00	250,00
Harga Konsentrat (Rp/Kg)	-	2.800,00	2.800,00
Harga Pakan Komplit (Rp/Kg)	1.000,00	-	-
Harga Jual Sapi (Rp/Kg)	45.000,00	46.666,67	53.333,33
Biaya Sewa Kandang (Rp/Ekor/Hr)	684,93	684,93	684,93
Biaya T. Kerja/ Overhead (Rp/E)	1.666,67	833,33	833,33
Lama Piara (Hari)	-	150,00	150,00
Lama Piara (Hari) Bunting	90,00	-	-
Lama Piara (Hari) Menyusui	150,00	-	-
Biaya Obat (Rp/ Ekor)	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Adg (Kg)	1,20	-	-
Calving Rate	0,63	-	-
Kematian (%)	-	5%	5%
Bunga Bank (5%)	5%	5%	5%

Tabel 4. Analisis Usahaternak Model Kemitraan Pemeliharaan Tahap-1

Asumsi	Proses Produksi					
	Induk Bunting 6 Bulan - Lepas Menyusui		Anak Betina - Lepas Sapih		Anak Jantan - Lepas Sapih	
	Per Ekor	100 ekor	Per Ekor	100 ekor	Per Ekor	100 ekor
HPP (Rp/ Kg)	52.173	-	40.300,55	-	40.300,55	-
HPP + Ongkos (Rp/ Kg)	52.493	-	40.992,22	-	40.992,22	-
HPP Setelah Kematian 5%	-	-	43.149,70	-	43.149,70	-
L/R (Rp/ Kg)	- 7.493	-487.017.301	3.516,97	26.377.247,60	10.183,63	76.377.247,60
L/R (Rp/ Ek/ Periode Prod)	- 4.870.173	-487.017.301	527.544,95	26.377.247,60	1.527.544,95	76.377.247,60
L/R (Rp/ Ekor/Bln)	- 608.772	- 60.877.163	65.943,12	3.297.155,95	190.943,12	9.547.155,95
Persentase (%)	-14	-	8,15	-	23,60	-
Penerimaan Peternak Total (Rp)	-4.470.173	-447.017.301	1.144.732,45	57.236.622,60	2.144.732,45	107.236.622,60
Penerimaan Peternak Bulanan (Rp)	-558.772	-55.877.163	228.946,49	11.447.324,52	428.946,49	21.447.324,52

Pada analisis usahaternak tahap ini, ternyata keuntungan pemeliharaan pedet betina sebesar 8,15% dan pedet jantan 23,6%, atau rata-rata sebesar 15,88% dalam satu periode produksi selama 8 bulan. Tingginya pendapatan pemeliharaan pedet jantan disebabkan karena harga sapi pedet jantan lebih mahal daripada pedet betina. Secara teknis mekanisme operasional kemitraan pembiakan sapi pada tahap-1 seperti tampak pada gambar 2.

Mekanisme Operasional kemitraan sebagai berikut:

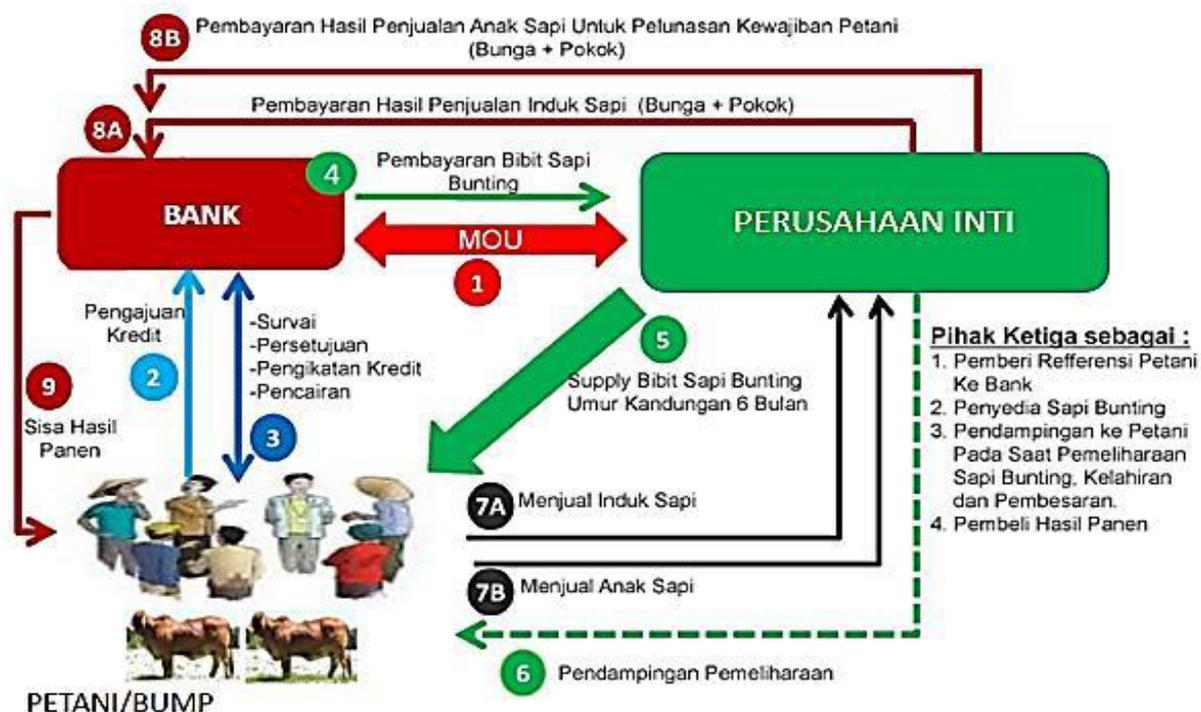
1. Pembuatan MoU, dilakukan antara pihak bank dan perusahaan feedlot berperan sebagai pihak ketiga yang menjamin pasar, teknologi pakan dan pembinaan/pendampingan terhadap kelompok peternak (Kluster).
2. Peternak yang ditunjuk mewakili kelompok peternak (kluster) mengajukan kredit ke bank atau koperasi atau BUMDesa yang menggunakan lembaga ekonomi desa berbadan hukum.
3. Bank melakukan survey (appraisal) terhadap kelompok peternak (kluster) untuk memperoleh persetujuan, pengikatan kontrak dan pencairan dana.
4. Peternak melalui bank yang ditunjuk melakukan pembayaran pembelian sapi dara bunting kepada perusahaan feedlot.
5. Perusahaan feedlot mensupply sapi indukan bunting 6 bulan setelah peternak melakukan pembayaran (*cash and carry*).
6. Perusahaan feedlot melakukan pembinaan/pendampingan pemeliharaan dan pemasaran, serta berperan sebagai:

- a) Pemberi referensi peternak (kluster) ke bank
 - b) Penyedia sapi dara bunting.
 - c) Pendamping peternak dalam proses produksi (budidaya).
 - d) Pembeli hasil panen poin C.
7. Setelah pedet umur 4 bulan, peternak menjual pedet dan induknya kepada perusahaan feedlot dengan harga pasar yang berlaku.
 8. Pembayaran hasil penjualan pedet dan induk dibayarkan oleh bank yang dananya berasal dari pembayaran bunga dan pinjaman pokok.

Analisis Usahaternak Pola kemitraan Tahap ke-2

Pada analisis usahaternak model kemitraan pemeliharaan pada tahap-2 ini menghasilkan sapi bakalan/dara berumur 18 bulan, dengan asumsi yang tampak pada Tabel 5. Asumsi yang digunakan didasarkan kepada situasi dan kondisi serta fenomena yang terjadi selama kajian berlangsung. Pada tahapan ini, pemeliharaan sapi indukan bunting 6 bulan sampai dengan menghasilkan bakalan. Proses budidaya yang dilakukan dibagi menjadi 3 yaitu (1) pemeliharaan indukan bunting, melahirkan sampai dengan menyusui; (2) pemeliharaan pedet sampai dengan lepas sapih; dan (3) Pembesaran anak lepas sapih sampai dengan menjadi bakalan umur 18 bulan sehingga total lama budidaya yang dilakukan adalah 21 bulan.

Pada Tabel 5, tampak asumsi nilai acuan anak lepas sapih pada proses tahapan yang ke tiga (pembesaran anak) adalah HPP anak lepas sapih jantan dan betina bukan harga jual anak lepas sapih yaitu seharga Rp. 4.870.173,01per ekor. Hal ini karena anak lepas sapih yang menjadi input pada aktivitas budidaya ke 2 tidak dijual melainkan



Gambar 2. Mekanisme Opsersional Kemitraan Tahap ke-1 (Agus dkk, 2017)

dilanjutkan aktivitas budidayanya sampai dengan menjadi sapi bakalan jantan/dara, sehingga acuan nilai perolehannya adalah HPP bukan pada harga jual. Sedangkan harga jual anak sapi jantan dan betina, harga jualnya berbeda secara signifikan yaitu Rp. 46.667,67/Kg berat hidup untuk pedet sapi betina dan Rp. 53.333,33/kg untuk pedet sapi jantan.

Berdasarkan asumsi pada Tabel 5, dilakukan analisis usahatani seperti tampak pada table 6. Pada

Tabel 6, dapat diungkap bahwa, kemitraan usaha ternak sapi potong pada tahapan-2 ternyata merugikan sebesar 3,54%. Seperti halnya pada analisis terdahulu, bahwa pemeliharaan Induk Bunting sampai melahirkan dan pembesaran usaha adalah dua kegiatan yang merugikan. Sebenarnya, ternyata hanya kegiatan usaha pemeliharaan pembesaran pedet yang menguntungkan, yaitu sejak dilahirkan sampai dengan lepas sapih.

Tabel 5. Asumsi Analisis Usahaternak Model Pemeliharaan Tahap-2

Asumsi	Proses Produksi			
	Induk Bunting 6 Bulan - Lepas sapih	Anak Betina - Lepas Sapih	Anak Jantan - Lepas Sapih	Lepas Sapih - Bakalan
HPP Beli Sapi (Rp/Ekor)	21.150.000,00	4.870.173,01	4.870.173,01	6.363.244,52
HPP Beli Sapi (Rp/Kg)	45.000,00	-	-	42.421,63
Bobot Beli (Kg)	470,00	-	-	150,00
Bobot Jual (Kg)	650,00	150,00	150,00	352,80
Rata-Rata HPT (Kg/e/h)	-	13,13	13,13	27,34
Rata-Rata Konsentrat (Kg/E/H)	-	0,82	0,82	5,15
Rata-Rata Pakan Komplit (Kg/E/H)	47,34	-	-	-
Harga HPT(Rp/Kg)	-	250,00	250,00	250,00
Harga Konsentrat (Rp/Kg)	-	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Harga Pakan Komplit (Rp/Kg)	1.000,00	-	-	-
Harga Jual Sapi (Rp/Kg)	45.000,00	46.666,67	53.333,33	42.850,00
Biaya Sewa Kandang (Rp/Ekor/Hr)	684,93	684,93	684,93	684,93
Biaya T. Kerja/ Overhead (Rp/E)	1.666,67	833,33	833,33	833,33
Lama Piara (Hari)	-	150,00	150,00	390,00
Lama Piara (Hari) Bunting	90,00	-	-	-
Lama Piara (Hari) Menyusui	150,00	-	-	-
Biaya Obat (Rp/ Ekor)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Adg (Kg)	1,20	-	-	-
Calving Rate	0,63	-	-	-
Kematian (%)	-	5%	5%	-
Bunga Bank (5%)	5%	5%	5%	5%

Tabel 6. Analisis Usahaternak Model Kemitraan pada Pemeliharaan Tahap-2

Asumsi	Proses Produksi	
	Lepas Sapih - Bakalan	
	Per Ekor	100 ekor
HPP (Rp/ Kg)	43.952	-
HPP + Ongkos (Rp/Kg)	44.422	-
HPP Setelah Kematian 5%	-	-
Laba/ Rugi (Rp/ Kg)	- 1.572	- 39.966.621.448
Laba/ Rugi (Rp/ Ekor/ Periode Produksi)	- 554.691	- 55.469.120
Laba/ Rugi (Rp/ Ekor/ Bulan)	- 26.414	- 2.641.387
Persentase (%)	-3,54%	-
Penerimaan Peternak Total (Rp)	2.436.324	243.632.443
Penerimaan Peternak Bulanan (Rp)	187.410	18.740.957

Mekanisme operasional kemitraan pemeliharaan sapi pada tahap-2 secara skematis tampak pada gambar 3.

Mekanisme Operasional kemitraan sebagai berikut:

1. Pembuatan MoU antara pihak bank dan perusahaan feedlot yang berperan sebagai pihak ketiga.
2. Peternak yang ditunjuk oleh kelompok Kluster mengajukan kredit ke bank.
3. Bank melakukan survey (appraisal), persetujuan, pengikatan kontrak dan pencairan dana.
4. Peternak melalui bank melakukan pembayaran pembelian sapi dara bunting 6 bulan kepada perusahaan feedlot.
5. Perusahaan feedlot mensupply sapi dara bunting 6 bulan setelah peternak kluster melakukan pembayaran (cash and carry).
6. Perusahaan feedlot melakukan pendampingan pemeliharaan dan berperan sebagai:

- a. Pemberi referensi peternak kluster kepada bank
 - b. Penyedia sapi dara bunting
 - c. Pendamping peternak dalam proses produksi dan Pembeli hasil panen.
7. Setelah pedet mencapai umur bakalan atau umur 18bulan, peternak menjual sapi bakalan tersebut kepada perusahaan feedlot.
 8. Pembayaran hasil penjualan sapi bakalan tersebut dibayarkan oleh bank yang dananya berasal dari pembayaran bunga dan pinjaman pokok.

Analisis Usahaternak Model Kemitraan Tahap ke-3

Asumsi Pada Model Kemitraan Pemeliharaan Tahap-3 yaitu pemeliharaan indukan bunting 6 bulan sampai dengan menghasilkan sapi siap potong. Lama budidaya yang dilakukan adalah 25 bulan, dan asumsi-asumsi tersebut tampak pada Tabel 7.

Gambar3. Mekanisme Operasional Kemitraan pemeliharaan Tahap-2 (Agus, dkk, 2017)



Tabel 7. Asumsi Analisis Usahaternak Model Kemitraan Tahap-3

Asumsi	Proses Produksi				
	Bunting 6 Bulan - Lepas Menyusui	Anak Betina - Lepas Sapih	Anak Jantan - Lepas Sapih	Lepas Sapih - Bakalan	Bakalan - Sapi Siap Potong
HPP Beli Sapi (Rp/Ekor)	21.150.000	4.870.173	4.870.173	6.363.245	15.506.171
HPP Beli Sapi (Rp/Kg)	45.000	-	-	42.422	43.952
Bobot Beli (Kg)	470	-	-	150	353
Bobot Jual (Kg)	650	150	150	353	497
Rata-Rata Hpt (Kg/e/h)	-	13	13	27	39
Rata-Rata Konsentrat (Kg/E/H)	-	1	1	5	7
Rata-Rata Pakan Komplit (Kg/E/H)	47	-	-	-	-
Harga Hpt(Rp/Kg)	-	250	250	250	250
Harga Konsentrat (Rp/Kg)	-	2.800	2.800	2.800	2.800
Harga Pakan Komplit (Rp/Kg)	1.000	-	-	-	-
Harga Jual Sapi (Rp/Kg)	45.000	46.667	53.333	42.850	42.500
Biaya T. Kerja/ Overhead (Rp/E)	685	685	685	685	685
Biaya Overhead (Rp/E)	1.667	833	833	833	833
Lama Piara (Hari)	-	150	150	390	120
Lama (Hari) Bunting	90	-	-	-	-
Lama (Hari) Menyusui	150	-	-	-	-
Biaya Obat (Rp/ Ekor)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Adg (Kg)	1	-	-	-	-
Calving Rate	1	-	-	-	-
Kematian (%)	-	5%	5%	-	-
Bunga Bank (5%)	5%	5%	5%	5%	12%

Pada Tabel 7, nilai acuan sapi bakalan pada proses penggemukan, adalah HPP bakalan bukan harga jual bakalan yaitu seharga Rp. 15.506.171,00 per ekor atau Rp. 43.952,00 per kg. Hal ini dilakukan karena bakalan yang menjadi input pada aktivitas budidaya penggemukan tidak dijual melainkan dilanjutkan aktivitas budidayanya sampai dengan menjadi sapi siap potong, sehingga acuan nilai perolehannya adalah HPP bukan pada harga jual. Selanjutnya suku bunga bank yang dilakukan dibagi dua yaitu sebesar 5% per tahun diperuntukkan bagi budidaya pengembangbiakan dan bunga bank komersial sebesar 12% per tahun bagi usaha penggemukan.

Berdasarkan asumsi yang tertera pada Tabel 7, dilakukan analisis usahaternak sapi potong, seperti tampak pada Tabel 8. Berdasarkan pada Tabel 8, tampak bahwa keuntungan usaha yang diperoleh peternak rakyat yang melakukan usaha kemitraan dengan Model tahap-3 adalah sebesar 4,13% atau senilai Rp. 2.095.712,00 per ekor. Jika dalam satu kluster sejumlah 100 ekor maka keuntungan yang didapatkan senilai Rp. 209.571.150,00 dalam satu periode produksi. Secara nilai aktivitas budidaya ini memberikan nilai tambah lebih baik daripada Model tahap-1 dan tahap-2. Namun demikian, yang menjadi kendala bagi usaha ini adalah rentang waktu proses budidaya yang relatif lebih lama akan menyebabkan putaran *cashflow* nya lebih lambat. Untuk petani maupun peternak yang memiliki kebutuhan harian yang harus dipenuhi memerlukan pemasukan yang relatif lebih cepat. Untuk itu diperlukan pengaturan *replacement stock* dan struktur populasi yang ditentukan oleh tingkat keberhasilan mengatur sistem perkawinannya.

Tabel 8. Analisis Usahaternak Model Kemitraan Pemeliharaan Tahap-3

Asumsi	Proses Produksi Bakalan – Siap Potong	
	Per Ekor	100 ekor
HPP (Rp/ Kg)	40.395	-
HPP + Ongkos (Rp/Kg)	40.813	-
HPP Setelah Kematian 5%	-	-
Laba/ Rugi (Rp/ Kg)	1.687	83.808.650
Laba/ Rugi (Rp/ Ekor/ Periode Produksi)	838.087	83.808.650
Laba/ Rugi (Rp/ Ekor/ Bulan)	209.522	20.952.163
Persentase (%)	4,13%	-
Penerimaan Peternak Total (Rp)	2.095.712	209.571.150
Penerimaan Peternak Bulanan (Rp)	523.928	52.392.788

Secara teknis operasional pola kemitraan pemeliharaan sapi tahap ke-3 tampak pada gambar 4.

Mekanisme Operasional kemitraan sebagai berikut:

1. Pembuatan MoU antara pihak bank dan perusahaan feedlot yang berperan sebagai pihak ketiga
2. Peternak yang ditunjuk oleh kelompok kluster mengajukan kredit ke bank
3. Bank melakukan survey (Apraisal), persetujuan, pengikatan kontrak dan pencairan dana
4. Peternak melalui bank melakukan pembayaran pembelian dara bunting 6 bulan kepada perusahaan Feedlot.



Gambar 4. Mekanisme Operasional Kemitraan pemeliharaan Tahap ke-3 (Agus dkk, 2017)

Berdasarkan ketiga model kemitraan, maka pemeliharaan tahap 1 dan 3 yang direkomendasikan untuk dilaksanakan oleh perusahaan feedlot bersama peternak rakyat sebagai kelompok peternak klaster. Hal ini disebabkan kedua model kemitraan ini menguntungkan secara finansial bagi kedua belah pihak. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Suryana (2009) dan bahwa peningkatan permintaan terhadap daging sapi membuka peluang bagi pengembangan sapi potong lokal dengan skala agribisnis melalui pola kemitraan. Sistem agribisnis sapi potong merupakan kegiatan yang mengintegrasikan pembangunan pertanian, industri, dan jasa secara simultan dalam suatu kluster. Selain itu menurut Tawaf dan Suryadi (2010) bahwa usaha penggemukan sapi potong yang dikelola oleh peternak rakyat memiliki keunggulan komparatif, sehingga secara finansial menguntungkan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap tiga model kemitraan pada pola usaha pembiakan usahaternak sapi potong rakyat sebagai berikut: Usaha pembiakan sapi potong tidak dapat dilakukan secara intensif yang ditunjukkan oleh tingkat keuntungan yang negative, hal ini mengingat mahalnya biaya pakan yang harus disediakan. Oleh karenanya, usaha ini sangat cocok jika dilakukan secara ekstensif. Agar usaha pembiakan dapat berjalan dengan baik pada pola usaha intensif, maka diperlukan kontribusi perusahaan feedlot terhadap biaya pakan sebesar Rp 400,00/kg dan lahan yang digunakan sebagai kandang. Selain itu, pemerintah harus mampu berkontribusi dengan fasilitas bunga bank 5% per tahun dengan tenggang waktu pembayaran hutang 18 bulan. Dari tiga model kemitraan pembiakan yang dianalisis, maka pola kemitraan tahap pertama dan ketiga yang dapat direkomendasi untuk direalisasikan dengan skala usaha per kelompok 100 ekor.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih disampaikan kepada Prof. Ir. I Gede Suparta Budisatria, M.Sc., Ph.D. sebagai ketua Tim peneliti Fapet UGM, yang telah memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada Penulis dalam melakukan penelitian bersama yang dilakukan oleh Tim peneliti Fapet UGM.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus,A., Suwignyo B., Budisatria IGS., Maharani, D. Widi, TSMW. Triyannanto, E. Wankar, T.J. Wulandari, E. dan Ibrahim, A. (2017). *Kajian Implementasi Instrumen Kebijakan Rasio Impor Sapi Indukan dan sapi Bakalan Dalam Permentan No. 49/ Permentan/Pk440/10/2016 Jo. Permentan No. 02/ Permentan/Pk440/2/2017*. Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- Anggraini, W. (2003). Analisis Usaha Peternakan Sapi Potong Rakyat Berdasarkan Biaya Produksi dan Tingkat Pendapatan Peternakan Menurut Skala Usaha. Fakultas Peternakan Institut Pertanian Bogor.
- Hadi, P.U. dan Ilham, N. (2000). Peluang pengembangan usaha pembibitan ternak sapi potong di Indonesia dalam rangka swasembada daging. Makalah disampaikan pada Pertemuan Teknis Penyediaan Bibit Nasional dan Revitalisasi UPT TA 2000. Jakarta, 11-12 Juli 2000. Direktorat Perbibitan, Direktorat Jenderal Bina Produksi Peternakan, Jakarta
- Hadi, P.U. dan Ilham, N. (2002). Problem dan prospek pengembangan usaha pembibitan sapi potong di Indonesia. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pertanian* 21(4): 148-157.
- Handayani, S. Fariyanti, A., dan Nurmawati, R. (2016). Swasembada Daging Sapi Analisis Simulasi Ramalan Swasembada daging Sapi di Indonesia. *Sosiohumaniora*, 18 (1): 61 – 70
- Handayani, Budiraharjo, K., dan Sanyoto, G. (2011). Analisis Profitabilitas Usaha Penggemukan Sapi Potong Di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. *Jurnal Ilmu-ilmu Pertanian*, 7(1), 1 - 9
- Nono, O.H. (2011). *Dampak Kelembagaan Bagi Hasil Terhadap Kinerja Usaha Penggemukan Sapi Potong di Kabupaten Kupang*. *Sosiohumaniora*, 13(1): 28 – 38
- Poetri, N. A., Basith., A., dan Wijaya N.H. (2014). Analisis Kelayakan Pengembangan Usaha Peternakan Sapi Perah KUNAK. *Jurnal Manajemen dan Organisasi*. V(2). 122-138.
- Umiasih, U., Gunawan, D.E. Wahyono, Anggraini, Y.N. dan Mathius, I.W. (2004). Penggunaan bahan pakan lokal sebagai upaya efisiensi pada usaha perbibitan sapi potong komersial: Prosiding Seminar Nasional Teknologi Peternakan dan Veteriner, Bogor, 4-5 Agustus 2004. Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan, Bogor.
- Sodiq, A. dan Budiono, M. (2012). *Produktivitas Sapi Potong pada Kelompok Tani Ternak di Pedesaan*. *Agripet*, 12,(1,): 28-33
- Suharto. (2004). *Pengalaman pengembangan usaha sistem integrasi sapi-kelapa sawit di Riau*. hlm. 57-63 Prosiding Lokakarya Nasional Sistem Integrasi Kelapa Sawit-Sapi, Bengkulu, 9-10 September 2003. Departemen Pertanian bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Bengkulu dan PT Agrinical.
- Suryana. (2009). *Pengembangan Usaha Ternak Sapi Potong Berorientasi Agribisnis dengan Pola Kemitraan*. *Jurnal Litbang Pertanian*, 28 (1). 29-37

Tawaf, R and Suryadi D. (2010). Response of Feedlot Business to The Beef Market Mechanism Changed in West Java Indonesia. *Journal Lucrări Științifice - vol. 54, Seria Zootehnie*; 87-93

Winarso, B., Sajuti, R. dan Muslim, C. (2005). Tinjauan ekonomi ternak sapi potong di Jawa Timur. *Forum Penelitian Agro Ekonomi* 23 (1): 61-71.

TRANSFORMASI DESAIN *TAROMPA DATUAK* DALAM KONTEKS PERUBAHAN SOSIOKULTURAL

Amrizal dan Sumadi

Dosen Program Studi Seni Kriya FSRD ISI Padangpanjang

E-mail: amrimuchtar2i@gmail.com

ABSTRAK. *Tarompa Datuak* adalah alas kaki yang secara sosiokultural merupakan produk budaya yang terinspirasi dari replika “capal Rasul” yang dibawa oleh saudagar dari Arab dan India. Sesuai dengan pepatah Minang “*sakali aie gadang sakali tapian barubah*” (perubahan waktu) dalam konteks sosialkultural *tarompa* yang awalnya berbentuk replika capal Rasul bertransformasi di tanah Melayu menjadi “capal Melayu” dan di Ranah Minang disebut dengan “*tarompa datuak*”, karena menjadi bagian dari pakaian kebesaran Datuak. ransformasi desain *tarompa datuak* menjadi keharusan dalam konteks perubahan sosiokultural, karena menjadi bagian dari pelestarian produk budaya dan pengembangan potensi *tarompa datuak* yang dilakukan secara optimal dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat pendukungnya. Untuk itu, perlu dilakukan penelitian ini dengan tujuan mengembangkan desain dan kemampuan perajin tarompa datuak serta memperbaiki sistem manajerial usahanya, sehingga potensi kerajinan tarompa datuak dapat dioptimalkan dan menjadi produk kerajinan tangan yang dapat bersaing ditengah percaturan budaya global. Metode yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada metodologi penelitian kualitatif, yaitu metode observasi partisipatif, yaitu observasi aktif. Untuk membuat desain tarompa datuak, kemudian dilakukan beberapa tahap penelitian, yaitu: survei ke pusat kerajinan tarompa datuak; eksplorasi; analisis dan sintesis; perancangan dengan mempertimbangkan faktor kinerja, faktor fungsi, faktor pemasaran dan minat konsumen; lalu ditransformasikan menjadi prototipe tarompa datuak. Untuk pemberdayaan perajin diadakan pelatihan kewirausahaan yang berbasis teknologi.

Kata kunci: Transformasi, *Tarompa Datuak*, Pengembangan Desain, Sosiokultural, Kewirausahaan.

DESIGN TAROMPA DATUAK TRANSFORMATION IN CONTEXT OF SOCIOCULTURAL CHANGE

ABSTRACT. *Tarompa Datuak is sociocultural footwear which is a cultural product inspired by a replica “capal Rasul” brought by merchants from Arab and India. In accordance with the Minang proverb “sakali aie gadang sakali tapian barubah” (time change) in the socio-cultural context of tarompa which was originally shaped replica capal Rasul transformed in Malay land into “capal Malays” and in Ranah Minang called “tarompa datuak”, as being part of Datuak greatness clothes. The transformation of tarompa datuak design is imperative in the context of sociocultural change, since it is part of the preservation of cultural products and the development of the optimal potential of tarompa datuak can provide prosperity for the supporting community . Therefore, it is necessary to conduct this research with the aim to develop the design and ability of tarompa datuak crafters and improve their business managerial system, so that the potential of tarompa datuak handicraft can be optimized and become handicraft product that can compete amid global cultural arena .The method used in this research refers to qualitative research methodology, namely participative observation method, that is active observation .To make tarompa datuak design, then do some stages of research, that is: survey to center of handicraft tarompa datuak; exploration; analysis and synthesis; design with consideration of performance factor, function factor, marketing factor and consumer interest; then transformed into prototype tarompa datuak. For the empowerment of crafters held entrepreneurship training based on technology.*

Key words: Transformation, *Tarompa Datuak*, Design Development, Sociocultural, Entrepreneurship.

PENDAHULUAN

Kerajinan *tarompa datuak* (sendal datuk) adalah bagian dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tradisional yang sampai saat ini masih ada di Sumatera Barat. Namun kalau diperhatikan pertumbuhan dan perkembangan kerajinan *tarompa datuak*, ibarat pituah (petuah) orang Minang, *karakok di ateh batu, iduik sagan mati ndak namuah* “ (tanaman sirih yang tumbuh di atas batu besar, hidup segan matipun tidak mau), artinya perkembangan usahanya lambat dan atau hampir tidak jalan, tetapi masih bertahan. Di sisi lain, UMKM merupakan motor penggerak pembangunan Indonesia

yang menyentuh semua lini (KADIN, 2009: 43). Kerajinan *tarompa datuak*, merupakan usaha kecil yang perlu dilindungi, diberdayakan, dan diberikan peluang usaha agar mampu dan sejajar dengan pelaku ekonomi lainnya, sehingga peran sertanya dalam pembangunan secara optimal. Untuk itu perlu terbangun kemitraan yang strategis dengan pihak-pihak terkait, seperti dengan usaha menengah dan usaha besar termasuk didalamnya Perguruan Tinggi dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan (Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 2001 Tentang Bidang/ Jenis Usaha yang Dicadangkan Untuk Usaha Kecil

dan Bidang/Jenis Usaha Yang Terbuka Untuk Usaha Menengah Atau Besar dengan Syarat Kemitraan, 2001).

Tarompa datuak merupakan bagian dari pakaian kebesaran Datuak (Datuak) yang dipakai Datuak saat upacara adat di Minangkabau. *Tarompa datuak* punya nilai etika dan estetika yang melekat dengan Pemangku Adat/*Pangulu* (Penghulu) yang dalam keseharian dipanggil dengan Datuk di Minangkabau. Sebagai seorang *Pangulu*, dalam berpakaian *Datuak* tentu punya pakaian kebesaran tersendiri. Pakaian itu merupakan cerminan dari perilaku yang menjadi kepribadiannya yang dituntut oleh adat. Pakaian *Datuak* itu terdiri dari: *saluak* (destar), baju *gadang* (besar), *sarawa galembong* (celana lapang), *cawek* (ikat pinggang), *sampiang* (kain yang disarungkan di pinggang), *sandang/salempang* (kain sarung yang diselempangkan ke bahu), *karih* (keris) dan *tungkek* (tongkat), dan *tarompa* (sendal). (Manggis, Karim, & Saus Sutan Bagindo, 1976: 15-22; Mutia, Munir, & Alwi, 1996: 19-61).

Kerajinan *tarompa datuak* adalah salah satu bentuk kriya yang sudah lama berkembang di Sumatera Barat, pada zaman penjajahan Belanda juga sudah ada, sesuai dengan penjelasan Datuak Imuih (82thn) bahwa orang tua beliau yang bernama Datuak Putih sudah membuat kerajinan ini sejak zaman Belanda (Amrizal, 2014: 341-342). Namun secara pasti kapan munculnya kerajinan ini belum ada data yang menjelaskan, akan tetapi keberadaannya dapat dilihat sebagai bagian dari keterampilan lokal masyarakat Minangkabau.

Pada tahun 1960-an di Padangpanjang, kerajinan ini sudah mencapai puncak kesempurnaan bentuknya dan *tarompa datuak* tidak hanya dipakai oleh *Datuak* tetapi dipakai oleh orang-orang kaya di waktu itu. Anwar Datuak Rajo Pangulu (63 thn) menjelaskan bahwa *tarompa datuak* awalnya termasuk barang mewah, dan hanya dipakai oleh orang-orang kaya. Datuak termasuk orang kaya di kaumnya, sehingga dia juga memakai *tarompa* tersebut (Amrizal & Yuliarni, 2016: 2). Hal ini juga sejalan dengan penjelasan Manggis (Manggis et al., 1976: 3) bahwa syarat menjadi *datuak* harus kaya, agar setelah menjadi *datuak* tidak menyusahkan anak kemenakannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Untuk membedakan *tarompa* yang dipakai *datuak* dengan *tarompa* yang dipakai orang kaya atau masyarakat biasa, Datuak Rajo Pangulu menjelaskan bahwa *tarompa datuak* diberi ragam hias atau kain songket pada permukaan (*mukaan/upper*) sedangkan *tarompa* yang dipakai orang kaya bentuk bagian permukaannya polos.

Perkembangan selanjutnya *tarompa datuak* tidak hanya dipakai oleh *Datuak*, tetapi berkembang sebagai salah satu bentuk karya kriya desain (cenderamata) yang sangat menarik dari Sumatera Barat. Kalau kita berkunjung ke Pasar Wisata Bukittinggi, cenderamata yang paling banyak ditemui adalah *tarompa datuak*, karena *tarompa datuak* dapat dimanfaatkan langsung

oleh wisatawan dan selain itu *tarompa datuak* juga sudah dibuat sesuai dengan kebutuhan segmen pasar. Berdasarkan hal itu, sesuai dengan perjalanan waktu, bentuk *tarompa datuak* berkembang dalam berbagai variasi bentuk, ukuran, bahan dan teknik. Setiap perajin *tarompa datuak*, berdasarkan dimensi ruang dan waktu memiliki kreasi produk tersendiri yang berbeda di setiap perajinya.

Tarompa datuak, berdasarkan dimensi ruang dan waktu berkembang menjadi produk untuk industri pariwisata. Namun di sisi lain dapat dilihat bahwa pada dasarnya transformasi *tarompa datuak* ini tidak sejalan dengan penambahan perajinnya, perajin *tarompa datuak* dilihat dalam perjalanan waktu terus berkurang jumlahnya. Hal itu menggambarkan sesuatu kenyataan yang bertolak belakang, di satu sisi sudah ada usaha pengembangan desain dan di sisi lain tidak signifikan dengan pertumbuhan dan kesejahteraan perajinnya.

Sebagai salah satu bentuk usaha di bidang kriya yang sudah lama berkembang, seharusnya usaha kerajinan *tarompa datuak* semakin pesat perkembangannya, namun kenyataannya usaha *tarompa datuak* saat ini sudah tergerus oleh waktu. Pada saat ini jumlah perajinnya semakin berkurang dan tidak ada regenerasinya. Para perajin pada umumnya sudah berumur di atas 50 tahunan dan generasi barunya boleh dikatakan tidak ada. Anak muda/generasi muda lebih memilih cara berwirausaha yang instan (cepat dapat uang/pagi bekerja sorenya langsung memperoleh uang), sulit diajak untuk berusaha di bidang kerajinan *tarompa datuak* ini, karena prosesnya lama dan lambat menghasilkan uang. Di Bukittinggi dan sekitarnya, perajin yang ada secara umum beralih usaha ke produk-produk *tarompa* yang laku di pasar (Muzakir, Wawancara 5 Mei 2017). Penyebab terjadinya hal itu, karena kurang lancar dan bagusnya pemasaran *tarompa datuak*, produk *tarompa datuak* kalah dalam persaingan dengan produk *tarompa* lain yang desain produknya lebih variatif, proses pembuatannya mempergunakan teknologi modern dan harganya lebih murah, dengan demikian di sisi ekonomi usaha kerajinan *tarompa datuak* tidak dapat mencukupi biaya kebutuhan hidup keluarga para perajinnya. Selain itu menurut Datuak Arlen bahan baku *tarompa datuak* terutama kulit samak nabati sulit mendapatkannya (Wawancara, 25 Juli 2015). Tetapi di sisi lain kalau kita cermati dan kita pakai atau gunakan sendiri *tarompa datuak* tersebut setiap hari, ternyata belum nyaman rasanya menggunakan *tarompa datuak*, karena masih terasa berat, keras atau tidak empuk, hak terlalu tinggi dan pada paku sol terlalu kelihatan sehingga kurang elegan. (Amrizal & Yuliarni, 2016: 10).

Sehubungan dengan uraian di atas sebagai produk kriya fungsional atau lebih tepatnya disebut dengan “kriya desain”, yaitu benda atau produk untuk kepentingan ekonomi komersial (MA, 2016: 11), maka produk *tarompa datuak* perlu dikaji secara komprehensif untuk pengembangan desainnya agar keberadaannya

tetap lestari serta perajinnya tetap termotivasi untuk selalu aktif memproduksi. Sesuai dengan hal tersebut, maka penelitian yang dilakukan diarahkan pada pokok permasalahan: pertama, masalah bagaimana mengembangkan desain *tarompa datuak* agar dapat mengikuti selera zamannya, dan kedua bagaimana memberdayakan perajin *tarompa datuak*, agar perajin dan usaha kerajinannya tumbuh dan berkembang dengan baik, sehingga perajinnya sejahtera serta usaha yang sudah mentradisi tersebut tetap lestari. Sukoco & Muhyi, (2015: 158), mengatakan bahwa potensi usaha yang prospektif akan terus berkembang apabila para pengusaha termasuk perajin yang bergerak di bidang usaha tersebut mampu menumbuhkan usahanya dari waktu ke waktu secara berkelanjutan.

Pengembangan desain merupakan suatu upaya peningkatan kualitas produk daya saing produk *tarompa datuak* agar punya daya saing yang lebih baik di pasar yang lebih luas. Upaya peningkatan kualitas produk harus dibarengi dengan peningkatan kemampuan sumber daya manusianya (SDM), terutama dalam penguasaan teknologi, karena perkembangan teknologi selalu diikuti oleh peningkatan keinginan masyarakat (Rofiqah Wahdah & Amalia, 2016: 94). Rufaidah & Sutisna, (2015: 63) juga menjelaskan bahwa SDM yang bergerak pada UMKM dituntut memiliki kompetensi yang perlu dikembangkan setiap saat, sesuai dengan perkembangan selera pasar.

Untuk memberdayakan perajin agar tetap memproduksi dan tidak terputus generasinya, perlu dilakukan pelatihan untuk menumbuhkan jiwa berwirausahanya (Rofiqah Wahdah & Amalia, 2016: 97). Pemberdayaan perajin ini, peneliti merujuk kepada faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pemberdayaan masyarakat miskin yang dikemukakan oleh Daraba, (2015: 167), yaitu: komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Komunikasi antara peneliti atau pembimbing atau pendamping dengan perajin arus lancar, jelas dan konsisten. Memaksimalkan sumberdaya yang ada dengan disposisi yang terstruktur jelas dan profesional.

METODE

Untuk memudahkan proses penelitian, maka ditetapkan sebuah metode penelitian yang dapat menuntun dalam memecahkan permasalahan yang dikemukakan dengan cara ilmiah. Metode penelitian yang digunakan di sini adalah metode *participation observation* yang disebut juga dengan observasi aktif (Soedarsono, 2001: 149). Metode ini diharapkan dapat memandu peneliti mengikuti langkah-langkah sesuai prosedur penelitian.

Perwujudan desain *tarompa datuak* nantinya akan menggunakan alat dan bahan yang mengacu pada bahan dan alat yang digunakan dalam industri sandal dan persepatuan yang berkembang saat ini. Alat dan bahan itu sebagaimana yang diuraikan dalam buku Abdullatif & Iswari, (2002: 7-10) terdiri dari: alat

pres, plong pembuat nama, kayu kasbuk/*solas*, mesin gerinda, jarum, pengaris, gunting, mesin jahit, talenan, palu, open dan *cutter*. Sedangkan bahannya terdiri dari: lem, karet bergelombang/*sol*, karet *simplex*/karet keras, karet ati/penganjal dasar, kulit tersamak, karton duplek, tripleks, *magic tape*/perekat, gesper, slang kecil dan vuring/kain pelapis.

Pada saat akan mendesain *tarompa datuak*, pendekatan terhadap kebutuhan pasar, serta tujuan penelitian dijadikan acuan untuk menentukan konsep awal dari desain ini. Pengembangan desain *tarompa datuak* dilakukan pada bagian tampilan bentuk tali sandal, lapisan cetak, hak dan solnya agar semakin menarik untuk dilihat serta mampu menampilkan sebuah *image* baru dari *tarompa datuak*. Kemudian pengembangan *tarompa datuak* dilakukan melalui pengembangan bahan baku, bentuk, *accessories* serta kenyamanan dalam pemakaian. Adanya pengembangan yang melahirkan *image* baru tersebut maka diharapkan selera pasar terhadap *tarompa datuak* meningkat, *tarompa datuak* punya nilai tawar yang baik ditengah-tengah masyarakat dan menjadi kerajinan yang punya daya saing ditengah percaturan budaya global.

Untuk itu dalam mendesain *tarompa datuak* sebagai suatu aktivitas dan karya budaya yang memiliki makna bagi perkembangan peradaban masyarakat Minang perlu diadopsi konsep estetika Jepang yang dijelaskan oleh Kenji Ekuhan (Sachari, 1986:18-34). Ekuhan menyatakan bahwa dalam mendesain ada dikenal dengan konsep “estetika kesederhanaan” yaitu mempertemukan elemen-elemen yang kompleks menjadi satu kesatuan untuk melahirkan bentuk-bentuk yang sederhana. Pada estetika kesederhanaan dimana kompleksitas (keruwetan) tertanam dalam simplisitas (kesederhanaan), sederhana tapi bernilai, berkualitas, mempesonakan dan mencapai kemewahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Transformasi Desain *Tarompa Datuak*, Ditinjau dari Aspek Sosiokultural

Transformasi menurut Putra (2006: 61) menunjuk pada berubahnya sesuatu tetapi seolah-olah tanpa melalui sebuah proses Transformasi diterjemahkan sebagai alih-rupa, perubahan hanya terjadi pada permukaannya saja atau hanya kulit luarnya saja, pada tataran bagian dalam tidak terjadi perubahan. Hal ini artinya identitas ataupun karakter dari produk yang berakar dari budaya lokal itu masih ada dan melekat dengan utuh. Adapun kunci transformasi menurut Zulaikha (2008: 1) terletak pada peningkatan kualitas SDM perajin, setelah itu introspeksi terhadap keunikan produk yang digeluti sebagai modal pengembangan desain, dan pengaturan manajemen. (Amrizal, 2010: 17-18).

Tarompa datuak menurut Datuk Imuih (Amrizal & Yuliarni, 2016: 4), dalam hal bentuknya sangat sesuai dengan pakaian kebesaran *Datuak* yang lainnya dan

serasi. Artinya bentuk *tarompa* dengan pakai hak tinggi lebih kurang 3 cm, talinya 3 tancapan (1 di depan dan 2 di belakang) dan dibuat dengan kulit asli, sehingga menjadikan *tarompa* tersebut sangat serasi dan sangat cocok dipakai oleh *Datuak*. *Tarompa* tersebut serasi bentuknya dengan pakaian kebesaran *Datuak* yang lainnya, yaitu: destar, baju hitam besar lengan panjang, celana hitam besar kaki, kain sandang, kain samping, keris, tongkat, dan asesoris lainnya yang dipakai saat upacara adat, hal itu jelas menambah wibawa seorang *Datuak* di hadapan kaumnya/anak kemenakannya. Seandainya *Datuak* pakai sepatu, justru sangat tidak serasi dengan pakaian kebesaran *Datuak* yang lainnya, bahkan akan kelihatan tidak pantas/janggal. Celana hitam besar kaki yang terpasang di atas mata kaki (isbal) sangat serasi disatukan dengan alas kaki berupa *tarompa datuak* dari pada dengan memakai sepatu, *Datuak* akan tampil lebih berwibawa dan fleksibel dalam bergerak pada setiap upacara adat.

Untuk proses pembuatan *tarompa datuak* pada awalnya sangat sederhana, yaitu dengan bahan kulit samak *uba* (*uba* = bahan penyamak kulit dan pewarna kulit dari kulit kayu *uba*/sejenis kayu akasia) atau samak semi kroom, tenun songket, kertas pola, paku sepatu, lem sintesis, benang nylon, vuring, tamsin (besi pingang), gesper dan karet ban (karet ban mobil yang sudah seset). Kulit yang digunakan ada dua jenis, yaitu kulit sapi untuk sol dan kulit kambing untuk tali dan *mukaan* sandal (bagian muka/depan sandal). Untuk alat yang digunakan juga dengan menggunakan peralatan yang sederhana, seperti pisau seset, palu besi, mesin jahit hitam (mesin jahit tua yang warnanya hitam), pensil, jarum, kayu gosokan, kertas karton/kertas pola, lilin, dan kayu gelondongan setinggi 50 cm dengan diameter 30-40 cm. Sedangkan untuk teknik yang digunakan adalah: teknik pola, gosok/*glazing*, potong, kempa, seset manual, cap/stempel, jahit, lem dan paku. (Amrizal & Yuliarni, 2016: 25-42).

Proses pembuatan *tarompa datuak* pada awalnya menggunakan teknik yang juga sangat sederhana, yaitu terlebih dahulu membuat dan menetapkan pola dasar, tanpa melalui sketsa dan desain. Pola pertama, pola untuk *upper* (atasan/tali), terdiri dari pola tali jepit dan *mukaan*. Kedua pola untuk *bottom* (bawah/sol), yang terdiri dari sol dan hak. Untuk tahap berikutnya sebelum dilakukan pemindahan pola kekulit kulit digosok terlebih dahulu dengan kayu gosokan (*glazing*) agar berkilat, kemudian dilanjutkan kepemolaan pada kulit dan dilanjutkan dengan pepotogan kulit sesuai dengan pola. Setelah itu dilakukan proses perakitan dengan teknik seset, lem, jahit dan paku. Untuk finishing pada bagian sisi sol agar mengkilat, sisi-sisi sol di olesi dengan lilin, kemudian digosok dengan kayu *likut*. (Amrizal & Yuliarni, 2016: 48-59).

Penetapan ukuran/penomoran dalam pembuatan *tarompa datuak* berpedoman pada ukuran kaki sipembuat/

perajin atau pemesan, artinya tanpa menggunakan acuan/cetakan atau solas. Perajin menetapkan besar kecil ukuran *tarompa datuak* berdasarkan perbandingan ukuran kaki perajin. Untuk membuat ukuran yang besar, maka ukurannya diletakkan sedikit dari ukuran kaki perajin dan untuk membuat ukuran yang kecil, perajin membuatnya dengan mengurangi ukurannya sedikit dari ukuran kaki perajinnya. Kalau ada ukuran yang lain, harus menyesuaikan dengan ukuran yang ada atau dipesan untuk di ukur langsung oleh perajinnya. (Herman, wawancara, 30 Juli 2015).

Pada bagian *upper* (atasan), yang pertama dipersiapkan yaitu *mukaan* (tali sandal), kulit dipotong sesuai ukuran pola untuk *mukaan*. *Mukaan* bagian tengahnya diisi dengan tali sabut kelapa atau tali ijuk dan atau tali plastik ukuran 0.3 mm agar berbentuk bulat, kemudian di lem dan dijahit. *Mukaan* dibuat dua lapis, lapisan luar digunakan kulit samak nabati atau tenun songket Pandai Sikek dan pada bagian lapis kedua juga digunakan kulit samak nabati atau diberi vuring, kemudian dilem dan dijahit. *Mukaan* bagian luar yang menggunakan kulit samak nabati, biasanya kulit tersebut dicap/stempel, ditatah, di sulam, dan atau diberi manik-manik. Untuk bagian *bottom* (bawah), sol dan hak/tumit digunakan kulit sol samak nabati atau samak *uba*, perakitan setiap bagian sol dan tumit/hak menggunakan paku atau lem sintesis. Sol pada dasarnya terdiri dari: *lemek* (sol lapis atas atau pada sepatu disebut *insole* sol dalam atau tapak bagian atas), sol tengah, sol luar dan setengah sol (berbahan/karet sol), dan hak juga terdiri dari lapisan tengah (lapisan hak) dan lapisan luar (cup/tutup hak). Pada awal berkembangnya kerajinan *tarompa datuak*, untuk membuat solnya hanya menggunakan kulit samak *uba* dan perakitannya tidak menggunakan lem, tetapi hanya menggunakan paku saja, hal ini disebabkan oleh kulit samak *uba* kalau dilem tidak tahan lama, karena kandungan airnya masih tinggi. (Amrizal & Yuliarni, 2016: 51-54).

Berdasarkan ruang dan waktu, bahan, alat dan teknik yang digunakan perajin juga mengikuti perkembangan zamannya, yaitu mengikuti perkembangan alat untuk industri alas kaki lainnya. Bahan yang digunakan selain bahan yang disebutkan di atas, pada saat ini sudah menggunakan bahan karet mika, karet ati/karet sol tenggah, dan *shoepolish* untuk finishing. Peralatan yang digunakan sudah menggunakan mesin ampelas, mesin jahit *phostbad*, plong tunggal, plong ganda, cutter, pemasang keling, landasan kaki tiga, pahat hias dan pahat kerawang. Sedangkan teknik yang baru digunakan adalah teknik press, gerinda, seset mesin, kerawang, anyam dan sulam. Bentuk dan fungsi *tarompa datuak* juga bertransformasi mengikuti zamannya. Dilihat dari sisi bentuk, pada bagian atasan dan sol *tarompa datuak* berkembang sesuai dengan selera pasar dan konsumennya. Untuk fungsi juga demikian, *tarompa datuak* yang digunakan untuk sebagai bagian dari pakaian

kebesaran Datuak berkembang menjadi produk yang dapat dipakai oleh semua kalangan dan produk untuk industri pariwisata. (Amrizal & Yuliarni, 2016: 13, 62)



Gambar 1. Bentuk Transformasi Desain Bagian Atasan Tarompa Datuak dalam Dimensi Ruang dan Waktu (Foto: Amrizal, 2017)



Gambar 2. Beberapa Bentuk Transformasi Bagian Sol Tarompa Datuak dalam Dimensi Ruang dan Waktu (Foto: Amrizal, 2017)

Pengembangan Desain Tarompa Datuak

Pengembangan pada dasarnya merupakan suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan konseptual, teoritis, teknis dan moral individu sesuai dengan kebutuhan pekerjaan, dan jabatan melalui pendidikan dan pelatihan (Alyas & Rakib, 2017: 116). Widagdo (2005: 8a), menjelaskan bahwa istilah desain sangat luas pengertiannya, jadi yang dimaksud dalam tulisan ini adalah wujud perancangan yang menghasilkan wujud benda untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dalam lingkup seni rupa dan desain yang berorientasi ekonomi pasar serta produksi masa. Sementara itu dalam hal pengembangan desain yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah usaha untuk melakukan inovasi terhadap produk yang sudah adasehingga produk tersebut lebih variatif sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen atau selera pasar melalui langkah-langkah penciptaan karya/produksehingga memiliki makna bagi perkembangan peradaban masyarakat.

Desain sebuah produkmenjadi faktor yang penting dalam pengembangan produk.Bagi pengusaha desain produk yang baik adalah yang mudah diproduksi dan didistribusikan, sedangkan bagi konsumen desain produk yang baik adalah yang menyenangkan mata dan mudah

dibuka, dipasang, digunakan, diperbaiki dan dibuang (Mahmud & Eko Agus Alfianto, 2014: 30).Secara umum faktor penentu keberhasilan produk terletak pada konsumen, untuk itu desain yang dibuat harus disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan konsumenHaryono & Bariyah, (2014: 71). Selain itu dalam mendesain sandal, nilai kenyamanan si pemakai harus menjadi prioritas utama dan dalam menentukan ukuran harus mengikuti standar ukuran yang baku (Abdullatief & Iswari, 2002: 3).Untuk itu keinginan pengusaha (produsen) dengan keinginan konsumen harus sinkron dalam sebuah desain.

Langkah awal dalam pembuatan desain yaitu: memikirkan model desain yang layak untuk dikembangkan (pencarian ide kreatif); mewujudkan dalam berbagai macam model produk (sketsa alternatif); kemudian dilanjutkan dengan menentukan ukuran dan memilih model yang nyaman, serasi dan menarik (membuat gambar kerja); langkah selanjutnya melakukan validasi kepada ahlinya (kriyawan atau perajin yang empu), agar desain yang dibuat maksimal sebelum dibuat menjadi produk yang siap untuk dipasarkan (Mulya & Mutmainah, 2017: 378). Pendapat itu sejalan dengan yang dipaparkan oleh SP.Gustami (2007: 329), yaitu terdapat tiga tahap penciptaan produk kriya: (1) eksplorasi (problem solving, acuan visual); (2) perancangan (menvisualkan ide dalam bentuk sketsa yang berlanjut sampai gambar kerja, prototipe); dan (3) perwujudan (buat produk sesuai prototipe, evaluasi/uji kelayakan).

Saidani, Rachman & Rizan, (2013:205) menjelaskan bahwa desain menawarkan tiga hal, yaitu: fungsi, estetika dan daya tarik. Seterusnya Mahmud & Alfianto, (2014: 30), juga menegaskan bahwa masalah desain dari sebuah produk sangat perlu mendapatkan perhatian serius dari team pengembangan produk atau pihak produsen, karena untuk dapat bersaing disetiap segmen pasar, suatu produk harus mampu memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumennya, baik dari aspek fungsi, estetika ataupun daya tarik yang dimiliki produk tersebut. Untuk itu, maka pengembangan desain *tarompa datuak* dimulai dari tahap mentransformasikan *tarompa datuak* menjadiproduk yang bukan sekedar menjadi pakaian kebesaran para Datuk saja, melainkan sudah menjadi produk untuk semua segmen pasar dan termasuk untuk industri pariwisata. Yoety (2008: 27) mengatakan industri pariwisata turut melestarikan dan mendorong kreatifitas para perajin serta sekaligus memperluas pasar ke dunia internasional.

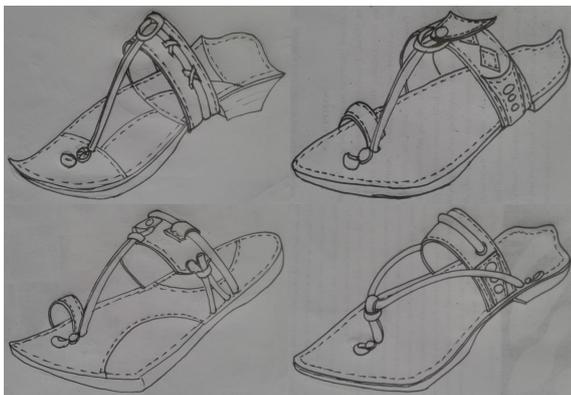
Pembuatan desain *tarompa datuak* diawali dari melakukan eksplorasi seluruh produk *tarompa datuak* yang ada di sentra-sentra kerajinan *tarompa datuak* yang ada di Padang Panjang dan Di Bukittinggi sekitarnya serta ditambah dengan browsing aneka model sandal di internet untuk mendapatkan ide kreatif. Produk yang ada sentra-sentra atau di toko tersebut di foto, sebagian dibeli untuk contoh real dalam pengembangan desain.

Perkembangan model sandal yang di pasar-pasar juga difoto dan yang di-*browsing* di internet di *print*, sehingga dapat jadi inspirasi dalam mendapatkan model yang sesuai dengan tren.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukandi Padang Panjang dan Bukittinggi sekitarnya ditemukan beberapamodel dan ukuran *Tarompa datuak* yang kemudian digunakan sebagai inspirasi untuk pengembangan desain atau pembuatan desain baru dalam penelitian ini. *Tarompa datuak* itu ada yang model biasa/ model standar, model klasik dan model petak. Tali atau mukaan ada yang polos dan ada yang diberi hiasan dengan di cap, di sulam, di anyam dan di beri tenun songket. Sedangkan sol ada yang berbentuk standar dan ada yang berbentuk klasik serta ketebalan sol antara 1 – 1.5 Cm dan hak 3 – 3.5 Cm.

Untuk bahan yang digunakan sudah beraneka ragam, ada yang menggunakan kulit samak nabati kombinasi songket Panadai Sikek untuk *tarompa datuak* yang asli dan kulit samak *chroom*, dan ada yang memakai kulit samak nabati kombinasi oscar, vinil dan karet ati untuk *tarompa datuak* yang sudah bertransformasi. Produk yang asli sol dan hak semuanya menggunakan bahan kulit samak nabati dan untuk membuat ketebalannya menggunakan paku, sedangkan *tarompa datuak* yang sudah bertransformasi solnya menggunakan karet ati dan untuk menambah ketebalannya menggunakan lem sintesis. Dihat dari sisi beratnya produk, *tarompa datuak* yang asli dengan sudah bertransformasi juga sangat jauh berbeda, yang asli beratnya lebih kurang 700 gram sampai dengan 800 gram, sedangkan yang sudah bertransformasi beratnya hanya 450 gram sampai dengan 500 gram.

Setelah eksplorasi dianggap cukup, maka dilakukan perancangan yang diawali dari membuat sketsa-sketsa alternatif, kemudian sketsa dipilih yang terbaik dan dipindahkan menjadi gambar kerja. Pada gambar kerja sudah tergambar ukuran yang jelas dan pecah pola sesuai elemen-elemen *tarompa* yang dirancang. Gambar kerja tersebut sebelum diwujudkan menjadi sebuah prototipe, terlebih dahulu di konsultasikan atau divalidasi keperajin di Padang Panjang dan Bukittinggi, dan setelah itu diwujudkan menjadi sebuah prototipe. Prototipe ini setelah dievaluasi/uji kelayakan, maka desain baru *tarompa datuak* siap untuk diproduksi.



Gambar 3. Bentuk Pengembangan Desain *Tarompa Datuak* (Desain: Amrizal, 2017)

Pemberdayaan Perajin

Produk alas kaki merupakan salah satu produk yang dibutuhkan konsumen untuk semua kalangan. Dewasa ini, alas kaki tidak sekedar untuk melindungi kaki agar tidak kotor atau cidera, tetapi sudah menjadi bagian dari gaya hidup. *Tarompa datuak* bukan sekedar menjadi pakaian kebesaran para Datuk, melainkan sudah menjadi produk untuk semua segmen pasar. Jadi dengan demikian sangat diperlukan desain baru dan pemberdayaan perajin agar usaha kerajinan *tarompa datuak* tumbuh dan berkembang sesuai zamannya.

Untuk meningkatkan daya saing usaha kerajinan *tarompa datuak* di tengah percaturan budaya global, perlu di adopsi strategi yang dikemukakan (Nurzamzami & Siregar, 2014:29), yaitu: mengadakan pelatihan motivasi, pelatihan kewirausahaan, peningkatan mutu dan kinerja perajin; memperluas pangsa pasar dengan memanfaatkan media semua promosi; meningkatkan kualitas dan karakter produk; serta menggunakan teknologi untuk menghasilkan produk yang bermutu, inovatif dan promosi yang efektif. Harefa & Siadari, (2008: 16-24) mengatakan bahwa orang yang berjiwa wirausaha/berbakat wirausaha atau sedikit memiliki bakat atau tidak merasa memiliki bakat wirausaha perlu di motivasi melalui pembelajaran yang berkelanjutan, lingkungan yang kondusif, terbuka, mengakui keunggulan orang lain dan belajar dari kesuksesan orang lain.

Wirausaha secara leksikal sama dengan wiraswasta yaitu orang yang pandai atau berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk pengadaan produk baru, memasarkannya, serta mengatur permodalan operasinya (<http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/kbbi/>, diakses 28 Agustus 2017). Wirausaha saat ini sangat terkenal disebut dengan *entrepreneur* yang artinya pengusaha, dan usahawan. Ciputra, (2009: 61-62) mengatakan bahwa seorang *entrepreneur* pasti seorang pengusaha tetapi tidak semua pengusaha adalah *entrepreneur*; seorang *entrepreneur* adalah orang yang mampu mengubah kotoran dan rongsokan menjadi emas. Jadi pengembangan kemampuan *entrepreneur* ini dimaksudkan sebagai suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan konseptual, teoritis, teknis dan moral perajin untuk dapat memiliki jiwa kewirausahaan, agar usaha kerajinan *tarompa datuak* tetap tumbuh dan berkembang dengan baik, sehingga kehidupan perajinnya sejahtera dan usaha yang sudah mentradisi di Ranah Minang tetap lestari.

Perancangan desain ada “estetika kesederhanaan”, dalam kewirausahaan ada “kekuatan kesederhanaan” (*the power of simplicity*). Seorang wirausahawan bisa kreatif, berani, bisa bertindak dan berpikir cepat, menjadi ahli dan menguasai keadaan, karena mereka menikmati kekuatan dari kesederhanaan, mereka berfikir tidak ruwet, mereka mengerjakan yang mereka kenali dan segala hal yang sulit mereka buat menjadi sederhana. Thomas A. Edison mengungkapkan bahwa “karena berpakaian

yang kompleks dan menggunakan cara berfikir seperti orang bekerja, banyak peluang yang hilang”. Banyak orang berpikir dirinya dipandang hebat kalau mereka bisa membuat yang mudah menjadi sulit, dalam kewirausahaan sebaliknya harus dilakukan, kalau anda membuatnya menjadi kompleks tidak akan bertahan. (Kasali, 2010: 55-57).

Setelah diadakan pelatihan motivasi kewirausahaan, peningkatan mutu dan kinerja perajin, maka untuk mengukur keberhasilannya dapat digunakan konsep *entrepreneurial marketing* yang dikemukakan oleh Septiani, Sarma, & Limbong, (2013: 92,108). *Entrepreneurial marketing* merupakan sebuah pendekatan yang berorientasi pada inovasi dan penerapan strategi *bottom-up* (penyesuaian produk dengan permintaan konsumen). Perbaikan dalam hal pemberdayaan perajin *tarompa datuak* dapat dikatakan berhasil apabila terjadi peningkatan kemampuan daya saing yang tercermin dari indikator: peningkatan jumlah pelanggan, peningkatan cakupan wilayah pemasaran, peningkatan jumlah penjualan produk kepada pelanggan baru.

SIMPULAN

Tarompa datuak merupakan *tarompa* pakaian kebesaran Datuk di Ranah Minang Sumatera Barat. Transformasi desain *tarompa datuak* tidak lepas dari konteks perubahan sosiokultural. Berdasarkan dimensi ruang dan waktu kerajinan *tarompa datuak* berkembang mengikuti perubahan perilaku masyarakat pendukungnya. Proses pembuatan *tarompa datuak* pada dasarnya sangat sederhana, seiring perjalanan waktu, proses pembuatan *tarompa datuak* mengikuti perkembangan proses produk alas kaki secara umum. Pembuatan desain *tarompa datuak* diawali dari melakukan eksplorasi seluruh produk *tarompa datuak* yang ada di sentra-sentra kerajinan *tarompa datuak* yang ada di Padang Panjang dan Di Bukittinggi sekitarnya serta ditambah dengan browsing aneka model sandal di internet untuk mendapatkan ide kreatif; kemudian dilakukan perancangan yang diawali dari membuat sketsa-sketsa alternatif, kemudian sketsa dipilih yang terbaik dan dipindahkan menjadi gambar kerja; dan terakhir diwujudkan menjadi sebuah prototipe. Prototipe ini setelah dievaluasi/uji kelayakan, maka desain baru *tarompa datuak* siap untuk diproduksi. Untuk pemberdayaan perajin *tarompa datuak* diadakan pelatihan motivasi, pelatihan kewirausahaan, peningkatan mutu dan kinerja perajin; workshop memperluas pangsa pasar dengan memanfaatkan media semua promosi. Disamping itu juga diadakan workshop untuk meningkatkan kualitas dan karakter produk; serta pelatihan menggunakan teknologi untuk menghasilkan produk yang bermutu, inovatif dan promosi yang efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullatief & Iswari, D. (2002). *Membuat Sandal & Sepatu Santai untuk Wirausaha*. Jakarta: Pustaka Swara. Jakarta: Pustaka Swara.
- Alyas & Rakib, M. (2017). Strategi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam Penguatan Ekonomi Kerakyatan (Studi Kasus Pada Usaha Roti Maros di Kabupaten Maros). *Sosiohumaniora*, 19(2), 115–121.
- Amrizal (2010). Transformasi Wayang Kulit Pedalangan ke Wayang Kulit Cenderamata di Pucung, Imogiri, Yogyakarta. Yogyakarta.
- Amrizal (2014). Kerajinan Kulit Padangpanjang: Antara Peluang dan Tantangan. *Jurnal Ranah Seni: Jurnal Seni Dan Desain*, 7(2), 339–352.
- Amrizal & Yuliarni. (2016). Proses Produksi Kerajinan Tarompa Datuk. Padangpanjang: LPPMPP ISI Padangpanjang.
- Ciputra (2009). *Ciputra Quantum Leap: Entrepreneurship mengubah Masa Depan Bangsa dan Masa Depan Anda*. Jakarta: Gramedia.
- Daraba, D. (2015). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar Propinsi Sulawesi Selatan. *Sosiohumaniora*, 17(2), 168–169.
- Harefa, A. & Siadari, E.E. (2008). *The Ciputra Way Praktik Terbaik Menjadi Entrepreneur Sejati*. Jakarta: Gramedia.
- Haryono, M. & Bariyah, C. (2014). Perancangan Konsep Produk Alas Kaki dengan Menggunakan Integrasi Metode Kansei Engineering dan Model Kano. *Jurnal Ilmiah Teknik Industri*, 13 (1), 71–82.
- Herman. (n.d.). Pengusaha kerajinan tarompa datuak “Merapi Shoes” di Bukittinggi. Bukittinggi: Wawancara.
- <http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/kbbi/>.(n.d.). Kewirausahaan.
- KADIN. (2009). *Roadmap Pembangunan Ekonomi Indonesia 2009-2014*. Jakarta: www.kadin.indonesia.or.id.
- Kasali, R. (2010). *Wirausaha Muda Mandiri: Ketika Anak Sekolah Berbisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 2001 Tentang Bidang/Jenis Usaha yang Dicadangkan Untuk Usaha Kecil dan Bidang/

- Jenis Usaha yang Terbuka Untuk Usaha Menengah atau Besar dengan Syarat Kemitraan (2001).
- Mahmud, & Alfianto, E.A. (2014). Pengaruh Desain Produk dan Layanan Purna Jual Terhadap Keputusan Konsumen Membeli Sepeda Motor Yamaha Merek New V-IXION FI (Full Injection) (Studi pada Konsumen Sepeda Motor Yamaha Merek New V-IXION FI (Full Injection) di Adiguna Sakti Motor Pandaan). *Jurnal Sketsa Bisnis*, 1, 1130–1132.
- Manggis, M.R.D.R.P., Karim, A. & Bagindo, S.S. (1976). *Limpapeh: Adat Minangkabau (Jilid II)*. Bukittinggi: Perc. Unit II Bkt.
- Mulya, A.N. & Mutmainah, S. (2017). Pengembangan Desain Produk Anyam Bambu di Desa Sukolilo Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan. *Jurnal Seni Rupa*, 5 (2), 375–384.
- Mutia, R., Munir, D. & Alwi, N. (1996). *Pakaian Penghulu Minangkabau*. Padang: Proyek Pembinaan Permuseuman Sumatera Barat.
- Muzakir. (2017). Wawancara dengan Perajin Tarompa Datuak di Panta, 5 Mei 2017. Kabupaten Agam.
- Nurzamzami, A. & Siregar, E.H. (2014). Peningkatan Daya Saing UMKM Alas Kaki di Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor dan Implikasinya terhadap Strategi Pemasaran. *Jurnal Manajemen Dan Organisasi*, V (1), 15–29.
- Rofiqah Wahdah, & Amalia, H.S. (2016). Pengembangan Daya Saing Produk pada Sentra Kerajinan Purun di Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan. *Jurnal Spread*, 6 (2), 89–99.
- Rufaidah, P. & Sutisna. (2015). Kapabilitas Dinamis UMKM Industri Kreatif Jawa Barat. *Sosiohumaniora*, 17 (1), 60–66.
- Sachari, A. (1986). *Seni Desain dan Teknologi: Antologi Kritik, Opini dan Filosofi*. Bandung: Pustaka.
- Saidani, B., Rachman, M.A. & Rizan, M. (2013). Pengaruh Kualitas Produk dan Desain Produk Terhadap Keputusan Pembelian Sepatu Olahraga Futsal Adidas Di Wilayah Jakarta Timur. *Jurnal Riset Manajemen Sains Indonesia*. *Jurnal Riset Manajemen Sains Indonesia (JRMSI)*, 4 (2), 201–217.
- Septiani, S., Sarma, M. & Limbong, W.H. (2013). Pengaruh Entrepreneurial Marketing dan Kebijakan Pemerintah terhadap Daya Saing Industri Alas Kaki di Bogor. *Jurnal Manajemen Dan Organisasi*, IV (2), 91–111.
- Soedarsono, R.M. (2001). *Metode Penelitian Seni Pertunjukan dan Seni Rupa*. Bandung: Masyarakat Seni Pertunjukan Indonesia.
- Gustami, SP. (2007). *Butir-Butir Mutiara Estetika Timur: Ide Dasar Penciptaan Seni Kriya Indonesia*. Yogyakarta: Prasista.
- Sukoco, I. & Muhyi, H. A. (2015). Ecopreneurship Dalam Menumbuhkan Usaha Berwawasan Lingkungan Pada Sentra Industri Penyamakan Kulit Suka-regang Kabupaten Garut. *Sosiohumaniora*, 17(2), 156–165.
- Widagdo. (2005). *Desain dan Kebudayaan*. Bandung: ITB.
- Yoety, O.A. (2008). *Ekonomi Pariwisata: Introduksi, Informasi dan Implementasi*. Jakarta: Kompas.

ANALISIS KEBERLANJUTAN PERKEBUNAN KARET DI PULAU SARAK KABUPATEN KAMPAR RIAU

Shorea Khaswarina dan Eliza

Jurusan/Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Riau

E-mail: shoreakhaswarina@yahoo.co.id

ABSTRAK. Usaha perkebunan karet rakyat di Pulau Sarak Kabupaten Kampar masih menghadapi banyak kendala. Tujuan penelitian untuk mengatasi kendala tersebut yaitu menganalisis keberlanjutan sistem usahatani karet di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Metode penelitian adalah survei. Hasil penelitian adalah tingkat keberlanjutan (Ikb) usahatani karet di Kabupaten, secara ekonomi cukup baik dan secara sosial dapat diterima oleh masyarakat, secara ekologis tidak berbahaya bagi lingkungan. Dimensi sosial lebih dominan dalam menentukan keberlanjutan dibandingkan dimensi ekonomi dan lingkungan. Faktor-faktor yang rentan terhadap keberlanjutan usahatani karet di Kabupaten Kampar adalah stabilitas harga hasil pertanian pada saat panen (dimensi ekonomi), pH air di lahan pertanian dan fluktuasi debit air pada lahan petani (dimensi lingkungan).

Kata kunci: indeks keberlanjutan karet, dimensi sosial, ekonomi, lingkungan.

SUSTAINABILITY ANALISYS OF RUBBER PLANTATION IN SARAK ISLAND DISTRIC KAMPAR RIAU

ABSTRACT. *The smallholder rubber plantation business in Sarak Island Kampar Regency still faces many obstacles. The objective of this research is to analyze the sustainability of rubber farming system in Kampar regency, Riau Province. The research method is survey. The result of this research is the level of sustainability (Ikb) of rubber farming in Regency, economically good enough and socially acceptable by society, ecologically not harmful to the environment. Social dimensions are more dominant in determining sustainability than economic and environmental dimensions. Factors that are susceptible to sustainability of rubber farming in Kampar regency are price stability of agricultural produce at harvest time (economic dimension), water pH in agricultural land and fluctuation of water debit on farmer's land (environmental dimension).*

Key words: *rubber sustainability index, social dimension, economy, environment*

PENDAHULUAN

Kebijakan pemerintah Indonesia tentang pertanian berkelanjutan telah sesuai dengan konsep dari *Food Agricultural Organization* (FAO) terkait pembangunan pertanian berkelanjutan. FAO menawarkan mekanisme untuk melaksanakan tindakan nyata menuju pencapaian Pertanian Berkelanjutan dan Pembangunan Pedesaan (*Sustainable Agriculture and Rural Development*). Demikian pula melalui konferensi tingkat tinggi PBB telah ditekankan pentingnya pertanian berkelanjutan, sehingga memberikan kontribusi terhadap ketahanan pangan dan pengelolaan sumber daya alam (FAO, 2002). Upaya mewujudkan pertanian berkelanjutan, setiap usahatani harus berorientasi pada proses pencapaian produksi yang menguntungkan dan efisien dengan menekankan pada perbaikan manajemen, dan pencegahan penyakit.

Kabupaten Kampar merupakan salah satu sentra produksi karet di Provinsi Riau. Tahun 2013 luas perkebunan karet rakyat di Kabupaten Kampar adalah 92.509 ha dengan produksi 60.714 ton/tahun. Mata pencaharian masyarakat di Kabupaten Kampar sebagian besar adalah petani karet dan sawit. Jumlah petani karet rakyat di Kabupaten Kampar adalah 52.289 Kepala Keluarga (BPS Kabupaten Kampar, 2014). Permasalahan yang dihadapi petani karet adalah harga yang diterima petani sering tidak menentu ada jangka waktu yang tidak dapat diperkirakan. Sesuai data

di lapangan harga jual karet ditingkat petani berfluktuasi yaitu pada Bulan April Rp.8.923, Bulan Mei Rp.7.146, Bulan Juni Rp.6.825, Bulan Juli Rp.6.423, Bulan Agustus Rp.7.179, Bulan September Rp.6.498. Kondisi ini jelas akan mempengaruhi keberlanjutan usahatani karet yaitu menguntungkan atau tidak dari aspek usaha tani (aspek ekonomi), tidak menurun kualitasnya (aspek lingkungan) serta usahatani yang dikembangkan dapat diterima atau diadopsi oleh semua pihak (aspek sosial). Oleh karena itu maka tujuan penelitian ini adalah menganalisis tingkat keberlanjutan dari aspek sosial, ekonomi dan lingkungan.

METODE

Penelitian ini dilakukan di Pulau Sarak Kabupaten Kampar dengan lama penelitian sekitar 8 (delapan) bulan. Pemilihan sampel responden pada penelitian ini dilakukan melalui dua tahap, yaitu pemilihan kecamatan dilakukan secara sengaja (*purposive sampling*) dengan pertimbangan sebagai sentra produksi karet di Kabupaten Kampar, yaitu Kecamatan Kampar. Selanjutnya dari kecamatan dipilih satu desa. Agar responden petani dapat mewakili luas penguasaan lahan, maka pada penelitian ini responden telah didistribusikan secara proporsional terhadap penguasaan lahan tersebut.

$$n = \frac{n}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n = Jumlah responden.

N= Jumlah populasi (kepala keluarga petani).

e = Galat yang dapat diterima (10 %).

Populasi di daerah penelitian pada Pulau Sarak Kecamatan Kampar terdiri dari 173 KK. Dengan tingkat presisi sebesar 10% maka jumlah sampel pada penelitian ini sebanyak 40 responden.

Data primer yang telah dikumpulkan selanjutnya diurutkan (*batching*), dilakukan proses *coding*, tabulasi dan analisis. Analisis diskriptif digunakan untuk mengidentifikasi profil dan permasalahan usaha perkebunan karet di Pulau Sarak Kabupaten Kampar. Sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai sumber referensi dan instansi terkait yang mendukung penelitian ini.

Analisis data dalam penelitian ini adalah menilai indeks dan status keberlanjutan perkebunan karet di Pulau Sarak Kabupaten Kampar dan menilai indeks status keberlanjutan masing-masing dimensi (produksi, kelembagaan, dan sosial ekonomi) pada perkebunan karet di Kabupaten Kampar menggunakan teknik ordinasasi *Rap-Rubber* melalui metoda *Multi Dimensional Scaling (MDS)*. Nilai indek dilihat dan status keberlanjutan yang diperoleh dibandingkan dengan Tabel 1.

Tabel 1. Nilai indeks dan status keberlanjutan

No	Nilai Indeks	Kategori	Keterangan
1	0,00 – 24,99	Buruk	Tidak berkelanjutan
2	25,00 – 49,99	Kurang	Kurang berkelanjutan
3	50,00 – 74,99	Cukup	Cukup berkelanjutan
4	75,00 – 100,00	Baik	Berkelanjutan

Sumber : Kavanagh dan Pitcher, 2004

Mengidentifikasi atribut/peubah yang sensitif berpengaruh pada keberlanjutan perkebunan karet di Kabupaten Kampar menggunakan *Leverage Analysis* untuk menentukan peubah yang sensitif mempengaruhi keberlanjutan perkebunan karet. Atribut sensitif yang diperoleh dari hasil *Leverage Analysis* terlihat pada perubahan Roof Mean Square (RMS) ordinasasi pada sumbu X. Semakin besar perubahan RMS, maka semakin sensitif peranan atribut tersebut terhadap peningkatan status keberlanjutan. Analisis Monte Carlo merupakan metode simulasi untuk mengevaluasi dampak kesalahan acak/galat (*random error*) dalam analisis statistik yang dilakukan terhadap seluruh dimensi (Kavanagh dan Pitcher, 2004).

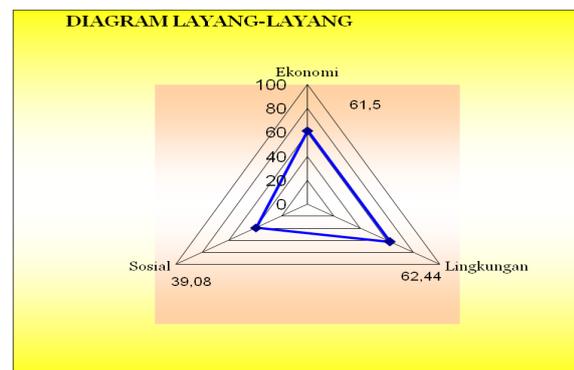
HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkebunan karet di Pulau Sarak Kabupaten Kampar merupakan perkebunan karet terluas di Provinsi Riau. Data sosial ekonomi responden petani

terdiri atas dimensi sosial, yaitu 10 atribut meliputi: persepsi terhadap pengelolaan, keterlibatan kelompok tani, langkah pelestarian, cara awal pembukaan lahan, perubahan proses produksi, kearifan lokal, kebijakan pemerintah, penyuluhan, lembaga penyuluh, penerapan teknologi.

Dimensi ekonomi, terdiri dari 12 atribut meliputi pendapatan, penggunaan tenaga kerja dalam keluarga, harga, harga ojol, panen, luas lahan, status lahan, pemasaran, fluktuasi harga, ketersediaan pestisida, ketersediaan pupuk, pemupukan. Dimensi lingkungan, terdiri dari 12 atribut meliputi : kegiatan pengendalian erosi, penurunan permukaan tanah, pencemaran tanah, dampak pestisida, penggunaan pestisida, dampak pupuk, pH air, sistem pengairan, pengaruh dekomposisi, frekuensi kebakaran, komoditi sampingan, pengetahuan petani terhadap tanaman penutup tanah (*Legum Cover Crop/LCC*). Penggunaan tanaman ini merupakan pengetahuan lokal petani yang merupakan salah satu bentuk dari pemahaman terhadap pertanian berkelanjutan. Sesuai dengan pendapat Hijjang P, et al (2014), pengetahuan lokal diaplikasikan dalam setiap kegiatan pertanian mulai dari penentuan musim dan pemilihan bibit hingga pasca panen dan hasil produksi.

Potensi keberlanjutan usahatani karet di Pulau Sarak, didasarkan pada indikator nilai indeks keberlanjutan. Hasil analisis *Rap-Rubber* multidimensi dengan menggunakan metoda MDS menghasilkan nilai *IKB-Rubber* di Desa Pulau Rambai Kabupaten Kampar sebesar 54,34 (50,01-75,00) termasuk kategori cukup berkelanjutan. Indeks Keberlanjutan perkebunan karet dimensi ekonomi sebesar 61,5 dan dimensi lingkungan sebesar 62,44 artinya masing-masing dimensi berada pada skala sustainabilitas 0-100, termasuk kategori status cukup berkelanjutan. Nilai *Ikb-Rubber* untuk dimensi sosial sebesar 39,08 pada skala sustainabilitas 25,00-50,01, termasuk kategori status kurang berkelanjutan, seperti terlihat pada Gambar 1. Berdasarkan nilai tersebut, yang paling dominan berkontribusi terhadap nilai indeks keberlanjutan usahatani tanaman karet di Pulau Sarak Kabupaten Kampar secara berurutan adalah dimensi ekologi/lingkungan, ekonomi dan sosial.



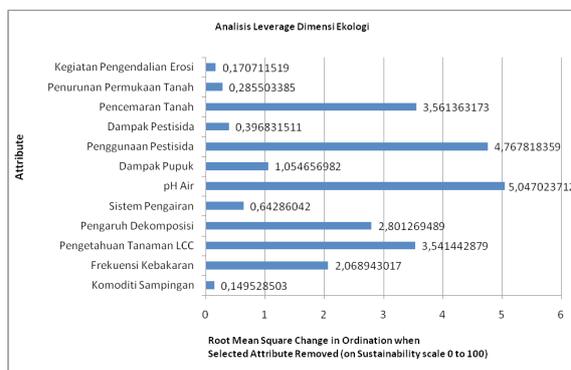
Sumber : Data Primer, 2017.

Gambar 1. Kontribusi setiap dimensi tanaman karet di Pulau Sarak.

Berdasarkan kajian ini terbukti bahwa dalam jangka panjang usahatani tanaman karet tidak sekedar menargetkan keuntungan maksimal dalam jangka pendek, tetapi usahatani dimaksud harus mampu mempertahankan dan melestarikan sumber daya alam, yaitu melalui sistem pertanian berkelanjutan. Upaya untuk mempertahankan potensi keberlanjutan tersebut, ada beberapa pendekatan yang dapat dilakukan, yaitu (1) proses produksi mengarah pada penggunaan hayati dan ramah lingkungan; (2) pola pertanian yang dikembangkan harus dapat menjamin investasi dalam bentuk tenaga kerja dan biaya lainnya dengan hasil produksi atau outputnya dapat mencukupi kebutuhan keluarga secara layak, atau dapat diartikan bahwa keberlanjutan usahatani harus mampu meminimalkan atau bahkan menghilangkan biaya eksternal dalam proses produksi.

Mengevaluasi dimensi ekologi, diidentifikasi 12 atribut atau faktor yang mempengaruhi tingkat keberlanjutan usahatani karet. Berdasarkan hasil analisis *leverage* keberlanjutan usahatani karet dimensi ekologi seperti yang terlihat pada Gambar 2 diketahui bahwa dari 11 atribut yang dianalisis ada 4 atribut yang sensitif mempengaruhi keberlanjutan perkebunan karet yaitu: (1) pH air, (2) penggunaan pestisida, (3) pencemaran tanah, (4) pengetahuan tanaman LCC. Dengan demikian atribut-atribut tersebut perlu mendapat perhatian dan dikelola dengan baik agar nilai indeks keberlanjutan ketersediaan karet dimensi ekologi ini meningkat di masa yang akan datang. Atribut yang paling sensitif yang mempengaruhi keberlanjutan perkebunan karet dari dimensi ekologi adalah pH air yang ditunjukkan oleh skala 5.

pH air sangat erat pengaruhnya terhadap pH tanah. pH tanah sangat menentukan pertumbuhan dan produktivitas tanaman, umumnya pH tanah yang optimal adalah 5,6 – 6,0. Sedangkan fluktuasi air berkaitan dengan tinggi muka air tanah yang dipengaruhi oleh kanal (parit). Tinggi muka air tanah akan memperkecil risiko kebakaran pada lahan gambut dan memudahkan pertumbuhan tanaman (Santoso, 2012). pH air di lahan usahatani karet dan fluktuasi debit air serta elevasi muka air sangat mempengaruhi produktivitas dan kelestarian lingkungan.



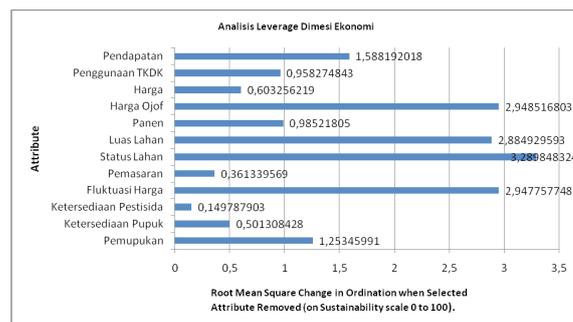
Sumber : Data Primer, 2017.

Gambar 2. Analisis sensitifitas dimesi ekologi, usaha tani tanaman karet di Pulau Sarak.

Dimensi ekonomi yang dievaluasi dan diidentifikasi ada sebanyak 11 atribut atau faktor yang mempengaruhi tingkat keberlanjutan usahatani karet di Pulau Sarak Kabupaten Kampar. Hasil analisis sensitifitas (*leverage analysis*), terdapat 4 atribut atau faktor yang sensitif mempengaruhi keberlanjutan usahatani status lahan, harga ojol, fluktuasi harga dan luas lahan (skala 3). Dari pengamatan dilapangan, ternyata harga jual produk petani sangat berfluktuasi dan cenderung nilai tukarnya rendah terutama pada saat panen, hal ini yang menjadi permasalahan di tingkat petani.

Pada umumnya usahatani karet bagi petani di Pulau Sarak Kecamatan Kampar adalah mata pencaharian utama mereka. Sebagian besar (75%) lahan pertanian di Pulau Sarak dimiliki oleh penduduk setempat, yang diperoleh melalui pembelian, pembagian dan warisan keluarga. Lahan milik petani setempat, sepenuhnya dipelihara dan dikelola oleh petani pemilik masing-masing beserta keluarganya. Status lahan dan luas lahan yang terbatas merupakan permasalahan utama bagi petani karet, sehingga usahatani yang dilakukan petani belum dapat menjadi sumber pendapatan utama yang dapat menopang seluruh kebutuhan petani dan keluarga. Realita di lapangan, sebagian besar petani hanya konsentrasi pada saat panen khususnya panen karet.

Harga hasil pertanian dalam jangka pendek, cenderung berfluktuatif atau tidak stabil. Ketidakstabilan tersebut bisa disebabkan oleh permintaan dan penawaran terhadap barang pertanian yang sifatnya tidak elastis. Beberapa faktor yang menyebabkan penawaran terhadap barang pertanian tidak elastis, adalah : produk pertanian umumnya musiman, kapasitas memproduksi sektor pertanian cenderung untuk mencapai tingkat yang tinggi dan tidak terpengaruh oleh perubahan permintaan, beberapa jenis tanaman memerlukan waktu bertahun-tahun sebelum hasilnya dapat dipanen. Irawan, (2007) mengemukakan bahwa fluktuasi harga komoditas pertanian pada dasarnya akibat ketidakseimbangan antara kuantitas pasokan dan permintaan yang dibutuhkan konsumen tidak seimbang. Jika terjadi kelebihan pasokan maka harga komoditas akan turun, dan sebaliknya jika terjadi kekurangan pasokan. Dalam proses pembentukan harga tersebut, petani dan pedagang memiliki peranan penting dalam mengatur volume penjualan yang selayaknya disesuaikan dengan kebutuhan konsumen.



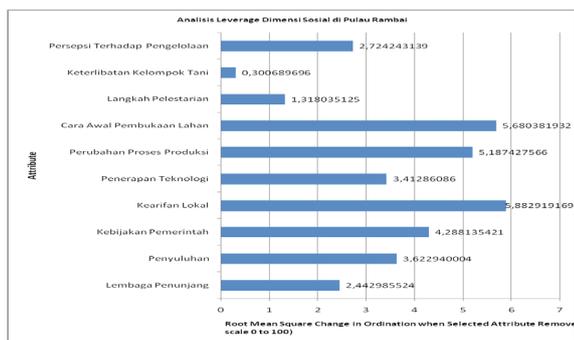
Sumber : Data Primer, 2017.

Gambar 2. Analisis sensitifitas dimensi ekologi usahatani karet di Pulau Sarak.

Dimensi sosial yang diidentifikasi 10 atribut atau faktor yang mempengaruhi tingkat keberlanjutan usahatani karet di Pulau Sarak Kabupaten Kampar. Hasil analisis sensitifitas (*leverage analysis*), di Pulau Sarak terdapat 5 atribut yang sensitif mempengaruhi keberlanjutan usahatani karet. Faktor sensitif tersebut adalah penerapan teknologi, kearifan lokal, cara pembukaan lahan, perubahan proses produksi dan kebijakan pemerintah. Tingkat sensitifitasnya berada pada skala lebih besar dari 5, artinya atribut-atribut tersebut sangat mempengaruhi keberlanjutan usahatani karet di Pulau Sarak.

Penerapan teknologi yang diamati didalam penelitian ini adalah bagaimana tingkat adopsi petani karet terhadap penerapan teknologi budidaya tanaman karet yang sesuai dengan anjuran terdiri atas 9 komponen yang keseluruhannya diadopsi dalam usahatani para petani. 9 komponen tersebut adalah penggunaan varietas unggul, pengolahan tanah/lahan, penanaman, pemupukan, pemeliharaan, pengendalian hama dan penyakit, pengairan, panen dan pasca panen. Teknologi pertanian merupakan piranti teknis di bidang pertanian yang dikembangkan dari ilmu pengetahuan untuk mempermudah, mempercepat, meningkatkan, mengarahkan, membina, dan membimbing usahatani sesuai dengan sasaran yang hendak dicapai. Lebih jauh lagi tujuan penerapan teknologi menurut SK Mentan No 9/1984 adalah peningkatan produksi, pendapatan, kesempatan kerja, devisa, dan kelestarian sumberdaya alam (Rachmawati, E, et al, 2008). Menurut Kasryno, F (1998) untuk wilayah perluasan baru diperlukan teknologi tepat guna (*appropriate technology*) untuk meningkatkan efisiensi dan nilai tambah dengan bertumpu pada keterbatasan, tenaga kerja, kapital dan sumberdaya pertanian lainnya.

Kearifan lokal yang diamati dalam penelitian ini adalah seluruh proses produksi dalam usahatani karet yaitu mulai dari pembukaan lahan, pembakaran lahan, penggunaan peralatan, larangan-larangan dalam pembukaan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, penyadapan sampai proses pengolahan hasil panen (ojol). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi kearifan lokal dahulu dengan kondisi pada saat penelitian adalah tidak sama. Artinya kearifan lokal yang dahulu ada, tidak lagi dilakukan.



Sumber : Data Primer, 2017

Gambar 3. Analisis sensitifitas dimesi sosial, usahatani tanaman karet di Pulau Sarak.

Cara pembukaan lahan yang dilakukan petani karet di lokasi penelitian dengan menebang pohon-pohon yang besar menggunakan alat mesin singso dan menggunakan kampak dan parang untuk pohon-pohon yang tidak besar. Selain itu, membakar masih dilakukan, tetapi dengan skala dan intensitas yang kecil. Meskipun petani karet sudah memahami peraturan pemerintah tentang kebijakan larangan membakar dalam membuka hutan dan lahan untuk kegiatan bercocok tanam sesuai dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2001. Namun cara pembukaan lahan dengan cara membakar dipengaruhi oleh keterbatasan tenaga kerja dan modal yang dimiliki serta cara ini dianggap lebih mudah sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Petani umumnya kesulitan dalam menentukan tahapan pembukaan dan pembakaran lahan, karena dibatasi oleh aturan atau larangan pembakaran lahan untuk menghindari kabut asap. Petani tidak diperbolehkan membakar lahan. Pengalaman saat ini, menunjukkan bahwa jika hujan langsung turun biasanya dalam curah hujan yang tinggi yaitu pada bulan Desember, sehingga mengakibatkan penyiapan lahan menjadi kurang optimal dan waktu tanam menjadi tidak menentu. Sedangkan perubahan produksi dipengaruhi oleh perubahan iklim, petani umumnya mengetahui isu perubahan iklim tersebut dari media massa (radio dan televisi). Perubahan iklim ini menyebabkan kuantitas dan kualitas hasil panen karet petani menjadi rendah.

SIMPULAN

Tingkat keberlanjutan usahatani tanaman karet di Pulau Sarak yang didasarkan pada nilai indeks keberlanjutan multidimensi di Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Riau menunjukkan skala cukup berkelanjutan dengan nilai indeks 54,34 artinya usahatani karet yang dikembangkan petani di Pulau Sarak berdasarkan pertimbangan ekonomi, sosial dan aspek ekologi/lingkungan, cukup berkelanjutan. Dengan kata lain bahwa usahatani karet tersebut memberi manfaat secara ekonomi, secara sosial dapat diterima masyarakat, dan secara ekologis tidak merusak lingkungan. Dimensi sosial lebih dominan dalam menentukan keberlanjutan usahatani dibanding dengan dimensi ekonomi dan lingkungan. Faktor yang peka mempengaruhi keberlanjutan perkebunan karet di Pulau Sarak di kaji dari dimensi sosial adalah kearifan lokal. Menurut Hijjag P, et al (2014) untuk membangun petani yang berjiwa agroecopreneur dan arif lingkungan diperlukan akumulasi pengetahuan lokal dan kreatifitas petani, baik yang bersumber dari tradisi lokal maupun yang dari luar secara selektif dalam situasi dan kondisi yang kondusif melibatkan secara aktif semua unsur stakeholder. Kestabilan harga hasil petani pada saat panen (dimensi ekonomi), pH air di lahan usahatani dan fluktuasi debit air di lahan petani (dimensi lingkungan/ ekologi).

Implikasi kebijakan dari kajian ini adalah: (a) meningkatkan dan menjaga kearifan lokal yang berwawasan lingkungan, (b) Implementasi nyata dari kebijakan pemerintah dalam mengatasi masalah harga panen yang tidak membantu petani, (c) langkah nyata meningkatkan pH air dengan pengelolaan sistem tata air sehingga debit air menjadi stabil.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS Kabupaten Kampar. (2014). *Kampar Dalam Angka 2013*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Kampar. Bangkinang.
- [FAO] Food Agriculture Organization, (2002). *Good agricultural practices*. Second Edition. FAO.
- Irawan, M.A., (2007). Glukosa dan Metabolisme Energi. *Sport Science Brief*. 1 (6):12-5.
- Kasrino F. (1998). *Pemikiran peningkatan daya saing komoditas pertanian melalui pemanfaatan mekanisasi pertanian yang ramah lingkungan*. Pusat Studi Ekonomi-Badan Litbang Pertanian. Departemen Pertanian. Bogor.
- Kavanagh P, Pitcher TJ. (2004). Implementing microsoft excel software for *rapfish*: A technique for the rapid appraisal of fisheries status. University of British Columbia Fisheries Centre Research Report 12 (2004).
- Hijjang, P., Lampe, M. dan Basir, M. (2014). Aneka ragam pengetahuan lokal dan kreatifitas petani yang mendukung agroecopreneuer ramah lingkungan di sulawesi selatan. *Jurusan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Jurnal Sosiohumaniora*, 16 (2): 143-148.
- Rachmawati, E. dan Djuwendah, E. (2008). Tingkat penerapan teknologi produksi kedelai (glysine max (l) merril) di kecamatan conggeang dan buahdua kabupaten sumedang. *Jurnal Sosiohumaniora*, 10 (1): Hal 43-57.
- Santoso, S. (2012). *Panduan Lengkap SPSS Versi 20* . Jakarta: PT Elex Media Komputind

MEMBANGUN MODEL KOMUNIKASI PROGRAM TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN UNTUK KEBERDAYAAN MASYARAKAT SEKITAR (Studi Kasus Desa Lulut, Kabupaten Bogor)

¹David Rizar Nugroho, ²Aida Vitayala S. Hubeis,
³Amiruddin Saleh, dan ⁴Wahyu Budi Priatna

¹Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pakuan

²Guru Besar Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat Institut Pertanian Bogor

³Dosen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat Institut Pertanian Bogor

⁴Dosen Agribisnis Institut Pertanian Bogor

E-mail: jubirdavid@gmail.com

ABSTRAK. Program Tanggung Jawab Sosial (TJS) perusahaan menjadi salah satu ukuran kepedulian perusahaan terhadap masyarakat sekitar perusahaan yang selanjutnya menjadi aspek penting dalam keberdayaan masyarakat. Tujuan penelitian secara khusus adalah (1) Mengetahui persepsi penerapan saluran komunikasi dan pendekatan komunikasi yang dilakukan dalam program TJS perusahaan. (2) Mengetahui faktor-faktor yang membentuk karakteristik penerima manfaat. (3) Menganalisis pengaruh karakteristik penerima manfaat, saluran komunikasi dan pendekatan komunikasi program TJS perusahaan terhadap keberdayaan masyarakat. Lokasi penelitian adalah Desa Lulut, Kabupaten Bogor dengan ukuran sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 74 responden. Penelitian ini didesain menggunakan metode campuran (mix method) dengan menggunakan analisis deskriptif dan *structural equation model* (SEM). Hasil dari penelitian ini meliputi : (1) Persepsi responden terhadap peubah saluran komunikasi secara umum dinilai baik, sedangkan untuk pendekatan komunikasi dan keberdayaan masyarakat secara umum dinilai buruk. (2) faktor – faktor yang membentuk kareakteristik penerima manfaat adalah pendidikan dan status sosial. (3) Peubah yang mempengaruhi keberdayaan masyarakat adalah pendekatan komunikasi dan saluran komunikasi, sedangkan karakteristik penerima manfaat berpengaruh terhadap saluran komunikasi.

Kata kunci: Model Komunikasi, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, pemberdayaan masyarakat

BUILDING A MODEL OF COMMUNICATION PROGRAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY FOR COMMUNITY DEVELOPMENT (Case Study Lulut Village, District Bogor)

ABSTRACT. Program Corporate Social Responsibility (TJS) into one measure of the company's concern about public companies that subsequently an important aspect of community empowerment. The research objective in particular is (1) Determine the perceptions of the application of communication channels and approaches to communications made in the program TJS companies. (2) Determine the factors that shape the characteristics of the beneficiaries. (3) to analyze of the characteristics of the beneficiaries, and the influence of communication channel approach program TJS the company towards community empowerment. The research location is lulut village, Bogor regency. The samples size used in this study were 74 respondents. This study is designed as a quantitative research boosted by the mix methode approach using descriptive analysis and structural equation modeling (SEM). The results of this study include: (1) Perceptions of respondents to variables of communication channels is generally considered good, while for communication and community empowerment approach is generally considered bad. (2) education and social status are factors that make up characteristics of beneficiaries. (3) The variables that affect the community empowerment approach is communication and communication channels, while the characteristics of the beneficiary effect on the communication channels.

Key words: Communications model, corporate sosial responsibilty, community empowerment

PENDAHULUAN

Perusahaan merupakan bagian dari masyarakat dan lingkungan, keberadaan perusahaan tidak terlepas dari masyarakat dan lingkungan. Perkembangan perusahaan seharusnya sejalan dengan perkembangan masyarakat dan daerah sekitar perusahaan. Konsep pengembangan masyarakat dicerminkan dalam pemberdayaan masyarakat yang merupakan salah satu kunci sukses dalam menjalankan pembangunan suatu daerah.

Bentuk pemberdayaan masyarakat dari perusahaan adalah Tanggung Jawab Sosial (TJS) perusahaan yang merupakan konsekuensi logis hukum sebab-akibat, di mana ketika operasional perusahaan memberikan

dampak bagi masyarakat. Dengan adanya program TJS perusahaan menjadi salah satu ukuran kepedulian perusahaan terhadap masyarakat sekitar perusahaan yang selanjutnya menjadi aspek penting dalam keberdayaan masyarakat.

Tanggung jawab sosial perusahaan mutlak diperlukan, baik untuk kepentingan pihak luar perusahaan yaitu pemerintah daerah dan masyarakat juga bagi kepentingan perusahaan itu sendiri. Jika dikaitkan dengan keuntungan perusahaan, disadari bahwa keuntungan itu diperoleh (1) Berkat usaha dari seluruh karyawan perusahaan mulai level bawah hingga tertinggi, (2) Pengorbanan masyarakat sekitar dengan mengorbankan sumber daya alam milik mereka, serta dampak yang ditimbulkan oleh perusahaan

terhadap potensi ekonomi mereka, (3) Pemerintah dengan kewenangan kebijakan yang memberikan fasilitas-fasilitas kepada perusahaan untuk melegalisasi kegiatan produksi perusahaan. Terkait usaha dan pengorbanan ketiga pihak itu, selayaknya perusahaan dalam kegiatan operasionalnya juga mempunyai tanggung jawab sosial kepada ketiga pihak di atas, dan tidak hanya semata membayar pajak (Zainal 2006).

Bentuk implementasi program TJS perusahaan memiliki karakteristik yang berbeda setiap perusahaan. Beberapa program TJS perusahaan diimplementasikan dalam kegiatan *community relations* (hubungan komunitas). *Community relations* merupakan bentuk TJS perusahaan. Wajar bila berbagai perusahaan di Indonesia kini sudah menjalankan tanggung jawab sosialnya itu dalam bentuk program dan kegiatan *community relations*. Keberhasilan suatu perusahaan salah satunya ditentukan oleh adanya perhatian terhadap lingkungan sosial sekitar. Artinya, sukses komersial perusahaan-perusahaan dilihat juga dari bagaimana perusahaan mengelola tanggung jawab sosial terhadap komunitas. Pertimbangan tersebut perlu diperhatikan, mengingat tidak sedikit permasalahan perusahaan timbul akibat hubungan di antara keduanya tidak harmonis, konflik berkepanjangan sering terjadi, dan tindakan anarkis masyarakat sekitar sering terdengar, hanya dikarenakan upaya pihak perusahaan dalam masalah TJS perusahaan tidak ditangani secara serius (Yulianita 2008).

Di Indonesia, pelaksanaan program TJS perusahaan diatur dalam UU Nomor 40/2007, selain itu diatur juga dalam UU Nomor 25/2007 tentang Penanaman Modal, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Di Kabupaten Bogor, diperkuat lagi dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

Desa Lulut merupakan salah satu desa yang termasuk wilayah administratif Kabupaten Bogor sekaligus salah satu desa binaan TJS perusahaan karena letaknya yang bersentuhan langsung dengan kegiatan penambangan. TJS yang diterapkan di Desa Lulut adalah program reklamasi lahan bekas tambang. Perusahaan melalui program TJS perusahaan, diharapkan mampu memahami permasalahan yang terdapat masyarakat, dengan memberikan solusi bagi masyarakat untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada sebagai wadah untuk memberdayakan masyarakat sekaligus menyampaikan tujuan perusahaan sehingga pada akhirnya akan menciptakan pemahaman bagi para pemangku kepentingan (stakeholders).

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka fokus penelitian ini adalah pentingnya pengukuran pendekatan komunikasi melalui kegiatan pemberdayaan program TJS perusahaan terhadap masyarakat di desa. Beberapa pertanyaan penelitian dirumuskan sebagai berikut: (1) Bagaimana persepsi penerima

manfaat terhadap penerapan saluran komunikasi dan pendekatan komunikasi yang dilakukan dalam program TJS perusahaan? (2) Faktor apa yang membentuk Karakteristik penerima manfaat? (3) Bagaimana pengaruh karakteristik penerima manfaat, saluran komunikasi dan pendekatan komunikasi program TJS perusahaan terhadap keberdayaan masyarakat?

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, secara umum penelitian bertujuan untuk mendapatkan informasi dan kejelasan mengenai bentuk pendekatan komunikasi program TJS perusahaan untuk keberdayaan masyarakat. Tujuan penelitian secara khusus adalah untuk: (1) Mengetahui persepsi penerapan saluran komunikasi dan pendekatan komunikasi yang dilakukan dalam program TJS perusahaan. (2) Mengetahui faktor-faktor yang membentuk karakteristik penerima manfaat. (3) Menganalisis pengaruh karakteristik penerima manfaat, saluran komunikasi dan pendekatan komunikasi program TJS perusahaan terhadap keberdayaan masyarakat.

METODE

Penelitian dilakukan di Kabupaten Bogor dengan mengambil lokasi di Desa Lulut yang merupakan salah satu desa binaan TJS perusahaan. Sampel penelitian ini dilakukan secara *purposive* yaitu kepada 74 orang penerima manfaat dari kegiatan TJS. Penelitian ini didesain menggunakan *mix method* yakni pendekatan penelitian yang mengkombinasikan atau mengasosiasikan bentuk kualitatif dan kuantitatif (Creswell, 2009). Riset ini juga mengkombinasikan antara penelitian menerangkan (*explanatory research*) dengan penelitian deskriptif (*descriptive research*) dan pengujian dari hipotesis. Metode penelitian ini menggunakan *Focus Group Discussion* (FGD) dan metode survei dengan pendekatan multi analisis yaitu analisis deskriptif untuk melihat persepsi responden terhadap variabel penelitian dan *structural equation model* (SEM) untuk mengetahui pengaruh antar variabel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Persepsi Saluran Komunikasi Program TJS Perusahaan

Saluran komunikasi merupakan alat yang digunakan sumber pesan dalam menyampaikan pesan kepada penerima. Saluran ini dianggap sebagai sarana dalam menyampaikan informasi program TJS perusahaan kepada masyarakat. Adapun indikator-indikator peubah saluran komunikasi dalam penelitian ini antara lain kebijakan korporasi, peran pendamping, peran tokoh masyarakat dan peran media.

Dari Tabel 2 terlihat sebaran frekuensi dan persentase persepsi penerima manfaat di Desa Lulut untuk indikator kebijakan korporasi dinilai kurang

baik oleh penerima manfaat. Sebanyak 40 orang atau 54.1 persen dari 74 responden menilai kebijakan terkait program TJS perusahaan pada kategori buruk. Frekuensi penerima manfaat, sebanyak 30 orang atau 40.5 persen menilai penerapan kebijakan perusahaan terkait program TJS kategori baik. Masing-masing sisanya satu orang atau 1.5 persen penerima manfaat menilai kebijakan perusahaan pada kategori sangat baik dan 3 orang atau 4.1 menilai pada kategori sangat buruk.

Masyarakat Desa Lulut sebagai penerima manfaat program TJS perusahaan mempersepsikan peran pendamping atau Kordes belum bekerja dengan baik dimana 50 orang atau 67.6 persen dari total 74 responden menilai peran Kordes pada kategori buruk. Sedangkan, 17 orang atau 23 persen menilai kinerja Kordes kategori baik. Masing-masing 2 orang atau 2.7 persen penerima manfaat Desa Lulut yang menilai peran Kordes pada kategori sangat baik dan ada 5 orang atau 6.8 persen penilaian pada kategori sangat buruk.

Pada indikator peran tokoh masyarakat atau tokoh informal di Desa Lulut dinilai penerima manfaat kurang berperan dengan maksimal dimana 42 orang atau 56.8 persen dari total 74 responden menilai peran tokoh masyarakat pada kategori buruk. Sebanyak 21 orang atau 28.4 persen peran tokoh masyarakat pada kategori baik. Sebanyak 9 orang atau 12.1 persen menilai peran tokoh masyarakat pada kategori sangat baik dan 2 orang atau 2.7 persen menilai pada kategori sangat buruk.

Pada indikator peran media di Desa Lulut dinilai penerima manfaat kurang dirasakan manfaatnya dimana 29 orang atau 39,2 persen dari total 74 responden menilai peran tokoh masyarakat pada kategori buruk dan sebanyak 45 orang atau 60.8 persen menilai pada

kategori sangat buruk. Hal ini juga sesuai dengan pendapat Sari (2012) dimana kualitas *Corporate Social Responsibility Disclosure* tidak mudah untuk diukur, umumnya perusahaan melakukan *Corporate Social Responsibility Disclosure* hanya sebagai bagian dari iklan dan menghindari untuk memberikan informasi yang relevan. Dengan demikian peran media sebagai sumber informasi tidak menjadi bagian penting dalam implementasi program TJS perusahaan.

Pendekatan Komunikasi Program TJS Perusahaan

Bentuk TJS perusahaan yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat terdiri program pengembangan masyarakat atau *community development* dan program pembangunan berkelanjutan atau *sustainable development programs*.

Data yang tersaji pada Tabel 3 menunjukkan persepsi masyarakat di Desa Lulut sebagai penerima manfaat masyarakat terhadap pendekatan komunikasi program TJS perusahaan. Penerima manfaat di Desa Lulut melihat indikator *community development* cenderung pada posisi yang tidak menguntungkan. Hal ini terlihat dari sebanyak 25 orang atau 33.8 persen dari total 74 responden menilai pendekatan program TJS perusahaan dengan *community development* masuk kategori baik, sedangkan sebanyak 46 orang atau 62.1 persen menilai pendekatan *community development* kategori buruk. Sisanya, 1 orang atau 1.4 persen menilai pada kategori sangat baik dan 2 orang atau 2.7 menilai pada kategori sangat buruk.

Sementara pandangan masyarakat Desa Lulut sebagai penerima manfaat terhadap pendekatan *sustainable development* cenderung negatif. Artinya, penerima manfaat lebih cenderung menolak pendekatan *sustainable development* dimana sebanyak 48 orang

Tabel 2. Sebaran frekuensi, persentase dan rata-rata skor peubah saluran komunikasi

Peubah Saluran Komunikasi		Jawaban				Total	Rataan Skor*
		Sangat Baik	Baik	Buruk	Sangat Buruk		
Kebijakan Korporasi	(f)	1	30	40	3	74	2.42
	(%)	1.3	40.5	54.1	4.1	100	(Baik)
Peran Pendamping	(f)	2	17	50	5	74	2.3
	(%)	2.7	23	67.6	6.8	100	(Baik)
Tokoh Masyarakat	(f)	9	21	42	2	74	2.53
	(%)	12.1	28.4	56.8	2.7	100	(Baik)
Peran Media	(f)	0	0	29	45	74	1.89
	(%)	0	0	39.2	60.8	100	(Buruk)

* Ket: 1 – 1.75: Sangat Buruk; 1.76 – 2.51: Buruk; 2.52 – 3.27: Baik; 3.28 – 4: Sangat Baik Hasil Olahan 2015

Tabel 3. Sebaran frekuensi, persentase dan rata-rata skor peubah pendekatan komunikasi

Peubah Pendekatan Komunikasi		Jawaban				Total	Rataan Skor*
		Sangat Baik	Baik	Buruk	Sangat Buruk		
Community Development	(f)	1	25	46	2	74	2.4
	(%)	1.4	33.8	62.1	2.7	100	(Buruk)
Sustainable Development	(f)	4	16	48	6	74	2.34
	(%)	5.4	21.6	64.9	8.1	100	(Buruk)

* Ket: 1 – 1.75: Sangat Buruk; 1.76 – 2.51: Buruk; 2.52 – 3.27: Baik; 3.28 – 4: Sangat Baik Hasil Olahan 2015

atau 64.9 persen responden menilai pada kategori buruk dan 17 orang atau 21.6 persen menilai pendekatan ini pada kategori baik. Sisanya, 4 orang atau 5.4 persen menilai pada kategori sangat baik dan 6 orang atau 8.1 menilai pada kategori sangat buruk. Secara umum, berdasarkan rata-rata skor pada Tabel x di atas terlihat kedua pendekatan komunikasi tersebut dikategorikan baik dan tidak terdapat ketimpangan skor yang mencolok antara satu pendekatan dengan yang lain dimana skor untuk pendekatan *community development* sebesar 2.4 dan untuk pendekatan *sustainable development* sebesar 2.34.

Keberdayaan Masyarakat

Keberadaan TJS perusahaan memiliki landasan yang kuat sejak John Elkington melalui karya tulisnya *Cannibals with Forks, the Triple Bottom Line of Twentieth Century Business* yang memperkenalkan konsep *triple bottom line*. Konsep ini menganut pandangan bahwa perusahaan yang ingin berkelanjutan (*sustainable*) haruslah memperhatikan 3P, yakni: *profit* (keuntungan), *people* (masyarakat pemangku kepentingan) dan *planet* (lingkungan). Menurut pandangan ini, perusahaan selain mengejar keuntungan (*profit*), juga mesti memperhatikan dan terlibat dalam pemenuhan kesejahteraan masyarakat (*people*) dan turut berkontribusi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (Wibisono 2007). Pandangan ini bermuara pada kemampuan dan usaha perusahaan untuk menciptakan keberdayaan masyarakat.

Hasbullah (2012) menyatakan bahwa peran TJS perusahaan PKT dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di kawasan pesisir cenderung masih lemah dan bersifat sporadis, hal ini terlihat dari kinerja sebagian besar program TJS perusahaan PKT yang dinilai belum cukup memenuhi harapan masyarakat dan kurang berfokus pada upaya pengelolaan kawasan pesisir terpadu. Birth *et.al.* (2008) memberikan gambaran bahwa komunikasi TJS perusahaan di Swiss berkembang dengan baik, meskipun masih memiliki batas-batas untuk pembangunan.

Merujuk data pada Tabel 4 sebaran frekuensi dan persentase persepsi penerima manfaat di Desa Lulut untuk

indikator keberdayaan sektor ekonomi dinilai buruk oleh penerima manfaat. Sebanyak 21 orang atau 28.9 persen dari 74 responden menilai keberdayaan sektor ekonomi dari implementasi program TJS perusahaan pada kategori baik. Frekuensi penerima manfaat, sebanyak 38 orang atau 51.4 persen menilai keberdayaan aspek ekonomi terkait program TJS kategori buruk. Masing-masing sisanya 1 orang atau 1.4 persen penerima manfaat menilai kebijakan perusahaan pada kategori sangat baik dan 14 orang atau 18.9 menilai pada kategori sangat buruk.

Sektor lain yaitu pendidikan masyarakat Desa Lulut sebagai penerima manfaat program TJS perusahaan mempersepsikan keberdayaan pendidikan juga dirasakan belum maksimal dimana hanya 4 orang atau 5.4 persen dari total 74 responden menilai keberdayaan sektor pendidikan pada kategori sangat baik dan 27 orang atau 36.5 persen menilai pada kategori baik. Sedangkan, 39 orang atau 52.7 persen menilai sektor pendidikan belum maksimal atau pada kategori buruk dan 4 orang atau 5.4 persen penerima manfaat Desa Lulut menilai pada kategori sangat buruk.

Sektor keberdayaan pada aspek kesehatan, Tabel 4 menunjukkan penerima manfaat program TJS perusahaan di Desa Lulut menilai aspek kesehatan sudah cukup baik. Sebanyak 30 orang atau 40.5 persen dari total 74 responden menilai masyarakat telah memperoleh manfaat dari program TJS perusahaan dan dikategorikan pada kategori baik. Namun, sebanyak 34 orang atau 46 persen dinilai pada kategori buruk. Sebanyak 9 orang atau 12.2 persen menilai pada kategori sangat baik dan 1 orang atau 1.4 persen menilai pada kategori sangat buruk.

Penilaian penerima manfaat program TJS di Desa Lulut pada aspek sosial-infrastruktur cenderung negatif. Berdasarkan Tabel 4, diketahui penerima manfaat di Desa Lulut menilai keberdayaan pada aspek ini kurang mempunyai nilai manfaat dimana dari total 74 responden sebanyak 43 orang atau 58.1 persen menilai keberdayaan sosial-infrastruktur pada kategori sangat buruk dan 3 orang atau 4.1 persen menilai pada kategori sangat buruk. Sementara, hanya 2 orang atau 2.7 persen yang menilai pada kategori sangat baik dan 26 orang atau 35.1 persen menilai pada kategori baik.

Tabel 4. Sebaran frekuensi, persentase dan rata-rata skor peubah keberdayaan masyarakat

Peubah Keberdayaan Masyarakat		Jawaban				Total	Rataan Skor*
		Sangat Baik	Baik	Buruk	Sangat Buruk		
Ekonomi	(f)	1	21	38	14	74	2.28
	(%)	1.4	28.9	51.4	18.9	100	(Buruk)
Pendidikan	(f)	4	27	39	4	74	2.41
	(%)	5.4	36.5	52.7	5.4	100	(Buruk)
Kesehatan	(f)	9	30	34	1	74	2.62
	(%)	12.2	40.5	46	1.4	100	(Baik)
Sosial	(f)	2	26	43	3	74	2.39
	(%)	2.7	35.1	58.1	4.1	100	(Buruk)
Infrastruktur	(f)	8	17	29	20	74	2.2
	(%)	10.8	23	39.2	27	100	(Buruk)

* Ket: 1 – 1.75: Sangat Buruk; 1.76 – 2.51: Buruk; 2.52 – 3.27: Baik; 3.28 – 4: Sangat Baik Hasil Olahan 2015

Penilaian pada aspek keamanan juga cenderung negatif. Penerima manfaat di Desa Lulut menilai keberdayaan pada aspek ini kurang mempunyai nilai manfaat dimana dari total 74 responden sebanyak 29 orang atau 39,2 persen menilai pada kategori sangat buruk dan 20 orang atau 27 persen menilai pada kategori sangat buruk. Sementara, hanya 8 orang atau 10,8 persen yang menilai pada kategori sangat baik dan 17 orang atau 23 persen menilai pada kategori baik.

Berdasarkan rataan skor hasil penelitian secara keseluruhan semua indikator keberdayaan masyarakat di Desa Lulut hanya keberdayaan pada aspek kesehatan yang dikategorikan baik yakni dengan rataan skor 2,62. Sementara, empat indikator lainnya yakni keberdayaan ekonomi, pendidikan, sosial-infrastruktur dan keamanan dikategorikan buruk. Dapat dikatakan masyarakat Desa Lulut belum merasakan manfaat atas implementasi program TJS perusahaan secara maksimal khususnya untuk empat pilar yang dinilai

Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Karakteristik Penerima Manfaat

Dalam melaksanakan kegiatan/program CSR, perusahaan selaku pihak perencana dan pelaksana program seyogyanya mempertimbangkan karakteristik masyarakat sasaran CSR. Karakteristik masyarakat dapat menunjukkan arah untuk dapat mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan masyarakat (Gani dkk, 2015). Data karakteristik penerima manfaat program TJS perusahaan meliputi beberapa indikator yaitu tingkat pendidikan, pekerjaan, pendapatan, status sosial, partisipasi sosial, dan keterdedahan media.

Berdasarkan hasil pengolahan, diketahui bahwa pada Desa Lulut faktor yang berpengaruh dalam membentuk karakteristik penerima manfaat adalah pendidikan, dan status sosial, hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikan ditentukan dari nilai t statistik lebih dari 1,96 atau $p\text{ value} < 0,05$. Lebih jelas mengenai signifikansi bobot tiap indikator dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Signifikansi bobot indikator peubah penerima manfaat

Indikator	Signifikansi	Keterangan
Pendidikan	2.689*	Berpengaruh
Pekerjaan	0.539	Tidak Berpengaruh
Pendapatan	1.241	Tidak Berpengaruh
Status sosial	3.804*	Berpengaruh
Partisipasi (Frekuensi)	0.990	Tidak Berpengaruh
Partisipasi (intensitas)	1.045	Tidak Berpengaruh
Keterdedahan (intensitas)	0.350	Tidak Berpengaruh
Keterdedahan (jumlah media)	0.889	Tidak Berpengaruh

* $p\text{ value} < 0,05$

Model Komunikasi Tanggung Jawab Sosial Keberdayaan Masyarakat Sekitar

Keberdayaan masyarakat merupakan langkah dan agenda yang penting bagi pelaksanaan dan implementasi program TJS perusahaan yang terdiri dari lima pilar keberdayaan. Kelima pilar tersebut antara lain adalah aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial-infrastruktur dan keamanan. Lima pilar keberdayaan masyarakat dalam program TJS perusahaan tersebut tidak dapat berdiri sendiri. Masing-masing pilar tergantung dan dipengaruhi oleh beberapa faktor penting.

Dalam penelitian ini, keberdayaan masyarakat terkait program TJS perusahaan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti karakteristik penerima manfaat, saluran komunikasi dan pendekatan komunikasi. Pengujian peubah yang memiliki pengaruh dalam penelitian ini menggunakan *Structural Equation Model Partial Least Square* (SEM PLS) dengan *software SmartPLS version 2.0*. Terdapat tiga peubah laten dalam penelitian yakni karakteristik penerima manfaat, saluran komunikasi dan pendekatan komunikasi. Setiap peubah laten memiliki masing-masing peubah manifest (indikator) sesuai dengan yang dijabarkan pada metode penelitian.

Penggunaan PLS dapat mengukur suatu hubungan yang tidak bisa diukur secara langsung. Selain itu, PLS juga memperbolehkan indikator formatif dalam mengukur peubah laten selain indikator reflektif. Hal ini tidak diijinkan dalam SEM berbasis kovarian yang menggunakan indikator reflektif saja. Oleh karena itu pemilihan PLS sebagai alat analisis dirasa tepat karena mampu menjelaskan hubungan yang kompleks dalam penelitian ini antara karakteristik penerima manfaat, saluran komunikasi, pendekatan komunikasi dan keberdayaan masyarakat. Untuk mengevaluasi model dalam penelitian ini diperlukan beberapa cara bergantung pada model yang telah dibentuk. Secara umum evaluasi dan interpretasi model dapat dilihat sebagai berikut.

1. Estimasi Koefisien Jalur

Hasil *bootstrapping* yang terdapat pada Tabel 6 menunjukkan koefisien untuk tiap jalur hipotesis dan nilai T-Statistiknya yang diperoleh dari hasil *output SmartPLS*.

Pada Tabel 6, diketahui bahwa pada model Desa Lulut terdapat pengaruh nyata dari karakteristik penerima manfaat terhadap saluran komunikasi, selain itu konstruk pendekatan komunikasi program TJS dan saluran komunikasi terhadap keberdayaan masyarakat, serta saluran komunikasi terhadap pendekatan komunikasi dengan nilai $p\text{-value} < 0,05$ atau nilai t-hitung $>$ t-tabel (1,96).

Jika dilihat dari efek total terhadap variabel eksogen, diketahui bahwa variabel keberdayaan masyarakat dipengaruhi secara berurutan oleh variabel saluran komunikasi (0,790), variabel pendekatan komunikasi (0,606) dan karakteristik penerima manfaat (0,352). Lebih jelas mengenai efek total variabel dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 6. Hasil *Bootstrap* Bobot Tiap peubah eksogen terhadap peubah endogen

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
Pendekatan Komunikasi → Keberdayaan Masyarakat	0.606	0.608	0.095	6.416	0.000
Profil Penerima Manfaat → Keberdayaan Masyarakat	-0.115	-0.076	0.089	1.298	0.195
Profil Penerima Manfaat → Pendekatan Komunikasi	0.064	0.111	0.117	0.545	0.586
Profil Penerima Manfaat → Saluran Komunikasi	0.542	0.583	0.099	5.476	0.000
Saluran Komunikasi → Keberdayaan Masyarakat	0.344	0.326	0.102	3.375	0.001
Saluran Komunikasi → Pendekatan Komunikasi	0.735	0.709	0.081	9.132	0.000

Hasil Olahan, 2015

Tabel 7. Efek total peubah eksogen

Peubah	Keberdayaan Masyarakat	Pendekatan Komunikasi	Profil Penerima Manfaat	Saluran Komunikasi
Keberdayaan Masyarakat	1.000			
Pendekatan Komunikasi	0.606	1.000		
Profil Penerima Manfaat	0.352	0.462	1.000	0.542
Saluran Komunikasi	0.790	0.735		1.000

Hasil Olahan 2015

2. *R-square*

Kekuatan untuk menjelaskan (*explanatory power*) yang dimiliki model, atau validitas nomologis (*nomological validity*), dapat dinilai dengan melihat *R-square* (R^2) dari konstruk-konstruk endogen atau peubah dependen yakni: karakteristik penerima manfaat, saluran komunikasi dan pendekatan komunikasi. Nilai *R-Square* digunakan untuk menilai pengaruh peubah laten independen tertentu terhadap peubah laten dependen, apakah mempunyai pengaruh yang substantif. Tabel 8 menunjukkan *R-Square* untuk peubah dependen.

Tabel 8. Nilai *R-Square* peubah laten

Peubah	<i>R Square</i>
Keberdayaan Masyarakat	0.713
Pendekatan Komunikasi Program TJS	0.595
Saluran Komunikasi	0.294

Hasil Olahan 2015

Dari Tabel 8, diketahui bahwa nilai R^2 untuk variabel pendekatan komunikasi sebesar 0,595 (termasuk pada penggolongan baik/ substansial), hal ini menunjukkan bahwa variabilitas pendekatan komunikasi dapat dijelaskan oleh konstruk karakteristik penerima manfaat dan saluran komunikasi sebesar 59,5%. Pada variabel saluran komunikasi dapat dijelaskan oleh variabel karakteristik penerima manfaat sebesar 0,294 atau sebesar 29,4%. Variabel keberdayaan masyarakat diketahui memiliki nilai R^2 sebesar 0,713 (termasuk pada penggolongan baik/substansial), hal tersebut menunjukkan

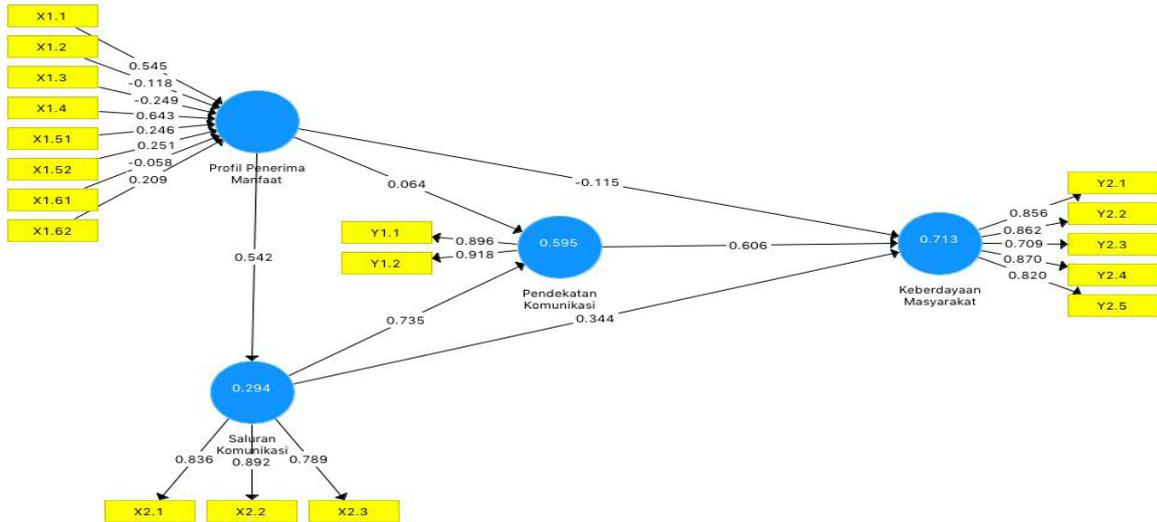
bahwa variabilitas keberdayaan masyarakat dapat dijelaskan oleh variabel karakteristik penerima manfaat, saluran komunikasi dan pendekatan komunikasi program TJS sebesar 71,3% sedangkan 28,7% dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian.

3. Pengujian Hipotesis

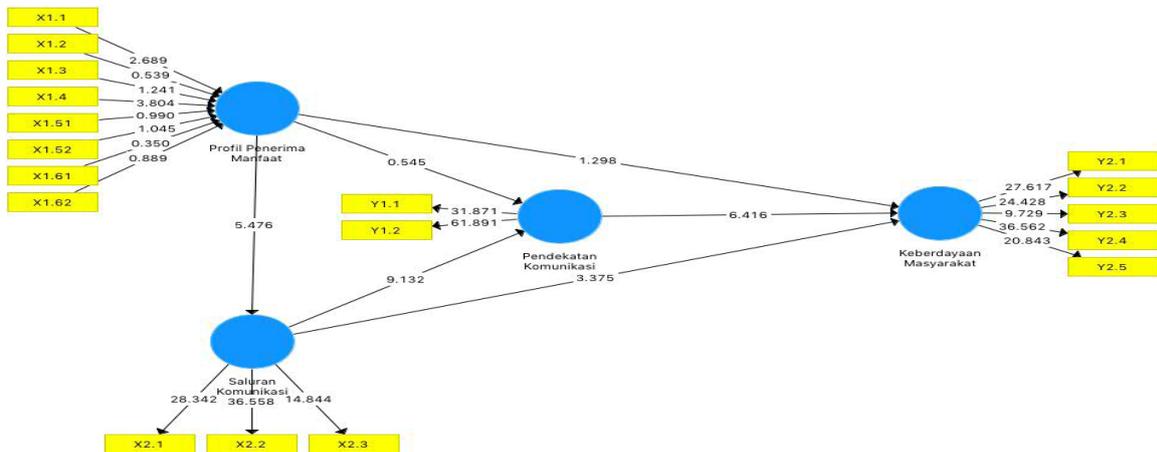
Berdasarkan analisa model penelitian ini dengan menggunakan PLS, diperoleh model penelitian yang disajikan pada Gambar 1 dan t-hitung model penelitian akhir yang disajikan pada Gambar 2.

Berdasarkan hasil pengolahan dan pembahasan sebelumnya, diketahui bahwa dari enam hipotesis khusus penelitian, didapatkan dua dari enam tidak memenuhi syarat sehingga hipotesis ditolak. Adapun hipotesis yang ditolak adalah pengaruh karakteristik penerima manfaat terhadap keberdayaan masyarakat dan pengaruh peubah karakteristik penerima manfaat terhadap pendekatan komunikasi program TJS. Sedangkan hipotesis yang diterima meliputi: pengaruh Karakteristik Penerima Manfaat terhadap saluran komunikasi, pengaruh pendekatan komunikasi program TJS terhadap keberdayaan masyarakat, pengaruh saluran komunikasi terhadap keberdayaan masyarakat, pengaruh saluran komunikasi terhadap pendekatan komunikasi program TJS.

Merujuk pada Tabel 6, terlihat hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa karakteristik/profil penerima manfaat tidak berpengaruh terhadap pendekatan komunikasi dan keberdayaan masyarakat, namun berpengaruh



Gambar 1. Hasil Perhitungan Model Komunikasi Pada Desa Lulut



Gambar 2. Hasil Perhitungan t-hitung Model Komunikasi Pada Desa Lulut

signifikan terhadap saluran komunikasi yang ditunjukkan dengan nilai (*original sample estimate* 0.542, *t-hitung* 5.476). Besarnya koefisien antara peubah karakteristik penerima manfaat terhadap saluran komunikasi sebesar 0,321, yang dalam hal ini termasuk dalam kategori moderat atau sedang. Dengan kata lain, apabila karakteristik penerima manfaat meningkat yang meliputi pendidikan, pendapatan, status sosial dan partisipasi sosial maka akan meningkatkan pemahaman terhadap saluran komunikasi. Dengan demikian hipotesis penelitian (H_1) yang menyebutkan terdapat pengaruh nyata antara karakteristik penerima manfaat berpengaruh terhadap saluran komunikasi **diterima** pada kategori moderat atau sedang.

Peubah saluran komunikasi terhadap pendekatan komunikasi didapatkan pengaruh signifikan (*original sample estimate* 0.735, *t-hitung* 9.132) Besarnya koefisien antara peubah saluran komunikasi terhadap pendekatan komunikasi sebesar 0.735 dalam hal ini termasuk substansial. Dengan demikian hipotesis penelitian (H_1) yang menyebutkan terdapat hubungan nyata antara

saluran komunikasi terhadap pendekatan komunikasi program TJS perusahaan **diterima**.

Peubah saluran komunikasi terhadap keberdayaan masyarakat didapatkan pengaruh signifikan (*original sample estimate* 0.344, *t-hitung* 3.375) Besarnya koefisien antara peubah saluran komunikasi terhadap keberdayaan masyarakat sebesar 0.344 dalam hal ini termasuk korelasi moderat. Dengan demikian hipotesis penelitian (H_1) yang menyebutkan terdapat hubungan nyata antara saluran komunikasi terhadap keberdayaan masyarakat **diterima**.

Peubah pendekatan komunikasi terhadap keberdayaan masyarakat didapatkan pengaruh signifikan (*original sample estimate* 0.606, *t-hitung* 6.416). Besarnya koefisien antara peubah pendekatan komunikasi terhadap keberdayaan masyarakat sebesar 0.606 dalam hal ini termasuk korelasi moderat. Oleh karena itu, hipotesis penelitian (H_1) yang menyebutkan terdapat hubungan nyata antara pendekatan komunikasi program TJS perusahaan terhadap keberdayaan masyarakat **diterima**. Dengan demikian, pendekatan komunikasi

dalam program TJS perusahaan baik dalam pendekatan CD maupun SD berpengaruh terhadap keberdayaan masyarakat.

SIMPULAN

Persepsi responden terhadap saluran komunikasi, secara umum dinilai baik untuk peubah kebijakan korporasi, peran pendamping dan peran tokoh masyarakat, sedangkan peran media masih dinilai buruk dengan nilai rata-rata sebesar 1.84. Persepsi penerima manfaat terhadap peubah pendekatan komunikasi, secara umum dinilai buruk dengan nilai rata-rata sebesar 2.4 untuk *community development* dan 2.34 untuk *sustainable development*. Untuk peubah keberdayaan masyarakat, secara umum penerima manfaat menilai buruk dengan nilai rata-rata 2.28 untuk keberdayaan ekonomi, 2.41 untuk keberdayaan pendidikan, 2.39 untuk keberdayaan sosial infrastruktur dan 2.2 untuk keberdayaan keamanan. Hanya keberdayaan kesehatan yang dinilai baik dengan rata-rata sebesar 2.98.

Karakteristik penerima manfaat yang menjadi pengaruh adalah pendidikan dan status social.

Dari tiga peubah yang mempengaruhi keberdayaan masyarakat, diketahui hanya pendekatan komunikasi dan saluran komunikasi yang berpengaruh langsung signifikan terhadap keberdayaan masyarakat, sedangkan karakteristik penerima manfaat berpengaruh signifikan terhadap saluran komunikasi.

Berdasarkan simpulan tersebut disarankan kepada perusahaan dan instansi terkait untuk mengoptimalkan pemilihan penerima manfaat pada indikator pendidikan dan status sosial Karena sebagai determinan yang berpengaruh pada peubah saluran komunikasi dan pendekatan komunikasi karena berpengaruh signifikan kepada keberdayaan masyarakat dengan berfokus pada keberdayaan ekonomi, pendidikan, social infrastruktur dan keamanan karena masih dinilai kurang baik/buruk oleh penerima manfaat.

DAFTAR PUSTAKA

- Birth, G., Illia, L., Lurati, F. and Zamparini, A. (2008). Communicating CSR: Practices among Switzerland's top 300 companies. *Corporate Communications: An International Journal*, 13(2): 182-190.
- Creswell, J. (2009). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Gani I, Muliati, dan Amalia S. (2015). Pemetaan masyarakat sebagai target group program CSR PT. PKT Bontang. *Jurnal Sosiohumaniora*, Vol. 17 No 1 hal.28-34.
- Hasbullah, T. (2012). Desain strategi tanggung jawab sosial perusahaan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dan sumber daya pesisir Kota Bontang (Studi Kasus PT. Pupuk Kaltim) [disertasi]. Bogor (ID): Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
- Nugroho, D.R., Hubeis AVS, Saleh A, and Priatna W.B. (2016). Communication model of corporate social responsibility program for community empowerment. *International journal of research in social science* vol.6 no.6 pp 1-10
- Payne M. 1997. *Modern Social Work Theory*. Second Ed. London (GB): MacMillan Press Ltd.
- [Sekneg RI] Sekretariat Negara Republik Indonesia. 2012. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Jakarta (ID): Sekneg RI.
- Sari, R.A. (2012). Pengaruh Karakteristik Perusahaan terhadap corporate social responsibility disclosure pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Nominal* Vol 1 No.1 hal 124 – 140 Tahun 2012
- Wibisono, Y. (2007). *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR (Corporate Social Responsibility)*. Gresik (ID): Fascho Publishing.
- Yulianita, N. (2008). Corporate social responsibility (CSR) sebagai aktivitas sosial marketing public relations. *Mediator*, 9 (1): 123-133
- Zainal, I.R. (2006). *Best Practices: Corporate Social Responsibility, Sebuah Pengalaman Membangun Multistakeholder Engagment bagi Penerpan CSR di Kabupaten Muba Sumatera Selatan*. Palembang (ID): Badan Penerbit Fakultas Ekonomi UNSRI.

DEMOKRASI DALAM SEJARAH MILITER INDONESIA Kajian Historis Tentang Pemilihan Panglima Tentara Pertama Pada 1945

Widyo Nugrahanto dan Rina Adyawardhina

Program Studi Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran

E-mail: widyo.nugrahanto@unpad.ac.id

ABSTRAK, Penelitian ini berjudul *Demokrasi dalam Sejarah Militer Indonesia; Kajian Historis Tentang Pemilihan Panglima Tentara Pertama pada 1945*. Penelitian ini adalah tentang bagaimana Soedirman terpilih sebagai Panglima Tentara Indonesia yang pertama. Begitu juga bagaimana cara pemilihannya sehingga Soedirman terpilih dan Oerip Soemohardjo terpilih mendampinginya sebagai kepala staf. Metode penelitian yang digunakan adalah metode sejarah. Metode Sejarah terdiri dari empat tahapan, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Sumber-sumber penelitian ini menggunakan koran-koran sezaman, majalah sezaman, buku, dan jurnal. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa terpilihnya Soedirman (Panglima Tentara) dan Oerip Soemohardjo (kepala Staf Tentara) merupakan cara-cara demokrasi langsung yang dilaksanakan pertama kali setelah Indonesia merdeka. Uniknya adalah cara ini justru digunakan oleh tentara dalam pemilihan panglima tertingginya.

Kata kunci: Panglima, TNI, Demokrasi.

DEMOCRACY IN INDONESIAN MILITARY HISTORY Historical Study about the Election of the First Army Commander in 1945

ABSTRACT, *The main subject this study is election the first commander of Indonesia's Military. In this case, Soedirman chose as Military Commander and Oerip Soemohardjo as Chief of Staff. Study employs a Historical Method, which consists of four stage: Heuristic, Critic, Interpretation, Historiography. The study utilize some sources such as newspaper, magazine, book, and journal. Main finding of this study are the election applied a direct democratic system. The conclusion this study shows that the election was firsts implemented the direct democratic system after Indonesia's Independence. The unique things is the democratic system implemented by army to choose the highest commander.*

Key words: *The First TNI's Commander, Voting, Democratic, Democrachy.*

PENDAHULUAN

Banyak orang berpandangan bahwa militer atau tentara kurang memiliki jiwa demokrasi. Pandangan ini muncul secara umum dalam kemiliteran di seluruh dunia, dengan sistem pemilihan yang sudah dianggap baku, yaitu sistem komando. Sistem komando ini sering diartikan suatu komunikasi satu arah dari atasan (komandan) kepada bawahan. Namun, dalam sejarah kemiliteran di Indonesia justru terdapat hal unik, yaitu pemilihan panglima pertamanya dilakukan secara demokratis, yaitu dengan cara voting. Menurut Nugroho Notosusanto (1991:43) tidak mungkin dalam suatu tentara profesional ala barat dilakukan pemilihan seorang panglima besar oleh pihak tentara itu sendiri. Di saat orang-orang sipil Indonesia hingga sekarang masih sering memperdebatkan tentang demokrasi, justru pihak militer Indonesia (dalam hal ini adalah TKR) telah memberi contoh pemilihan yang demokratis dalam sejarah kemiliteran Indonesia, yaitu ketika pemilihan panglima pertamanya.

Secara terminologis, demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warganegara memiliki hak yang sama dalam pengambilan keputusan. Demokrasi sering diartikan secara umum sebagai pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat, demikian Abraham Lincoln (Presiden Amerika Serikat) pernah menyebutkannya. Demokrasi berasal dari *demokratia* yang sudah digunakan pada pertengahan abad ke-5 SM

di Yunani. Akar kata demokrasi berasal dari kata *demos* yang berarti rakyat dan *kratia* yang berarti pemerintahan atau kekuasaan (Dahl, 1992:5). Pada masa itu, demokrasi yang terjadi adalah demokrasi langsung atau *direct democracy* (Budiardjo, 2008:109) atau pada masa sekarang lebih populer dengan kata *voting*, yang artinya pemilihan secara langsung oleh rakyat kala itu yang diselenggarakan dalam gelanggang *Coloseum* pada polis-polis di Yunani pada abad tersebut.

Demokrasi sebagai model pemerintahan Amerika Serikat ini banyak diimplementasikan di banyak negara di Asia, tidak terkecuali Indonesia (Rahmatunnisa dan Dede Mariana, 2003:175). Terkait hal ini, secara praktis, demokrasi lebih sering dikaitkan dengan pemilihan umum, baik langsung maupun tidak langsung, yang terjadi pada insitusi sipil, seperti presiden pada sebuah negara atau gubernur pada pemerintahan daerah atau kepala daerah lainnya. Memang agak aneh jika sistem demokrasi berupa pemilihan langsung muncul dalam institusi kemiliteran yang memiliki budaya sistem komando. Hipotesisnya, hal ini mungkin hanya terjadi di Indonesia dan mungkin juga hanya satu satunya di dunia. Oleh karena itu, masalah utama yang dibahas dalam kajian ini adalah proses pemilihan panglima tentara pertama di Indonesia pada 1945. Terkait hal itu maka dirumuskanlah beberapa pertanyaan: (1) Bagaimana cara pemilihan panglima tentara pertama di Indonesia?

(2) Mengapa diadakan pemilihan panglima tentara di Indonesia ketika itu? (3) Benarkah pemilihan panglima tentara pertama itu dilakukan secara demokratis? Rumusan masalah-masalah tersebut ditujukan untuk menjawab secara detail proses demokrasi yang dilakukan dalam pemilihan panglima tentara pada 1945.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah. Tahapan-tahapan dalam metode sejarah adalah sebagai berikut. Pertama adalah heuristik, yakni kegiatan dalam mencari, menemukan, dan menghimpun sumber atau jejak-jejak masa lalu. Sumber-sumber yang dihimpun itu dapat berupa sumber tertulis dan sumber tidak tertulis dan juga wawancara dengan pelaku yang masih hidup. Sumber-sumber itu diperoleh dari berbagai tempat.

Tahapan kedua adalah kritik atau verifikasi. Kritik ini dilakukan pada sumber atau data yang telah dihimpun. Kritik ini dapat dibagi dua, yaitu kritik eksternal yang gunanya untuk menentukan sejauh mana otentisitas sumber, dan kritik internal untuk menguji kredibilitas sumber. Untuk itu, hal yang dilakukan adalah mengadakan penilaian intrinsik (hakiki) terhadap sumber. Dalam tahapan kritik ini dilakukan pemilahan sumber-sumber yang telah dihimpun itu menjadi sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber yang berasal dari saksi sejarah (*eyewitness*). Sumber berasal dari seseorang yang menyaksikan, mendengarkan, atau mengalami sendiri peristiwa yang diceritakannya (Garraghan, 1947: 33, Gottchalk, 1975: 35-36, Sjamsuddin, 2007:107, Herlina, 2008: 10). Sumber primer ini bisa berupa arsip-arsip atau dokumen-dokumen. Selain itu, sumber primer itu juga didapat dengan mewawancarai beberapa orang saksi atau pelaku yang masih hidup. Sumber-sumber primer itu kemudian dilengkapi oleh koran-koran yang memuat berita-berita yang sezaman. Sumber-sumber penelitian ini didapatkan dari Perpustakaan TNI AD dan Dinas Sejarah TNI AD di Bandung, Monumen Pers di Surakarta, Perpustakaan Nasional di Jakarta, Museum Pusat TNI AD Dharma Wiratama di Yogyakarta, serta Museum Panglima Besar Jenderal Sudirman di Yogyakarta. Langkah selanjutnya adalah menghimpun sumber sekunder. Sumber sekunder adalah sumber yang berasal dari orang yang tidak menyaksikan sendiri peristiwanya dan bahkan tidak hidup sezaman dengan peristiwa-peristiwa yang diteliti. Sumber sekunder dapat juga berupa sumber yang telah diolah secara ilmiah (Garraghan 1947: 91; Kuntowijoyo, 1995: 96-97; Sjamsuddin, 2007: 106-107; Herlina, 2008: 12-13).

Dalam tahapan ini selanjutnya adalah melakukan koraborasi. Koraborasi itu dilakukan setelah dilakukannya kritik eksternal dan kritik internal. Koraborasi dilakukan karena dalam mendapatkan fakta sejarah

diperlukan suatu dukungan data dari sumber sejarah lain satu atau lebih. Apabila sumber yang berisi data hanya satu saja, maka koraborasi tidak dapat dilakukan. Dalam hal ini berlakulah prinsip *Argumentum ex Silentio* artinya sumber berisi data itu dianggap sebagai fakta apabila tidak ada kontradiksi (berdiam diri) atau penentangan terhadap data itu (Gottschalk, 1975: 102; Herlina 2008: 35). Koraborasi yang dilakukan dalam kajian ini salah satunya adalah pencarian fakta terkait rapat tentara di Yogyakarta pada 12 November 1945, dimana sumber sekunder seperti pemaparan Nugroho Notokusanto dalam buku *Pejuang dan Prajurit*, diperkuat oleh kesaksian langsung Didi Kartasasmita yang waktu itu ikut dalam pemilihan tersebut.

Tahap ketiga adalah interpretasi. Dalam interpretasi ini dilakukan dua macam interpretasi yang berbeda. Interpretasi yang pertama adalah analisis. Pada analisis ini fakta-fakta pemilihan panglima militer pertama tersebut diuraikan secara kronologis. Interpretasi kedua adalah sintesis. Pada sintesis ini dilakukan penyatuan fakta-fakta (Kuntowijoyo 1995: 100-105; Herlina, 2008: 36-38). Dalam tahapan interpretasi ini, langkah utamanya adalah menggabungkan fakta-fakta yang telah ditemukan sehingga berurutan secara kronologis.

Tahapan terakhir adalah historiografi. Historiografi adalah tahapan yang mana fakta-fakta yang telah ditemukan, dituliskan menjadi suatu cerita yang menarik. Pada tahapan historiografi ini terjadi suatu penulisan yang utuh dari interpretasi, eksplanasi, sampai pada presentasi atau pemaparan sejarah yang sebenar-benarnya secara bersamaan (Sjamsuddin, 2007: 155-156). Dalam tahap historiografi ini, kajian disusun dalam lingkup judul *Demokrasi Dalam Sejarah Militer Indonesia: Kajian Historis Tentang Pemilihan Panglima Tentara Pertama pada 1945*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembentukan Tentara Pada Awal Kemerdekaan

Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada 17 Agustus 1945, tidak secara langsung Pemerintahan Indonesia membentuk tentara Indonesia. Pada 22 Agustus 1945, PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) lebih memilih membentuk suatu badan Penolong Keluarga Korban Perang. Badan tersebut lebih terkenal dengan sebutan BKR (Badan Keamanan Rakyat). Sebetulnya pada rapat 19 Agustus 1945 sempat diputuskan untuk segera membentuk suatu tentara kebangsaan (*Tjahaja*, 21 Agustus 1945). Akan tetapi, keputusan itu diubah pada rapat 22 Agustus 1945 karena pada saat itu berkembang suatu pendapat bahwa jika dibentuk tentara kebangsaan maka akan mengundang serangan dari Sekutu ataupun Jepang yang telah sepakat untuk mempertahankan *status quo*. Pada saat itu, para anggota PPKI berpendapat bahwa kekuatan tentara kebangsaan yang akan dibentuk belum cukup untuk

menghadapi gempuran Sekutu ataupun Jepang. Dan pilihan utamanya adalah melakukan diplomasi untuk mendapatkan pengakuan kemerdekaan Indonesia saat itu. Pada rapat 22 Agustus 1945 tersebut, PPKI memutuskan untuk membentuk KNI (Komite Nasional Indonesia), Partai Nasional Indonesia (PNI) dan Badan Keamanan Rakyat (BKR) sebagai bagian dari Badan Penolong Keluarga Korban Perang (BPKKP) (*Tjahaja*, 23 Agustus 1945). Dalam pidato pembentukan ketiga badan tersebut - 23 Agustus 1945 - Presiden Soekarno mengatakan kepada mantan anggota PETA (Pembela Tanah Air), *Heiho* dan pemuda-pemuda kelaskaran lainnya untuk bergabung dalam BKR dan bersiap untuk dipanggil menjadi prajurit tentara kebangsaan (*Soeara Asia*, 24 Agustus 1945).

BKR atau Badan Keamanan Rakyat tersebut kemudian menjadi suatu wadah berkumpulnya para mantan anggota PETA dan *Heiho* yang telah dibubarkan oleh Jepang pada 19-20 Agustus 1945 (Nasution, 1970: 115) - sehubungan dengan menyerahnya Jepang pada Sekutu 14 Agustus 1945. BKR kemudian berdiri di daerah-daerah karena gerakan spontan dari para mantan PETA dan *Heiho* yang ada di daerah dalam merespon pidato Soekarno. BKR yang berdiri kemudian menjadi badan-badan yang melakukan revolusi di daerah-daerah (Nasution, 1970: 115). Di dalam BKR terdapat kesatuan keprajuritan darat, laut dan udara. Para mantan *Kaigun*, *Heiho*, serta para pemuda yang bekerja pada obyek-obyek vital di pelabuhan-pelabuhan dan pada jawatan-jawatan pelayaran membentuk BKR Penjaga Pantai (*Soeara Asia*, 12 September 1945). Sementara itu, pemuda-pemuda mantan anggota badan penerbangan Belanda dan pemuda-pemuda mantan anggota kesatuan penerbangan Jepang - seperti *Rikugun Koku Butai*, *Kaigun Koku Butai* dan *Nanpo Koku Kabusyiki* - membentuk BKR udara (Trihadi, 1981:2).

Pada 5 Oktober 1945, BKR diubah menjadi TKR (Tentara Keamanan Rakyat). Presiden Soekarno membentuk tentara untuk tujuan memperkuat perasaan keamanan umum (Fattah, 2005: 46). Selain itu, pembentukan tentara dengan nama keamanan rakyat ini dimaksudkan untuk dapat menjadi sebuah pertanda bagi Sekutu maupun Jepang bahwa tentara yang dibentuk oleh Pemerintah Indonesia ini bukan untuk menghadapi musuh yang datang atau menghadapi Sekutu ataupun Jepang, tetapi untuk menangani masalah dalam negeri, yaitu keamanan rakyat.

Pada 6 Oktober 1945 dikeluarkan surat resmi berjudul Maklumat Pemerintah yang isinya mengangkat Soeprijadi seorang anggota PETA yang memimpin pemberontakan di Blitar sebagai Menteri Keamanan Rakyat - yang berarti sekaligus sebagai Panglima Tentara Keamanan Rakyat. Menurut Nasution (Nasution, 1970) karena Soeprijadi tidak pernah muncul atau datang ke Jakarta, maka pada 4 Oktober 1945 untuk melengkapi jabatan dalam Kementrian Keamanan Rakyat diangkatlah susunan kepengurusan sebagai berikut:

Menteri ad interim : Moehamad Soeljoedikoesoemo
 Pemimpin Tertinggi : Soeprijadi
 Kepala Staf Umum : Mayor Oerip Soemohardjo

Untuk menjalankan fungsi Menteri Keamanan yang kosong karena ketidakhadiran Soeprijadi diangkatlah Moehamad Soeljoedikoesoemo, mantan *daidanco* (Nasution 1970:208-239).

Wakil Presiden Moehamad Hatta memanggil Oerip Soemohardjo - seorang pensiunan mayor KNIL (*Koninklijke Nederlandsche Indische Leger*) yang pensiun pada 1938 - untuk datang ke Jakarta. Oerip Soemohardjo kemudian diangkat oleh Moehamad Hatta menjadi Kepala Staf Umum Tentara dengan pangkat letnan jenderal (Notosusanto, 1991:41) dan ditugaskan untuk membentuk tentara Indonesia (Nasution, 1970: 125). Alasan dipilihnya Oerip Soemohardjo ialah karena ia pernah membuat pernyataan "Aneh negara *zonder* tentara" (Notosusanto, 1991: 40). Pernyataan yang menyindir pemerintah tersebut malah membuat ia diperhatikan pemerintah. Apalagi Mohamad Hatta (Wakil Presiden) dan Soetan Sjahrir (yang nantinya diangkat sebagai Perdana Menteri atas saran Mohamad Hatta) adalah mahasiswa lulusan Belanda yang sangat mengerti tentang mutu orang-orang lulusan Belanda. Oerip Soemohardjo dalam hal ini ialah seorang pensiunan perwira KNIL dengan pangkat mayor yang lulusan Breda, sekolah kemiliteran di Belanda. Hatta dan Sjahrir sangat percaya pada perwira lulusan Breda di Belanda daripada mantan-mantan PETA atau *Heiho* yang tidak mengalami pendidikan kemiliteran secanggih pendidikan di Breda Belanda. Selain itu, Hatta juga dapat masukan dari Didi Kartasmita tentang sepak terjang Oerip Soemohardjo.

Keresahan muncul di kalangan para anggota TKR di daerah-daerah akibat Soeprijadi yang sejak ditetapkan sebagai panglima tentara tidak pernah muncul atau datang ke Jakarta. Selanjutnya, sambil menunggu kehadiran Soeprijadi, untuk melengkapi ketentaraan di Indonesia, Kementrian Keamanan Rakyat atas kerjasama Oerip Soemohardjo dan Moehamad Soeljoedikoesoemo membentuk empat komandemen di Sumatra, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kepada setiap panglima masing masing komandemen diberikan komando taktis, baik atas kesatuan kesatuan TKR (Tentara Keamanan Rakyat) yang regular maupun atas sekian banyaknya badan perjuangan, yakni nama baru yang diberikan kepada berbagai organisasi kelaskaran. Selanjutnya, batalyon-batalyon TKR dikelompokkan menjadi resimen dan divisi. Enam divisi terbentuk di Sumatra, tiga di Jawa Barat, empat di Jawa Tengah dan tiga di Jawa Timur (Sundhaussen, 1988: 14).

Dalam pembentukan komandemen, Oerip Soemohardjo dibantu oleh pemuda bekas perwira KNIL, yaitu Soerjadharma dan TB Simatoepang. Mereka kemudian memilih Yogyakarta sebagai Markas Tertinggi TKR (MT TKR). Pada awalnya markas itu terletak

di gedung yang sekarang menjadi Hotel Garuda di Yogyakarta, lalu dipindahkan ke bangunan rumah yang sekarang menjadi Museum TNI AD Yogyakarta.

Pada awalnya, Oerip Soemohardjo hanya akan membentuk empat divisi saja, yaitu tiga di Jawa dan satu di Sumatra. Namun, karena pemuda yang mendaftar sebagai anggota TKR membludak melebihi yang direncanakan maka terjadilah pembentukan yang lebih banyak. Di Sumatra, anggota TKR banyak berasal dari Barisan Pemuda Republik Indonesia (BPRI) dan Pemuda Indonesia (PI), sedangkan di Jawa banyak berasal dari PETA dan Heiho yang bergabung dalam BKR yang kemudian menjadi TKR (*Soeara Merdeka*, 10 November 1945). Para panglima komandemen tersebut ditetapkan oleh Oerip Soemohardjo dan Moehamad Soeljoadikoesoemo. Para panglima komandemen tersebut adalah sebagai berikut: Komandemen I Jawa barat dipimpin oleh Jenderal Mayor Didi Kartasasmita; Komandemen II Jawa Tengah dipimpin oleh Jenderal Mayor Soeratman; Komandemen III Jawa Timur dipimpin oleh Jenderal Mayor Moehamad; serta Komandemen Sumatra dipimpin oleh Jenderal Mayor Soehardjo Hardjowardojo (Nasution, 1970: 208).

Untuk mengatasi kemungkinan kacaunya keadaan karena kedatangan musuh, sebagai pimpinan TKR, Oerip Soemohardjo mengeluarkan perintah kepada TKR untuk menduduki jabatan pamong praja agar dapat menjamin keamanan dan kesejahteraan masyarakat. "Pada tempat-tempat di mana pamongpraja sudah meninggalkan tempat kerjanya atau hilang, mereka segera diganti TKR yang sesuai dengan tingkat dan pangkatnya, misalnya Kepala Desa diganti oleh Komandan Regu, Camat diganti oleh Komandan Seksi (peleton), Wedana diganti oleh Komandan Kompi dan Bupati diganti oleh Komandan Batalyon" (*Kedaoelatan Rakjat*, 1 November 1945). Selain itu, para anggota TKR juga menduduki Badan Pekerja Komite Nasional Pusat dan Daerah seperti yang terjadi di Surabaya (*Soeara Rakjat*, 16 Oktober 1945).

Rapat Tentara di Yogyakarta

Bersamaan dengan pembentukan divisi-divisi dan komandemen-komandemen di daerah-daerah, pasukan Sekutu telah mengadakan pelucutan senjata di beberapa daerah yang didudukinya. Oleh karena itu, para perwira TKR mendesak pemerintah untuk sesegera mungkin mengisi jabatan Panglima Tentara dan Menteri Keamanan. Pada awalnya, pemerintah tidak menanggapi desakan para perwira TKR tersebut, tetapi karena Oerip Soemohardjo sudah diberi mandat untuk membentuk tentara maka ia atas seizin pemerintah pusat berinisiatif untuk memanggil semua panglima divisi dan resimen TKR untuk sebuah rapat besar. Rapat atau konferensi tersebut dilakukan pada 12 November 1945 di Yogyakarta setelah Jakarta diduduki oleh tentara Sekutu (Tjokropranolo, 1992:64). Menurut Didi Kartasasmita, dalam ketentaraan pada masa itu telah muncul gejala

persaingan antara mantan KNIL dan mantan PETA. Ia menduga gejala persaingan itu telah diketahui oleh Oerip Soemohardjo dan pemerintah pusat. Didi menduga persaingan itu menjadi salah satu titik tolak Oerip sebagai kepala MBT (Markas Besar Tentara) menyelenggarakan rapat perwira. Selain itu, ada pula kondisi objektif yang mengharuskan diselenggarakannya rapat itu, yaitu TKR belum memiliki pemimpin tertinggi yang lazim disebut sebagai "Panglima Besar" (Sumarsono, 1993: 142-143).

Pada 12 November 1945 diadakanlah rapat tentara di sebuah gedung markas Tertinggi Tentara Keamanan Rakyat (MT TKR) di daerah Gondokusuman, Yogyakarta. Sekarang gedung tersebut menjadi gedung Museum Dharma Wiratama Museum Pusat TNI-AD, sebuah museum di bawah pengelolaan TNI AD. Gedung tersebut sempat menjadi Korem 072/Pamungkas Kodam VII Diponegoro. Gedung ini dibangun Pemerintah kolonial Belanda pada 1904 yang digunakan sebagai rumah dinas Pejabat Administrasi Perkebunan Belanda di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Pada masa Pendudukan Jepang, gedung ini digunakan sebagai Markas Tentara Jepang (*syudokan*) di Yogyakarta. Semua divisi diundang untuk datang ke rapat tentara di Yogyakarta. Konferensi tersebut dihadiri hampir semua komandan Divisi dan Resimen TKR. Juga hadir dalam rapat konferensi itu adalah Sri Sultan Hamengkobowono IX, Soenan Pakoebowono XII dan Mangkoenogoro X. Utusan dari Sumatra yang hadir hanya seorang, yaitu Kolonel Moehamad Noeh mewakili enam divisi di Sumatra (Tjokropranolo, 1992:63).

Sejatinya, dalam rapat tersebut Oerip Soemohardjo berharap mendapat mandat dari divisi-divisi yang hadir untuk menjadi panglima tertinggi TKR. Apalagi Mohamad Hatta sudah tampak mendukungnya. Ketika itu rapat dihadiri oleh para perwira senior dalam markas tertinggi TKR (MT TKR), panglima-panglima divisi dan komandan-komandan resimen dari Pulau Jawa. Dari Pulau Sumatra tidak ada yang hadir karena sulitnya komunikasi dan akses di masa awal kemerdekaan. Hanya seorang wakil dari Sumatra yaitu Moehamad Noeh. Begitu pula dari Surabaya tidak ada yang hadir karena ketika itu Surabaya telah dilanda peperangan (10 November 1945) dengan Inggris (Notosusanto, 1991: 43).

Setelah rapat dibuka oleh Oerip Soemohardjo, forum membicarakan tentang bagaimana membangun tentara yang kuat guna menghadapi serangan Sekutu. Akan tetapi, menurut Didi Kartasasmita sejak awal rapat sudah timbul kesan bahwa rapat perwira tersebut tidak akan tertib. Para pesertanya datang dengan pistol di pinggang. Didi menyebutnya sebagai rapat koboy-koboyan. Rapat itu terkesan kacau dan tidak mencerminkan kedisiplinan. Orang yang berbicara di forum selalu disoraki, tidak terkecuali pejabat sementara Menteri Pertahanan yaitu Moehamad Soeljoadikoesoemo (Sumarsono, 1993:143-145). Nasution mengatakan bahwa rapat berkembang sedemikian rupa sehingga Oerip susah menguasai

jalannya pembicaraan. Wakil Pemerintah Pusat Soeljoedikoesoemo pun tak dapat memberikan tuntunan. Berbeda dengan pernyataan Didi Kartasasmita dan Nasution, menurut Djatikoesoemo suasana rapat semakin seru, hangat dan riuh ramai ketika dimulai pencalonan nama-nama yang akan dijadikan calon panglima karena yang hadir belum siap untuk mengajukan nama calon masing-masing. Akibatnya, Soedirman meminta rapat diskors beberapa saat (Djatikoesoemo dalam Tjokropranolo 1992: 64).

Menurut majalah *Tentara Keamanan Rakyat* (1946), saat itu sebetulnya telah mencuat dua nama yang ramai dibicarakan untuk mengganti Soeprijadi, yaitu Oerip Soemohardjo - yang ketika itu diberi mandat sebagai kepala Staf Umum dari Pemerintah Pusat di Jakarta - serta Soedirman sebagai Panglima Divisi V Banyumas. Munculnya nama Soedirman berasal dari suara kalangan mantan PETA yang hadir dalam rapat tersebut. Berbeda dengan para mantan KNIL yang berharap Oerip lah yang dapat memenangkan pemilihan tersebut. Alasannya, Oerip adalah tokoh senior yang dianggap mumpuni dan cakap dalam organisasi kemiliteran. Apalagi ia seorang lulusan Sekolah Militer Breda di Belanda. Akan tetapi, pandangan berbeda berkembang dalam pemikiran kalangan mantan PETA yang hadir dalam rapat saat itu. Rupanya mereka masih punya kecurigaan pada perwira-perwira mantan KNIL karena mereka dianggap sebagai perwira didikan Belanda. Oleh karena itu, mereka masih berharap bahwa pengganti Soeprijadi adalah juga mantan PETA.

Pada saat jalannya rapat, muncul pertanyaan tentang cara pemilihan pimpinan tertinggi tersebut. Ketika itu Oerip Soemohardjo mengusulkan pemilihan secara langsung. Menurut Majalah *Historia*, cara pemilihan tersebut sangat sederhana, yakni peserta cukup mengangkat tangan dan mengacungkan tangan begitu nama kandidat yang dipilihnya disebutkan panitia (*Historia*, 32 Tahun III 2016: 68). Sepertinya ketika itu para perwira yang hadir tidak sedang berpikir untuk menerapkan sistem demokrasi atau tidak sedang memilih cara demokrasi langsung untuk memilih panglima tertinggi mereka. Mereka pun sepertinya berpikir bahwa cara itu adalah suatu cara yang paling adil dalam memilih tokoh yang akan memimpin mereka kelak.

Secara kronologis, setelah waktu skorsing dicabut dimulailah kembali rapat tersebut. Suasana rapat pun sudah tenang, tidak seperti sebelumnya. Saat itu dipilihlah salah seorang pimpinan sidang untuk memimpin pemilihan, yakni Letnan Kolonel Holland Iskandar. Holland Iskandar memimpin secara terbuka rapat tersebut dengan meminta pengajuan para calon panglima dari para peserta melalui secarik kertas dan langsung dituliskan di papan tulis yang tersedia di ruangan tersebut. Menurut Didi Kartasasmita, Holland sangat aktif memimpin rapat pemilihan itu (Sumarsono, 1993:145).

Ketika pencalonan dibuka, muncullah beberapa nama yang dituliskan di papan tulis, yaitu:

1. Hamengkoeboewono IX (Sultan Yogyakarta)
2. Widjoyo Soerjokoesoemo
3. GPH Poerbonegoro (Bangsawan Jawa)
4. Oerip Soemohardjo (utusan Pemerintah Pusat dan mantan perwira KNIL)
5. Soedirman (Komandan Resimen TKR Banyumas dan mantan PETA)
6. Soerjadharma (mantan perwira angkatan udara KNIL)
7. M. Pardi (seorang laksamana Kepala TKR Laut)
8. Nazir (mantan pelaut yang pernah bekerja di angkatan laut Jepang)

Menurut Kantor Berita *Antara*, suatu saat nanti Komodor Soerjadarma diangkat sebagai Kepala Staf Angkatan Udara, Nazir diangkat menjadi kepala Staf Angkatan Laut, Oerip diangkat sebagai Kepala Staf Umum, Sakirman sebagai Ketua Laskar Rakyat, Soetomo diangkat sebagai Ketua Pejuang Revolusi Rakyat pada 28 Juni 1947 (*Algemeen Indisch Dagblad; De Preangerbode 48e Jaargang no 144* Selasa 1 Juli 1947).

Pemilihan berlangsung hanya dengan mengangkat dan mengacungkan tangan satu per satu setelah nama-nama calon disebutkan oleh Holland Iskandar (Pernyataan Djatikoesoemo dalam Tjokropranolo 1992: 64 dan dalam *Historia* 32 tahun III 2016:68). Menurut Didi Kartasasmita dalam bukunya:

“Sebelum pemilihan berlangsung, ada orang yang saya nilai sangat aktif. Ia adalah Holland Iskandar, mantan *Daidancho* (atau mungkin juga *Syudancho*) di Jawa Tengah. Bisa jadi Holland sendiri yang aktif mensponsori Pak Dirman untuk menjadi Panglima Besar. Holland itulah yang kemudian memimpin rapat pemilihan, menggantikan Pak Oerip (Sumarsono, 1993:145)”.

Pemilihan berlangsung tiga putaran. Pada putaran pertama dua calon gugur. Pada putaran kedua dua calon gugur lagi. Pada putaran ketiga, tersisa empat nama, di antaranya Soedirman, Oerip Soemohardjo, Hamengkoeboewono IX dan Soerjadharma. Lalu terpilihlah Soedirman dengan selisih suara yang tidak terlalu banyak dengan Oerip Soemohardjo (Pernyataan Djatikoesoemo dalam Tjokropranolo 1992: 64). Pernyataan ini diperoleh dari Djatikoesoemo yang disampaikan pada peringatan wafatnya Soedirman pada 9 Februari 1991 yang diadakan oleh Yayasan PETA di Gedung Pola Jakarta. (Tjokropranolo 1992: 64). Menurut Didi Kartasasmita, Oerip Soemohardjo mendapat 21 suara, sedangkan Soedirman 23 suara (Sumarsono, 1993:143). Mengenai perolehan suara terdapat perbedaan data. Majalah *Historia* menyebutkan Soedirman hanya unggul 1 suara dari Oerip, yaitu 22 suara, sedangkan Oerip mendapat 21 suara (*Historia* 32 tahun III 2016:68).

Uniknya, enam suara bagi Soedirman diperoleh hanya dari satu nama yaitu Mohammad Noeh sebagai wakil Sumatra satu satunya yang datang ke rapat tersebut (Djatikoesoemo dalam Tjokropranolo, 1992:64). Menurut Nasution (Nasution: 1989), karena Mohammad Noeh mewakili enam resimen yang terdapat di Sumatra, maka semua suara dari Sumatra berasal dari Noeh. Kebetulan Noeh memang lebih dekat ke PETA karena kebanyakan TKR Sumatra adalah mantan *Gyugun*, tentara Sukarela bentukan Jepang. Berikut hasil wawancara Majalah *Historia* dengan Antony N.A.Noeh putra Kolonel Moehammad Noeh dalam majalah *Historia* 32 tahun III 2016.

“Kolonel Muhammad Nuh hadir membawa surat dari Koordinator/Organisator Tentara di Sumatra Dr. A.K.Gani yang menetapkan dirinya sebagai Kepala Staf Komandemen Sumatra. Sebagai satu-satunya wakil TKR Sumatra pada rapat itu, sejak kali pertama Muhamad Nuh merasa berhak menyumbangkan enam suara. Itu diyakini Muhammad Nuh karena kapasitasnya selaku wakil Komandemen Sumatra yang membawahkan 6 divisi. Namun karena dalam kenyataannya divisi yang dimaksud belum terbentuk, pendirian Nuh ditentang beberapa Panglima Divisi dan Komandan Resimen dari Jawa. Mereka menghendaki Kolonel Muhammad Nuh pun sepatutnya hanya punya satu suara. Disinilah peran Holland Iskandar. Selaku pemimpin rapat, Holland meluluskan ke inginan Muhammad Nuh dengan mengacu pada kawat/telegram dari Presiden Soekarno mengenai pengangkatan Dr.A.K.Gani sebagai Koordinator/Organisator Tentara di Sumatra. Kawat itulah yang melahirkan keputusan penetapan Jenderal Mayor Suhardjo sebagai panglima Komandemen Sumatra dan Kolonel Muhammad Nuh sebagai Kepala Staf Komandemen Sumatra. Pada akhirnya, argumen yang diutarakan Kolonel Muhammad Nuh dapat diterima oleh peserta konferensi.”

Setelah diadakan pemilihan, maka terpilihlah Soedirman - yang ketika itu masih berusia 29 tahun – sebagai panglima tentara. Di kalangan perwira-perwira Jawa yang hadir kala itu, Soedirman dipandang memiliki daya tarik dan kharisma yang besar. Ketika zaman Pendudukan Jepang, ia pernah duduk sebagai anggota Dewan Penasehat Daerah “Syu SangiKai” Purwokerto Jawa Tengah. Namanya terkenal setelah berhasil merebut senjata dari gudang tentara Jepang di Banyumas pada 9 September 1945 (Salam 1963: 21-26). Oerip Soemohardjo kemudian tetap diminta menjabat sebagai Kepala Staf Umum, dan ditetapkanlah Hamengkoeboewono IX sebagai Menteri Keamanan (Sekarang jabatan itu menjadi Menteri Pertahanan).

Analisis Kemenangan Soedirman

Terpilihnya Soedirman sebagai panglima tertinggi tentara, memiliki beberapa tendensi. *Pertama*, perlu

diketahui bahwa yang banyak hadir rapat dan ikut memilih dalam rapat itu adalah para mantan tentara didikan Jepang, seperti PETA dan *Gyu-gun*. Ada beberapa mantan PETA yang sebetulnya pernah mengenyam kemiliteran KNIL. Mereka ini pernah menjadi anggota KNIL dan saat Jepang menduduki Indonesia, mereka beralih menjadi anggota PETA dan ketika Indonesia merdeka, memilih masuk BKR. Mereka di antaranya Djatikoesoemo, Soeharto, Gatot Soebroto, dan Ibrahim Adjie. Jumlah terbanyak adalah mantan PETA yang masuk BKR, yang terkemuka dari golongan ini adalah Soedirman. Mantan KNIL jumlahnya lebih sedikit. Mereka dapat dibagi dua, yaitu yang pertama adalah yang sempat mengenyam pendidikan di Breda (jumlahnya paling sedikit) diantara mereka adalah Didi Kartasasmita, Soerio Soelerso, Soerjadharma dan Oerip Soemohardjo - yang paling senior di antara mereka. Lalu yang kedua adalah mereka yang hanya dididik dalam sekolah militer KNIL di Cimahi, yaitu TB Simatupang, AH. Nasution dan Alex Kawilarang (Sundhaussen, 1988: 20-23).

Kedua, kebanyakan dari mereka adalah orang dari suku-suku dari Pulau Jawa. Suku Jawa dalam hal ini adalah perwira-perwira Cirebon dan sedikit perwira dari suku Sunda. Para perwira dari luar Pulau Jawa jumlahnya sangat sedikit, yaitu AH Nasution dan TB Simatupang. Sementara sebagian besar dari mereka adalah para perwira dari suku Jawa dan Sunda, seperti Oerip Soemohardjo, Soedirman, Gatot Soebroto, Didi Kartasasmita, Ibrahim Adjie, Hidajat Padmadisastra (Sundhaussen, 1988: 20-23).

Ketiga, di antara mereka sebagian besar adalah muslim dan sedikit para perwira *abangan* atau priyayi Jawa. Di Jawa terdapat subkultur santri dan *abangan* (untuk hal ini baca *The Religion of Java* dari Clifford Geertz), dan lebih sedikit lagi adalah perwira Protestan seperti Simatupang dan Kawilarang (Sundhaussen, 1988: 20-23). Melihat komposisi yang hadir kala itu, sulit bagi Oerip Soemohardjo - yang mantan KNIL dan seorang Jawa *abangan* dan beristri seorang perempuan priyayi beragama Katholik - dapat memenangkan pemilihan pada rapat tentara itu. Istri Oerip Soemohardjo adalah Raden Ayu Maria Rochmah, seorang perempuan Indo-Belanda (*Kompas*, 30 Oktober 1977:6). Apalagi tokoh pemimpin rapat adalah Holland Iskandar yang menurut Didi Kartasasmita ikut mempromosikan Soedirman untuk maju sebagai calon panglima tentara. Selain itu, hal yang terpenting ialah Soedirman namanya “sedang naik daun” karena peristiwa perebutan gudang senjata di Banyumas sehingga membuat orang memperhitungkan namanya sebagai calon panglima tentara.

Selain Panglima tertinggi TKR, ketika itu dipilih pula tokoh yang akan menjadi menteri keamanan rakyat. Menteri Keamanan terpilih ketika itu adalah Sri Soeltan Hamengkoeboewono IX untuk menggantikan Moehamad Suljoadikoesoemo. Dalam terpilihnya Sri Soeltan tidak terlalu banyak masalah. Tampak lebih

mudah karena dianggap tidak ada nama lain yang dianggap sesuai selain Sri Soeltan. Terpilihnya Soedirman dan Soeltan Hamengkoeboeono IX lebih mencerminkan subkultur dalam masyarakat Jawa. Soedirman yang berlatar belakang Santri Muhammadiyah dan Soeltan Hamengkoeboeono IX yang berlatar belakang priyayi (raja Keraton Yogyakarta yang sangat dihormati). Clifford Geertz pernah mengklasifikasikan masyarakat Jawa dalam tiga subkultur yaitu santri, *abangan* dan priyayi. (lihat Clifford Geertz Religion of Jawa, 1981).

Pemilihan panglima tertinggi TKR tersebut mencerminkan paham demokratis yang ada di kalangan militer saat itu. Cara *voting* atau pemilihan langsung dengan mengangkat tangan atau mengacungkan tangan ketika itu dirasa sangat unik karena tidak umum digunakan pada zaman itu, ditambah dalam budaya militer lazim menggunakan sistem komando. Di saat sebagian besar orang Indonesia kala itu belum berpikiran demokratis, tentara sudah menerapkan demokrasi dalam pemilihan langsung panglima tertingginya. Menurut Nugroho Notosusanto (1991: 43) tidak mungkin dalam suatu tentara profesional ala barat dilakukan pemilihan seorang panglima besar oleh pihak tentara itu sendiri, sedangkan menurut Tjokropranolo (1992) pemilihan ini berlangsung secara demokratis dan penuh perasaan kesetiakawanan. Dalam hal berlakunya cara demokrasi ini, Oerip Soemohardjo-lah tokoh yang paling berjasa di balik munculnya paham demokratis tersebut karena dari dirinyalah ide pemilihan secara demokratis ini diadakan.

Setelah Rapat Tentara

Oerip Soemohardjo dapat menerima hasil rapat tentara itu, meski awalnya sempat kecewa. Terdapat tendensi bahwa Oerip Soemohardjo berharap mendapatkan legitimasi untuk memimpin TKR dari para tentara yang hadir. Mohamad Hatta dan Sutan Sjahrir pun berkeberatan untuk mengakui hasil rapat tentara di Yogyakarta tersebut karena Hatta dan Sjahrir telah berharap banyak pada Oerip Soemohardjo karena latar belakang pendidikan militernya dari Breda Belanda. Sjahrir pun bersikeras sebagai Perdana Menteri bahwa ia berhak mengangkat menteri-mentrinya dan akan menyerahkan jabatan Menteri Keamanan pada Amir Sjarifudin dan tidak mau menerima Soeltan Hamengkoeboewono IX. Di saat Hatta dan Sjahrir dalam kebimbangan, Soekarno mengambil keputusan untuk mengakui hasil rapat tentara Yogyakarta tersebut. Kurang lebih satu bulan Soekarno menyakinkan Hatta dan Sjahrir. Akhirnya Sjahrir dan Hatta setuju dengan pemilihan di Yogyakarta tersebut, asalkan Oerip tetap duduk menjabat sebagai Kepala Staf (Notosusanto, 1991: 43). Jika rapat tentara di Yogyakarta tersebut tidak diakui, maka kemungkinan besar tentara tidak akan setia pada Pemerintahan Indonesia di bawah Soekarno-Hatta. Pemerintahan Republik Indonesia di bawah Soekarno-Hatta pasti akan mendapatkan dua musuh sekaligus. Pertama tentara Sekutu dan NICA telah

datang untuk mengambil alih Indonesia kembali. Kedua tentara yang akan berjuang sendiri tanpa ketaatan pada Pemerintah RI di bawah Soekarno-Hatta. Soekarno yang telah lama menggandrungi persatuan dan kesatuan lebih memilih mengakui hasil rapat tentara di Yogyakarta itu.

Pada 18 Desember 1945, akhirnya Kolonel Soedirman dilantik sebagai Panglima Besar TKR dengan pangkat Jenderal, sedangkan Oerip Soemohardjo dilantik kembali sebagai Kepala Staf dengan pangkat Letnan Jenderal (*Tentara Keamanan Rakyat* no 1 tahun I tanggal 10 Januari 1946: 1). Pada akhir 1945, timbul konsep keselamatan untuk merubah konsep keamanan dengan harapan bahwa konsep keselamatan tersebut tentara akan lebih memperluas dan memperdalam tugas ketentaraannya (Nasution, 1970: 258). Pemerintah mengabdikan, lalu menerbitkan surat penetapan pada 1 Januari 1946. Sejak saat itu, nama tentara secara resmi disebut TKR (Tentara Keselamatan Rakyat) (Notosusanto, 1991:43). Begitu juga nama Kementerian Keamanan digantikan menjadi Kementerian Pertahanan (Nasution, 1970: 258-259). Tentara Keselamatan Rakyat kemudian diubah lagi menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI) pada tanggal 24 Januari 1946.

SIMPULAN

Dalam rapat tentara yang terjadi di Yogyakarta tersebut, telah terbukti bahwa sistem demokrasi, yaitu pemilihan langsung atau *voting* telah digunakan untuk memilih pimpinan tertinggi tentara Indonesia. Perlu dicatat bahwa pada masa itu sistem kemiliteran belum stabil sehingga Oerip Soemohardjo menggunakan cara sipil dalam pemilihan panglima militer pertama, yaitu dengan cara *voting*. Walaupun mungkin saja ketika itu para perwira militer yang hadir tidak bermaksud menerapkan demokrasi atau tidak terpikir akan konsep demokrasi langsung, tetapi mungkin mereka memikirkan cara tersebutlah cara yang paling adil untuk memilih panglima tertinggi mereka. Sebetulnya Oerip Soemohardjo berharap mendapatkan legitimasi untuk memimpin TKR dari para tentara yang hadir saat itu. Terpilihnya Soedirman menyiratkan bahwa Soedirman lah yang mendapatkan legitimasi dari mayoritas tentara yang hadir untuk memimpin TKR ketika itu.

Demokrasi langsung telah diterapkan dalam pemilihan Panglima Tertinggi tentara Indonesia pertama melalui *voting* pada rapat tersebut. Suatu hal yang unik tapi nyata dalam sejarah kemiliteran Indonesia disaat sistem demokrasi langsung belum banyak dipikirkan ketika itu bahkan oleh elit-elit politik Indonesia ketika itu. Melihat berkembangnya sistem demokrasi sedemikian rupa seperti yang terjadi di Indonesia sekarang, ternyata pihak militer di Indonesia telah mempraktekannya dalam pemilihan panglima pertamanya. Oleh karena itu, sangat tepat jika TNI sekarang mendukung sistem demokrasi di Indonesia karena telah dicontohkan oleh bapak-bapak *founding-father* pendiri TNI itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Algemeen Indisch Dagblad; De Preangerbode* 48e Edisi no 144 Selasa 1 Juli 1947
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Dahl, R.A. (1992). *Demokrasi dan Para Pengkritiknya* (Terjemahan). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Fattah, A. (2005). *Demiliterisasi Tentara; Pasang Surut Politik Militer 1945- 2004*. Yogyakarta: LKiS.
- Geertz, C. (1981). *The Religion of Java; Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Herlina, N. (2011). *Metode Sejarah*. Bandung: Satya Historika.
- Historia* 32 tahun III 2016. Hlm 45-79."Oerip Soemohardjo Bapak Tentara Yang dilupakan".
- Kedaoelatan Rakjat*, 1 November 1945.
- Tentara Keamanan Rakyat* no 1 Tahun I 10 Januari 1946. Yogyakarta.
- Kompas*, 30 Oktober 1977. Hlm 6.
- Kuntowijoyo. (2005). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Bentang.
- Nasution, A.H. (1970). *TNI Tentara Nasional Indonesia I*. Jakarta: Seruling Masa.
- _____.(1989). *Memenuhi Panggilan Tugas I ; Kenangan Masa Gerilya*.
- Notosusanto, N (editor). (1991). *Pejuang dan Prajurit*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Rahmatunnisa, M dan Mariana, D. (2003). *Democracy: Is it Necessary?. Sosiohumaniora* 5, (3) 2003. Hlm. 175
- Salam, S. (1963). *Jenderal Sudirman Pahlawan Kemerdekaan*. Jakarta: Jaya Murni
- Soeara Asia*, 24 Agustus 1945
- Soeara Asia*, 12 September 1945
- Soeara Merdeka*, 10 November 1945
- Soeara Rakjat*, 16 Oktober 1945
- Soebroto, R.S. (1973). *Oerip Soemohardjo Letnan Jenderal TNI; 22 Februari 1893-17 November 1948*. Jakarta: Gunung Agung.
- Sundhaussen, U. (1988). *Politik Militer Indonesia 1945-1967; Menuju Dwi Fungsi ABRI*. Jakarta: LP3ES.
- Sumarsono, T. (1993). *Djenderal Major Didi Kartasmita: Pengabdian Bagi Kemerdekaan dan Lahirnya Organisasi Tentara*. Jakarta: Pustaka Jaya
- Tjahaja*, 21 Agustus 1945
- Tjahaja*, 23 Agustus 1945
- Tjokropranolo. (1992). *Panglima Besar TNI Jenderal Soedirman; Pemimpin Pendobrak Terakhir Penjajahan di Indonesia, Kisah Seorang Pengawal*. Jakarta: PT Surya Persindo.
- Trihadi. (1981). *Sejarah Perkembangan Angkatan Udara*. Jakarta: Pusat Sejarah ABRI.

PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PROGRAM DESA MANDIRI PANGAN DI KABUPATEN BANDUNG

Encang Saepudin, Ninis Agustini Damayani, dan Agung Budiono

Fakulta Ilmu Komunikasi, Universitas Padjadjaran

E-mail: encang@unpad.ac.id

ABSTRAK. Penelitian ini mengkaji tentang *Partisipasi Masyarakat Pada Program Desa Mandiri Pangan di Kabupaten Bandung*. Dengan menggunakan metode deskriptif dan teknik pengumpulan data melalui penyebaran angket, wawancara, *Focus Group Discussion*, observasi, dan studi pustaka, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengambilan manfaat, dan evaluasi. Penelitian ini bermanfaat sebagai sebuah bentuk evaluasi program terutama terhadap implementasi kebijakan pemerintah. Selain itu, sebagai masukan bagi pemerintah Kabupaten Bandung terutama Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan (BKPPP) dalam mengimplementasikan program desa mandiri pangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengambilan manfaat, dan evaluasi dapat dikategorikan positif artinya partisipasi masyarakat dinilai cukup aktif. Hal ini didasarkan pada hasil perhitungan statistik yang menggambarkan bahwa nilai median lebih kecil dari nilai skor dan nilai skor lebih kecil dari nilai kuartil III. Berdasarkan hasil pengolahan data, penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat pada program desa mandiri pangan di kabupaten bandung adalah positif.

Kata kunci: Partisipasi, masyarakat, desa mandiri pangan, pangan

PARTICIPATION OF COMMUNITIES TOWARD THE VILLAGE FOOD INDEPENDENT PROGRAM IN BANDUNG REGENCY

ABSTRACT. This study examines the Participation of the Community towards the Village Food Independent Program in Bandung Regency. By using descriptive method and data collecting technique through questionnaires, interview, *Focus Group Discussion*, observation, and literature study, this study aims to determine the level of community participation in the planning, implementation, benefit, and evaluation phases. This research is useful as a form of program evaluation especially on the implementation of government policy. In addition, it is also an input for the government of Bandung Regency, especially Food Security Agency and Executing Agency (BKPPP) in implementing the village independent food program. The results showed that the community participation both in the planning, implementation, benefit, and evaluation phases can be categorized as positive, which mean that the community participation is considered adequately active. This is based on the results of statistical calculations which illustrate that the median value is less than the score and the score is smaller than the value of quartile III. Based on the results of data processing, this study can conclude that the *community participation towards the program of independent village food in Bandung Regency* is positive.

Keywords: Participation, society, food independent village, food

PENDAHULUAN

Menurut Sartono Kartodirjo dalam Hari Poerwanto (2000:197), mengemukakan bahwa sebagian besar masyarakat desa di Indonesia diliputi oleh sindrom kemiskinan dan sindrom enersia. Sindrom kemiskinan memiliki dimensi yang amat kompleks dan satu dengan yang lainnya saling berkaitan, misalnya dalam bentuk tingkat produktivitas yang rendah, pengangguran, kurang gizi dan derajat kesehatan yang buruk, tingkat morbiditas dan buta huruf yang tinggi. Sementara itu sindrom enersia terwujud pada sikap fatalisme, passivisme, rasa saling ketergantungan yang tinggi, kehidupan serba mistik dan sebagainya. Jika dikaji lebih lanjut, kedua jenis sindrom tadi diakibatkan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain ketimpangan pemilikan dan distribusi tanah, pelapisan sosial yang rancu, kurangnya pemanfaatan sumber daya dan sebagainya.

Salah satu upaya untuk mengatasi masalah kerawanan pangan dan kemiskinan di pedesaan adalah melalui Program Desa Mandiri Pangan. Desa Mandiri Pangan adalah desa yang masyarakatnya mempunyai

kemampuan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi sehingga dapat menjalani hidup sehat dan produktif dari hari kehari, melalui pengembangan sistem ketahanan pangan yang meliputi subsistem ketersediaan, subsistem distribusi, dan subsistem konsumsi dengan memanfaatkan sumberdaya setempat secara berkelanjutan. (Pangan, B. K. 2006), (Indonesia, B. K. P. R. 2011). Dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 25/Permentan/Ot.140/2/2010 disebutkan bahwa pemerintah melalui Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, sejak tahun 2006 telah meluncurkan Program Aksi Desa Mandiri Pangan (Proksi Desa Mapan). Dari program ini diharapkan masyarakat desa mempunyai kemampuan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi sehingga dapat menjalani hidup sehat dan produktif dari hari ke hari, secara berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan melalui proses pemberdayaan masyarakat untuk mengenali potensi dan kemampuannya, mencari alternatif peluang dan pemecahan masalah serta mampu mengambil keputusan untuk memanfaatkan sumberdaya alam secara efisien dan berkelanjutan menuju Gerakan Kemandirian Pangan (Gema Pangan).

Upaya tersebut dilakukan melalui proses pemberdayaan masyarakat untuk mengenali potensi dan kemampuannya, mencari alternatif peluang dan pemecahan masalah serta mampu mengambil keputusan untuk memanfaatkan sumberdaya alam secara efisien dan berkelanjutan sehingga tercapai kemandirian. Permasalahan dan tantangan dalam pembangunan ketahanan pangan secara umum menyangkut pertambahan penduduk, semakin terbatasnya sumber daya alam, beralih fungsinya lahan pertanian, masih terbatasnya prasarana dan sarana usaha di bidang pangan, semakin ketatnya persaingan pasar dengan produk impor, dan besarnya proporsi penduduk miskin. Penduduk miskin yang rawan pangan serta rentan terhadap masalah kerawanan pangan masih cukup tinggi. Penyebab utama kerawanan pangan dan kemiskinan adalah rendahnya pendapatan masyarakat miskin yang mengakibatkan daya beli masyarakat berkurang. (Mulyono, A. 2008)). Keterbatasan kemampuan masyarakat dalam mengakses pangan; serta keterbatasan aset dan akses terhadap sumber daya untuk mengembangkan usaha mikro.

Kerawanan pangan terjadi manakala rumah tangga, masyarakat atau daerah tertentu mengalami ketidak cukupan pangan untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan para individu anggotanya. Kerawanan pangan dibedakan atas kerawanan kronis, yaitu yang terjadi terus menerus karena ketidakmampuan membeli atau memproduksi pangan sendiri, dan kerawanan sementara yang terjadi karena kondisi tak terduga seperti bencana alam atau bencana lainnya. Kerawanan pangan, apabila terjadi terus menerus, akan berdampak pada penurunan status gizi dan kesehatan (Badan Ketahanan Pangan 2009).

Kemiskinan adalah situasi serba kekurangan yang terjadi bukan karena dikehendaki si miskin, melainkan karena tidak dapat dihindari oleh kekuatan yang ada padanya. Inti daripada deventasi ini adalah situasi serba kekurangan yang tidak dapat dihindari oleh si miskin. (Safi'i 2011:24). Penduduk miskin ini memiliki resiko tinggi dan rentan mengalami kerawanan pangan. Apabila program-program pemantapan ketahanan pangan kurang memperhatikan kelompok ini maka akan berdampak meningkatkan kemiskinan/kerawanan pangan dan status gizi yang rendah. Kerawanan pangan terjadi manakala rumah tangga, masyarakat atau daerah tertentu mengalami ketidakcukupan pangan untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan para individu anggotanya. Kerawanan pangan dibedakan atas kerawanan kronis, yaitu yang terjadi terus menerus karena ketidakmampuan membeli atau memproduksi pangan sendiri. Selain itu, kerawanan sementara yang terjadi karena kondisi tak terduga seperti bencana alam atau bencana lainnya. Kerawanan pangan, apabila terjadi terus menerus, akan berdampak pada penurunan status gizi dan kesehatan.

Perwujudan ketahanan pangan nasional dimulai dari pemenuhan pangan di wilayah terkecil yaitu pedesaan

sebagai basis kegiatan pertanian. Basis pembangunan pedesaan bertujuan untuk mewujudkan ketahanan pangan dalam suatu wilayah yang mempunyai keterpaduan sarana dan prasarana dari aspek ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan untuk mencukupi dan mewujudkan ketahanan pangan rumah tangga. (Suryana, A, 2008). Disamping itu membangun daerah pedesaan sangat penting terutama dalam hal penyediaan bahan pangan untuk penduduk, penyedia tenaga kerja untuk pembangunan, penyedia bahan baku untuk industri, dan penghasil komoditi untuk bahan pangan dan ekspor. Karena itu, desa merupakan salah satu *entry point* untuk masuknya berbagai program yang mendukung terwujudnya ketahanan pangan di tingkat rumah tangga, yang secara kumulatif akan mendukung terwujudnya ketahanan pangan di tingkat kabupaten/kota, propinsi, dan nasional.

Program Desa Mandiri Pangan adalah program pembangunan yang bersifat partisipatif yang amanatkan adanya pelibatan masyarakat secara aktif pada setiap tahapan kegiatan, yang mengarah pada bertemunya pendekatan pembangunan *top down* dan *bottom up*. (Damayani, N. A., Rachmawati, T. S., Budiono, A., & Saepudin, E, 2015) Secara riil operasional program baik dalam penentuan lokasi dan operasional awal pelaksanaan program terdapat kesenjangan karena masih menggunakan pendekatan pembangunan yang bersifat *top down* dalam artian, proses perencanaan, penentuan lokasi, penentuan tahapan kegiatan dan pelaksanaan program awal belum sepenuhnya melibatkan partisipasi masyarakat. Peran dan partisipasi masyarakat berupa tinjauan dan komentar terhadap program merupakan peran yang paling sederhana dari masyarakat belum muncul, sehingga dikhawatirkan dukungan dan rasa memiliki masyarakat terhadap program tidak akan muncul yang berimbas pada capaian program yang kurang maksimal.

Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam setiap tahapan kegiatan Iskandar, J., & Ginanjar, A. (2002). Sebagaimana mekanisme kerja yang telah diuraikan, terlihat jelas bahwa partisipasi masyarakat memang masih kurang dalam semua tahapan kegiatan program desa mandiri pangan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan serta evaluasi. Oleh karena itu, kita tidak dapat pungkiri bahwa program desa mandiri pangan hanya bisa berhasil jika mendapat respon dan perhatian dari masyarakat. Dari apa yang terjadi di Kecamatan Cikancung kita bisa melihat bahwa salah satu faktor pendukung dari pelaksanaan desa mandiri pangan adalah tingginya respon masyarakat terhadap desa mandiri pangan itu sendiri. Masyarakat menyadari betul bahwa berpartisipasi dalam program desa mandiri pangan ini berarti turut serta dalam berpartisipasi dalam pembangunan desa. Sehingga proses pelaksanaan desa mandiri pangan menjadi lebih lancar.

Pengertian dan Prinsip Partisipasi Masyarakat Menurut Ach. Wazir Ws (Ach. Wazir Ws *et al*, 1999,

29) partisipasi bisa diartikan sebagai keterlibatan seseorang secara sadar ke dalam interaksi sosial dalam situasi tertentu. Dengan pengertian itu, seseorang bisa berpartisipasi bila ia menemukan dirinya dengan atau dalam kelompok, melalui berbagai proses berbagi dengan orang lain dalam hal nilai, tradisi, perasaan, kesetiaan, kepatuhan dan tanggungjawab bersama. Akhmaddhian, S. (2017). Bentuk partisipasi yang diberikan masyarakat tersebut tidak hanya bisa dilihat dari barang ataupun material saja, melainkan bentuk partisipasi yang diberikan dapat dilihat melalui sumbangan tenaga selama proses pelaksanaan kegiatan, sumbangan waktu dan pikiran, begitupun juga sumbangan dalam bentuk lahan dan material bagi kepentingan desa mandiri pangan itu sendiri yang pada akhirnya akan kembali juga manfaatnya kepada masyarakat itu sendiri. Dalam program desa mandiri pangan keterlibatan masyarakat menjadi syarat mutlak kelancaran dan keberhasilan program tersebut. Hal tersebut disebabkan oleh program ini memang menginginkan adanya pelembagaan pengelolaan pembangunan partisipatif dengan mendayagunakan potensi dan sumberdaya lokal.

Keterlibatan masyarakat dalam program desa mandiri pangan dimulai dari proses perencanaan program yaitu mulai kehadiran dalam setiap pertemuan yang diadakan oleh pengurus desa mandiri pangan. Begitupun ketika dilakukan penggalian gagasan, masyarakat dituntut untuk lebih pro aktif dalam menyampaikan ide, gagasan maupun saran bagi kepentingan pembangunan desa. Setelah proses perencanaan dilakukan masyarakat kembali dituntut partisipasinya dalam bentuk tenaga, waktu, serta material dalam proses pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan tersebut. Begitupun setelah pelaksanaan kegiatan dilakukan masyarakat dituntut untuk lebih proaktif dalam memanfaatkan serta menjaga dan memelihara hasil dari program tersebut sehingga apa yang menjadi tujuan dari desa mandiri pangan tersebut dapat tercapai.

Berdasarkan uraian diatas maka masalah yang diangkat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian, yaitu Bagaimana partisipasi masyarakat pada tahap pengambilan keputusan/ perencanaan, pelaksanaan program, pengambilan manfaat, dan evaluasi dalam program desa mandiri pangan di Desa Mekaraksana Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung? Berdasarkan kepada rumusan masalah tersebut tujuan penelitian ini adalah Untuk Mengetahui Partisipasi masyarakat pada tahap pengambilan keputusan/ perencanaan, pelaksanaan program, pengambilan manfaat, dan evaluasi dalam program desa mandiri pangan di Desa Mekaraksana Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *mixed methods*. Penelitian ini merupakan suatu

langkah penelitian dengan menggabungkan dua bentuk penelitian yang telah ada sebelumnya yaitu penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Menurut Creswell (2010: 5), penelitian campuran merupakan pendekatan penelitian yang mengkombinasikan antara penelitian kualitatif dengan penelitian kuantitatif. Dalam penelitian ini menggunakan strategi metode campuran sekuensial/ bertahap (*sequential mixed methods*) terutama strategi eksploratoris sekuensial. *Sequential explanatory designs*, pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif dilaksanakan dalam dua tahap, dengan penekanan utama pada metode kuantitatif.

Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi objek/subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian di tarik kesimpulan. Populasi dalam penelitian merupakan sumber data yang terdiri dari sekelompok subjek, gejala atau objek. Hal ini sesuai dengan pendapat Prijana (2005, 4) yang mengemukakan bahwa, "*Populasi adalah keseluruhan unit-unit observasi yang karakteristiknya akan diduga*". Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Masyarakat yang tergabung dalam kelompok afinitas di Desa Mekaraksana Kecamatan Cikancung. Ukuran populasi penelitian ini adalah seluruh anggota afinitas dengan jumlah 180 orang. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 25/Permentan/Ot.140/2/2010 *Kelompok afinitas* dalam penelitian adalah kelompok yang tumbuh atas dasar ikatan kebersamaan dan kecocokan antar anggota yang mempunyai kesamaan visi dan misi dengan memperhatikan sosial budaya setempat.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah Masyarakat yang tergabung dalam kelompok afinitas di Desa Mekaraksana Kecamatan Cikancung. Untuk dapat menentukan jumlah sampel dan agar sampel yang diambil dapat mewakili keseluruhan populasi (*representatif*) maka digunakanlah teknik pengambilan sampel (*sampling*) *simple random sampling* (Sampel acak sederhana), hal ini disebabkan jenis populasi yang relatif homogen atau sama (Sugiyono 2011, 82).

Untuk memperoleh ukuran sample yang representatif, maka penulis menggunakan rumus Taro Yamane, yaitu sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{N d^2 + 1}$$

Keterangan:

n : jumlah sample

N : jumlah populasi

d : tingkat perkiraan kesalahan 10%

(Jalaludin Rahmat 2005,82)

Berdasarkan rumus tersebut maka ukuran sampelnya dapat dihitung sebagai berikut;

$$n = \frac{180}{180 (0.1)^2 + 1} = 64,28 \text{ dibulatkan menjadi } 65 \text{ orang}$$

Sampel yang diambil adalah 65 orang.

Pengukuran Tingkat Partisipasi Masyarakat

Kuesioner yang diberikan kepada responden, berupa pernyataan tertutup mengenai partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program desa mandiri pangan di Desa Mekaraksana Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung. Setiap pernyataan yang diajukan, responden hanya perlu menjawab satu pilihan jawaban yang tersedia. Butir-butir pernyataan yang diajukan mengacu pada tolak ukur yang telah ditetapkan sebelumnya. Jawaban-jawaban yang tercantum dalam kuesioner mengacu pada skala likert. Pertanyaan yang ada dalam kuesioner masing-masing jawaban diberi skor sebagai berikut.

Tabel 1. Alternatif Jawaban Responden dan Skor Penilaian

Pilihan jawaban	Skor masing-masing pernyataan	
	Pernyataan positif	Pernyataan negatif
Sangat tidak setuju	1	5
Tidak setuju	2	4
Tidak ada pendapat	3	3
Setuju	4	2
Sangat setuju	5	1

Setelah dilakukan uji validitas dan reliabilitas, selanjutnya adalah menganalisis data yang telah didapatkan dengan menggunakan model analisis deskriptif. Model analisis ini menjelaskan pernyataan responden dengan mendeskripsikannya melalui penggunaan tabel dan pengukurannya menggunakan skala likert. Berdasarkan hal tersebut, maka jumlah skor dari seluruh responden adalah:

Tabel 2. Jumlah Skor Seluruh Responden

Maksimal	65 responden x 5 = 325
Minimal	65 responden x 1 = 65
Median	65 responden x 3 = 195
Kuartil I	65 responden x 2 = 130
Kuartil III	65 responden x 4 = 260

Jumlah skor tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan beberapa pendekatan (Sugiyono, 2008), untuk menentukan seberapa besar tingkat partisipasi masyarakat, sebagai berikut :

- Jika Kuartil III < Skor < Maksimal; artinya sangat positif (partisipasi masyarakat dinilai aktif).
- Jika Median < Skor < Kuartil III; artinya positif (partisipasi masyarakat dinilai cukup aktif).
- Jika Kuartil I < Skor < Median; artinya negatif (partisipasi masyarakat dinilai kurang aktif).
- Jika Minimal < Skor < Kuartil I; artinya sangat negatif (partisipasi masyarakat dinilai tidak aktif).

Apabila dipersentasekan, maka besar tingkat partisipasi masyarakat dapat dihitung berdasarkan rumusan sebagai berikut:

$$\text{Tingkat partisipasi} = \frac{\text{Skor yang diperoleh}}{\text{Skor maksimal}} \times 100$$

Pada bagian ini akan diukur mengenai tingkat partisipasi masyarakat berdasarkan tolak ukur yang ada pada masing-masing variabel. Untuk mempermudah pengolahan data, data yang diperoleh kemudian diolah dengan menggunakan Microsoft Excel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Melalui program desa mandiri pangan diharapkan masyarakat mempunyai kemampuan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi. Upaya tersebut dilakukan melalui proses pemberdayaan masyarakat. Upaya ini untuk mengenali potensi dan kemampuannya, mencari alternatif peluang dan pemecahan masalah, serta mampu mengambil keputusan untuk memanfaatkan sumberdaya alam secara efisien dan berkelanjutan. Dengan demikian akan tercapai kemandirian pangan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan menempatkan tenaga pendamping di setiap desa pelaksana selama empat tahun berturut-turut. Hal ini dilaksanakan sesuai tahapan program yaitu pada tahap persiapan, penumbuhan, pengembangan, dan kemandirian.

Dalam pelaksanaan program desa mandiri pangan, kondisi awal partisipasi masyarakat sangat perlu diketahui. Hal ini karena keberhasilan program ini sangat ditentukan oleh peran dan partisipasi masyarakat sasaran. Kondisi partisipasi masyarakat Kecamatan Cikancung dapat digambarkan dengan potensi dan kendala yang berasal dari masyarakat setempat. Potensi partisipasi masyarakat adalah;

- Kebiasaan gotong-royong dan kesadaran kebersamaan sudah tumbuh, seperti kegiatan terjadwal dalam melaksanakan kegiatan di pedesaan.
- Kelembagaan di tingkat lokal dalam menyikapi kondisi dan dinamika pembangunan yang berkembang cukup baik, hal ini dikoordinasikan oleh tokoh-tokoh setempat.
- Kesadaran terhadap pengembangan potensi desa telah dimiliki oleh masyarakat. Hal ini berpotensi untuk pengembangan ekonomi pedesaan berbasis masyarakat.
- Motivasi masyarakat untuk maju dan bersaing sudah ada.

Sedangkan faktor yang menjadi kendala dalam meningkatkan partisipasi masyarakat Kecamatan Cikancung dalam kegiatan pengembangan desa mandiri pangan adalah;

1. Perbedaan kepentingan yang ada di masyarakat. Hal ini, berpotensi menjadi konflik.
2. Lembaga-lembaga desa belum maksimal untuk dapat mengakomodir dan melihat kebutuhan masyarakat.
3. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai pengembangan desa mandiri pangan.
4. Keterbatasan kreatifitas dan inovasi untuk mengembangkan ekonomi di tingkat lokal yang mendukung program pembangunan.

Partispasi masyarakat dalam program desa mandiri pangan adalah keterlibatan masyarakat secara langsung dalam setiap tahapan kegiatan mulai dari perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan, dan pemeliharaan pada program fisik maupun non fisik. Pola partisipasi masyarakat memang cukup dominan dalam semua tahapan kegiatan program desa mandiri pangan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, serta pemeliharaan hasil kegiatan. Oleh karena itu, tidak dapat di pungkiri bahwa program desa mandiri pangan hanya bisa berhasil jika mendapat respon dan perhatian dari masyarakat. Partisipasi masyarakat didalam tahapan desa mandiri pangan dapat dilihat dari tiga sisi yaitu Partisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan hasil kegiatan.

1. Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan/Perencanaan

Variabel ini memiliki enam indikator yaitu a. Informasi mengenai program desa mandiri pangan didapatkan melalui kelurahan atau RT/RW setempat, b. Pemberitahuan mengenai adanya program desa mandiri pangan bagi masyarakat dilakukan secara jelas, c. Masyarakat mencari tahu lebih jauh mengenai program desa mandiri pangan, d. Pernah diajak musyawarah untuk membahas perencanaan program desa mandiri pangan, e Pernah memberikan masukan gagasan/ ide dalam program desa mandiri pangan, dan f. Keterlibatan masyarakat dalam program desa mandiri pangan harus dari awal kegiatan sampai akhir kegiatan, Berikut adalah perhitungan dari tiap indicator/ tolak ukur tersebut:

Tabel 3. Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan/Perencanaan

No	Tolak ukur	Skor	Kuartil III	Maksimal
1	Informasi mengenai program desa mandiri pangan	287	260	325
2	Kejelasan Informasi	255	260	325
3	Masyarakat mencari tahu lebih jauh	211	260	325
4	Pernah diajak musyawarah	290	260	325
5	Pernah memberikan masukan gagasan/ ide	265	260	325
6	Keterlibatan masyarakat	262	260	325
Total		1570		
Rata-rata		261.66		

Data di atas menggambarkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan/ Perencanaan program desa mandiri pangan cukup tinggi. Hal ini terlihat dari rata-rata skor yang diperoleh adalah 261, 66. Skor tersebut jauh lebih tinggi dari skor median yakni 195 bahkan ada diatas nilai kuartil III yakni 260. Berdasarkan kepada angka skor yang ada diatas kwartil III maka tingkat partisipasi mayarakat dapat dikategorikan sangat positif. Hal ini berarti bahwa tingkat partisipasinya dinilai aktif. Apabila skor kumulatif dari sub variabel ini dipresentasekan maka dapat dihitung sebagai berikut;

$$\text{Tingkat partisipasi } V1 = \frac{261.66}{325} \times 100 = 80.51$$

Presentase partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan ini mencapai 80,51%. Hal ini berarti hampir setiap tahapan perencanaan masyarakat ikut terlibat atau dilibatkan. Tingkat partisipasi ini terjadi disebabkan oleh keterbukaan para pengelola program desa mandiri pangan yang dimotori oleh pihak pemerintahan desa Mekaraksana. Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan kegiatan desa mandiri pangan dapat dilihat dari kehadiran masyarakat pada proses perencanaan program yang dilakukan oleh pelaku Tim Pengelola Kegiatan (TPK) di tingkat dusun/lingkungan. Kegiatan atau tahapan desa mandiri pangan utamanya dalam musyawarah di tingkat desa harus memperhatikan jadwal atau kegiatan sehari-hari masyarakat sebagai sasaran program. Hal ini sangat penting, mengingat bahwa dalam proses penentuan prioritas kegiatan disitulah letak awal perencanaan pembangunan yang akan dilakukan. Pada tahap ini keterlibatan masyarakat sangat diperlukan untuk mengetahui apa yang menjadi kebutuhan mereka.

Selanjutnya dalam proses penentuan prioritas kegiatan ini, masyarakat tidak hanya dituntut kehadirannya, tetapi masyarakat dituntut untuk lebih aktif menyampaikan ide, usulan, serta kebutuhan mereka serta penentuan jenis kegiatan yang dibutuhkan. Dari hasil wawancara dengan Fasilitator bidang pemberdayaan UPK Kecamatan Cikancung mengenai partisipasi masyarakat dalam perencanaan program desa mandiri pangan menyatakan bahwa: Perlu kita pahami bersama bahwa keaktifan masyarakat dalam menyampaikan ide atau gagasan mencerminkan masyarakat sudah mengerti dan memahami masalah atau kendala yang dihadapi. Pada dasarnya yang tahu dan yang merasakan permasalahan adalah masyarakat itu sendiri. oleh karenanya yang membuat solusi dari permasalahan tersebut harus dari kalangan masyarakat itu sendiri.

2. Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program

Variabel ini memiliki enam indikator yaitu a. Sebagiaan dana yang digunakan sebagian modal

usaha adalah milik pribadi. b. Tempat yang digunakan untuk berusaha adalah milik pribadi. c. Alat usaha yang digunakan dalam menjalankan usaha adalah milik pribadi. d. Setiap kegiatan dalam program desa mandiri pangan selalu didokumentasikan e. Selalu ikut serta dalam pengadministrasian kegiatan f. Fasilitator mudah ditemui oleh anggota program desa mandiri pangan g. Fasilitator sangat berperan dalam pendampingan kelompok. Berikut adalah perhitungan dari tiap indikator/ tolak ukur tersebut:

Tabel 4. Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program

No	Tolak ukur	Skor	Median	Kuartil III
1	Sebagian modal usaha milik pribadi.	259	195	260
2	Tempat yang digunakan untuk berusaha milik pribadi.	248	195	260
3	Alat usaha yang digunakan adalah milik pribadi.	247	195	260
4	Setiap kegiatan dalam program desa mandiri pangan selalu didokumentasikan	149	195	260
5	Selalu ikut serta dalam pengadministrasian kegiatan	140	195	260
6	Fasilitator mudah ditemui oleh anggota program desa mandiri pangan	148	195	260
7	Fasilitator sangat berperan dalam pendampingan kelompok	259	195	260
Total		1450		
Rata-rata		207,14	195	260

Data di atas menggambarkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program desa mandiri pangan cukup tinggi. Hal ini terlihat dari rata-rata skor yang diperoleh adalah 207,14. Berdasarkan kepada angka skor yang ada diatas median namun ada di bawah skor kuartil III maka tingkat partisipasi masyarakat dapat dikategorikan cukup positif. Hal ini berarti bahwa tingkat partisipasinya cukup aktif. Apabila skor kumulatif dari sub variabel ini dipresentasikan maka dapat dihitung sebagai berikut;

$$\text{Tingkat partisipasi } V2 = \frac{207,14}{325} \times 100 = 63,73$$

Presentase partisipasi masyarakat pada tahap pelaksanaan kegiatan ini mencapai 63.73%. Hal ini berarti hampir setiap tahapan pelaksanaan kegiatan masyarakat ikut terlibat atau dilibatkan. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan dapat dilihat dari keterlibatan masyarakat dalam proses pelaksanaan kegiatan. Utamanya dalam hal pelaksanaan kegiatan non fisik yakni dibidang ekonomi. Melalui keterlibatan

masyarakat baik dari segi kesediaan masyarakat dalam meluangkan waktu dan tenaga serta kesediaan masyarakat dalam menyediakan bahan/materi yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan. Dari hasil wawancara dengan Kepala UPK Kecamatan Cikancung mengenai partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program desa mandiri pangan menyatakan bahwa "Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan program desa mandiri pangan di Kecamatan Cikancung dilihat dari tingkat kehadiran masyarakat tidak sepenuhnya mencapai 100%. Hal ini dipengaruhi oleh tahapan atau jadwal pelaksanaan kegiatan seringkali berbenturan dengan pekerjaan sehari-hari. Hal ini mengakibatkan masyarakat lebih memprioritaskan pekerjaan sehari-hari mereka sebagai sumber pendapatan utama. Namun dari segi minat secara menyeluruh masyarakat memberikan partisipasi dalam segala kerja kelompok."

Berdasarkan data di atas dari tujuh indikator yang menjadi tolak ukur variabel ini dapat dipilah menjadi dua kelompok. Kelompok pertama menunjukkan skor diatas median dan kelompok kedua skor berada di bawah median. Kelompok pertama yakni a. Sebagian dana yang digunakan sebagian modal usaha adalah milik pribadi memiliki skor 259, b. Tempat yang digunakan untuk berusaha adalah milik pribadi memiliki skor 248, c. Alat usaha yang digunakan dalam menjalankan usaha adalah milik pribadi memiliki skor 247, dan d. Fasilitator sangat berperan dalam pendampingan kelompok memiliki skor 259. Kelompok ini menggambarkan mengenai modal, tempat, dan alat usaha sebagian besar adalah milik dari anggota afinitas. Hal ini menggambarkan bahwa setiap anggota afinitas berusaha untuk terlibat dalam program desa mandiri pangan dengan melibatkan modal, tempat, dan alat usahanya sebagai bagian dari program tersebut. Oleh karena itu, data ini menunjukkan betapa besarnya antusiasme masyarakat untuk ikut terlibat/ berpartisipasi dalam program ini.

Kelompok kedua yakni a. Setiap kegiatan dalam program desa mandiri pangan selalu didokumentasikan memiliki skor 149, b. Selalu ikut serta dalam pengadministrasian kegiatan memiliki skor 140, dan c. Fasilitator mudah ditemui oleh anggota program desa mandiri pangan memiliki skor 148. Apabila kelompokan komponen-komponen yang termasuk pada kelompok ini adalah komponen administrasi dan komunikasi. Komponen administrasi berkaitan dengan proses pendokumentasian kegiatan dan pelaporan. Berdasarkan hasil wawancara dengan para anggota afinitas mereka menyatakan bahwa proses pengadministrasian itu sangat sulit. Apalagi proses pelaporan hasil kegiatan harus slalu lengkap.

Yang kedua adalah proses komunikasi antara anggota kelompok afinitas dengan pendamping atau fasilitator. Berdasarkan hasil wawancara dengan para anggota afinitas fasilitator sulit ditemui. Proses pendampingan tidak begitu lancar. Hal ini terjadi karena

tersebarannya anggota kelompok afinitas di daerah-daerah yang sulit untuk dijangkau sehingga koordinasi sulit dilaksanakan secara efektif. Selain itu, kesibukan anggota afinitas dan pendamping juga berpengaruh terhadap kelancaran komunikasi diantara mereka. Anggota afinitas pada umumnya adalah petani dan peternak. Keseharian mereka lebih banyak di kebun dan sawah. Mereka baru berada di rumah atau menjalankan aktifitas lainnya diatas pukul 4 sore. padahal para pendampig datang siang hari sekitar pukul 12-an.

3. Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Manfaat

Variabel partisipasi masyarakat dalam pengambilan manfaat memiliki 4 indikator. Keempat indikator tersebut adalah a. Kemudahan dalam permohonan pengajuan program desa mandiri pangan, b. Kemudahan prosedur dalam mendapatkan modal usaha dari program desa mandiri pangan, c. Adanya program desa mandiri pangan membantu pemecahan masalah usaha yang dihadapi anggota, dan d. Keterampilan anggota kelompok menjadi meningkat dengan pendampingan yang diberikan. Berikut adalah perhitungan dari tiap indicator/ tolak ukur tersebut:

Tabel 5. Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Manfaat

No	Tolak ukur	Skor	Median	Kuartil III
1	Kemudahan dalam permohonan pengajuan program	118	195	260
2	Kemudahan prosedur dalam mendapatkan modal usaha	145	195	260
3	Adanya program desa mandiri pangan membantu pemecahan masalah usaha yang dihadapi anggota	279	195	260
4	Keterampilan anggota kelompok menjadi meningkat	251	195	260
Total		793		
Rata-rata		198,25	195	260

Data di atas menggambarkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengambilan manfaat program desa mandiri pangan cukup tinggi. Hal ini terlihat dari rata-rata skor yang diperoleh adalah 198,25. Berdasarkan kepada angka skor yang ada diatas median namun ada di bawah skor kuartil III maka tingkat partisipasi masyarakat dapat dikategorikan cukup positif. Hal ini berarti bahwa tingkat partisipasinya cukup aktif. Apabila skor kumulatif dari sub variabel ini dipresentasikan maka dapat dihitung sebagai berikut;

$$\begin{aligned} \text{Tingkat partisipasi} &= \frac{198,25}{325} \times 100 \\ &= 61 \end{aligned}$$

Presentase partisipasi masyarakat pada pengambilan manfaat ini mencapai 61%. Hal ini berarti hampir setiap tahapan pelaksanaan kegiatan masyarakat

ikut terlibat atau dilibatkan. Berdasarkan data di atas dari tempat indikator yang menjadi tolak ukur variabel ini dapat dipilah menjadi dua kelompok. Kelompok pertama menunjukkan skor diatas median dan kelompok kedua skor berada di bawah median. Kelompok pertama adalah a. Adanya program desa mandiri pangan membantu pemecahan masalah usaha yang dihadapi anggota memiliki skor 279, b. Keterampilan anggota kelompok menjadi meningkat dengan pendampingan yang diberikan memiliki skor 251. Kelompok pertama menunjukkan partisipasi masyarakat cukup tinggi. Hal ini terkait dengan permasalahan pokok yang dihadapi oleh para anggota afinitas. Permasalahan utama kelompok afinitas adalah kemampuan sumberdaya manusia dan modal usaha. Dengan adanya program desa mandiri pangan ini kedua masalah tersebut teratasi.

Menurut para responden, dengan adanya program desa mandiri pangan permasalahan sumberdaya manusia dan permodalan sedikit teratasi. Melalui program ini masyarakat bisa meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya sesuai dengan bidang usaha masing-masing, karena dalam program ini ada pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh para fasilitator atau pendamping. Begitu pun dengan permodalan, melalui program ini permodalan para anggota sangat dibantu. Namun, berkaitan dengan permodalan ini yang menjadi kesulitannya adalah prosedur pengajuan bantuan keuangan dan administrasi pertanggung jawaban. Hal ini terlihat dari hasil perhitungan angket yang menggambarkan kedua masalah tersebut sulit buat para anggota afinitas. Data tersebut dapat dilihat pada kelompok kedua.

Kelompok kedua adalah a. Kemudahan dalam permohonan pengajuan program desa mandiri pangan memiliki skor 118, b. Kemudahan prosedur dalam mendapatkan modal usaha dari program desa mandiri pangan memiliki skor 145.

4. Partisipasi Masyarakat dalam Evaluasi

Variabel partisipasi masyarakat dalam kegiatan evaluasi memiliki enam indikator. Keenam indikator tersebut adalah a. Program desa mandiri pangan sangat baik dan tepat sasaran, b. Program desa mandiri sangat bermanfaat, c. Program desa mandiri pangan dilakukan oleh Pemerintah dan masyarakat, d. Masyarakat terlibat dalam program desa mandiri pangan karena ada keharusan, e. Dalam melakukan perencanaan terhadap program desa mandiri pangan sebaiknya ada pertemuan yang dilakukan setiap akan membuat perencanaan dalam kegiatan, f. Setiap kebijakan dalam program desa mandiri pangan sebaiknya dikonsultasikan kepada masyarakat.

Data di atas menggambarkan bahwa partisipasi masyarakat pada tahap evaluasi program desa mandiri pangan cukup tinggi. Hal ini terlihat dari rata-rata skor yang diperoleh adalah 266,5. Berdasarkan kepada angka skor yang ada diatas kuartil III maka tingkat partisipasi masyarakat dapat dikategorikan sangat positif. Hal ini

berarti bahwa tingkat partisipasinya dinilai aktif. Apabila skor kumulatif dari sub variabel ini dipresentasikan maka dapat dihitung sebagai berikut;

$$\begin{aligned} & 266,5 \\ \text{Tingkat partisipasi } V4 &= \frac{\text{-----}}{325} \times 100 \\ &= 82 \end{aligned}$$

Tabel 6. Partisipasi Masyarakat dalam Evaluasi

No	Tolak ukur	Skor	Median	Kuartil III
1	Program desa mandiri pangan sangat baik dan tepat sasaran.	248	195	260
2	Program desa mandiri pangan sangat bermanfaat	251	195	260
3	Program desa mandiri pangan dilakukan oleh Pemerintah dan masyarakat	254	195	260
4	Masyarakat terlibat dalam program desa mandiri pangan karena ada keharusan	279	195	260
5	Dalam melakukan perencanaan terhadap program desa mandiri pangan sebaiknya ada pertemuan yang dilakukan setiap akan membuat perencanaan dalam kegiatan	287	195	260
6	Setiap kebijakan dalam program desa mandiri pangan sebaiknya dikonsultasikan kepada masyarakat	280	195	260
Total		1599		
Rata-rata		266,5	195	260

Presentase partisipasi masyarakat pada tahap evaluasi ini mencapai 82%. Hal ini berarti hampir setiap tahapan kegiatan evaluasi masyarakat ikut terlibat atau dilibatkan. Tingkat partisipasi ini muncul disebabkan oleh pelaksanaan program yang tepat sasaran, program ini sangat bermanfaat, dan program ini dijalankan secara bersama-sama oleh masyarakat dan pemerintah.

Apabila dirinci berdasarkan tolak ukur yang digunakan dapat digambarkan sebagai berikut, a. Program desa mandiri pangan di Desa Mekaraksana Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung sangat baik dan tepat sasaran memiliki skor 248. berdasarkan hasil wawancara dengan para responden bahwa masyarakat yang bias menjadi anggota afinitas harus diseleksi dan disesuaikan dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi tidak bias sembarang orang bias menjadi anggota afinitas. Hal ini sejalan dengan buku pedoman desa mandiri pangan. Di dalam buku tersebut dinyatakan bahwa “Kelompok usaha adalah masyarakat yang mengembangkan usaha secara bersama-sama dan memiliki komoditas sejenis, yang mengarah pada pembentukan *cluster*. Kelompok usaha ditumbuhkan oleh FKK, LK, dan masyarakat. Kelompok ditetapkan

melalui Keputusan Kepala Badan/Dinas/Kantor/unit kerja Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota.”

Berikut data mengenai indikator masing-masing b. Program desa mandiri pangan di Desa Mekaraksana Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung sangat bermanfaat memiliki skor 251, c. Program desa mandiri pangan di Desa Mekaraksana Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung ini dilakukan oleh Pemerintah dan masyarakat memiliki skor 254. d. Masyarakat terlibat dalam program desa mandiri pangan di Desa Mekaraksana Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung karena ada keharusan memiliki skor 279, e. Dalam melakukan perencanaan terhadap program desa mandiri pangan sebaiknya ada pertemuan yang dilakukan setiap akan membuat perencanaan dalam kegiatan memiliki skor 287. dan f. Setiap kebijakan dalam program desa mandiri pangan sebaiknya dikonsultasikan kepada masyarakat memiliki skor 280.

Berdasarkan skor kumulatif dari masing-masing sub variabel maka tingkat partisipasi masyarakat dalam program desa mandiri pangan dapat dikelompokkan menjadi dua bagian. Bagian pertama yakni partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan/ perencanaan dan partisipasi masyarakat dalam evaluasi program sangat positif. Hal ini karena **Kuartil III < Skor < Maksimal**; artinya sangat positif (partisipasi masyarakat dinilai aktif). a) Pelaksanaan program apabila digambarkan secara rinci sebagai berikut 260 (kuartil III) < 261.66 (skor) < 325 (nilai maksimal). b) Pelaksanaan program apabila digambarkan secara rinci sebagai berikut 260 (kuartil III) < 266.5 (skor) < 325 (nilai maksimal). Bagian kedua yakni partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan manfaat positif. Hal ini karena **Median < Skor < Kuartil III**; artinya positif (partisipasi masyarakat dinilai cukup aktif). a) Pelaksanaan program apabila digambarkan secara rinci sebagai berikut 195 (median) < 207.14 (skor) < 260 (kuartil III). b) Pelaksanaan program apabila digambarkan secara rinci sebagai berikut 195 (median) < 198.25 (skor) < 260 (kuartil III).

Apabila skor kumulatif dari variabel ini dihitung maka partisipasi masyarakat dalam program desa mandiri pangan adalah positif. Hal ini terlihat dari **Median < Skor < Kuartil III** artinya positif (partisipasi masyarakat dinilai cukup aktif). Apabila digambarkan secara rinci sebagai berikut 195 (median) < 233,38 (skor) < 260 (kuartil III). Apabila skor kumulatif ini dipresentasikan maka dapat dihitung sebagai berikut;

$$\begin{aligned} & 233,38 \\ \text{Tingkat partisipasi } V &= \frac{\text{-----}}{325} \times 100 \\ &= 71,81 \end{aligned}$$

Presentase kumulatif partisipasi masyarakat pada program desa mandiri pangan ini mencapai 71,81%. Hal ini berarti hampir setiap tahapan kegiatan masyarakat

ikut terlibat atau dilibatkan. Tingkat partisipasi ini terjadi disebabkan oleh keterbukaan para pengelola program desa mandiri pangan yang dimotori oleh pihak pemerintahan Desa Mekarlaksana. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat pada tahap pengambilan keputusan/perencanaan, pelaksanaan program, pengambilan manfaat, dan evaluasi cukup positif.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pengolahan data dan analisis deskriptif dari masing-masing sub variabel maka tingkat partisipasi masyarakat dalam program desa mandiri pangan dapat dikelompokkan menjadi dua bagian. Bagian pertama yakni partisipasi masyarakat pada pengambilan keputusan/ perencanaan dan evaluasi program sangat positif. Hal ini karena Kuartil III < Skor < Maksimal. Hal ini mengandung arti bahwa partisipasi masyarakat sangat positif atau dapat dimaknai bahwa partisipasi masyarakat dinilai aktif. Bagian kedua yakni partisipasi masyarakat pada pelaksanaan program dan pengambilan manfaat positif. Hal ini karena Median < Skor < Kuartil III. Hal ini mengandung arti bahwa partisipasi masyarakat positif dan dapat dimaknai bahwa partisipasi masyarakat dinilai cukup aktif. Berdasarkan skor kumulatif dari masing-masing sub variabel maka tingkat partisipasi masyarakat dalam program desa mandiri pangan *Di Desa Mekarlaksana Kec. Cikancung Kabupaten Bandung adalah positif*. Hal ini terlihat dari Median < Skor < Kuartil III artinya positif (partisipasi masyarakat dinilai cukup aktif).

UCAPAN TERIMAKASIH

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung terlaksananya penelitian ini. Secara Khusus penulis mengucapkan terima kasih kepada Dekan Fakultas Komunikasi Unpad, Direktur DRPMI Unpad, Ketua Program Studi Ilmu Perpustakaan Fakultas Ilmu Komunikasi Unpad, dan Pemerintah Kabupaten Bandung.

DAFTAR PUSTAKA

Akhmaddhian, S. (2017). Aparatur Peduli Lingkungan, Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Dalam Konservasi Sumber Daya Air. *Sosiohumaniora*, 19(3).

Damayani, N. A., Rachmawati, T. S., Budiono, A., & Saepudin, E. (2015). "Literasi Informasi Masyarakat Pedesaan Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung". *Jurnal Kajian Informasi dan Perpustakaan*, 3(2), 221-234.

PROKSI DESA MAPAN, Evaluasi kegiatan Program Aksi Desa Mandiri Pangan 2009. Badan Ketahanan Pangan.

Indonesia, B.K.P.R. (2011). Pedoman Teknis Program Aksi Desa Mandiri Pangan. Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI.

Iskandar, J. & Ginanjar, A. (2002). Perubahan Pengelolaan Hutan oleh Masyarakat Dayak Akibat Kegiatan HPH/HPHH di Kutai Barat Kalimantan Timur. *Sosiohumaniora*, 4(3), 209.

Mulyono, A. (2008). Studi Partisipasi Masyarakat pada Program Desa Mandiri Pangan Di Desa Muntuk, Kabupaten Bantul (Doctoral dissertation, program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro).

Pedoman Umum Program Aksi Desa Mandiri Pangan (Desa Mapan). 2012. Badan Ketahanan Pangan Badan Ketahanan Pangan, Dep. Pertanian RI. Jakarta.

Pangan, B. K. (2006). Pedoman Umum Program Aksi Desa Mandiri Pangan (MAPAN). Departemen Pertanian.

Prijana, (2005). Metode Sampling Terapan. Bandung: Humaniora

Suryana, A. (2008). Menelisik ketahanan pangan, kebijakan pangan, dan swasembada beras. *Pengembangan Inovasi Pertanian*, 1(1), 1-16.

Safi'i, M. (2011). Ampih Miskin, Model Kebijakan Penuntasan Kemiskinan dalam Perspektif Teori dan Praktek. Cetakan 1. Averroes Press. www.averroespress.net.

Sugiyono. (2008). Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R & D . Bandung : Alfabeta.

Sugiyono. (2008). Metode Penelitian Bisnis. Bandung. Alfabeta

ANALISIS KINERJA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH DI PROVINSI LAMPUNG

**Teguh Endaryanto, Muhammad Firdaus, Hermanto Siregar dan
Dedi Budiman Hakim**

Mahasiswa dan Dosen Sekolah Pascasarjana Program Studi Ilmu Perencanaan

Pembangunan Wilayah dan Perdesaan (PWD)-IPB

E-mail: teguh.e.69@gmail.com

ABSTRAK. Isu otonomi daerah di Provinsi Lampung adalah kinerja ekonomi maupun keuangan di kabupaten induk dan pemekaran. Tujuan penelitian adalah menganalisis kinerja ekonomi dan kinerja keuangan daerah serta faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja ekonomi daerah. Penelitian ini menggunakan data sekunder, dengan analisis deskriptif dan analisis statistik regresi panel data. Hasil analisis menunjukkan bahwa kinerja ekonomi dan keuangan daerah di kabupaten pemekaran lebih tinggi dibandingkan di kabupaten induk. Indikator penurunan angka kemiskinan adalah indikator yang paling signifikan mendongkrak kinerja ekonomi di kabupaten pemekaran. Kinerja keuangan kabupaten pemekaran yang tinggi dibandingkan kabupaten induk didorong oleh indikator turunnya ketergantungan fiskal, penciptaan pendapatan, proporsi belanja modal, dan kontribusi sektor pemerintah. Kinerja ekonomi daerah dipengaruhi oleh pangsa pertanian, ukuran wilayah, pendidikan, kesehatan, transfer pemerintah pusat, belanja pemerintah daerah.

Kata Kunci : otonomi daerah, kinerja ekonomi, kinerja keuangan, kemiskinan

ANALYSIS OF ECONOMIC AND FINANCIAL PERFORMANCE IN LAMPUNG

ABSTRACT. The issue of regional autonomy in the province of Lampung is the economic and financial performance in the main district and division. The research objective is to analyze the performance of the economy and the financial performance of and the factors affecting the performance of the local economy. This study uses secondary data, descriptive analysis and statistical regression analysis of data panel. The analysis shows that the economic and financial performance in the area of the district division was higher than in the main district. Indicators of poverty reduction is the most significant indicator of economic performance boost in the district division. The financial performance of the district division is higher than the parent region is driven by the decrease dependence indicator of fiscal, revenue generation, the proportion of capital expenditure, and the contribution of the government sector. Economic performance is affected by the share of agricultural area, the size of the region, education, health, the transfer of central government, local government spending.

Keywords: decentralization, economic performance, financial performance, poverty

PENDAHULUAN

Satu dekade lebih intensifikasi pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia telah berlangsung sejak digulirkannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999 merupakan landasan yuridis bagi pengembangan otonomi daerah yang kemudian direvisi dengan UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004 yang paling akhir dengan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. UU tersebut memberi banyak kewenangan bagi pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya secara proporsional. Artinya pelimpahan tanggung jawab akan diikuti oleh pengaturan pembagian, pemanfaatan sumberdaya yang berkeadilan termasuk dalam perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Provinsi Lampung sebelum tahun 1997 terdiri dari Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Lampung Utara. Setelah tahun 1997 terjadi pemekaran kabupaten baru yaitu Lampung Timur, Kota Metro,

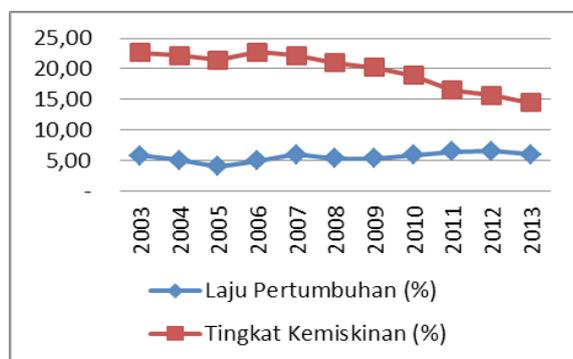
Tanggamus, Tulang Bawang, Way Kanan dan Lampung Barat. Sampai tahun 2013 Provinsi Lampung memiliki 15 kabupaten/kota yaitu 13 Kabupaten dan 2 Kota. Terdapat 5 kabupaten yang baru dimekarkan sejak dicanangkan otonomi daerah 1 Januari 2001 yaitu Pesawaran, Pringsewu, Mesuji, Tulang Bawang Barat, dan Kabupaten Pesisir Barat.

Kondisi perekonomian Provinsi Lampung dalam kurun waktu tahun 2003-2013 relatif stabil. Laju pertumbuhan ekonominya tercatat positif dengan trend meningkat setiap tahunnya (Gambar 1). Sementara angka kemiskinan menunjukkan trend penurunan yang menunjukkan angka kemiskinan di Provinsi Lampung yang makin mengecil. Tentu ini kondisi yang cukup kondusif bagi pembangunan dan kesejahteraan di Provinsi Lampung. Perkembangan IPM di seluruh kabupaten di Provinsi Lampung periode 2009-2013 meningkat dengan rata-rata sebesar 71,48 walau masih berada di bawah rata-rata IPM Nasional yaitu 72,77.

Menurut Kuncoro (2012), alasan mendasar terjadi pemekaran adalah peningkatan kesejahteraan rakyat lokal. Selama ini, sumber daya cenderung ditarik ke daerah induk sehingga daerah yang jauh

dari pusat kekuasaan tertinggal. Selain itu, pemekaran juga untuk peningkatan pelayanan sehingga tidak perlu pergi jauh untuk mengurus sesuatu ke provinsi/kabupaten. Memperpendek rentang kendali (*span of control*) karena cakupan yang terlalu luas menyebabkan organisasi tidak dapat berjalan efektif. Dalam konteks ini, otonomi harus dipahami secara fungsional, artinya orientasi otonomi seharusnya pada upaya pemaksimalan fungsi pemerintah, yaitu layanan, pengaturan, dan pemberdayaan agar dapat dilakukan secepat, sedekat, dan setepat mungkin dengan kebutuhan masyarakat (Badrudin, 2012). Menurut Juanda (2007) pemekaran daerah memberikan manfaat dalam peningkatan pelayanan publik, otonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dengan prinsip-prinsip kearifan lokal dan berkelanjutan, partisipasi masyarakat yang meningkat, terjadi efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumberdaya alam, kesejahteraan masyarakat.

Hasil studi yang dilakukan Kana and Suwondo (2007) di Kabupaten Sambas Kalimantan Barat dan Kabupaten Buton Sulawesi Tenggara menunjukkan bahwa ada keinginan daerah untuk menarik DAU (Dana Alokasi Umum) sebanyak-banyaknya. Kuncoro (2012), menyampaikan bahwa implementasi pemekaran wilayah dilihat dari transfer dana dari pusat ke daerah, khususnya total DAU Nasional meningkat. Otonomi fiskal bila dikelola mampu meningkatkan kinerja keuangan daerah dan pertumbuhan ekonomi dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti efisiensi keuangan dan efektivitas keuangan daerah.



Sumber: BPS (2014), 2006-2013, data diolah.

Gambar 1. Hubungan Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan di Provinsi Lampung Tahun 2003-2013

Sementara pertumbuhan ekonomi jika tidak dikelola dengan baik dapat mengurangi kinerja keuangan daerah (Renyaaan, Ubud, Idrus, & Djumahir, 2012). Olowu (2003), menegaskan bahwa otonomi daerah yang sukses mensyaratkan adanya kemampuan daerah yang memadai dalam pengelolaan pemerintahan daerah dan akuntabilitas. Dana desentralisasi berpengaruh secara signifikan pada belanja langsung pemerintah dan pertumbuhan ekonomi. Dana otonomi daerah khusus memiliki pengaruh jauh pada belanja tidak langsung pemerintah. Efek desentralisasi telah meningkat, melalui

pertumbuhan ekonomi sebagai variabel intermediasi, bermakna terhadap lapangan kerja, kemiskinan, dan kesejahteraan (Suwandi & Warokka, 2013). Menurut Wardhana, Juanda, Siregar, and Wibowo (2013) DAU, DAK, infrastruktur jalan, aturan hold harmless dan jumlah penduduk mempengaruhi signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

Berdasarkan uraian di atas, yang menjadi pertanyaan penelitian adalah bagaimana kinerja ekonomi dan keuangan daerah era otonomi dengan kondisi dan potensi wilayah yang tersedia. Adapun tujuan penelitian adalah menganalisis kinerja ekonomi dan keuangan daerah era otonomi serta, faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja ekonomi daerah di Provinsi Lampung.

METODE

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data diperoleh dari instansi terkait seperti BPS, Biro Keuangan, Bappeda, serta dinas instansi lainnya baik tingkat kabupaten maupun provinsi tahun 2004-2013. Untuk analisis era otonom ditetapkan 2 (dua) kabupaten induk dan 3 (tiga) kabupaten pemekaran. Kabupaten Tanggamus dan Tulang Bawang sebagai kabupaten induk dan Kabupaten Pringsewu (pemekaran Kab. Tanggamus), Kabupaten Mesuji dan Tulang Bawang Barat (pemekaran Kab. Tulang Bawang) sebagai kabupaten pemekaran. Untuk mengukur kinerja ekonomi dan keuangan digunakan analisis deskriptif. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja ekonomi digunakan analisis regresi panel data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kinerja Ekonomi dan Keuangan Kabupaten Induk dan Pemekaran

Perkembangan ekonomi daerah kabupaten dapat dianalisis dengan membuat Indeks Kinerja Ekonomi Daerah (IKE) yang pada prinsipnya adalah rata-rata dari indikator pertumbuhan PDRB non-migas (PPNM), PDRB per kapita (PPK), Rasio PDRB Kabupaten Terhadap PDRB Propinsi (RPKPP), Angka Kemiskinan (AK).

Sementara kinerja keuangan dianalisis dengan Indeks Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (IKKPD) yang merupakan angka rata-rata dari indikator: ketergantungan fiskal (KF), kapasitas penciptaan pendapatan (KPP), proporsi belanja modal (PBM) dan kontribusi sektor pemerintah (KSP).

Kabupaten Tanggamus Sebelum dan Sesudah Pemekaran

Kabupaten Tanggamus sesudah pemekaran menunjukkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang positif (tren naik). Berdasarkan Tabel 1 dan Gambar 2,

IKE Kabupaten Tanggamus sesudah pemekaran lebih tinggi dibandingkan dengan sebelum pemekaran. IKE sesudah pemekaran yang lebih tinggi tersebut disebabkan kenaikan pertumbuhan PDRB non-migas, pendapatan per kapita dan turunnya angka kemiskinan.

Kabupaten Pringsewu sebagai kabupaten pemekaran, selama kurun 2010-2013 pasca dimekarkan 2008 mampu menunjukkan kinerja ekonomi yang menggembirakan. Dengan rata-rata IKE sebesar 25,75 lebih tinggi dibandingkan kabupaten induknya Tanggamus sebesar 24,56. Indikator yang mendongkrak kinerja ekonomi Kabupaten Pringsewu adalah tingkat kemiskinan di kabupaten pemekaran yang lebih rendah dari kabupaten induknya, sehingga secara akumulatif rata-rata IKE Kabupaten Pringsewu (pemekaran) selama tahun 2010-2013 lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Tanggamus (induk).

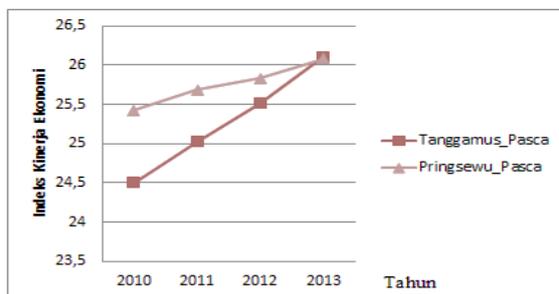
Tabel 1. Rata-rata Kinerja Ekonomi Daerah di Kabupaten Tanggamus dan Pringsewu Periode 2004-2007 dan 2010-2013

No	Indikator	Tanggamus*	Tanggamus**	Pringsewu**
1	Pertumbuhan PDRB non migas	5,17	6,85	6,71
2	PDRB per Kapita	4,66	4,75	3,99
3	Rasio PDRB Kab. thd PDRB Provinsi	9,55	6,22	3,55
4	Angka Kemiskinan	21,16	16,68	11,22
	Indeks Kinerja Ekonomi Daerah	24,56	25,29	25,75

Sumber: BPS 2008; 2014 (data diolah)

Keterangan : * = sebelum pemekaran
** = sesudah pemekaran

Namun demikian Kabupaten Pringsewu perlu memperhatikan dan meningkatkan indikator pertumbuhan PDRB, PDRB per Kapita, termasuk kontribusi terhadap PDRB provinsinya.

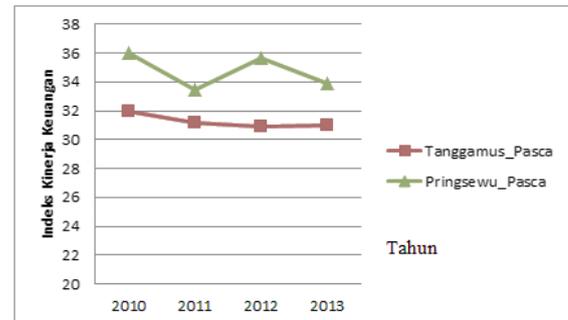


Gambar 2. Kinerja Ekonomi Kabupaten Tanggamus dan Pringsewu

Akumulasi rata-rata indeks keuangan Kabupaten Tanggamus sesudah pemekaran selama 4 tahun relatif lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Tanggamus sebelum pemekaran (Tabel 2). Hal ini didorong oleh capaian kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus menurunkan ketergantungan kapasitas fiskal yang lebih rendah dalam arti terdapat sumber pendapatan

lain selain dari dana transfer pusat, selain itu juga makin tingginya proporsi belanja modal daerah dan rasio belanja terhadap PDRB.

Indeks kinerja keuangan Kabupaten Tanggamus sebelum pemekaran menunjukkan tren naik, namun setelah pemekaran justru trennya menurun (Gambar 3).



Gambar 3. Kinerja Keuangan Kabupaten Tanggamus dan Pringsewu

Hal ini disebabkan ketergantungan fiskal di Kabupaten Pringsewu lebih rendah dibandingkan kabupaten induknya, kapasitas penciptaan pendapatan, proporsi belanja modal dan kontribusi sektor pemerintah di Kabupaten Pringsewu masih lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Tanggamus (Tabel 2). Kondisi ini menyebabkan secara akumulatif meningkatkan indeks kinerja keuangan kabupaten pemekaran melampaui kabupaten induknya, sehingga ini berdampak positif bagi pembangunan di Kabupaten Pringsewu sebagai kabupaten pemekaran.

Indeks kinerja keuangan daerah di Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Pringsewu tersebut ditopang oleh struktur APBD (2004-2007 dan 2010-2013) yang secara riil mengalami peningkatan jumlah secara signifikan, namun dari alokasi sumber pendapatan maupun alokasi belanja daerah hanya sedikit mengalami perubahan. Pendapatan Kabupaten Tanggamus sebelum pemekaran rata-rata periode 2004-2007 adalah 480 milyar, dimana 94,01 persen berasal dari dana perimbangan pusat ke daerah. Sesudah pemekaran jika digabungkan pendapatan kabupaten induk dan pemekaran periode 2010-2013 adalah sebesar 1.396 milyar, terjadi kenaikan 191 persen. 1.084 milyar rupiah diantaranya merupakan dana yang berasal dari transfer pusat (dana perimbangan).

Tabel 2. Rata-rata Kinerja Keuangan Daerah di Kabupaten Tanggamus dan Pringsewu Periode 2004-2007 dan 2010-2013

No	Indikator	Tanggamus*	Tanggamus**	Pringsewu**
1	Ketergantungan Fiskal	21,84	7,79	-1,72
2	Kapasitas Penciptaan Pendapatan	0,29	0,27	0,54
3	Proporsi Belanja Modal	19,74	20,44	20,35
4	Kontribusi Sektor Pemerintah	11,9	12,12	16,36
	Indeks Kinerja Keuangan Daerah	27,52	31,26	34,75

Sumber: BPS 2008; 2014 (data diolah)

Menurut (Kana dan Suwondo, 2007) ada kecenderungan pemekaran daerah dilakukan untuk menarik DAU sebanyak-banyaknya. Kabupaten Pringsewu sebagai kabupaten pemekaran baru berhasil menarik dana pusat (APBN) sebesar 477 milyar rupiah, hampir setara dengan Kabupaten Tanggamus sebagai kabupaten induknya yaitu antara 75,93-79,06 persen dari total pendapatan daerah. Struktur sumber pendapatan sesudah pemekaran yang mengalami kenaikan berasal dari pendapatan lainnya antara lain pendapatan dari dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemda lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus, bantuan keuangan dari provinsi/kab/kota lainnya dan pendapatan lainnya.

Alokasi belanja daerah sebelum dan sesudah pemekaran di Kabupaten Tanggamus relatif sama. Belanja pegawai masih mendominasi pengeluaran APBD. Kabupaten Pringsewu sebagai kabupaten pemekaran memiliki alokasi belanja pegawai yang lebih tinggi dibandingkan kabupaten induknya. Namun secara nasional, rata-rata belanja pegawai tahun 2012 sebesar 50,9 persen dan tahun 2013 sebesar 49,26 persen. Ini mengindikasikan bahwa proporsi belanja pegawai Kabupaten Tanggamus dan Pringsewu masih tinggi, berada di atas rata-rata nasional. Hal ini berdampak terhadap alokasi belanja yang kecil bagi program-program pembangunan.

Belanja modal di Kabupaten Tanggamus sebelum dan sesudah pemekaran masih berada di bawah rata-rata belanja modal nasional yaitu 25,36 persen (2012) dan 24,1 persen (2013). Demikian juga Kabupaten Pringsewu sebagai kabupaten pemekaran. Proporsi belanja modal masih kecil, padahal belanja modal ini adalah belanja yang langsung bersentuhan dengan program-program pembangunan di masyarakat

Kabupaten Tulang Bawang Sebelum dan Sesudah Pemekaran

Kabupaten Tulang Bawang sesudah dimekarkan pada periode 2010-2013 justru menunjukkan kinerja ekonomi yang merosot dibandingkan sebelum pemekaran (Gambar 4 dan Tabel 3). Pertumbuhan PDRB yang menurun yang berimbas kepada pangsa kontribusi ke PDRB provinsi yang makin kecil membuat IKE Kabupaten Tulang Bawang secara akumulasi rata-rata periode 2010-2013 lebih rendah dibandingkan sebelum pemekaran termasuk dibandingkan dengan IKE kabupaten pemekaran (Mesuji dan Tulang Bawang Barat). Kabupaten Mesuji dan Tulang Barat sebagai kabupaten pemekaran, selama kurun 2010-2013 pasca dimekarkan 2008 mampu menunjukkan kinerja ekonomi yang menggembirakan.

Dengan rata-rata IKE sebesar 27,13 dan 26,77 lebih tinggi dibandingkan kabupaten induknya Tulang Bawang yaitu 26,51. Indikator yang mendongkrak kinerja ekonomi Kabupaten Mesuji dan Tulang Bawang Barat adalah pertumbuhan PDRB yang

meningkat dan tingkat kemiskinan di kabupaten pemekaran yang lebih rendah dari kabupaten induknya, sehingga secara akumulatif rata-rata IKE Kabupaten Mesuji dan Tulang Bawang Barat (pemekaran) selama tahun 2010-2013 lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Tulang Bawang (induk).



Gambar 4. Kinerja Ekonomi Kabupaten Tulang Bawang, Mesuji dan Tulang Bawang Barat

Tabel 3. Rata-rata Kinerja Ekonomi Daerah di Kabupaten Tulang Bawang, Mesuji dan TB Barat Periode 2004-2007 dan 2010-2013

No	Indikator	T.Bawang*	T.Bawang**	Mesuji**	TB Barat**
1	Pertumbuhan PDRB non migas	5,54	5,49	5,77	6,13
2	PDRB per Kapita	4,89	5,98	7,15	4,83
3	Rasio PDRB Kab. Thd PDRB Provinsi	12,32	5,46	3,25	2,94
4	Angka Kemiskinan	14,75	9,60	7,68	6,82
	Indeks Kinerja Ekonomi Daerah	27,00	26,51	27,13	26,77

Sumber: BPS 2008; 2014 (data diolah)

Indeks kinerja keuangan Kabupaten Tulang Bawang sebelum pemekaran menunjukkan tren naik, namun setelah pemekaran justru trennya menurun (Gambar 5). Namun secara akumulasi rata-rata indeks keuangan Kabupaten Tulang Bawang sesudah pemekaran selama 4 tahun relatif lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Tulang Bawang sebelum pemekaran (Tabel 4). Hal ini didorong oleh capaian kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus meningkatkan kapasitas penciptaan pendapatan dan kontribusi sektor pemerintah.



Gambar 5. Kinerja Keuangan Kabupaten Tulang Bawang, Mesuji dan Tulang Bawang Barat

Kabupaten Mesuji dan Tulang Bawang Barat selama kurun waktu 2010-2013 memiliki indeks kinerja keuangan daerah yang lebih tinggi dibandingkan kabupaten induknya Tulang Bawang walaupun

dengan tren yang mulai menurun (Gambar 5). Hal ini disebabkan ketergantungan fiskal di Kabupaten Tulang Bawang Barat lebih rendah dibandingkan kabupaten induknya, kapasitas penciptaan pendapatan, proporsi belanja modal dan kontribusi sektor pemerintah di Kabupaten Mesuji dan Tulang Bawang Barat masih lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Tulang Bawang (Tabel 4). Kondisi ini menyebabkan secara akumulatif mendongkrak indeks kinerja keuangan kabupaten pemekaran melampaui kabupaten induknya, sehingga ini berdampak positif bagi pembangunan di Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagai kabupaten pemekaran. Namun tetap harus mampu mempertahankan kondisi ekonomi dan keuangannya, mengingat tren perkembangan kinerja keuangan yang menurun.

Kabupaten pemekaran Tulang Bawang Barat memiliki indeks kinerja keuangan yang lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Mesuji. Hal ini disebabkan Kabupaten Tulang Bawang memiliki ketergantungan fiskal yang lebih rendah dari Kabupaten Mesuji, kapasitas penciptaan pendapatan dan kontribusi sektor pemerintah yang lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Mesuji. Secara akumulatif memiliki indeks kinerja keuangan yang lebih tinggi yaitu sebesar 37,69 dibandingkan Kabupaten Mesuji sebesar 34,77.

Tabel 4. Rata-rata Kinerja Keuangan Daerah di Kabupaten Tulang Bawang, Mesuji dan T.B. Barat Periode 2004-2007 dan 2010-2013

No	Indikator	T.Bawang*	T.Bawang**	Mesuji**	TB Barat**
1	Ketergantungan Fiskal	27,75	7,79	27,41	17,7
2	Kapasitas Penciptaan Pendapatan	0,25	0,27	0,5	1,68
3	Proporsi Belanja Modal	21,77	20,44	35,47	33,8
4	Kontribusi Sektor Pemerintah	11,5	12,12	30,52	32,99
	Indeks Kinerja Keuangan Daerah	26,44	31,26	34,77	37,69

Sumber: BPS (2008); 2014 (data diolah)

Indeks kinerja keuangan daerah di Kabupaten Tulang Bawang, Mesuji dan Kabupaten Tulang Bawang Barat ditopang oleh struktur APBD (2004-2007 dan 2010-2013) yang secara riil mengalami peningkatan jumlah secara signifikan, namun dari alokasi sumber pendapatan maupun alokasi belanja daerah hanya sedikit mengalami perubahan. Pendapatan Kabupaten Tulang Bawang sebelum pemekaran rata-rata periode 2004-2007 adalah 427 milyar rupiah, dimana 91,33 persen berasal dari dana perimbangan pusat ke daerah. Sesudah pemekaran jika digabungkan pendapatan kabupaten induk dan pemekaran periode 2010-2013 adalah sebesar 1.479 milyar rupiah, terjadi kenaikan 246,28 persen. 1.228 milyar rupiah diantaranya merupakan dana yang berasal dari transfer pusat (dana perimbangan).

Kabupaten Mesuji sebagai kabupaten pemekaran baru berhasil menarik dana pusat (APBN) sebesar 337 milyar rupiah, sedangkan Kabupaten Tulang Bawang Barat berhasil menarik dana pusat sebesar 353 milyar rupiah. Secara umum dampak pemekaran di Kabupaten Tulang Bawang memberikan ruang penciptaan sumber pendapatan di luar dana transfer pusat (persentase alokasi dana transfer pusat terhadap total pendapatan berkurang).

Estimasi Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Ekonomi Daerah

Hasil uji Hausman menunjukkan nilai χ^2 adalah 5,45 dan $p\text{-value (Prob)} > \chi^2 = 0,3632$. Hal ini berarti persamaan untuk mengestimasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja ekonomi daerah memiliki parameter yang berbeda antar individu maupun antar waktu yang dimasukkan dalam error. Dengan demikian *random effect model* lebih sesuai untuk estimasi ini. Berdasarkan estimasi terhadap model didapat hasil hampir semua variabel bebas menunjukkan hasil yang signifikan secara statistik pada taraf nyata (α) 5 persen dan 1 persen (Tabel 5), kecuali variabel DAK. Hal ini ditunjukkan dari nilai probabilitas z-hitung masing-masing variabel.

Tabel 5. Hasil Estimasi Faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja Ekonomi Daerah Kabupaten Pemekaran dan Lainnya di Provinsi Lampung

No	Variabel	Coef.	P > z
1	Pangsa Pertanian	-23,8143	0,002
2	Jumlah Penduduk	0,0024	0,001
3	Angka Harapan Hidup	298,469	0,000
4	Angka Melek Huruf	121,8747	0,000
5	Kontribusi Sektor Pemerintah	-1712,35	0,045
6	Kontribusi Sektor Pemerintah* D1	0,5382	0,000
7	Dana Alokasi Khusus	-0,0002	0,875
8	Dana Alokasi Khusus*D1	0,0026	0,224
9	Dana Alokasi Umum	0,0012	0,000
10	Dana Alokasi Umum*D1	-0,0014	0,009
	Konstanta	-28593,5	0,000

Sumber: data diolah 2015

Pangsa pertanian berpengaruh signifikan terhadap kinerja ekonomi daerah, namun dengan koefisien negatif. Artinya jika terjadi penurunan kontribusi 1 persen di sektor pertanian akan menaikkan pendapatan per kapita sebesar 23,81. Hal ini sebagai ciri kemajuan suatu perekonomian dan merupakan bagian dari transformasi struktural sehingga fokus pembangunan lebih banyak diarahkan ke pembangunan infrastruktur untuk menopang pertumbuhan ekonomi. Juga rendahnya penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pangsa industri dan jasa.

Jumlah penduduk berpotensi untuk meningkatkan kinerja ekonomi daerah. Artinya setiap terjadi kenaikan jumlah penduduk 1 persen akan meningkatkan kinerja ekonomi daerah sebesar 0,002. Menurut Fitriani, Hofman,

and Kaiser (2005); Qibthiyyah (2008); Martinez-Vazquez (2012), determinan pemekaran adalah jumlah penduduk, luas wilayah daratan, insentif fiskal (DAU, DAK, bagi hasil pendapatan sumberdaya alam dan bagi hasil pendapatan dari sumber lain), dorongan politik, etnik, agama, PDRB per kapita, kemiskinan, tingkat kematian bayi dan tingkat putus sekolah.

Faktor pendidikan yang diproxy dengan variabel angka melek huruf dan kesehatan yang diproxy dengan variabel angka harapan hidup berpengaruh signifikan untuk meningkatkan kinerja ekonomi daerah. Artinya setiap terjadi peningkatan pendidikan 1 persen akan meningkatkan kinerja ekonomi daerah sebesar 121,87, dan setiap peningkatan kesehatan 1 persen akan meningkatkan kinerja ekonomi daerah sebesar 298,47. Perekonomian yang ditandai dengan menurunnya pangsa sektor pertanian dan bergeser ke sektor industri dan jasa membutuhkan tenaga ahli dengan pendidikan dan skill yang memadai. Melalui pendidikan peningkatan sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan keterampilan bisa diciptakan. Dampaknya tentu akan meningkatkan produktivitas kerja dan inovasi. Demikian halnya dengan kesehatan, jika sumberdaya manusia memiliki tingkat kesehatan yang baik, maka akan mendukung tercapainya produktivitas kerja dan inovasi yang lebih baik sehingga berdampak terhadap pendapatan per kapita. Variabel pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, NTP, IPM diuji oleh Bakri (2011) untuk melihat perkembangan kesejahteraan, termasuk variabel kerapatan tempat ibadah sebagai faktor endogenik yang secara positif signifikan dapat meningkatkan pertumbuhan pangsa ekonomi bagi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung.

Kontribusi sektor pemerintah (KSP) adalah variabel untuk melihat kontribusi pemerintah dalam menggerakkan perekonomian. Keuangan pemerintah daerah tidak saja mencerminkan arah dan pencapaian kebijakan fiskal dalam pembangunan, namun juga menggambarkan kinerja pemerintah daerah. Struktur belanja pemerintah daerah umumnya terdiri dari belanja pegawai, belanja modal, belanja barang dan jasa, serta belanja kabupaten lainnya. Hasil analisis menunjukkan bahwa KSP berpengaruh signifikan terhadap kinerja ekonomi daerah dengan koefisien negatif. Artinya setiap terdapat peningkatan KSP 1 persen akan menurunkan kinerja ekonomi daerah masyarakat sebesar 1712,35. Hal ini menunjukkan bahwa alokasi belanja masih sangat kecil untuk kegiatan pembangunan, sehingga pembangunan belum bisa menyentuh aspek pendapatan per kapita bagi masyarakat. Sementara variabel KSP dengan interaksi *dummy* pemekaran menunjukkan pengaruh yang signifikan dengan koefisien positif. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa kontribusi sektor pemerintah terkait dengan alokasi belanja cukup memberikan dampak positif bagi peningkatan kinerja ekonomi daerah di kabupaten pemekaran.

KSP (Rasio Belanja/PDRB Kabupaten) di kabupaten pemekaran berpengaruh positif terhadap kesejahteraan. Jika dilihat pada Tabel 46, rata-rata belanja daerah KP masih lebih rendah daripada KL, namun jika alokasi belanja daerahnya digunakan tepat sasaran akan mampu menggerakkan potensi pembangunan daerah sehingga diharapkan mampu mensejahterakan masyarakat. Menurut (Nurlaela (2010)), pengelolaan APBD dapat dilihat salah satunya yaitu alokasi belanja modal, penambahan alokasi belanja modal berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Jika IPM meningkat maka potensi peningkatan kesejahteraan dapat dicapai.

Variabel DAK, baik dengan *dummy* interaksi ataupun tidak ternyata tidak berpengaruh terhadap pendapatan per kapita. Hal ini menunjukkan bahwa alokasi DAK belum terdistribusi sesuai kebutuhan masyarakat. DAK mempunyai tujuan untuk memberikan insentif bagi pemerintah pada level sub-nasional untuk menyelenggarakan kegiatan khusus yang biasanya merupakan prioritas pemerintah tingkat nasional (Boadway & Shah, 2007). Dalam implementasinya sering terjadi kebutuhan daerah tidak sama dengan prioritas pemerintah pusat. Menurut Handra and Paddu (2012) besaran DAK yang diterima daerah relatif tidak dapat diprediksi dibandingkan dengan DAU dan Dana Bagi Hasil (DBH). Selain itu juga jarang mendapat tambahan anggaran dari sumber lainnya. Sejak tahun 2006 hampir semua daerah menerima DAK, sehingga DAK yang sedikit dan terdistribusi ke banyak daerah, tidak mampu mendorong perbaikan pelayanan publik.

DAU berpengaruh signifikan dalam peningkatan kinerja ekonomi daerah dengan koefisien positif. Setiap peningkatan tambahan DAU 1 persen yang dibelanjakan melalui pemerintah daerah kepada masyarakat akan meningkatkan kinerja ekonomi daerah sebesar 0,0012. Dana desentralisasi berpengaruh secara signifikan pada belanja langsung pemerintah dan pertumbuhan ekonomi. Efeknya meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel intermediasi terhadap lapangan kerja, kemiskinan, dan kesejahteraan (Suwandi & Warokka, 2013).

Dana alokasi umum (DAU), bagi daerah pemekaran tentu sangat dibutuhkan untuk membangun daerahnya yang baru. 71,49 persen DAU adalah sumber pendapatan dalam APBD di KP tidak berbeda jauh dengan di KL sebesar 64,83 persen. Rata-rata alokasi DAU per tahun dapat dilihat pada Tabel 47. Berdasarkan hasil analisis regresi data panel dengan *dummy* interaksi, DAU di KP berpengaruh terhadap kesejahteraan, namun dengan koefisien negatif. Artinya jika terjadi kenaikan DAU justru terjadi penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat. Kondisi ini bisa terjadi jika DAU yang dibelanjakan melalui pemerintah daerah banyak dialokasikan bukan di sektor publik/pembangunan. Sehingga tidak memberi dampak terhadap pembangunan dan

kesejahteraan masyarakat. Diduga faktor usia kabupaten pemekaran yang relatif baru (rata-rata 5 tahun berjalan) juga mempengaruhi, sehingga alokasi DAU lebih banyak untuk membiayai belanja pegawai dan belanja barang dan jasa untuk aparatur.

Hasil analisis dengan menggunakan *dummy* interaksi (Juanda, 2009) DAU di kabupaten pemekaran berpengaruh terhadap kinerja ekonomi daerah, namun dengan koefisien negatif. Artinya jika terjadi kenaikan DAU justru terjadi penurunan kinerja ekonomi daerah. Kondisi ini bisa terjadi jika DAU yang dibelanjakan melalui pemerintah daerah banyak dialokasikan bukan di sektor publik/pembangunan. Sehingga tidak memberi dampak terhadap pembangunan dan pendapatan per kapita masyarakat. Diduga faktor usia kabupaten pemekaran yang relatif baru (rata-rata 5 tahun berjalan) juga mempengaruhi, sehingga alokasi DAU lebih banyak untuk membiayai belanja pegawai dan belanja barang dan jasa untuk aparatur. Sumber pendapatan dalam APBD di kabupaten pemekaran yang berasal dari DAU adalah sebesar 71,49 persen dibandingkan dengan di kabupaten lainnya yaitu sebesar 64,83 persen.

SIMPULAN

Kinerja ekonomi dan keuangan kabupaten pemekaran (Pringsewu, Mesuji dan Tulang Bawang Barat) berdasarkan analisis menunjukkan hasil yang lebih tinggi dibandingkan kabupaten induk (Tanggamus dan Tulang Bawang). Indikator yang paling signifikan mendongkrak kinerja ekonomi di kabupaten pemekaran adalah indikator penurunan angka kemiskinan, diikuti oleh percepatan pertumbuhan PDRB dan peningkatan pendapatan per kapita. Kinerja keuangan kabupaten pemekaran yang tinggi dibandingkan kabupaten induk didorong oleh indikator turunnya ketergantungan fiskal, penciptaan pendapatan, proporsi belanja modal, dan kontribusi sektor pemerintah. Sementara sumber pendapatan daerah sebagian besar berasal dari dana transfer pusat (dana perimbangan). Pangsa pertanian, ukuran wilayah, pendidikan, kesehatan, transfer pemerintah pusat, belanja pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja ekonomi daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Badrudin, R. (2012). *Ekonomika Otonomi Daerah*. Yogyakarta (ID): UPP STIM YKPN.
- Bakri, S. (2011). *Fungsi Intrinsik Hutan Dan Faktor Endogenik Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Determinan Pembangunan Wilayah Provinsi Lampung*. (Disertasi), Institut Pertanian Bogor, Bogor (ID).
- Boadway, R. W., & Shah, A. (2007). *Intergovernmental fiscal transfers: principles and practices*: World Bank Publications.
- BPS. (2008). *Lampung Dalam Angka*. Bandar Lampung (ID): BPS Provinsi Lampung.
- BPS. (2014). *Lampung Dalam Angka*. Bandar Lampung (ID): BPS Provinsi Lampung.
- Fitriani, F., Hofman, B., & Kaiser, K. (2005). Unity in diversity? The creation of new local governments in a decentralising Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 41(1): 57-79.
- Handra, H., & Paddu, H. (2012). *Evaluasi Kinerja Pelaksanaan DAU dan DAK*. In T. A. K. K. B. D. Fiskal (Ed.), *Policy Brief 2012* (pp. 41). Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Juanda, B. (2007). *Manfaat dan Biaya Pemekaran Daerah serta Implikasinya terhadap APBD*. *Jurnal Ekonomi FE Universitas Borobudur Jakarta*, XXV.
- Juanda, B. (2009). *Ekonometrika Permodelan dan Pendugaan*. Bogor: IPB Press.
- Kana, N. L., & Suwondo, K. (2007). *Pemekaran Kabupaten Sambas dan Kabupaten Buton: Temuan dan Isu Penting*. Paper presented at the Seminar Internasional ke-8 "Dinamika Politik Local di Indonesia" : Penataan Daerah (Territorial Reform) dan Dinamikanya, Salatiga Jawa Tengah. Makalah retrieved from
- Kuncoro, M. (2012). *Perencanaan Daerah: Bagaimana Membangun Ekonomi Lokal, Kota, dan Kawasan?* Jakarta: Salemba Empat.
- Martinez-Vazquez, J. (2012). *Managing Pressures for Fragmentation*. In D. G. o. F. B. M. o. F. R. o. Indonesia (Ed.), *Fiscal Decentralization in Indonesia a Decade after Big Bang*. Jakarta (ID): University of Indonesia Press.
- Nurlaela. (2010). *Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Pembangunan Manusia (Human Capital)*. Di Propinsi Sulawesi Barat. (Tesis), Institut Pertanian Bogor, Bogor (ID).
- Olowu, D. (2003). *Local institutional and political structures and processes: recent experience in Africa*. *Public Administration and Development*, 23(1): 41-52.
- Qibthiyah, R. M. (2008). *Essays on Political and Fiscal Decentralization*. (Disertasi), Georgia State University, Atlanta.
- Renyaan, J. P. A., Ubud, S., Idrus, M. S., & Djumahir. (2012). *Effect of Fiscal Autonomy and Economic Growth on Local Financial Performance*. *International Journal of Business and Management Invention*, 1(1): 16-21.

Suwandi, & Warokka, A. (2013). Fiscal Decentralization and Special Local Autonomy: Evidence from an Emerging Market. *The Journal of Southeast Asian Research*, 1-14. doi: 10.5171/2013.554057

Wardhana, A., Juanda, B., Siregar, H., & Wibowo, K. (2013). Dampak Transfer Pemerintah Pusat Terhadap Penurunan Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia. *Sosiohumaniora*, 15 (2): 111 - 118.

PANDUAN UNTUK PENULIS

JUDUL ARTIKEL (mak. 14 kata)

(Huruf Kapital, Times New Roman, 12 point, Bold, centered)

(kosong, spasi tunggal)

Penulis Pertama¹, Kedua², dan Ketiga³ (10 point)

¹ Alamat instansi (Instansi, Fakultas, Universitas, alamat lengkap) (10 point)

(kosong, spasi tunggal)

(E-mail:peneliti@alamat.com (10 point, italic)

(dua ketuk spasi tunggal)

ABSTRAK

(bold, 10 Point).

Abstrak dalam bahasa Indonesia, tidak lebih dari 250 kata.

Abstrak mencakup permasalahan, metode, dan temuan serta simpulan. Abstrak dalam bahasa Inggris, tidak lebih dari 200 kata.

(kosong, spasi tunggal)

Kata kunci:

Key words: Tuliskan maksimal 5 kata-kata kunci (key words).

(tiga ketuk spasi tunggal)

PENDAHULUAN (tanpa subjudul)

(10 point kapital)

(kosong, spasi tunggal)

METODE

(10 point kapital)

(kosong, spasi tunggal)

HASIL DAN PEMBAHASAN

(10 point kapital)

(kosong, spasi tunggal)

(dalam hasil sertakan data temuannya baik dalam bentuk tabel ataupun hasil wawancara, sedangkan dalam pembahasan harus disertai kutipan referensi yang relevan)

SIMPULAN

(10 point kapital)

(kosong, spasi tunggal)

UCAPAN TERIMA KASIH

(10 point kapital)

(kosong, spasi tunggal)

Penulis dapat menuliskan ucapan terima kasih kepada individu, lembaga pemberi dana penelitian, dsb. Ucapan terima kasih ditulis sebelum Daftar Pustaka.

DAFTAR PUSTAKA

(10 point kapital)

(kosong, spasi tunggal)

Kepustakaan yang dicantumkan dalam daftar pustaka hanya kepustakaan yang dikutip atau yang dijadikan rujukan dan ditulis dalam teks. Penulisan rujukan dalam badan karangan dilakukan sebagai berikut:

- Apabila terdiri dari satu orang penulis, ditulis sebagai berikut: McNeely (1995:...) atau (McNeely, 1995:...)
- Apabila terdiri dari dua orang penulis, ditulis sebagai berikut: McNeely & McCurdy (1995) atau (McNeely & McCurdy, 1995)
- Apabila terdiri dari tiga orang penulis atau lebih, ditulis sebagai berikut: McNeely *et al.* (1995) atau (McNeely *et al.*, 1995). Kata/istilah *et al.*, hanya digunakan untuk referensi berbahasa asing. Untuk referensi berbahasa Indonesia digunakan istilah dkk., misalnya Suparman, dkk. (1996).

Sitasi/Kutipan

- *Running note* atau *footnote* Penulisan dalam Daftar Pustaka dilakukan sebagai berikut:

Sumber buku:

- Strahler, A. N. 1957. Physical geography. New York: Wiley.
- Farrington, J., Turton, C., & Ames, A. J. (Eds.). 1999. Participatory watershed development: Challenges for the twenty-first century. New Delhi: Oxford University Press.
- Shaxson, T. F. 2000. People's involvement in watershed management: Lessons from working among resource-poor farmers. In R. Lal (Ed.), Integrated watershed management in the global ecosystem (pp. 345–363). Boca Raton, FL: CRC Press.
- Van Noordwijk, M., van Roode, M., McCallie, E. L., & Lusiana, B. (1998). Erosion and sedimentation as multiscale, fractal processes: Implications for models, experiments and the real world. In F. W. T. Penning de Vries, F. Agus, & J. Kerr (Eds.), Soil erosion at multiple scales (pp. 223–253). New York: CAB International.

Sumber jurnal:

diharuskan mensitir atau mengutip dari sumber jurnal Sosiohumaniora

Tomich, T. P., Fagi, A. M., de Foresta, H., Michon, G., Murdiyarso, D., Stolle, F., & van Noordwijk, M. 1998. Indonesia's fires: Smoke as a problem, smoke as a symptom. *Agroforestry Today*, 10(1), 4-7.

Sumber prosiding seminar:

Fay, C., de Foresta, H., & Sirait, M. 1998. Progress towards recognizing the rights and management potentials of local communities in Indonesian state-defined forest areas. Paper presented at the workshop on participatory natural resource management in developing countries, Mansfield College, Oxford, April 6-7.

Sumber internet:

Knox McCulloch, A., Meinzen-Dick, R., & Hazell, P. 1998. Property rights, collective action and technologies for natural resource management: A conceptual framework. CAPRI Working Paper No.1. Washington DC, USA: International Food Policy Research Institute. http://www.capri.cgiar.org/pdf/ca_priwp01.pdf.

Sumber disertasi/tesis:

Zandbergen, P. 1998. Urban watershed assessment: Linking watershed health indicator to management. Ph.D. Thesis. Resource Management and Environmental Studies, University of British Columbia, Vancouver.

Satuan, singkatan, nomenklatur, dan lambang

Satuan dan singkatan menggunakan sistem SI (*Systeme Internationale*) Nomenklatur nama ilmiah tumbuhan dan hewan ditulis lengkap dengan nama authornya. Nama ilmiah sesuai dengan aturan nomenklatur harus digunakan pada penulisan yang pertama kali, selanjutnya dapat disingkat sesuai aturan yang berlaku dan atau menggunakan nama daerah. Penggunaan lambang ditulis sebagai berikut: contoh, lambang alpha ditulis dengan bukan dengan huruf a.

FORMAT NASKAH

Artikel yang dimuat dalam jurnal ini dapat berupa kajian konseptual dan atau hasil-hasil penelitian pada masing-masing disiplin ilmu atau interdisiplin. Secara umum, sistematika artikel terdiri atas pendahuluan/introduksi yang menguraikan latar

belakang dan permasalahan yang dikaji yang ditunjang oleh referensi yang relevan, metode, hasil dan pembahasan, dan simpulan/rekomendasi. Pada kajian yang bersifat konseptual, bagian metode dapat diabaikan bila dianggap tidak perlu. Naskah ditulis dalam dua kolom pada kertas berukuran A4, dengan jarak antar kolom 1 cm. Panjang tulisan maksimal 6 - 10 halaman berspasi tunggal, termasuk daftar pustaka, gambar, tabel, dan lampiran. Setiap halaman memiliki margin atas 3.5 cm, margin bawah 2.5 cm margin kiri dan kanan 2 cm. Naskah ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar bentuk huruf Times New Roman 12. Naskah juga dapat ditulis dalam bahasa Inggris.

Naskah dimulai dengan halaman pertama yang memuat:

- Judul singkat (running head). Penulis diminta untuk membuat judul singkat (maksimal 14 kata).
- Judul lengkap (dalam bahasa Indonesia dan Inggris).
- Nama penulis, afiliasi, dan alamat korespondensi (mis. E-mail).

Gambar dan Tabel

- Gambar yang akan ditampilkan dalam jurnal adalah gambar hitam-putih. Bila menginginkan, penulis dapat menyertakan gambar berwarna, namun penulis akan dikenai biaya pencetakan gambar berwarna tersebut. (*mak. 6 untuk gambar dan tabel*)
- Gambar dan tabel diberi nomor sebagai berikut: Gambar 1., Gambar 2, dst. Tabel 1, Tabel 2, dst.
- Gambar dan tabel yang substansinya sama, ditampilkan salah satu.
- Tabel berbentuk pivot table.
- Letak penempatan Tabel diatas gambar tabel (9 point kapital)
- letak penempatan Gambar di bawah gambar (9 point kapital)
- Untuk keterangan di simpan di bawah gambar tabel atau gambar (9 point kapital)

Penulisan subjudul (heading)

- Subjudul tingkat pertama semuanya dicetak tebal ditulis dengan huruf kapital, misal: **PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN**
- Subjudul tingkat kedua, semuanya dicetak tebal dan ditulis dengan huruf kecil, kecuali huruf pertama dari setiap kata, misal: **Sistem Pengelolaan Lingkungan Tradisional**
- Subjudul tingkat ketiga, semuanya ditulis dengan huruf miring dan huruf kecil kecuali huruf pertama dari setiap kata, misal: *Sistem Kebun Talun*

PENYERAHAN NASKAH

Lakukan registrasi online pada alamat <http://jurnal.unpad.ac.id/sosiohumaniora/user/register>. di bagian akhir form, pilih Daftar sebagai: penulis. Pada tahap selanjutnya, lakukan unggah file artikel dalam bentuk .doc (Ms.Word diutamakan office 2003-2007) di link [Penyerahan Naskah Baru]. Berilah centang pada isian Checklist naskah untuk menunjukkan bahwa naskah yang akan diunggah sudah mengikuti panduan. Jika sudah, klik Simpan dan lanjutkan. Di tahap ini klik Browse dan pilih file artikel yang akan dikirimkan untuk Jurnal Sosiohumaniora. Klik Unggah. Klik Simpan dan lanjutkan. Selanjutnya, isi form yang ada hingga Penyerahan Selesai.

INDEKS PENULIS

- A**
Agung Budiono 86-94
Ahmad Averus 15-21
Akhmad Satori 22-28
Amrizal 57-64, 58-64, 59-64, 60-64, 61-64, 62-64, 63-64
Andi Pitono 15-21
Ari Purbowati 1-14
- D**
Dedi Budiman Hakim 95-102
Dian Novayanti 29-38
- E**
Eliza 65-69
Encang Saepudin 86-94
- H**
Hermanto Siregar 95-102
Hermanto Siregar 95-102
- I**
Indra Gumay Febryano 29-38
Irwan Sukri Banuwa 29-38
- M**
Muhammad Firdaus 95-102
- N**
Ninis Agustini Damayani 86-94
- R**
Rahmat Safe'i 29-38
Rina Adyawardhina 78-85
Rochadi Tawaf 45-56
- S**
Shorea Khaswarina 65-69
- S**
Sumadi 57-64
- T**
Teguh Endaryanto 95-102
- W**
Widyo Nugrahanto 78-85
Wiwi Widiastuti 22-28

INDEKS SUBJEK

- D**
Demokrasi 78-85, 79-85, 84-85, 85
desa mandiri pangan 86-94, 87-94, 88-94, 89-94, 90-94, 91-94, 92-94, 93-94, 94
dimensi sosial 65-69, 66-69, 68-69
- E**
ekonomi 65-69, 66-69, 67-69, 68-69
elastisitas pendapatan antargenerasi 1-14, 6-14
- H**
Hutan Tanaman Rakyat (HTR) 29-38, 38
- I**
IGE 1-14, 2-14, 3-14, 4-14, 5-14, 6-14, 8-14, 9-14, 10-14, 11-14, 12-14, 13-14
indeks keberlanjutan karet 65-69
Internalisasi 22-28, 25-28
- K**
kemiskinan 95-102, 96-102, 97-102, 98-102, 100-102, 101-102
kemiskinan 95-102, 96-102, 97-102, 98-102, 100-102, 101-102
kemitraan 45-56, 46-56, 47-56, 49-56, 51-56, 52-56, 53-56, 54-56, 55-56
Kerusakan Hutan 29-38
Kesejahteraan 39-44, 40-44, 41-44, 43-44, 44
Kewirausahaan 57-64, 63-64
Kinerja 15-21, 17-21, 20-21, 21
kinerja ekonomi 95-102, 96-102, 97-102, 98-102, 99-102, 100-102, 101-102
kinerja ekonomi 95-102, 96-102, 97-102, 98-102, 99-102, 100-102, 101-102
kinerja keuangan 95-102, 96-102, 97-102, 98-102, 99-102
kinerja keuangan 95-102, 96-102, 97-102, 98-102, 99-102
Klasifikasi JEL: I24, I25, J24 1-14
- L**
lingkungan 65-69, 66-69, 67-69, 68-69, 69
- M**
masyarakat 86-94, 87-94, 88-94, 89-94, 90-94, 91-94, 92-94, 93-94, 94
mobilitas pendapatan antar generasi 1-14, 2-14, 4-14, 6-14, 8-14, 10-14, 11-14, 12-14, 13-14
modal manusia 1-14, 2-14, 3-14, 4-14, 5-14, 6-14, 7-14, 8-14, 10-14, 11-14, 12-14, 13-14
model komunikasi 70-77
- O**
otonomi daerah 95-102, 96-102
otonomi daerah 95-102, 96-102
- P**
pangan 86-94, 87-94, 88-94, 89-94, 90-94, 91-94, 92-94, 93-94, 94
Panglima 78-85, 79-85, 80-85, 81-85, 82-85, 83-85, 84-85, 85
Partisipasi 86-94, 87-94, 88-94, 89-94, 90-94, 91-94, 92-94, 93-94, 94
Pelayanan 15-21, 20-21, 21
pemberdayaan masyarakat 70-77, 72-77
pembinaan 45-56, 46-56, 47-56, 48-56, 51-56, 55-56
Pembudidaya ikan 39-44
pendidikan 1-14, 2-14, 3-14, 4-14, 5-14, 6-14, 7-14, 8-14, 9-14, 10-14, 11-14, 12-14, 13-14
Pendidikan Multikulturalisme 22-28, 23-28, 28
Pengawasan 15-21, 17-21, 18-21, 20-21, 21
Pengembangan Desain 57-64, 61-64, 62-64, 64
penggemukan 45-56, 46-56, 47-56, 54-56, 55-56
perusahaan 45-56, 46-56, 47-56, 48-56, 49-56, 51-56, 53-56, 54-56, 55-56
Pesantren Tradisional 22-28, 25-28
peternak rakyat 45-56, 46-56, 47-56, 55-56
- R**
Radikalisme 22-28
Sosiokultural 57-64, 59-64
strategi 29-38, 30-38, 31-38, 36-38, 37-38
Susenas 2011 39-44, 40-44, 41-44, 42-44, 43-44, 44
- T**
tanggung jawab sosial perusahaan 70-77, 77
Tarompa Datuak 57-64, 59-64, 61-64, 62-64, 64
TNI 78-85, 79-85, 81-85, 84-85, 85
transfer langsung 1-14, 2-14, 3-14, 4-14, 6-14, 10-14, 11-14, 12-14, 13-14
Transformasi 57-64, 59-64, 61-64, 63-64

UCAPAN TERIMA KASIH

Dewan Redaksi Jurnal Sosiohumaniora menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya serta ucapan terima kasih kepada:

1. Dr. Ir. Bagdja Muljadi, SE., MS. (Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Padjadjaran)
2. Prof. Eng. Pradono, SE., M.Ec., Dev (Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan, ITB)
3. Dr. Ir. Elisa Wildayana, M.Si (Fakultas Pertanian, Universitas Sriwijaya)
4. Dr. Drs. Heru Nurasa, MA. (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran)
5. Dr. Chandradewini, S.IP., M.Si. (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran)
6. Dr. Ismail Nurdin, M.Si. (Fakultas Politik Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri)
7. Dr. Tb. Chaeru Nugraha, M.Hum. (Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Padjadjaran)
8. Dr. Rd. Muhammad Mulyadi, SS., M.Hum. (Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Padjadjaran)
9. Dr. Nina Karlina, S.IP., M.Si. (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran)
10. Dr. Rd. Ahmad Buchari, S.IP., M.Si. (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran)
11. Dr. Asep Agus Handaka Suryana, S.Pi., MT. (Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan UNPAD)
12. Dr. Risna Resnawati, MP. (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran)
13. Dr. Ir. Hasan Hadiana, MS. (Fakultas Peternakan, Universitas Padjadjaran)
14. Dr. Kunto Sofianto, M.Hum. (Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Padjadjaran)
15. Dr. Elis Suryana Nani Sumarlina, MS. (Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Padjadjaran)
16. Endah Djuwendah, SP., MS. (Fakultas Pertanian, Universitas Padjadjaran)
17. Dr. Ir. Marina Sulistyati, M.Si. (Fakultas Peternakan, Universitas Padjadjaran)
18. Dr. Herwan Abdul Muhyi, M.Si. (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran)
19. Prof. Dr. Sam'un Jaja Raharja, M.Si. (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran)
20. Prof. Dr. Reiza D. Dienaputra, M.Hum. (Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Padjadjaran)
21. Dr. Achmad Rizal, S.Pi., M.Si. (Fakultas Ilmu Perikanan dan Kelautan, Universitas Padjadjaran)

Sebagai Mitra Bestari (*Peer Reviewer*) pada Jurnal Sosiohumaniora Volume 20 No. 1 Maret 2018. Atas kerjasama yang terjalin selama ini dalam membantu kelancaran penerbitan Jurnal Sosiohumaniora. Semoga kerjasama ini berjalan lebih baik untuk masa yang akan datang.

Pemimpin/Redaksi

KONTRIBUSI PENULIS ARTIKEL

Perlu kami informasikan, bahwa setiap artikel yang dimuat pada Jurnal Sosiohumaniora terhitung sejak penerbitan Vol. 17, No. 3, November 2015 dikenakan biaya sebesar Rp 2.000.000,00 (Dua juta rupiah) bagi penulis artikel dari luar Unpad dan Rp 1.000.000,00 (Satu Juta rupiah) bagi penulis artikel dari dan mengatasmamakan Dosen Unpad. Penulis atau Penulis Utama artikel (untuk setiap judul) akan mendapatkan jurnal sebanyak 5 buah dan *reprint* 2 (dua) *copy*.

Untuk memperoleh tambahan jurnal dikenakan pengganti biaya cetak sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap jurnal.

Biaya tersebut dapat di Transfer melalui Rekening
V.A. a.n. Jurnal Sosiohumaniora: 9881957142329004
Kantor Cabang BNI Jatinangor
Jl. Raya Bandung-Sumedang KM. 21 Jatinangor

Direktorat Sumber Daya Akademik dan Perpustakaan
Universitas Padjadjaran, Graha Kandaga (Perpustakaan) Lt. 1
Jl. Raya Jatinangor – Sumedang Km 21 Jatinangor atau melalui Fax. (022) 8428888 ext. 3806

Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.